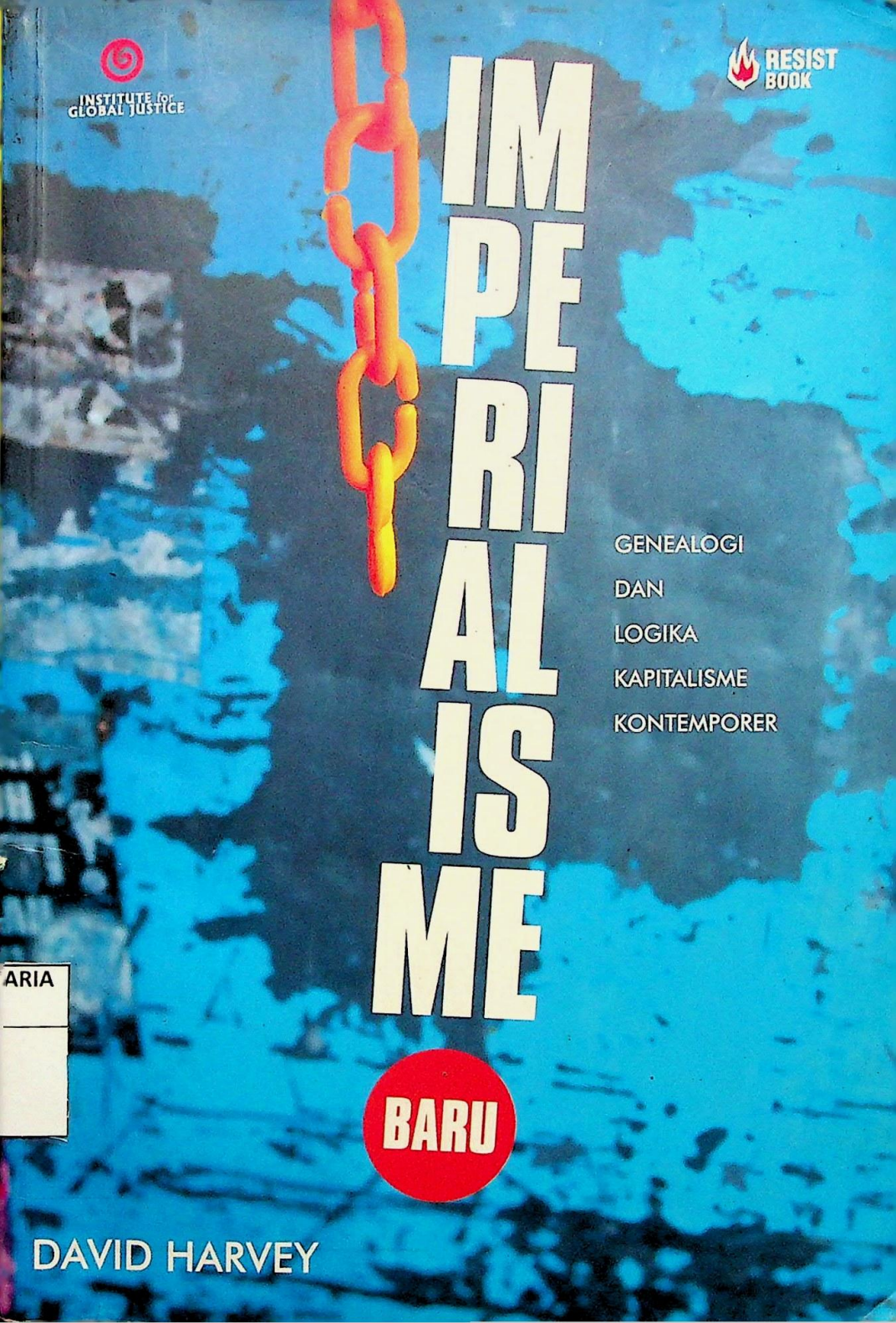

INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE
RESIST BOOK
IMPERIALISME
GENEALOGI DAN LOGIKA KAPITALISME KONTEMPORER
BARU
DAVID HARVEY

ARIA

IMPERIALISME

BARU

GENEALOGI
DAN
LOGIKA
KAPITALISME
KONTEMPORER

Daya hidup kapitalisme yang begitu lama meski menghadapi berbagai macam krisis dan mengalami reorganisasi, disertai dengan ramalan muram, baik dari kaum kiri maupun kanan, mengenai kehancurannya merupakan misteri yang musti dikuak. Levebvre, Lenin, dan Luxemburg dengan menggunakan nalar dan argumen yang berbeda menemukan jawaban yang sama: imperialisme. Namun, jawaban itu tidak memadai karena kontradiksi teoritiknya sendiri.

Buku ini mencoba mengatasi kelemahan argumen-argumen itu dengan menelaah peran "spatial fixes" atas kontradiksi internal dari akumulasi kapital. Dengan menyingkap bagaimana kapital memproduksi ruang, Harvey menyempurnakan teori perkembangan geografi yang tidak merata, dan mengintegrasikan secara lebih baik fenomena perkembangan dan ekspansi geografi dalam membangun kembali teori Marx tentang akumulasi kapital. Gagasan spatial fix ini harus dipahami dalam kaitannya dengan krisis yang sekarang diidap kapitalisme, serta upaya untuk mengatasinya dalam bentuk imperialisme baru atau lebih dikenal sebagai neoliberalisme.

Tulisannya jelas dan langsung, diarahkan untuk pembaca umum ketimbang spesialis akademis…Analisa Harvey sungguh mengesankan….Saya harap banyak orang di luar geografi dan akademi membaca buku ini…Seperti biasanya proyek Harvey memberi kita peta kognitif dan moral sehingga kita dapat menemukan jalan ke masa depan yang lebih adil, toleran, dan waras (cultural geographies)

---[Harvey] memberi sumbangsih teoritis yang penting untuk memahami seluk beluk imperium. (The Times Higher Education Supplement)

Buku ini layak mendapat perhatian publik luas. David Harvey adalah teoritisi sosial yang dikenal karena gaya analisanya yang dingin dan menggunakan pendekatan interdisipliner, disertai dengan tendensi atas signifikansi politik. Buku ini menunjukkan bakatnya. (The Boston Pheonix)

PUST

diterbitkan oleh:

RESIST BOOK

INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE

Seri Ideologi

Seri ini membuka ruang pemahaman yang lebih kritis atas ideologi-ideologi dunia, baik karena kelaliman kuasa yang diciptakannya maupun kekuatan perubahan yang didemonstrasikannya. Dalam seri ini, pikiran tokoh-tokoh besar, suara kelompok dominan, dan seruan dogmatis yang mewakili "reputasi sejarah" ideologi-ideologi itu, akan dipahami ulang, dianalisis, sekaligus dibongkar dengan seksama. Kajian-kajian ini dirancang karena jutaan manusia telah menjadi korban ideologi sedang jutaan orang lainnya berharap dan bermimpi karena energi magis ideologi.

ISBN 979-1097-68-2

9 789791 097680

IMPERIALISME BARU

Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer

David Harvey

RESIST BOOK

INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Harvey, David
Imperialisme Baru— David Harvey, Yogyakarta dan Jakarta: Resist Book dan IGJ , April 2010

254 halaman, i - v, 14,5 X 21 cm
ISBN 978-979-1097-68-0

1. Imperialisme Baru 2. Ekonomi-Politik 3. Neoliberalisme
I. Judul

Cetakan Pertama, April 2010

Penerjemah: Eko PD
Penyunting: Dian Yanuardy
Rancang Sampul: asn
Kompugrafi: meja malam design

Diterbitkan oleh:
Resist Book
Jl. Magelang Km.5
Kutu Dukuh RT02/04 No. 83
Sinduadi Mlati Sleman Yk 55284
Telp. 0274-7422 761
E-mail: resistbook@gmail.com

Institute for Global Justice (IGJ)
Jl. Matraman 12A, Jakarta 10430, Indonesia
Telp: +62-21-3107578
Faks: +62-21-3107586
Email: igj@globaljust.org
Website: www.globaljust.org

Pencetak:
Nailil Printika
Telp. 0274 580 439

Daftar Isi

1. Semua Tentang Minyak	1
2. Bagaimana Kekuasaan Amerika Tumbuh	31
3. Ikatan Kapital	97
4. Akumulasi Lewat Penjarahan	153
5. Dari Konsensus ke Koersi	203
Indeks	247
Penulis	253

1 Semua Tentang Minyak

TUJUAN tulisan saya ialah untuk memetakan kondisi mutakhir dari kapitalisme global dan peran yang mungkin dimainkan oleh imperialisme 'baru' di dalam kapitalisme global. Saya akan membahas dari sudut pandang rentang waktu yang panjang (*long duree*) dan dari lensa analisis yang saya sebut sebagai materialisme geografis-historis (*historical-geographical materialism*). Saya akan berusaha menyingkap transformasi-transformasi apakah yang ada di balik semua gejolak dan perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat di permukaan ini, dan dengan begitu saya berharap bisa memancing munculnya perdebatan mengenai bagaimana cara terbaik menginterpretasikan dan sekaligus bereaksi terhadap situasi terkini kita.

Rentang waktu terlama yang bisa dijalani oleh seseorang tentu saja ialah sepanjang hayatnya. Nah, pengertian saya mengenai dunia pada mulanya terbentuk selama Perang Dunia Kedua dan tahun-tahun sesudahnya. Pada masa itu, ide tentang imperium Inggris masih dianut luas dan punya makna. Dunia bagi saya tampak luas karena ada begitu banyak wilayah di peta dunia yang berwarna merah, warna yang melambangkan suatu imperium dimana di dalamnya

matahari tak pernah tenggelam karena begitu luasnya. Jika saya ingin lebih meyakinkan diri akan keberadaan imperium itu, saya tinggal memperhatikan koleksi perangko saya – gambar sang kepala kerajaan Inggris ada di perangko-perangko yang berasal dari India, Sarawak, Rhodesia, Nyasaland, Nigeria, Ceylon, Jamaika... Namun, tak lama kemudian saya melihat bahwa kekuasaan Inggris tengah merosot. Imperium itu runtuh dengan cepat. Kekuasaan global telah beralih dari Inggris ke Amerika Serikat dan peta dunia berubah warna ketika serangkaian pernyataan kemerdekaan diri bermunculan dari satu negara ke negara lain. Even traumatik yang berupa kemerdekaan dan pemisahan diri India dari Inggris pada tahun 1947 menjadi awal dari berakhirnya imperium Inggris. Pada awalnya, trauma tersebut timbul dalam diri saya karena kejadian itu saya hayati sebagai suatu contoh khas dari digantikannya kekuasaan Inggris yang 'baik hati' (*sensible*) dan 'adil' oleh nafsu-nafsu pribumi yang irasional dan oleh gerak mundur kembali ke prasangka-prasangka lama (suatu cara penghayatan atas dunia yang baik di masa lalu maupun di masa kini tidak semata-mata khas milik orang Inggris dan yang bahkan terus ada sampai sekarang). Namun, ketika perjuangan memerdekakan diri semakin meluas, sisi lebih dalam dan lebih jahat dari kekuasaan imperium menjadi tampak di mata saya. Bagi saya dan generasi saya, sisi lebih kelam ini semakin terlihat ketika Inggris dan Prancis berupaya untuk merebut kembali Terusan Suez pada tahun 1956. Pada kejadian itu, Amerika Serikat mengecam Inggris dan Prancis karena telah mengobarkan perang dalam rangka untuk menggulingkan seorang pemimpin Arab, Nasser, yang di mata Barat digambarkan sama mengancamnya dan sama 'iblis'-nya dengan Saddam Hussein di masa sekarang. Eisenhower lebih suka jalan penyelesaian damai ketimbang perang, dan bisa dikatakan bahwa reputasi kepemimpinan Amerika Serikat di mata dunia semenjak itu menanjak seiring dengan merosotnya reputasi Inggris dan Prancis. Sulit bagi saya setelah peristiwa Suez itu untuk menyangkal sisi kejam dari imperialisme Ing-

gris yang sangat mementingkan diri sendiri dan sekaligus tengah merosot dengan cepat.

Apa yang saya rasakan itu sangatlah berbeda dari yang dirasakan oleh seorang mahasiswa dari Bronx yang datang ke Oxford pada awal tahun 1960-an. Marshall Berman menulis bagaimana dia tak tahan melihat 'anak-anak muda yang tak bersemangat yang seperti tokoh-tokoh dalam film Brideshead Revisited yang berjalan kesana-kemari mengenakan tuksedo (dan tampak seolah-olah baru bangun tidur), hidup untuk makan minum hanya karena ayah-ayah mereka memiliki Imperium Inggris dan dunia. Atau setidaknya mereka berlagak seolah-olah ayah-ayah mereka memiliki dunia. Padahal saya tahu betul apa yang tengah terjadi: Imperium Inggris tengah runtuh; dan anak-anak dari kelas yang berkuasa hidup dengan mengandalkan dana-dana perwalian (*trust funds*) yang nilainya semakin merosot setiap tahunnya, dan mewarisi perusahaan-perusahaan yang sedang bangkrut... saya melihat bahwa roda dunia tengah berbalik'.[1] Saya tak bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Berman saat ini ketika perusahaan-perusahaan 'dot.com' di Amerika Serikat berguguran, skandal-skandal pembukuan terkuak dimana-mana, pasar saham jatuh sehingga menghancurkan nilai dari setiap harta yang diandalkan sebagai jaminan hari tua oleh setiap orang, serta pernyataan-pernyataan perang yang mulai bermunculan sebagaimana ditunjukkan oleh sampul depan *New York Times Magazine* tanggal 5 Januari 2003: '*American Empire: Get Used to It*' (Imperium Amerika: Biasakanlah Hidup Dengannya).[2] Bagi saya, rasanya aneh membayangkan bahwa seiring dengan berlalunya dan mundurnya satu imperium, pada

1. M. Herman, 'Justice/Just Us: Rap and Social Justice in America', dalam A. Merrifield and E. Swyngedouw (eds.), The Urbanization of Injustice (New York: New York University Press, 1997), halaman 148.

2. M. Ignatieff, 'The Burden', New York Times, 5 Jan. 2003, Sunday Magazine, hal. 22-54, diterbitkan ulang dengan judul 'Empire Lite', dalam Prospect (Feb. 2003), 36-43. Lihat juga id., 'How to Keep Afghanistan from Falling Apart: The Case for a Committed American Imperialism', New York Times, 26 July 2002, Sunday Magazine, hal. 26-58.

momen yang sama muncul proklamasi di depan publik akan kelahiran resmi imperium yang lain.

Michael Ignatieff, seorang penulis artikel di New York Times, mengulang kembali pernyataan terdahulunya (juga dalam New York Times Magazine tanggal 28 Juli 2002) bahwa 'seluruh perang Amerika terhadap teror merupakan suatu olah imperialisme'. Pernyataan ini mungkin terasa mengejutkan bagi orang-orang Amerika yang tak suka membayangkan negeri mereka sebagai suatu imperium. Namun, apalagi sebutan yang bisa anda berikan kepada legiun-legiun tentara, agen rahasia, dan pasukan khusus yang bertebaran di seluruh dunia?' AS tak lagi harus 'malu-malu' dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap imperium, atau tak boleh berharap akan bisa membangun imperium dengan biaya yang murah, demikian kata Ignatieff. AS haruslah bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengambil peran yang lebih serius dan lebih permanen, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang untuk mewujudkan tujuan-tujuan transformatif besar. Bahwa ada media arus utama seperti New York Times yang memberikan posisi penting terhadap ide imperium Amerika, hal tersebut tentu memiliki arti yang signifikan. Dan Ignatieff tidak sendirian dalam pandangannya tersebut. Max Boot, seorang editor Wall Street Journal, berpandangan bahwa 'dosis tertentu imperialisme AS mungkin merupakan jawaban terbaik terhadap terorisme'. Amerika haruslah lebih ekspansif, katanya: 'Afghanistan dan negeri-negeri bermasalah lainnya saat ini membutuhkan semacam pemerintahan asing yang tercerahkan seperti yang dulu pernah dibangun oleh orang-orang Inggris di India'. Dengan tradisi agung imperiumnya yang digambarkan dengan begitu nostalgis, Inggris juga bisa terlibat dalam olah imperialisme yang baru itu. Sejarawan konservatif Niall Ferguson (yang film seri TV dan bukunya dengan gaya yang patriotik mendokumentasikan bukan saja perbuatan-perbuatan heroik dari para pembangun imperium Ing-

gris, namun juga perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan yang diandaikan diberikan oleh imperium ini ke seluruh dunia) mengatakan bahwa AS haruslah memperkuat tekadnya, mengerahkan uangnya, dan 'menciptakan transisi dari imperium informal menjadi imperium formal'. Sekarang ini, banyak yang berpandangan bahwa suatu 'imperialisme baru' memang telah beroperasi, namun dibutuhkan suatu pengakuan yang lebih eksplisit dan suatu komitmen yang lebih solid jika imperialisme baru itu ingin betul-betul menjadi suatu Pax Amerikana yang bisa memberikan manfaat bagi dunia sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Pax Britania pada paro terakhir abad kesembilanbelas.[3]

Komitmen ini tampaknya siap diberikan oleh Presiden Bush meski dalam pidato West Point-nya dia menyatakan bahwa 'Amerika tak punya imperium yang harus diperluas atau Utopia yang harus dibangun'. Peristiwa 11 September, tulis Bush dalam artikel untuk New York Times saat hari peringatan tragedi itu, menunjukkan dengan gamblang peran apa yang harus dijalankan oleh Amerika di dunia dan sekaligus membukakan kesempatan-kesempatan agung buat AS. 'Kita akan menggunakan posisi kekuatan dan pengaruh kita yang tak ada tandingannya untuk membangun suatu atmosfer ketertiban dan keterbukaan internasional dimana di dalamnya kemajuan dan kebebasan bisa tumbuh berkembang di banyak negara. Suatu dunia bebas yang tumbuh dalam kedamaian adalah kepentingan jangka-panjang yang ingin diciptakan oleh Amerika karena mencerminkan nilai-nilai ideal Amerika yang abadi dan sekaligus telah menyatukan Amerika dengan sekutu-sekutunya... Kita ingin menciptakan suatu perdamaian yang adil', tulisnya saat persiapan perang Irak dilakukan, 'di tempat dimana represi, kebencian dan

3. Banyak dari kutipan ini yang telah dihimpun dalam B. Bowden, 'Reinventing Imperialism in the Wake of September 11'', Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 1/2 (Summer 2002). Bisa dibaca dalam <http://alternatives.journal.fatih.edu.tr/Bowden.htm>.

kemiskinan akan digantikan oleh harapan akan demokrasi, pembangunan, pasar bebas dan perdagangan bebas', dan kedua hal terakhir itu telah 'terbukti kemampuannya dalam mengentaskan seluruh masyarakat dari kemiskinan'. Amerika Serikat, katanya, 'akan mempromosikan moderasi, toleransi, dan ditegakkannya martabat manusia secara tanpa syarat – aturan hukum, pembatasan kekuasaan negara, dan penghormatan terhadap kaum wanita, hak milik pribadi, kebebasan berbicara dan keadilan yang setara'. Saat ini, demikian simpulnya, 'umat manusia memiliki kesempatan di tangannya untuk memenangkan kebebasan atas seluruh musuh-musuh lamanya. Amerika Serikat menyambut dengan baik tanggung jawab untuk memimpin misi agung ini.' Gaya bahasa yang sama juga muncul dalam prolog untuk dokumen National Defense Strategy yang dikeluarkan tak lama kemudian.[4] Mungkin pernyataan tersebut bukan merupakan suatu deklarasi formal dari suatu imperium, namun yang jelas pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan deklarasi berbunga-bunga yang mengandung maksud imperial.

Ada banyak bentuk imperium (Romawi, Ottoman, Kekaisaran Cina, Rusia, Soviet, Austro-Hongaria, Napoleon, Inggris, Prancis dsb.) Dari beragam bentuk ini, kita bisa melihat bahwa ada banyak ruang manuver di antara berbagai bentuk itu dalam hal bagaimana imperium harus direncanakan, dijalankan dan dibangun secara aktif. Konsepsi-konsepsi imperium yang berbeda dan kadangkala saling bersaingan bisa terinternalisasi dalam ruang yang sama. Kekaisaran Cina menjalankan suatu fase eksplorasi maritim yang ekspansionis sebelum kemudian secara mendadak dan misterius menutup diri. Imperialisme Amerika sejak Perang Dunia juga ber-

4. G. W. Bush, 'Securing Freedom's Triumph', New York Times, 11 Sept. 2002, hal. A33. The National Security Strategy of the United State of America. Bisa dibaca dalam situs <www.whitehouse.gov/nsc/nss>. Ignatieff, 'The Burden', membuka tulisannya (p. 22) dengan membahas kata-kata Pidato Bush di West Point.

gerak maju-mundur secara tak stabil dari satu konsepsi imperium yang kabur (karena selalu tak diproklamirkan) ke konsepsi yang lain. Jika Bush muda memperlihatkan suatu impuls ala Napoleonik dengan keinginannya untuk berperang ke Baghdad dan mungkin setelah itu ke Teheran (tempat yang diyakini oleh kalangan hawkish dalam pemerintahannya sebagai tempat dimana 'musuh-musuh sebenarnya' berada), pendekatan Clinton (yang menariknya dicap sebagai 'tidak jantan' [*effeminate*] oleh pemerintahan Bush) lebih mirip dengan pendekatan imperium Ottoman pada masa puncaknya. Dengan kekuasaan yang sangat tersentralisir di tangan Departemen Keuangan AS dimana Rubin dan kemudian Summers menjadi tokoh-tokoh pemegang komandonya, kekuasaan yang lunak (*soft power*) lebih dipilih ketimbang kekuasaan yang keras (*hard power*), dan negara-negara lain di dunia diperlakukan dengan toleransi multikultural yang lebih besar. Politik dijalankan secara multilateral ketimbang unilateral. Di bawah Roosevelt, Truman dan Eisenhower sampai dengan Nixon, pembangunan kekuasaan imperium Amerika lebih mencerminkan pendekatan negara klien ala Soviet ketimbang konsepsi imperium yang lain. Perbedaanya hanyalah bahwa Jepang, berbeda dari Hongaria atau Polandia dalam kasus Uni Soviet, dibiarkan bebas membangun ekonominya sendiri sepanjang masih bergantung secara politik dan militer kepada AS. Imperium Amerika yang sungguh-sungguh eksis, kata Ignatieff, akan dicapai bukan dengan cara pelupaan (*absent-mindedness*) (sebagaimana yang suka dilakukan oleh Inggris), namun dengan cara penyangkalan (*denial*): jadi, aksi-aksi imperial yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak boleh dibicarakan sebagai aksi-aksi imperial ataupun aksi-aksi itu tak boleh dilakukan di dalam negeri. Ini menciptakan 'imperium dengan dosis ringan' (*empire lite*) ketimbang suatu imperium dengan komitmen yang solid dan jangka panjang.[5]

---

5. M. W. Doyle, Empires (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986), menyajikan suatu studi komparatif yang menarik mengenai imperium. Untuk

Banyak orang yang bisa disebut sebagai 'kiri tradisional' berpandangan bahwa AS telah menjadi suatu kekuatan imperial selama setidaknya satu abad atau lebih. Analisis mengenai imperialisme Amerika marak bermunculan selama tahun 1960-an, dan terutama terfokus pada peran AS di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Berlangsung perdebatan-perdebatan yang menarik antara teoretisi-teoretisi dependensia (seperti Frank) dengan mereka yang lebih cenderung mendasarkan uraiannya pada Hobson, Hilferding, Lenin, Luxemburg dan pada teoretisi-teoretisi lain yang hidup pada peralihan dari abad kesembilan belas ke keduapuluh. Mao sendiri memandang imperialisme AS sebagai kontradiksi primer yang harus dia lawan. Munculnya tulisan berjudul *Empire* karya Hardt dan Negri pada tahun 2000, dan kontroversi yang mengikutinya, kemudian memunculkan tantangan terhadap perdebatan-perdebatan tradisional itu. Karya tersebut menyatakan bahwa penentangan kiri haruslah dibangunulang agar bisa menyesuaikan diri dengan konfigurasi imperium yang tersebar yang memiliki banyak karakteristik baru dan posmodern. Meski bersikap kritis terhadap alur argumen tersebut, namun banyak kalangan kiri yang mulai mengakui bahwa kekuatan-kekuatan globalisasi (apapun tafsirannya) memang telah menciptakan suatu situasi baru sehingga menuntut adanya suatu kerangka analisis yang baru.[6] Pengakuan secara terbuka atas imperium dan imperialisme oleh kalangan kanan dan juga oleh kalangan liberal sesungguhnya hanyalah

---

kasus AS, lihat juga W. A. Williams, Empire as a Way of Life (New York: Oxford University Press, 1980).

6. Topik mengenai 'imperialisme baru' telah dirintis oleh L. Panitch, 'The New Imperial State', New Left Review, 11/1 (2000), 5-20; lihat juga P. Gowan, L. Panitch, dan M. Shaw, 'The State, Globalization and the New Imperialism: A Round Table Discussion', Historical Materialism, 9 (2001), 3-38. Komentar-komentar lain yang juga menarik ialah J. Petras dan H. Veltmeyer, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century (London: Zed Books, 2001); R. Went, 'Globalization in the Perspective of Imperialism', Science and Society, 66/4 (2002-3), 473-97; S. Amin, 'Imperialism and Globalization', Monthly Review (June 2001), 1-10; dan M. Hardt dan A. Negri, Empire (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).

merupakan pernyataan terbuka dari apa yang telah lama dijalankan. Namun, pengakuan ini juga mengindikasikan bahwa imperialisme saat ini mungkin berjalan dalam suatu alur yang agak berbeda. Sebagai konsekuensinya, situasi ini membuat persoalan mengenai imperium dan imperialisme menjadi topik perdebatan yang ramai di berbagai spektrum politik (patut dicatat bahwa karya Hardt dan Negri mendapatkan liputan perhatian dari media arus utama). Muncul suatu pertanyaan lebih lanjut: jika memang ada yang baru, apakah yang baru itu?

Pertanyaan tersebut akan saya dekati pertama-tama dengan menganalisis kejadian-kejadian kontemporer. AS, dengan didukung Inggris, Spanyol, dan Australia dan dengan persetujuan beberapa negara melancarkan perang terhadap Irak. Perang ini sendiri dilakukan di tengah-tengah penentangan yang keras dari beberapa sekutu tradisionalnya, terutama dari Prancis dan Jerman, maupun dari penentang-penentang lamanya, terutama dari Rusia dan Cina. Mobilisasi umum untuk menentang perang itu terjadi di seluruh dunia dan muncul kebingungan di banyak pihak mengapa pemerintahan Bush bersikeras melancarkan perang tersebut. Bukti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang beroperasi di balik kengototan tersebut. Hal-hal yang lebih dalam ini harus ditemukan di balik buih-buih retorika dan disinformasi yang menyesatkan yang selama ini disebarluaskan.

Kisah dari Dua Negara Produsen Minyak

Kudeta yang menggulingkan Presiden Chavez pada bulan April 2002 disambut dengan euforia di Washington. Presiden yang baru – seorang pebisnis – dengan segera diakui sebagai presiden negeri tersebut dan disuarakan harapan bahwa dengan presiden yang baru, stabilitas dan tatanan akan kembali dipulihkan di negeri itu sehingga bisa menjadi basis bagi pembangunan masa depan yang solid. Editorial New York Times menyuarakan nada yang sama. Namun, sebagian

besar orang di Amerika Latin dengan segera bisa melihat adanya keterlibatan tangan CIA dalam kudeta tersebut dan teringat kembali dengan apa yang disebut secara ironis oleh orang-orang Chili saat ini sebagai 'tragedi 11 September kecil mereka' ketika di tahun 1973, pemimpin mereka yang terpilih secara demokratis dari kalangan sosialis, Salvador Allende, digulingkan dalam suatu kudeta berdarah oleh Jenderal Auguste Pinochet. Dalam arsip Departemen Luar Negeri AS mengenai kejadian tersebut, terdapat sebuah kabel dari CIA yang berbunyi 'Menjadi kebijakan yang tegas dan berkelanjutan bahwa Allende harus digulingkan lewat suatu kudeta... Kita akan terus mendorong terciptanya tekanan yang maksimum ke arah tersebut dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada. Aksi-aksi ini harus dilaksanakan secara klandestin dan secara rahasia sehingga keterlibatan tangan Pemerintah dan orang-orang Amerika Serikat tersembunyi dengan rapi.'[7] Tak sulit membayangkan bahwa kabel-kabel serupa terkait dengan kudeta di Venezuela suatu saat kelak di masa depan akan muncul dalam situs internet Departemen Luar Negeri.

Kudeta itu berhasil dimentahkan tiga hari kemudian dan Chavez kembali ke tampuk kekuasaan. Departemen Luar Negeri dengan tegas menyangkal mengetahui rencana kudeta tersebut sebelum kudeta itu dilancarkan, dan mengatakan bahwa semua kejadian merupakan persoalan dalam negeri Venezuela. Mereka menyatakan harapan akan adanya suatu solusi yang damai, demokratik dan konstitusional terhadap persoalan yang terjadi. Editorial New York Times mengekor dengan nada yang sama, dengan sedikit penambahan bahwa bukanlah suatu ide yang bagus untuk menggulingkan suatu rezim yang telah terpilih secara demokratis, betapapun buruk-

7. Dikutip dari C. Johnson, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire (New York: Henry Holt, 2000), halaman 18.

nya, jika memang salah satu nilai fundamental Amerika ialah mendukung demokrasi.

Kesejajaran kasus itu dengan kasus Irak, yang kebetulan sama-sama merupakan anggota kunci lainnya dari OPEC, menarik untuk dipelajari. Di Irak, Amerika Serikat mengklaim berkepentingan untuk menegakkan demokrasi. Padahal, sebelumnya mereka pernah menggulingkan pemimpin Iran yang terpilih secara demokratis, yaitu Mossadegh, pada tahun 1953 dan mendukung kekuasaan diktator Shah Iran. Jadi, bisa diandaikan bahwa hanya pemerintahan-pemerintahan yang terpilih secara demokratis dari jenis tertentu yang akan ditoleransi. Dalam kasus Irak, klaim ingin mendemokratisasi Irak dan seluruh kawasan itu adalah salah satu klaim yang dipakai untuk menjelaskan di antara berbagai klaim yang saling bertolak belakang mengenai mengapa penting untuk melancarkan perang. Banyak kalangan, termasuk para pendukung perang, merasa bingung dan sama sekali tak mengerti dengan rasionalisasi-rasionalisasi yang dikemukakan oleh pemerintah AS. Sangat sulit memahami serangkaian disinformasi dan argumen yang sering berubah-ubah. Usaha awal untuk mengkaitkan Irak dengan serangan-serangan anthrax di Amerika Serikat gagal berantakan. Sementara meski Irak memiliki catatan mengerikan dalam penggunaan senjata-senjata biologis dan kimia, namun hal tersebut dimungkinkan karena adanya dukungan Amerika Serikat terhadap Irak saat perang Irak-Iran, dan Departemen Luar Negeri dengan sengaja mengarahkan dunia secara sesat ke pandangan bahwa kedua belah pihak pada saat itu menggunakan metode-metode yang mengerikan semacam itu, padahal mereka tahu betul bahwa Irak-lah satu-satunya yang menjadi pihak penyerang.[8] Alasan hak-hak asasi manusia mungkin menarik perhatian, namun alasan ini pun sulit untuk dicerna jika meng-

8. J. Hilterman, 'Halabja: America Didn't Seem to Mind Poison Gas', International Herald Tribune, 17 Jan. 2003, hal. 8.

ingat bantuan militer yang diberikan oleh pemerintah AS kepada Aljazair – sebuah negeri yang sama buruknya dengan Irak dalam hal pelanggaran hak-hak asasi manusia dengan menindas oposisi Islam di negeri itu (diperkirakan 120.000 orang meninggal dunia dalam waktu delapan tahun terakhir). William Burns, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Timur Tengah, bahkan mengatakan bahwa 'kita telah banyak belajar dari orang-orang Aljazair bagaimana caranya mengendalikan teror'.[9] Ini menjelaskan mengapa dalih penyiksaan di Irak dengan segera diperdebatkan oleh publik di Amerika Serikat (dan sekali lagi mengemuka di New York Times).

Kemudian dalih keberadaan senjata pemusnah massal diajukan. Meski sulit untuk menentukan apa yang sesungguhnya dimiliki oleh Irak, namun kapasitas militer Irak telah sedemikian merosot selama dan setelah perang Teluk sehingga bahkan CIA pun menilai bahwa Irak bukanlah ancaman riil bagi perdamaian kawasan tersebut. Ini membuat pernyataan bahwa Irak merupakan suatu ancaman bagi Amerika Serikat (dimana Presiden Bush dengan anehnya melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa serangan Irak atas Amerika Serikat akan bisa menciptakan kerusakan yang sangat besar terhadap ekonomi AS) terdengar bodoh. Kesimpulan CIA sendiri mengatakan bahwa Saddam hanya akan menggunakan senjata-senjata biologis dan kimia jika diprovokasi, itu pun jika dia memang memilikinya. Kerapuhan dalih itu membuat semakin sulit untuk mengerti mengapa AS sedemikian gigih ingin menyerang Irak. Dalih yang paling mungkin dipakai ialah karena Irak sedang berusaha membuat nuklir, namun ada sedemikian banyak negara lain yang demikian, dan bahkan Korea Utara menyatakan tersebut secara terbuka kepemilikan nuklirnya. Pengawas-pengawas senjata, ketika pada akhirnya diijinkan melakukan inspeksi,

9. Dimuat dalam R. Fisk, 'The Case Against War: A Conflict Driven by the Self-interest of America', Independent, 15 Feb. 2003, hal. 20.

juga tak menemukan apa-apa. Apapun alasan yang dipakai sebagai dalih, tujuan utamanya tetaplah perubahan rezim, dan pelucutan senjata hanyalah dalih untuk mendesak otoritas Perserikatan Bangsa-bangsa karena Piagam PBB tidak membolehkan dilancarkannya serangan-serangan penangkalan (*pre-emptive attacks*). Dan jika semua dalih tersebut gagal, maka Saddam tetap harus disingkirkan karena dia adalah seorang pembohong (suatu tuduhan yang sesungguhnya berlaku pada semua politisi sehingga membuat tuduhan itu terasa sebagai banyolan), kejam (demikian juga dengan Sharon [Ariel Sharon, PM Israel, pen.]), ugal-ugalan (tidak terbukti), atau merupakan inkarnasi setan yang harus diperangi sehingga seolah-olah perang di Timur Tengah merupakan suatu episode dalam suatu drama moralitas abad pertengahan yang berlangsung panjang (dengan Saddam berperan sebagai Mordor dan George Bush sebagai Frodo yang pemberani didampingi dengan Blair sebagai Sam yang setia). Pada akhirnya, dibangun dalih seolah-olah AS dan Inggris punya komitmen terhadap misi moral yang kelihatannya luhur untuk membebaskan rakyat Irak apapun yang terjadi dan untuk mendirikan rezim tercerahkan gaya Amerika di Timur Tengah.

Dalam semua dalih yang dikemukakan di atas, tak sulit untuk melihat bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang tengah disembunyikan di balik sederetan dalih itu. Pada mulanya, memang terdengar masuk akal jika dikatakan bahwa ada informasi rahasia yang tak bisa diungkap, namun setiap kali ada usaha untuk mengungkapkan sesuatu dari arsip rahasia, yang muncul ialah sesuatu yang remeh-temeh, mudah disangkal, atau dalam kasus pengungkapan Inggris dijiplak tanpa ijin dari suatu disertasi doktoral yang telah berumur lima tahun (yang sebagian telah diterbitkan dalam jurnal Foreign Affairs) yang merupakan hasil riset yang sangat buruk sehingga sulit untuk dipandang secara serius. Bocoran-bocoran dari komunitas intelijen di Amerika Serikat menun-

jukkan bahwa beberapa anggotanya merasa tak senang dengan cara informasi mereka diotak-atik oleh pihak pemerintah. Muncul skeptisisme terhadap keberimbangan opini dunia ketika pers menunjukkan sikap mendukung perang (ke-175 koran dimiliki oleh jaringan media dunia Murdoch, yang digawangi oleh editor-editor yang dikatakan dipilih karena sikap independen mereka, mendukung secara bulat perang sebagai hal yang bagus, sebagaimana juga yang dilakukan oleh koran-koran lain yang dimiliki oleh taipan-taipan media), dan muncul banyak tekanan dari para politisi yang masih tetap skeptis terhadap perang, atau bahkan yang secara terbuka menentang perang.

Jadi, apa yang sesungguhnya tengah terjadi? Dalih-dalih yang dikemukakan sama sekali tidak meyakinkan; dalih-dalih itu lemah. Jadi, apakah yang mungkin menjadi alasan-alasan yang sebenarnya hanya saja tidak dikatakan? Dan di sini, kita berhadapan dengan fakta bahwa mungkin saja alasan-alasan yang sesungguhnya ini tidak disadari benar oleh pelaku-pelaku utama dalam drama yang ada, atau kalaupun disadari, dengan sengaja disembunyikan atau disangkal.

Dialektika Internal dalam *Civil Society* di AS

Segera setelah pemilihan umum di Jerman tahun 2002, Menteri Kehakiman Jerman memicu kemarahan dengan mengatakan bahwa adventurisme pemerintah Bush di luar negeri dirancang secara sengaja untuk mengalihkan perhatian masyarakat AS dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam negeri AS. Dia lupa menambahkan bahwa itulah salah satu taktik yang juga dijalankan oleh Hitler, dan itulah alasan sesungguhnya Hitler untuk berperang. Kealpaan itu menjadikan paro pertama dari proposisinya tak berkembang menjadi bahan diskusi.

Di AS, terdapat sejarah panjang pemerintah-pemerintah yang bermasalah berusaha memecahkan problem-problem mereka di dalam negeri entah dengan melakukan adven-

turir di luar negeri ataupun dengan merekayasa ancaman-ancaman asing agar bisa tercipta solidaritas-solidaritas di dalam negeri. Ide ini patut untuk diperhatikan dalam kasus ini karena kondisi dalam negeri di Amerika Serikat selama tahun 2002 dalam banyak hal lebih genting jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Resesi yang telah mulai berlangsung pada tahun 2001 (dan yang semakin kuat akibat goncangan 9/11) tidak kunjung selesai. Angka pengangguran meningkat dan rasa ketidakamanan ekonomi terasa nyata. Skandal-skandal perusahaan tersingkap satu persatu dan imperium-imperium korporasi yang tampaknya kokoh runtuh dalam waktu yang singkat. Kegagalan-kegagalan akuntan (maupun korupsi besar-besaran) dan kegagalan-kegagalan regulasi menjadikan nama besar Wall Street ternoda, dan nilai-nilai saham dan nilai-nilai aset lainnya jatuh terbang bebas. Dana-dana pensiun merugi antara seperempat sampai sepertiga nilai mereka (jika bukan sepenuhnya lenyap sebagaimana dalam kasus dana pensiun pegawai Enron), dan masa depan pensiun kelas menengah menjadi suram. Layanan kesehatan kacau, surplus-surplus pemerintah federal, negara bagian dan lokal menguap dengan cepat, dan defisit anggaran mulai membesar dan semakin membengkak. Neraca transaksi perdagangan dengan negara-negara lain di dunia berubah dari buruk menjadi lebih buruk lagi ketika Amerika Serikat menjadi negara pengutang terbesar sepanjang sejarah. Kesenjangan sosial yang telah sejak lama terus meningkat, tampaknya semakin lebih meningkat lagi dengan adanya kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintah. Program perlindungan terhadap lingkungan berhenti, dan ada keengganan yang mendalam untuk memaksakan kembali setiap kerangka regulasi terhadap pasar bahkan di tengah-tengah kenyataan kegagalan pasar. Di atas semua itu, presiden AS, yang terpilih karena suara lima-berbanding-empat-nya Mahkamah Agung ketimbang karena suara rakyat, legitimasinya dipertanyakan oleh setidaknya separo penduduk AS pasca

tragedi 9/11. Satu-satunya hal yang mencegah anihilasi politik terhadap kekuasaan Republik ialah karena adanya solidaritas yang kuat – yang nyaris seperti kebangkitan nasionalis kembali – yang terbangun pasca kejadian 9/11 dan ancaman anthrax (yang sekali lagi anehnya tak terpecahkan dan terlupakan kecuali sebagai suatu pertanda dari apa yang akan dilakukan oleh Saddam jika merasa terlalu tertekan). Meski Afghanistan dengan cepat dan (bagi orang-orang Amerika) tanpa banyak pertumpahan darah tunduk pada AS, Osama tak kunjung ditemukan 'hidup atau mati' dan perang terhadap terorisme tidak banyak menghasilkan capaian-capaian yang spektakuler. Karena itu, tidakkah ini merupakan momen terbaik untuk mengalihkan perhatian ke Irak sebagai salah satu pilar kunci dari 'poros setan' yang ingin dihabisi secara militer oleh anggota-anggota hawkish dalam pemerintahan Bush semenjak akhir yang tak jelas dari Perang Teluk? Bahwa taktik pengalihan perhatian itu berhasil, setidaknya dalam jangka pendek, hal tersebut memang terlihat buktinya. Publik Amerika umumnya menerima ide bahwa ada semacam ikatan hubungan antara al Qaeda dan rezim Saddam dan bahwa yang terakhir ini dalam kasus apapun merupakan musuh yang cukup berbahaya dan jahat sehingga menuntut aksi militer untuk menggulingkannya. Dan sementara itu, kaum Republikan mampu mengkonsolidasikan kekuasaan politiknya melalui pemilihan tingkat Kongres, dan sang presiden pun bisa menutupi aura ilegitimasi yang membayangi kemenangannya.

Meski demikian, barangkali ada sesuatu yang lebih dalam yang beroperasi di sini yang membuat oportunisme politik yang dangkal berhasil menduduki kekuasaan politik yang kuat dan bertahan lama dalam sejarah geopolitik Amerika Serikat. Yang pertama ialah rasa ketakutan yang telah sejak lama ada secara tersembunyi dalam tubuh pemerintahan AS selama beberapa masa kepresidenan terhadap kekuasaan Irak dan terhadap gerakan pan-Arab yang berpotensi mengacaukan. Colin Powell telah memetakan rencana-rencana konti-

ngensi militer untuk menghadapi Irak bahkan sebelum Perang Teluk pertama. Paul Wolfowitz, yang menjadi Deputi Menteri Pertahanan semasa kepresidenan Bush, secara eksplisit menyerukan pergantian rezim di Irak sejak tahun 1992 dan menyatakannya secara terbuka di hadapan publik sepanjang tahun 1990-an. Pergantian rezim kemudian menjadi kebijakan yang diterima dalam pemerintahan Clinton. Suatu kelompok neo-konservatif dibentuk di bawah nama *Project for The New American Century* (Proyek untuk Abad Baru Amerika) pada tahun 1997, dan kelompok ini menjadikan pergantian kekuasaan di Irak sebagai suatu tujuan kunci dan mendesak agar hal tersebut dilakukan secara militer. Kelompok itu terdiri atas Rumsfeld, Wolfowitz, Armitage, Perle, dan beberapa nama lainnya yang merupakan inti dari tim perumus kebijakan luar negeri dan pertahanan Bush. Maka, secara geo-strategis Irak telah sejak lama menjadi sasaran kelompok ini. Namun, mereka mengakui dalam suatu laporan tahun 1999 bahwa dibutuhkan[f] suatu even yang sama katastrofis dan katalisnya seperti peristiwa Pearl Harbor untuk membuat suatu serangan militer bisa diterima secara internasional dan di dalam negeri. Peristiwa 9/11 memberikan peluang untuk itu asalkan bisa dibuat suatu koneksi antara Saddam dan al Qaeda.[10] Karena sebagian besar publik Amerika tak peduli dan tak berpengetahuan mengenai hampir segala hal yang bersifat geografis, maka mudah sekali menjadikan tema perburuan teroris sebagai suatu alasan untuk menjatuhkan dan menggulingkan Saddam. Hanya saja, alasan tersebut tak mudah untuk meyakinkan negara-negara lain.

Di samping itu, ada dimensi lain dari dinamika internal ini yang juga perlu dipahami. AS merupakan sebuah masyarakat imigran multikultural yang cukup luar biasa yang digerakkan oleh cara pandang individualisme yang sangat

---

10. Dimuat dalam R. Fisk, 'This Looming War isn't about Chemical Warheads or Human Rights: It's about Oil', Independent, 18 Jan. 2003, p. 18. Lihat juga situs <www.newamericancentury.org>.

kompetitif yang tiada henti merevolusi kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kekuatan-kekuatan ini menjadikan demokrasi di AS sangat tak stabil, sulit jika bukannya tak mungkin untuk diatur kecuali lewat korupsi atas kekuasaan finansial. Ada masa-masa ketika seluruh negeri itu sedemikian liar sehingga terasa tak bisa diatur. Hannah Arendt menggambarkan bagaimana persisnya *civil society* di negeri itu:

> Karena kekuasaan pada dasarnya hanyalah merupakan alat bagi suatu tujuan, maka suatu masyarakat yang didasarkan semata-mata pada kekuasaan mestilah akan membusuk di balik ketenangan ketertiban dan stabilitasnya; keamanannya yang bersifat total memperlihatkan bahwa masyarakat itu dibangun di atas pasir. Hanya dengan menguasai lebih banyak lagi kekuasaan, *status quo* bisa terjamin; hanya dengan terus-menerus memperluas otoritasnya dan hanya melalui proses akumulasi kekuasaan, masyarakat itu bisa tetap stabil. *Commonwealth*-nya Hobbes merupakan suatu struktur yang mudah goyah dan harus selalu membutuhkan tiang-tiang penyangga baru dari luar agar bisa tegak; jika tidak, masyarakat itu akan runtuh dengan cepat ke dalam kekacauan yang tak bertujuan dan tanpa makna di dalam kepentingan-kepentingan pribadi yang menyusun masyarakat tersebut...
>
> Kemungkinan tiada akhir akan datangnya perang memberikan suatu prospek permanensi kepada gagasan mengenai *Commonwealth* karena hal itu memungkinkan negara untuk memperbesar kekuasaannya dengan cara-cara yang mengorbankan negara-negara yang lain.[11]

Perang Dingin telah usai dan ancaman Rusia yang dengan sepatu laras bersaljunya bergerak melintasi Kanada

---

11. H. Arendt, Imperialism (New York: Harcourt Brace Janovich, 1968 edn.), halaman 22.

bukan lagi merupakan gambaran yang dapat dipercaya. Selama tahun 1990-an, tak ada musuh yang jelas dan *booming* ekonomi dalam negeri Amerika Serikat menciptakan situasi kepuasan dan ketentraman dengan level yang belum ada tandingannya ke seluruh penduduk AS kecuali ke banyak elemen yang terabaikan dan termajinalisasi dalam *civil society*. Namun, seperti yang telah diprediksikan oleh Arendt, tahun 1990-an ternyata menjadi salah satu dekade paling tak menyenangkan dalam sejarah AS. Kompetisi berjalan dengan kejam, avatar-avatar 'ekonomi baru' menjadi jutawan-jutawan dalam semalam dan berubah menjadi tukang pamer kekayaan, aksi kejahatan keuangan seperti *scam* dan *fraudulent schemes* berkembang marak, skandal-skandal (baik yang riil maupun yang imajiner) terjadi di mana-mana, kabar-kabar angin yang keji mengenai rencana pembunuhan terhadap presiden beredar di mana-mana, pembawa acara talk-show Howard Stern dan Rush Limbaugh menyebut media sebagai tak lagi terkontrol, kerusuhan-kerusuhan pecah di Los Angeles dan menjadi simbol dari kecenderungan oposisi dan kekerasan di dalam negeri yang selama sekian lama masih bersifat laten, remaja-remaja menembaki dan membunuh kawan-kawan sekelas mereka di Columbine, hura-hura yang irasional mengalahkan akal sehat, dan korupsi korporasi terhadap proses politik sangat menyolok. Singkat kata, *civil society* di AS jauh dari beradab (*civil*). Masyarakat terfragmentasi dan terpecah-pecah dengan cepat. Masyarakat, meminjam kata-kata Arendt, sepertinya berada dalam proses keruntuhan menuju kekacauan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak bertujuan dan tanpa makna.

Salah satu daya tarik George Bush dalam pemilu 2000, menurut saya, ialah janjinya untuk menciptakan suatu kompas moral yang tegas dan kokoh bagi *civil society* yang tak terkendali itu. Semua pejabat kuncinya berasal dari kalangan neo-konservatif yang, seperti halnya John Ashcroft yang menjabat sebagai Jaksa Agung, memiliki kecenderungan menyukai aksi negara otoritarian. Neo-konservatisme

menggantikan neo-liberalismenya Clinton. Peristiwa 9/11 menjadikan tahun 1990-an dilewati dengan cara-cara yang tak bermoral. Peristiwa tersebut menjadi adegan pembuka politik bukan saja dari penegasan suatu tujuan nasional dan dari proklamasi solidaritas nasional, namun juga dari pemaksaan ketertiban dan stabilitas pada *civil society* di dalam negeri AS. Perang melawan teror, dan diikuti secara halus dengan persiapan perang terhadap Irak, memungkinkan negara mengakumulasi kekuasaan yang lebih besar lagi. Keterlibatan dalam perang terhadap Irak bukanlah sekedar pengalihan dari kesulitan-kesulitan yang ada di dalam negeri; keterlibatan tersebut juga memberikan kesempatan maha besar untuk memaksakan suatu makna baru dari ketertiban sosial di dalam negeri dan membuat patuh *Commonwealth*. Kritik dicap sebagai tak patriotis. Musuh yang jahat di luar negeri menjadi alasan utama untuk melenyapkan atau menjinakkan setan-setan yang bersembunyi di dalam negeri. Relasi antara kondisi-kondisi politik internal dan eksternal memainkan suatu peran yang signifikan, jika bukannya sangat besar, dalam dinamika peristiwa yang memicu konflik dengan Irak. Kita akan kembali membahas ini nanti.

Semua Tentang Minyak

Para penentang perang terhadap Irak seringkali menggambarkan perang tersebut sebagai perang yang bermuara pada minyak. Pemerintah AS biasanya bersikap abai terhadap klaim tersebut dengan alasan bahwa analisa tersebut tak masuk akal atau sama sekali tak perlu didengarkan. Memang minyak penting. Namun bagaimana persisnya dan dalam artian apa minyak itu penting, hal tersebut tak mudah untuk dijawab.

Tesis konspirasi yang dangkal mendasarkan tesisnya pada ide bahwa pemerintahan di Washington tak lebih dari suatu mafia perminyakan yang merebut kekuasaan atas domain publik. Ide ini didukung oleh fakta adanya koneksi-koneksi yang dekat antara Bush dan Cheney dengan kepen-

tingan-kepentingan minyak, diperkuat lagi dengan laporan-laporan bahwa Halliburton, sebuah perusahaan milik Wakil Presiden Cheney, meraup perolehan hampir satu milyar dari kontrak-kontrak minyak segera setelah perang Irak.[12] Meskipun tak ada bantahan atas ide ini, namun saya tak melihat apa untungnya tatanan politik-militer yang ada atau kepentingan-kepentingan korporat menyetujui dilancarkannya perang atas dasar alasan tersebut mengingat dalam kenyataan perusahaan-perusahaan minyak AS dan Inggris justru dieksklusikan dari Irak dan perusahaan-perusahaan Prancis, Rusia dan Cina lebih menjadi pilihan. Penentangan terhadap perang yang dilancarkan oleh AS dengan alasan bahwa perang bertentangan dengan perlucutan senjata secara damai muncul dari negara-negara yang telah memiliki konsesi-konsesi tambang minyak di Irak. Jika perlucutan senjata secara damai disetujui, maka sanksi PBB akan ditarik dan pemilik-pemilik konsesi yang lama akan diuntungkan. Pergantian rezim lewat perang memang akan berarti bahwa konsesi-konsesi minyak yang ada harus dinegosiasi ulang. Hanya saja, Irak masih tetap memegang kepemilikan atas minyaknya, dan prospek bagi perusahaan-perusahaan minyak AS bahkan setelah pergantian rezim tidak dengan sendirinya menggembirakan. Satu-satunya skenario yang mungkin terasa bagus ialah jika suatu pemerintahan AS pasca-perang mengambil alih perusahaan minyak Irak atau mendirikan semacam organisasi garis depan – seperti suatu konsorsium internasional dimana di dalamnya AS memiliki hak veto, sebagaimana yang dimilikinya di dalam IMF – untuk mengelola eksploitasi minyak. Hanya saja, semua itu akan sangat sulit untuk dinegosiasikan tanpa menimbulkan penentangan yang kuat baik di dalam negeri Irak sendiri maupun di antara kekuatan-kekuatan kapitalis.

12. N. Banerjee, 'Energy Companies Weigh their Possible Future in Iraq', New York Times, 26 Oct. 2002, hal. C3.

Ada suatu perspektif lain yang lebih luas untuk memahami teka-teki penguasaan minyak tersebut. Perspektif tersebut bisa dirumuskan dalam proposisi berikut: siapapun yang mengontrol Timur Tengah akan mengontrol jalur minyak global dan siapapun yang mengontrol jalur minyak global akan bisa mengontrol ekonomi global, setidaknya untuk masa depan yang tidak terlalu jauh.[13]

Karena itulah, kita tak boleh mengarahkan perhatian semata-mata kepada Irak, namun harus memperhitungkan kondisi dan signifikansi politik dari Timur Tengah secara keseluruhan dalam relasinya dengan kapitalisme global. Dan poin ini bisa dibaca dari retorika resmi AS. Dalam rencana pergantian rezim di Irak, secara terbuka dikatakan bahwa suatu pemerintahan yang demokratis dan pro-AS akan membawa keuntungan ke seluruh kawasan, dan barangkali bahkan mendorong terjadinya pergantian-pergantian rezim di tempat-tempat lain (terutama sekali yang menjadi target nyata ialah Iran dan Syria, dan kemudian juga Arab Saudi). Bahkan dalam tubuh pemerintahan, ada yang dengan sangat gagahnya berpandangan bahwa suatu pergolakan besar-besaran di kawasan itu akan memberi kesempatan untuk mengocok ulang seluruh peta Timur Tengah (sebagaimana yang telah terjadi di bekas Uni Soviet dan Yugoslavia). Terlebih lagi mengingat formasi negara di kawasan tersebut terutama terbentuk sebagai dampak sampingan dari perjanjian Versailles pasca Perang Dunia Pertama. Perjanjian itu secara umum dinilai telah mengkhianati kepentingan-kepentingan Arab dan memaksakan konfigurasi negara yang mencerminkan kepentingan-kepentingan imperial Inggris dan Prancis. Konfigurasi itu dilihat sebagai anakronistik dan disfungsional. Suatu perjanjian yang menyeluruh mungkin bisa memuaskan beberapa kepentingan separatis (dengan pemberian status negara federal untuk suku

13. M. Klare, Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict (New York: Henry Holt, 2001), menyajikan suatu ulasan yang sangat bagus mengenai geopolitik minyak.

Kurdi di Irak misalnya, dan barangkali dipecahnya Irak menjadi negara Syiah di bagian selatan yang berbasis di Basra). Yang paling penting dari semua itu, perjanjian baru tersebut akan memungkinkan terciptanya penyelesaian atas masalah Israel-Palestina lewat pembentukan suatu negara Palestina yang lebih besar dengan memasukkan Yordania dan barangkali sebagian Arab Saudi. Terhadap pandangan tersebut, muncul opini penentangan yang sangat kuat di PBB yang memandang bahwa pelestarian integritas teritorial Irak sebagaimana yang ada saat ini haruslah menjadi suatu tujuan primer dalam suatu penyelesaian pasca-perang, dan terhadap opini PBB ini, Amerika Serikat setidaknya secara nominal menyetujuinya.

AS telah sejak lama memiliki kepentingan geopolitik terhadap kawasan tersebut. Yang sangat krusial bagi konsep kontrol global secara menyeluruh yang berusaha dicapai selama Perang Dunia Kedua ialah

> kontrol atas Timur Tengah yang dianggap sebagai bagian dari bekas Imperium Inggris, dan sangat esensial bagi kontrol ekonomi, militer dan politik atas dunia – kalau bukan paling penting karena kawasan tersebut memiliki kandungan cadangan minyak yang terbukti paling besar di dunia. Amerika Serikat telah memulai serangkaian panjang operasi rahasia dan terbuka di kawasan itu pada tahun 1950-an, dan operasi terpentingnya diantaranya ialah penggulingan pada tahun 1953 pemimpin pemerintahan Iran yang terpilih secara demokratis, yaitu Mossadegh, karena telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak milik asing. Keberhasilan operasi AS terlihat jelas. Antara tahun 1940 dan 1967, kontrol perusahaan-perusahaan AS atas cadangan minyak Timur Tengah naik dari 10 persen menjadi mencapai 60 persen, sementara cadangan minyak yang berada di bawah kontrol Inggris merosot dari 72 persen pada tahun 1940 menjadi 30 persen pada tahun 1967.[14]

14. The Editors, 'U.S. Imperial Ambitions and Iraq', Monthly Review, SMI (2002), 1-13.

Pada akhir tahun 1960-an, Inggris menarik mundur keberadaan militernya di Suez, dan hal ini membuat AS menjadi satu-satunya pemegang komando. Kekalahan di Vietnam membuat AS memilih menjadikan negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi sebagai negara kaki tangannya (*surrogate states*) guna mengejar kepentingan-kepentingannya yang terus meningkat di kawasan tersebut. AS juga menjadikan dukungannya yang sangat kuat dan hampir tanpa syarat kepada Israel sebagai landasan bagi terciptanya suatu pos terdepan yang solid dari kaki tangan kekuasaan Amerika di kawasan tersebut. Namun, boikot minyak dan membumbungnya harga minyak pada tahun 1973 yang diorganisir oleh OPEC, dan kemudian jatuhnya rezim Shah Iran pada tahun 1979, membuat solusi kekuasaan tak langsung lewat gagasan negara kaki tangan menjadi tak lagi bisa diandalkan. Presiden Carter kemudian mengeluarkan doktrin bahwa Amerika Serikat dalam kondisi apapun tak akan membiarkan adanya interupsi dalam arus minyak dari Teluk. Ini berarti komitmen AS terhadap terus terbukanya Selat Hormuz (karena sistem pengiriman dan distribusi sama pentingnya dengan ladang minyak itu sendiri) dan terhadap kehadiran militer yang bersifat permanen di kawasan tersebut plus pembentukan *Rapid Deployment Force* untuk menangani setiap situasi darurat. AS secara diam-diam mendorong dan mendukung dilancarkannya perang yang brutal dan mematikan oleh Irak terhadap Iran, namun kekuasaan yang semakin besar dari Irak memunculkan rencana (di bawah prakarsa Colin Powell) untuk menciptakan suatu konflik terhadap Irak, bahkan sebelum invasi Irak ke Kuwait berlangsung. Pertanyaan mengapa duta besar AS untuk Irak memberi sinyal bahwa AS tak akan memberikan respon militer terhadap setiap pergerakan Irak ke Kuwait masih merupakan kontroversi, dan salah satu penjelasan yang masuk akal ialah bahwa hal tersebut lebih mengindikasikan adanya unsur penjebakan terhadap Irak ketimbang merupakan suatu kesalahpahaman yang fatal.

Perang Teluk, meski hasil akhirnya dalam hal Irak tidak begitu jelas, membuat kehadiran militer AS di kawasan itu menjadi jauh lebih kuat. Kehadiran militer itu tak berkurang selama pemerintahan Clinton. Patroli-patroli bersama terhadap 'zona-zona larangan terbang' dilakukan dan Inggris melakukan pertempuran udara tingkat rendah dan serangan-serangan misil terhadap fasilitas-fasilitas militer Irak. Joseph Nye, seorang pejabat dalam pemerintahan Clinton dan secara umum merupakan seorang pendukung 'kekuasaan yang lunak', secara tegas menyatakan bahwa AS tak akan segan-segan menggunakan kekuatan militer di kawasan Teluk dan akan melakukannya secara unilateral jika perlu jika kepentingan AS terancam.[15] Dibutuhkan kekuatan AS yang sangat kuat pada tahun 1997-1998 untuk memaksa dilakukannya babak pertama inspeksi persenjataan ke Irak sebagai tanda bahwa isi perjanjian damai mengenai perlucutan senjata Irak betul-betul dijalankan. Serangan-serangan misil dan konflik di udara meningkat eskalasinya. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, AS membentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara lainnya sebagai anggotanya, menjual perlengkapan militer kepada negeri-negeri tersebut sebagai suatu *back-up* bagi kekuatan AS di kawasan tersebut (transfer persenjataan senilai bersih $42 milyar – $23 milyar diantaranya ke Arab Saudi – berlangsung sepanjang tahun 1990-an). Kekuatan-kekuatan AS ditempatkan sebagai penjaga di kawasan tersebut sepanjang tahun 1990-an dan gudang-gudang besar perlengkapan senjata dibangun di Kuwait, Qatar dan Arab Saudi yang memungkinkan AS memiliki kemampuan bergerak langsung. Perencanaan militer di masa berakhirnya Perang Dingin beralih ke usaha membangun kemampuan bertarung di dua perang regional dalam waktu yang bersamaan, dan Irak dan Korea

15. J. Nye, The Paradox of American Power: Why the World's Only Super-Power Cannot Go It Alone (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Utara dipilih sebagai medan latihan bagi usaha tersebut. Pada akhir tahun 1990-an, lebih dari 20.000 personel militer dikerahkan ke kawasan tersebut dengan biaya $4-5 milyar per tahun.

Saya membahas secara ringkas sejarah di atas dengan tujuan untuk menunjukkan dua hal. Sejak tahun 1945, telah terjadi suatu eskalasi yang terus meningkat dalam keterlibatan AS di kawasan tersebut, dan setelah tahun 1980 terjadi suatu perubahan yang signifikan dimana keterlibatan semakin lebih bergantung pada kehadiran militer secara langsung. Yang kedua, konflik dengan Irak merupakan konflik yang berkepanjangan, dan rencana untuk mengakhiri situasi tersebut dengan cara militer telah ada bahkan sejak sebelum Perang Teluk dimulai. Satu-satunya perbedaan antara masa pemerintahan Clinton dan saat ini ialah bahwa topeng yang dipakai sebagai kedok selama ini telah ditanggalkan dan sikap pasif digantikan oleh sikap agresif, sebagian karena atmosfer pasca-9/11 di dalam negeri Amerika Serikat yang membuat aksi militer secara terbuka dan unilateral menjadi bisa diterima secara politik. Dipandang dari sudut geopolitik dan jangka panjang, suatu konfrontasi dengan Irak tampaknya tak akan terelakkan kecuali jika Irak bersedia menjadi negara anteknya AS seperti halnya Arab Saudi. Namun, mengapa tusukan geopolitik ke negara itu yang dilakukan? Sekali lagi, jawabannya ialah bahwa segala sesuatunya berhubungan dengan minyak.

Selama ini, status cadangan minyak secara global hanya didasarkan pada dugaan-dugaan belaka. Perusahaan-perusahaan minyak tak banyak mengungkap apa yang mereka ketahui, dan dalam saat-saat tertentu, mereka bahkan dengan sengaja menyajikan informasi yang menyesatkan. Estimasi-estimasi cadangan minyak seringkali sangat berbeda satu sama lain. Meski begitu, banyak perhitungan yang menyatakan bahwa tingkat eksploitasi cadangan minyak telah melampaui tingkat temuan semenjak tahun 1980 atau setelahnya. Minyak perlahan-lahan menjadi semakin langka. Kita tahu bahwa banyak ladang minyak telah melewati masa puncak-

nya, dan dalam satu dekade atau lebih banyak ladang minyak yang ada sekarang di dunia akan tutup. Ini berlaku untuk kasus produksi dalam negeri AS, Laut Utara, Kanada, Rusia, dan (lebih buruk lagi) Cina. Walaupun ladang-ladang minyak di negara-negara lain usianya lebih panjang, namun satu-satunya ladang yang bisa bertahan sampai limapuluh tahun atau lebih ialah yang ada di Iran, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Temuan-temuan baru mungkin memang bisa mengubah gambaran tersebut, namun untuk saat ini para pemikir strategis harus berhadapan dengan kenyataan semakin meningkatnya peran Timur Tengah sebagai pemain kunci dalam suplai minyak. Di sisi permintaan, kita melihat bahwa Amerika Serikat semakin bergantung pada impor asing, bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Asia Timur dan Asia Tenggara nyaris merebut cadangan minyak yang penting (dimana tingkat permintaan Cina sekarang meningkat secara fenomenal), dan bahwa Eropa (terkecuali Inggris dan Norwegia) bergantung secara total pada minyak impor. Alternatif-alternatif sumber minyak tengah dieksplorasi, namun sangat kecil kemungkinannya bahwa alternatif-alternatif ini akan bisa menjadi penantang yang serius (karena adanya hambatan-hambatan yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan minyak dan kepentingan-kepentingan lainnya) selama beberapa dekade. Karena itulah, akses ke Timur Tengah sekarang menjadi suatu isu keamanan yang krusial bagi Amerika Serikat maupun bagi ekonomi global secara keseluruhan.

Situasi ini memunculkan problem mendesak buat AS dan memotivasi negeri itu untuk berusaha merebut kontrol strategis dan militer yang lebih kuat, jika perlu secara unilateral. Thomas Friedman misalnya berargumen bahwa 'tak ada yang tak sah atau immoral dalam keprihatinan AS terhadap kenyataan bahwa seorang diktator yang jahat dan megalomania justru memiliki pengaruh yang luar biasa besar atas sumber daya alam yang menjadi motor penggerak industri dunia'. Namun, tentu saja argumen tersebut harus disampai-

kan secara berhati-hati kepada publik dan kepada dunia agar tercipta pemahaman bahwa niatan AS ialah 'untuk melindungi hak kelangsungan hidup ekonomi dunia' ketimbang untuk melindungi hak AS untuk memanjakan dirinya, bahwa AS 'bertindak demi kepentingan planet ini, bukan sekedar untuk menyediakan sumber energi bagi kemewahan Amerika... Baru jika kita menduduki Irak dan mendirikan suatu otokrat yang pro-AS semata-mata untuk mengelola minyak Irak (sebagaimana yang kita lakukan di negara-negara minyak Arab lainnya), maka perang yang sebagian tujuannya adalah minyak ini akan menjadi immoral.'[16] Pertanyaannya, apakah AS sedang menjalankan kepemimpinan dan berusaha mengatur penggunaan minyak demi kepentingan setiap pihak di atas dasar persetujuan semua pihak? Ataukah AS sedang berusaha mengejar dominasi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan strategisnya sendiri yang dangkal? Friedman tampaknya lebih percaya pada yang pertama. Namun, bagaimana jika faktanya ialah yang kedua?

Jika AS berhasil merekayasa penggulingan Chavez maupun Saddam, jika AS bisa menstabilkan atau mereformasi rezim macan ompong Saudi yang melandaskan kekuasaannya pada kekuasaan otoritarian yang rapuh (dan sedang berada dalam ancaman kuat jatuh ke tangan-tangan Islam yang radikal), jika AS bisa bergerak (yang kemungkinan kuat akan dilakukannya) dari Irak ke Iran dan mengkonsolidasikan suatu kehadiran militer strategis di republik-republik Asia Tengah dan dengan begitu bisa mendominasi cadangan minyak Cekungan Kaspia, maka mungkin lewat kontrol yang ketat atas jalur minyak dunia, AS berharap bisa mengontrol secara efektif ekonomi global selama lima puluh tahun mendatang. Eropa dan Jepang, maupun Asia Timur dan Asia Tenggara (sekarang termasuk Cina) sangat bergantung pada minyak

16. T. Friedman, 'A War for Oil?', *New York Times*, 5 Jan. 2003, kolom Week in Review, hal. 11

Teluk, dan konfigurasi kekuatan ekonomi-politik di kawasan tersebut sekarang menciptakan suatu tantangan terhadap hegemoni global AS di dunia produksi dan keuangan. Cara apalagi yang lebih baik bagi AS untuk memenangkan kompetisi tersebut dan untuk mengamankan posisi hegemoniknya selain dengan mengontrol harga, kondisi, dan distribusi sumber daya ekonomi kunci yang menjadi fondasi bagi kompetisi tersebut? Dan cara apa yang lebih baik untuk mencapai dominasi itu selain dengan mengunakan secara langsung kekuatan dimana AS masih tetap yang berjaya – yaitu kekuatan militer? Dalam argumen tersebut, terkandung juga aspek militer. Pihak militer-lah yang menggunakan minyak. Korea Utara mungkin memiliki angkatan udara yang canggih, namun semua itu tak akan bisa digunakan jika tak ada bahan bakar. Bukan saja AS butuh minyak untuk menjamin suplai militernya sendiri, namun setiap konflik militer di masa depan, katakanlah dengan Cina akan berjalan timpang jika AS memiliki kekuasaan untuk memotong arus minyak ke pesaingnya. Namun alur argumen semacam itu hanya bisa diterima jika AS memang tengah merasa takut bahwa posisi dominannya dalam kapitalisme global tengah terancam. Dalam bab 2 buku ini, saya akan lebih membahas dimensi ekonomi ketimbang dimensi militer dari persoalan ini. []

2 Bagaimana Kekuasaan Amerika Tumbuh

IMPERIALISME merupakan sebuah kata yang mudah diucapkan. Namun karena artinya bisa sangat berbeda-beda, maka sulit untuk menggunakan kata itu sebelum dijelaskan apa arti dari kata itu dalam posisinya sebagai suatu istilah analitik ketimbang sebagai suatu istilah polemik. Di sini, saya mendefinisikan cabang dari imperialisme yang disebut sebagai 'imperialisme kapitalis' (*capitalist imperialism*) sebagai perpaduan yang kontradiktif antara 'politik negara dan imperium' (yaitu imperialisme dalam posisinya sebagai suatu proyek politik khusus dari pelaku-pelaku yang kekuasaannya didasarkan pada komando atas suatu teritori dan pada kapasitas untuk memobilisir sumber daya-sumber daya manusia dan alamnya untuk tujuan-tujuan politik, ekonomi dan militer) dengan 'proses-proses molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu' [*the molecular processes of capital accumulation in space and time*] (yaitu imperialisme dalam posisinya sebagai suatu proses ekonomi-politik yang lintas ruang dan waktu dimana di dalamnya komando atas dan pemanfaatan kapital menjadi hal yang utama). Dalam unsur yang pertama, saya ingin menekankan pada strategi-strategi politik, diplomatik dan militer yang dikerahkan dan digunakan oleh negara (atau sekum-

pulan negara yang beroperasi sebagai suatu blok kekuatan politik) saat berjuang untuk meneguhkan kepentingan-kepentingannya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya di bagian dunia yang lain. Sementara dalam unsur yang kedua, saya memfokuskan diri pada cara-cara dimana di dalamnya kekuasaan ekonomi mengalir di sepanjang dan melalui ruang yang kontinyu menuju atau menjauhi entitas-entitas teritorial tertentu (seperti negara atau blok kekuatan regional tertentu) lewat kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam bidang produksi, perdagangan, perniagaan, arus kapital, transfer uang, migrasi tenaga kerja, transfer teknologi, spekulasi mata uang, arus informasi, impuls-impuls kultural, dan semacamnya.

Apa yang Arrighi sebut sebagai logika kekuasaan 'teritorial' dan logika kekuasaan 'kapitalis', keduanya saling berbeda satu sama lain.[1] Yang pertama, motivasi-motivasi dan kepentingan-kepentingan dari agen-agen masing-masing logika berbeda. Sang kapitalis yang menguasai kapital uang ingin meletakkan kapitalnya dimana pun laba bisa didapat, dan umumnya berusaha untuk mengakumulasi lebih banyak lagi kapital. Sementara para politisi dan negarawan umumnya berusaha untuk mengejar keluaran-keluaran yang akan melanggengkan atau memperbesar kekuatan negara mereka sendiri vis-a-vis kekuatan negara-negara yang lain. Sang kapitalis mengejar keuntungan individual dan (meski biasanya dibatasi oleh hukum) hanya bertanggungjawab kepada lingkaran sosial terdekatnya sendiri, sementara sang negarawan mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi oleh situasi politik dan militer dari negara dan dalam artian tertentu bertanggung jawab kepada warga negara atau yang lebih sering kepada suatu kelompok elit, suatu kelas, suatu struktur kekerabatan atau kelompok sosial lainnya. Sang kapitalis beroperasi dalam ruang dan waktu yang kontinyu, sementara sang politisi beroperasi dalam suatu ruang teritorial yang tertentu dan setidaknya di

1. G. Arrighi, *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times* (London: Verso, 1994), hal. 33-4.

negara-negara demokrasi, tunduk pada suatu siklus pemilu. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan kapitalis datang dan pergi, berpindah lokasi, merger, atau menutup usahanya, sementara negara adalah entitas yang berusia panjang, tak bisa berpindah, dan kecuali di bawah situasi-situasi penaklukan geografis tertentu, dibatasi oleh batas-batas geografis tertentu.

Kedua logika itu juga kontras dalam cara yang lain. Meski derajat dan modalitas dari keterlibatan publik sangatlah beragam, namun jenis politik negara dan imperium seperti yang sekarang tengah kita alami lebih bersifat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Keputusan-keputusan tertentu harus diambil, seperti apakah perang akan dilancarkan atau tidak terhadap Irak, apakah serangan itu dilakukan secara unilateral atau tidak, bagaimana menangani kesulitan-kesulitan pasca-perang, dan sebagainya. Pejabat-pejabat pengambil kebijakan luar negeri dan pakar-pakar politik/militer memperdebatkan isu-isu tersebut, dan jarang sekali tidak terjadi perbedaan pendapat. Keputusan yang tegas dengan seluruh cabang-cabangnya haruslah dibuat. Keputusan-keputusan strategis yang kadangkala bermakna luas (dan kadangkala memiliki konsekuensi-konsekuensi tak terduga yang sangat besar) diputuskan dan diimplementasikan dalam proses politik yang tak mudah dan penuh perdebatan dimana beragam kepentingan dan opini saling berbenturan (bahkan kadangkala bergantung pada kepercayaan-kepercayaan tertentu atau kharisma dari mereka yang memegang kekuasaan atau pada apa yang tercipta dari konflik-konflik pribadi di antara pemain-pemain yang berpengaruh).

Di sisi lain, proses akumulasi kapital secara geografis jauh lebih menyebar dan kurang begitu tunduk pada proses pengambilan kebijakan seperti itu. Agen individual (biasanya adalah agen bisnis, agen finansial, dan agen korporat) bekerja di segala tempat, dan bentuk molekuler menciptakan beragam kekuatan yang saling bertumbukan satu sama lain, sehingga terkadang membalik arah dan terkadang mem-

perkuat arah gerak dari agregat tren-tren tertentu. Sulit untuk mengelola proses-proses ini kecuali secara tidak langsung dan seringkali setelah tren-tren yang ada menjadi kenyataan. Di sini tatanan institusional yang ada dalam tubuh negara, sebagaimana akan kita lihat, memang berperanan dalam penciptaan konteks bagi akumulasi kapital itu. Selain itu, ada beragam lever dan string moneter dan fiskal (seperti yang diterapkan oleh Alan Greenspan saat menjabat Kepala Federal Reserve), maupun beragam modus intervensi fiskal dan moneter (termasuk di antaranya kebijakan pajak, kebijakan redistribusi, penarikan cukai negara atas barang-barang publik, dan perencanaan fiskal dan moneter) yang menjadikan negara berposisi sebagai agen ekonomi yang kuat di dalam dirinya sendiri. Namun, bahkan di negara-negara otoritarian atau di negara-negara yang disebut sebagai negara-negara 'pembangunan' (*developmental*) karena adanya koneksi yang kuat antara kebijakan negara, keuangan dan pembangunan industri, kita masih bisa temukan ada proses-proses molekuler yang seringkali lepas dari kontrol negara. Jika saya memutuskan untuk membeli sebuah mobil Toyota ketimbang Ford, atau menonton film Hollywood ketimbang film Bollywood, maka apakah dampak dari pilihan ini terhadap neraca keseimbangan AS? Jika saya mentransfer uang dari New York kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan di Lebanon atau Meksiko, maka apakah dampak dari tindakan ini terhadap neraca keuangan masing-masing negara? Tampaknya memang tak mungkin untuk mengantisipasi, dan bahkan sulit untuk melacak, arus kapital dan uang yang melewati berbagai sistem kredit. Semua bentuk kecenderungan psikologis yang tak terlihat (*psychological intangibles*), seperti rasa kepercayaan investor atau konsumen, juga turut menjadi kekuatan-kekuatan yang mendeterminir. Itulah sebabnya Keynes (menimba secara diam-diam gagasan Marx) menyebut 'semangat kebinatangan' (*animal spirits*) dari sang entrepreneur dan ekspektasi-ekspektasi dari *financier* sebagai sesuatu yang krusial bagi terciptanya kekokohan dan viabilitas kapitalisme.

Langkah terbaik yang bisa kita lakukan ialah memonitor data setelah kejadian, dengan harapan kita bisa menemukan trentrennya, menduga-duga apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya, dan menerapkan beberapa langkah korektif untuk menjaga agar sistem tetap dalam kondisi sestabil mungkin.

Jadi, apa yang ingin saya sampaikan ialah bahwa kita harus melihat logika teritorial dan kapitalis dari kekuasaan sebagai dua hal yang berbeda satu sama lain. Memang tak bisa disangkal bahwa kedua logika tersebut saling jalin menjalin dalam cara-cara yang kompleks dan kadangkala kontradiktif. Bahkan, kepustakaan mengenai imperialisme dan imperium sering sekali mengadaikan adanya hubungan yang serasi di antara keduanya: bahwa proses-proses ekonomi-politik dipandu oleh strategi-strategi negara dan imperium dan bahwa negara dan imperium selalu beroperasi berdasarkan motivasi-motivasi kapitalistik. Padahal, dalam praktek, kedua logika tersebut seringkali saling bertabrakan satu sama lain, bahkan kadangkala sampai ke titik antagonisme yang tajam. Akan sulit untuk memahami kebijakan Perang Vietnam atau invasi ke Irak, misalnya, semata-mata dalam kerangka kebutuhan-kebutuhan langsung dari akumulasi kapital. Bahkan, bisa diajukan argumen yang masuk akal bahwa pilihan langkah seperti itu akan menghambat ketimbang memajukan keuntungan kapital. Namun, dengan logika yang sama, akan sulit untuk memahami strategi pengepungan secara teritorial terhadap Kekuasaan Soviet oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua – strategi yang kemudian mendorong intervensi AS ke Vietnam – tanpa memasukkan faktor adanya kebutuhan mendesak di pihak kepentingan-kepentigan bisnis di Amerika Serikat akan tersedianya sebanyak mungkin wilayah di dunia yang terbuka bagi akumulasi kapital sehingga memperluas perdagangan, perniagaan, dan kesempatan bagi investasi asing. Relasi diantara kedua logika tersebut karenanya haruslah dilihat sebagai sesuatu yang problematis dan seringkali kontradiktif (dengan

kata lain dialektis) ketimbang sebagai sesuatu yang fungsional atau satu-sisi. Relasi dialektis ini, yang memunculkan berbagai drama yang kemudian menjadi obyek dari setiap analisis mengenai imperialisme kapitalis, memiliki arti bahwa di antara dua logika kekuasaan yang berbeda tersebut, terdapat interseksi yang saling jalin menjalin. Kesulitan yang mesti dihadapi oleh setiap analisis kongkret terhadap situasi aktual ini kemudian ialah bagaimana mempertahankan dua sisi dari dialektika ini secara serentak agar tidak jatuh ke dalam modus argumentasi yang semata-mata bercorak politik atau yang didominasi oleh aspek ekonomi.

Tak selalu mudah untuk menentukan proporsi determinasi di antara kedua logika tersebut dalam menciptakan perubahan sosial dan politik. Apakah Uni Soviet runtuh akibat keputusan strategis pemerintahan Reagan untuk melancarkan suatu perlombaan senjata yang besar-besaran sehingga mematahkan tulang punggung ekonomi Uni Soviet? Ataukah keruntuhan itu dikarenakan oleh terjadinya perubahan-perubahan molekuler di dalam tubuh politik sistem Soviet itu sendiri (termasuk misalnya pengaruh korosif dari kekuatan uang atau bentuk-bentuk kultural kapitalis yang diam-diam masuk dari luar)? Apakah yang sekarang saksikan ialah klaim-klaim politik yang terbuka mengenai imperium dan praktek-praktek imperialisme dari Amerika Serikat pada level politik dan teritorial, di tengah-tengah momen ketika arus kekuatan ekonomi dan bahkan pengaruh kultural dan moral tengah bergeser dari AS menuju blok-blok kekuatan regional yang tersebar (yang berpusat di Asia dan Eropa, misalnya)? Apakah yang sedang kita saksikan ialah disintegrasi hegemoni AS di dalam sistem global dan munculnya 'regionalisme baru' dalam kekuatan ekonomi-politik di tengah-tengah keponganan Amerika Serikat seolah-olah dirinya merupakan satu-satunya adidaya yang harus dipatuhi? Bahaya-bahaya apakah yang akan dikandung oleh proses regionalisasi ini mengingat bahwa periode paling akhir ketika regionalisasi dominan ialah tahun 1930-an dan bahwa regionalisasi pada saat itu runtuh

akibat tekanan-tekanan ekonomi dan politik dan berubah menjadi perang global? Apakah AS memiliki kekuatan untuk membalik atau mengontrol fragmentasi global semacam itu? Pertanyaan-pertanyaan besar inilah yang ingin saya perbincangkan dalam bagian ini.

Dalam Bab 3, fokus pembahasan saya lebih pada bagaimana persisnya proses-proses molekuler dari akumulasi kapital bekerja. Dalam kesempatan ini, saya merasa perlu untuk menjelaskan proses-proses molekuler tersebut dengan tujuan untuk memerinci secara lebih jelas batasan-batasan dimana di dalamnya logika teritorial dari kekuasaan bekerja. Praktek-praktek imperialistik dari sudut pandang logika kapitalistik pada intinya berorientasi pada bagaimana mengeksploitasi ketidakseragaman kondisi-kondisi geografis dimana di dalamnya akumulasi kapital berlangsung dan juga bagaimana memanfaatkan apa yang saya sebut sebagai 'asimetri-asimetri' yang niscaya tercipta dari relasi-relasi pertukaran yang bersifat spasial. Asimetri-asimetri ini terlihat dalam bentuk adanya pertukaran yang tak adil dan timpang, adanya kekuatan-kekuatan monopoli yang bersifat spasial, adanya praktek-praktek pemerasan yang mengiringi arus-arus kapital tertentu, dan adanya penghisapan rente-rente hasil monopoli. Kondisi kesetaraan yang biasanya berlaku dalam pasar-pasar yang berfungsi secara sempurna dilanggar, dan ketidaksetaraan yang tercipta secara spasial dan geografis. Kemakmuran dan kesejahteraan teritori-teritori tertentu dicapai dengan mengorbankan teritori-teritori yang lain. Kondisi-kondisi geografis yang tak seragam bukan saja tercipta akibat adanya pola keberadaan sumber daya alam dan keuntungan lokasi yang tak seragam, namun lebih penting lagi tercipta sebagai akibat ketidakseragaman cara-cara dimana di dalamnya kemakmuran dan kekuasaan menjadi sangat terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu karena adanya relasi-relasi pertukaran yang asimetris. Di sinilah dimensi politik masuk kembali dan turut mempengaruhi jalannya cerita. Salah satu tugas kunci negara ialah berusaha untuk melestarikan pola asimetri

dalam pertukaran antar ruang sehingga bisa menguntungkannya. Jika, sebagai misal, kekuatan-kekuatan AS membuka pasar kapital di seluruh dunia lewat operasi-operasi IMF (Dana Moneter Internasional) dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), hal itu karena adanya keuntungan-keuntungan yang bisa diraup oleh institusi-institusi keuangan AS. Singkat kata, negara merupakan entitas politik, tubuh politik, yang paling sanggup mengorganisir proses-proses tersebut. Kegagalan menjalankan fungsi tersebut akan berbuah menurunnya kemakmuran dan kekuasaan negara.

Memang ada banyak pembangunan geografis yang tak seragam akibat adanya relasi-relasi pertukaran yang asimetris di dalam negeri itu sendiri. Entitas-entitas sub-nasional seperti pemerintah metropolitan atau regional biasanya sangat terlibat dalam proses-proses semacam itu. Namun, proses itu biasanya tidak disebut sebagai imperialisme. Meski beberapa pihak suka menyebutnya sebagai, untuk beberapa alasan, neokolonialisme internal, atau bahkan imperialisme metropolitan (yang dilakukan oleh New York atau San Fransisco), namun saya lebih suka meletakkan penyelidikan mengenai peran yang dimainkan oleh entitas-entitas regional subnasional dalam kaitannya dengan imperialisme itu ke dalam suatu teori yang lebih general mengenai pembangunan geografis yang tak seragam. Tujuannya ialah untuk meletakkan istilah imperialisme, setidaknya *pro tem*, sebagai suatu sifat dari relasi antar-negara dan arus kekuasaan di dalam suatu sistem akumulasi kapital yang bersifat global. Dari sudut pandang akumulasi kapital, politik imperialistik melahirkan setidaknya usaha untuk melanggengkan dan mengeksploitasi keuntungan-keuntungan ketersediaan sumber daya dan keuntungan-keuntungan asimetris apapun yang bisa dikumpulkan oleh kekuasaan negara.

Logika Teritori dan Logika Kapital

Pada momen historis-geografis tertentu, salah satu dari dua logika itu ada yang mendominasi. Akumulasi kon-

trol atas teritori sebagai tujuan dalam dirinya sendiri jelas memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomi. Konsekuensi-konsekuensi ini bisa jadi positif atau negatif dari sudut pandang penghisapan upeti, arus kapital, armada kerja, komoditi dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan ketika kontrol teritorial (yang mungkin berupa pengambilalihan dan pemerintahan secara langsung atas teritori tertentu atau tidak) dipandang sebagai suatu cara yang niscaya untuk mengakumulasi kapital. Apa yang membuat imperialismenya sang kapitalis berbeda dari konsepsi-konsepsi imperium lainnya ialah bahwa logika kapitalistik-lah yang umumnya mendominasi, meski sebagaimana akan kita lihat, ada saat-saat dimana di dalamnya logika teritorial mengemuka. Pertanyaan pentingnya kemudian ialah: bagaimana cara logika teritorial dari kekuasaan yang cenderung sangat terpaku pada ruang merespon dinamika akumulasi kapital yang tiada henti dan bersifat lintas spasial? Dan apakah implikasi dari akumulasi kapital yang tiada henti ini terhadap logika teritorial dari kekuasaan? Sebaliknya, jika hegemoni dalam sistem dunia merupakan milik dari suatu negara atau sekelompok negara, maka bagaimana cara logika kapitalis dijalankan sehingga bisa posisi sang pemegang hegemoni tetap lestari?

Hannah Arendt memberi kita pemahaman yang gamblang mengenai problem tersebut lewat observasinya yang tajam: 'Suatu akumulasi hak milik yang tiada henti', tulisnya, 'haruslah didasarkan pada suatu akumulasi kekuasaan yang tiada henti... Proses akumulasi kapital yang tanpa batas membutuhkan struktur politik dari "suatu Kekuasaan yang sedemikian tak terbatas" yang bisa melindungi hak milik yang jumlahnya semakin besar dengan cara terus-menerus tumbuh lebih kuat.' Dari sini, dalam pandangan Arendt, muncul 'ideologi "progresif" di akhir abad kesembilanbelas' yang 'menjadi awal bagi munculnya imperialisme'.[2] Namun,

2. Arendt, *Imperialism*, 23.

jika akumulasi kekuasaan haruslah selalu mengiringi akumulasi kapital, maka sejarah kaum borjuis mestilah merupakan suatu sejarahnya hegemoni-hegemoni dalam bentuk semakin meluas dan ekspansifnya kekuasaan. Dan inilah persisnya yang dicatat oleh Arrighi dalam sejarah komparatifnya mengenai pergeseran hegemoni global dari fase negara-negara kota Italia, menuju fase Belanda, Inggris dan akhirnya sekarang sampai pada fase AS:

> Sebagaimana di akhir abad ketujuhbelas dan awal abad kedelapanbelas, peran hegemonik telah menjadi terlalu besar untuk ditangani oleh suatu negara yang seukuran *United Provinces*, demikian pula di awal abad keduapuluh peran hegemonik itu menjadi terlalu besar untuk ditangani oleh suatu negara yang ukuran dan sumber dayanya sebesar Kerajaan Inggris. Dalam kedua kasus, peran hegemonik jatuh ke sebuah negara – Kerajaan Inggris di abad kedelapanbelas, dan Amerika Serikat di abad keduapuluh satu – yang bisa menikmati 'rente proteksi' yang besar, atau keuntungan-keuntungan biaya yang dicapainya berkat posisi geostrategisnya yang bersifat absolut atau pun relatif.. Namun negara dalam kedua kasus itu juga memiliki bobot yang penting dalam ekonomi dunia yang kapitalis sehingga mampu menggeser keseimbangan kekuasaan di antara negara-negara yang saling bersaing ke arah manapun yang mereka anggap cocok. Dan karena ekonomi dunia yang kapitalis telah meluas secara sangat luas pada abad kesembilanbelas, maka teritori dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa hegemonik di awal abad keduapuluh juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibutuhkan di abad kedelapanbelas.[3]

Namun, jika apa yang dikatakan oleh Arendt benar, maka setiap pemegang hegemoni jika ingin mempertahankan posisinya terkait dengan akumulasi kapital tiada henti, haruslah juga tiada henti memperluas, mengembangkan, dan mengintensifkan kekuasaannya. Namun di sini, ada suatu

3. Arrighi, *The Long Twentieth Century*, hal. 62.

bahaya yang terus mengintai karena seperti yang pernah diperingatkan oleh Paul Kennedy dalam karyanya *The Rise and Fall of the Great Powers*, perluasan yang terlalu jauh dan jangkauan yang terlalu luas berulangkali terbukti menjadi titik terlemah dari negara-negara dan imperium-imperium hegemonik (Roma, Venesia, belanda, Inggris).[4] Namun, peringatannya (di tahun 1990) bahwa AS sendiri tengah berada dalam bahaya, andaikata pun didengarkan, didengarkan tanpa dipedulikan karena dalam satu dekade sejak terbitnya karyanya, AS telah memperluas kekuasaan militer maupun politiknya secara luar biasa sampai ke suatu titik dimana bahaya jangkauan yang terlalu luas terlampaui. Ini memunculkan pertanyaan lebih jauh, yaitu bahwa jika AS tak lagi cukup besar dan cukup sumber daya untuk mengelola ekonomi dunia abad keduapuluh satu yang telah meluas sedemikian jauh, maka jenis akumulasi kekuasaan politik macam apakah yang akan mampu menggantikannya mengingat bahwa dunia masih terpaku pada komitmen akumulasi kapital tanpa batas? Saya kelak akan kembali ke pertanyaan ini. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang menarik. Beberapa menyatakan bahwa pemerintahan dunia bukan saja merupakan sesuatu yang diinginkan, namun juga merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Sementara yang lain berargumen bahwa kelompok-kelompok negara yang saling berkolaborasi satu sama lain (dengan cara yang sama dengan yang disarankan oleh Kautsky dalam teorinya mengenai ultra-imperialisme, dan sebagaimana ditunjukkan oleh adanya pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi seperti G7 – yang sekarang menjadi G8) mungkin bisa menjadi penggantinya. Terhadap kemungkinan tersebut, bisa kita tambahkan ide yang kurang begitu optimistik bahwa jika terbukti bahwa karena alasan-alasan tertentu, tak

4. P. Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict* from 1500 to 2000 (New York: Fontana Press, 1990).

mungkin untuk mengkonstruk akumulasi kekuasaan politik yang terus-menerus semakin membesar, maka akumulasi kapital tiada henti memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi kekacauan, sehingga era kapital berakhir bukan lewat suatu ledakan revolusioner, namun lewat anarki yang menghancurkan.

Hegemoni

Jadi, apakah yang pada dasarnya membentuk suatu hegemoni? Pemakaian konsep tersebut oleh Gramsci sangatlah ambigu sehingga memberi ruang bagi munculnya beragam interpretasi. Kadangkala konsep itu merujuk semata-mata pada kekuasaan politik yang dijalankan melalui kepemimpinan dan penerimaan dari yang diperintah, dan ini berbeda dari kekuasaan politik yang dijalankan sebagai dominasi melalui koersi. Dalam kesempatan yang lain, konsep itu sepertinya merujuk pada percampuran tertentu antara koersi dan penerimaan yang mengiringi pelaksanaan suatu kekuasaan politik. Dalam kesempatan tertentu, saya merujuk pada artian yang kedua, namun saya menginterpretasikan hegemoni secara umum dalam artian yang pertama. Saya juga mengikuti adaptasi Arrighi terhadap konsep ini dalam kasus relasi-relasi antar-negara: 'Supremasi suatu kelompok, atau dalam kasus ini, suatu negara bangsa bisa... terejawantah dalam dua cara: yaitu sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan intelektual dan moral". Suatu kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok yang menjadi musuhnya dengan cara-cara yang cenderung "melikuidasi" mereka atau menundukkannya, mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; dan kelompok sosial itu memimpin kelompok-kelompok yang menjadi sekutu atau sepaham dengannya.' Kelompok itu bisa memimpin dengan dua cara yang berbeda. Lewat daya tarik capaian-capaiannya, 'suatu negara dominan menjadi "model" yang diikuti oleh negara-negara lain dan karena itu membuat negara-negara lain tertarik mengikuti jalan pembangunan yang

ditempuhnya... Hal ini bisa meningkatkan prestise dan seiring dengan itu kekuatan dari negara dominan itu... namun ketika peniruan itu berhasil, hal itu akan membalik keseimbangan dan karena itu memerosotkan ketimbang menaikkan kekuasaan dari pemegang hegemoni karena memunculkan pesaing-pesaing dan mengurangi "keistimewaan" dari sang pemegang hegemoni. Di sisi lain, kepemimpinan merujuk pada 'fakta bahwa suatu negara yang dominan memimpin sekelompok negara ke arah yang diharapkan, dan dengan begitu secara luas dipandang sebagai tengah mengejar suatu kepentingan bersama. Kepemimpinan dalam artian ini meningkatkan kekuasaan dari sang negara yang dominan.'[5]

Suatu konsekuensi penting dari argumen ini ialah adanya pembedaan antara kekuasaan 'distributif' dan 'kolektif'. Kekuasaan yang pertama memiliki karakter menang-kalah dimana kompetisi bisa meningkatkan posisi dari sang pemegang hegemoni lewat perampasan dari yang lain atau dengan memimpin suatu koalisi regional dengan cara sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan-keuntungan yang lebih besar buat suatu kawasan tertentu. Kebangkitan kembali akhir-akhir ini kepentingan para pemegang hegemoni regional (seperti 'model angsa terbang'-nya Jepang dimana Jepang memimpin negara-negara Asia lainnya, atau model Eropa dimana aliansi Prancis-Jerman memimpin) menunjukkan bahwa proses redistribusi kekuasaan ini barangkali tengah memainkan suatu peran yang jauh lebih kuat dalam reorganisasi kapitalisme global ketimbang yang cenderung diimplikasikan oleh istilah 'globalisasi'.[6] Namun, untuk bisa benar-benar hegemonik dalam artian global, dibutuhkan peng-

5. G. Arrighi and B. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), hal. 26-8.

6. J. Mittelman, The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance (Princeton: Princeton University Press, 2000), terutama part II; Mittelman merupakan satu-satunya penulis yang membahas secara serius tesis regionalisasi.

gunaan kepemimpinan yang menciptakan suatu permainan yang tidak menang-kalah dimana semua pihak mendapatkan keuntungan, entah dari perolehan timbal-balik dari interaksi mereka (seperti perdagangan) atau melalui kekuatan bersama mereka yang semakin meningkat vis-a-vis alam lewat, sebagai misal, penciptaan dan transfer teknologi-teknologi baru, bentuk-bentuk organisasi baru, dan tatanan-tatanan infrastruktural yang baru (seperti jaringan komunikasi dan struktur hukum internasional). Arrighi menegaskan bahwa akumulasi kekuatan secara kolektif merupakan satu-satunya basis yang solid bagi hegemoni di dalam sistem global. Hanya saja, kekuatan dari pemegang hegemoni terbentuk dari dan terekspresikan melalui suatu keseimbangan yang berayun-ayun dari sisi koersi ke sisi konsensus.

Perhatikan sejenak bagaimana koersi dan konsensus dimainkan oleh Amerika Serikat selama limapuluh tahun terakhir. AS seringkali bergantung pada dominasi dan koersi dan tidak segan-segan untuk melikuidasi musuhnya. Bahkan di dalam negeri, AS memiliki sejarah kejam yang sebenarnya melanggar komitmennya pada konstitusi dan prinsip hukumnya sendiri. McCarthyisme, pembunuhan atau penahanan pemimpin-pemimpin Black Panther, penawanan orang-orang Jepang selama Perang Dunia Kedua, pemata-mataan dan infiltrasi terhadap berbagai kelompok oposisi, dan di masa kini kesediaan untuk menggusur Undang-undang Jaminan Kebebasan (*Bill of Rights*) dengan mengesahkan Undang-undang Patriot dan Keamanan Dalam Negeri. Bahkan lebih keji lagi dalam keterlibatannya di luar negeri dengan mensponsori kudeta-kudeta di Iran, Irak, Guatemala, Chili, Indonesia dan Vietnam (sekedar menyebut beberapa kasus) dimana ribuan nyawa menjadi korbannya. AS juga mendukung terorisme negara di seluruh dunia manakala dibutuhkan. CIA dan unit-unit pasukan khusus beroperasi di banyak negara. Studi atas catatan ini mendorong banyak kalangan melukiskan AS sebagai 'negara berandal' (*rogue state*) terbesar di muka bumi. Ada banyak karya yang menyebut demikian, mulai dari

Chomsky, Blum, Pilger, Johnson, dan banyak lagi yang lainnya.[7] Sementara pengetahuan kita mungkin hanya sebagian saja, yang menakjubkan dari AS ialah betapa besarnya yang diperlihatkan dan didokumentasikan dalam sumber-sumber resmi atau setengah-resmi dan betapa menyesakkan, kejam dan sangat mengejutkannya catatan tersebut. Likuidasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kekuatan ekonomi untuk mendominasi (seperti embargo perdagangan terhadap Irak dan Kuba atau program-program penghematan IMF yang diimplementasikan dengan arahan dari Departemen Keuangan AS) bisa digunakan dengan sama destruktifnya sebagaimana kekuatan fisik. Contoh kasusnya ialah bagaimana peran istimewa dari institusi-institusi keuangan AS dan Departemen Keuangan AS dengan didukung oleh IMF dalam menimbulkan aksi devaluasi yang kejam terhadap aset-aset di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga terciptalah pengangguran massal dan secara efektif menihilkan seluruh kemajuan sosial dan ekonomi di sebagian besar penduduk di kawasan tersebut yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Uniknya, sebagian besar penduduk AS hidup dalam penyangkalan, dalam penolakan untuk mendengarkan hal-hal seperti itu, atau andaikata pun mendengarkan, menerima secara pasif likuidasi dan koersi sebagai fakta-fakta kehidupan yang memang harus diterima, sebagai biaya yang mesti dikeluarkan jika menjalankan bisnis yang pada dasarnya jujur di dunia yang kotor.

Namun, apa yang sangat sering gagal disadari oleh kritikus-kritikus yang hanya terfokus pada aspek perilaku koersi AS di seluruh dunia ini ialah bahwa koersi dan likuidasi musuh hanyalah merupakan sebagian dari basis, dan kadangkala kontraproduktif, bagi kekuasaan AS. Penerimaan

---

7. Johnson, Blowback; J. Pilger, The New Rulers of the World (London: Verso, 2002): W. Blum, Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower (London: Zed Books, 2002); dan, tentu saja, N. Chomsky, 9-11 (New York: Seven Stories Press, 2001).

dan kooperasi juga sama pentingnya. Jika hal ini tak mampu dimobilisasi di level internasional dan jika kepemimpinan tidak dijalankan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan manfaat kolektif, maka sudah sejak lama AS tak akan lagi hegemonik. AS setidaknya harus bertindak dengan cara sedemikian rupa sehingga klaim yang dibuat bahwa dia bertindak demi kepentingan umum menjadi masuk akal bagi yang lain bahkan meski banyak yang menduga bahwa tindakannya itu lahir dari kepentingan diri yang dangkal. Tentang semua inilah pelaksanaan kepemimpinan melalui penerimaan itu.

Dalam konteks itu, Perang Dingin memberi kesempatan luar biasa besar buat AS. Amerika Serikat, yang mendedikasikan dirinya pada akumulasi kapital tiada henti, tak segan-segan mengakumulasi kekuasaan politik dan militer untuk membela dan memajukan proses akumulasi kapital tersebut di seluruh dunia di tengah-tengah ancaman komunis. Para pemilik hak milik pribadi dari seluruh dunia bersatu, mendukung dan berlindung di balik kekuatan tersebut guna menghadapi ancaman sosialisme internasional. Hak-hak milik pribadi dianggap sebagai nilai universal dan diproklamirkan demikian dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. AS menjamin keamanan negara-negara demokrasi Eropa, dan dengan murah hati membantu membangun kembali ekonomi-ekonomi Jepang dan Jerman Barat yang hancur akibat perang. Lewat kebijakan 'containment' (*pengepungan*), AS secara diam-diam menetapkan garis batas dari imperium informalnya (terutama di Asia), sambil menyatakan komitmennya untuk melemahkan dengan cara apapun kekuasaan dari pesaing agungnya, yaitu imperium Soviet. Pengetahuan kita mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri selama masa pemerintahan Roosevelt-Truman dan sesudahnya memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa AS selalu menempatkan kepentingannya sendiri sebagai yang nomer satu, dan laba yang besar mengalir ke kelas-kelas kaya-raya di cukup banyak negara sehingga membuat klaim AS bahwa dia bertin-

dak demi kepentingan universal (baca 'kelas kaya-raya') terlihat kredibel dan membuat kelompok-kelompok subalter (dan negara-negara klien) dengan senang hati berpihak kepadanya. Gambaran 'kemurahhatian' ini dimainkan secara cukup lihai oleh para pembela AS saat menanggapi penilaian dari mereka yang lebih menekankan pada citra negara berandalan AS karena perilaku koersinya. Gambaran itu juga sangat dilebih-lebihkan dalam cara dimana AS biasanya diperlihatkan dan ditampilkan di depan mata dunia, dan apa yang dilakukan di sini lebih merupakan penceritaan fakta dicampuradukkan dengan mitos. Sebagai misal, AS suka mempercayai bahwa dirinya dan hanya dirinya sajalah yang membebaskan Eropa dari cengkeraman Nazi, dan kepercayaan itu melenyapkan peran yang jauh lebih penting yang dimiliki oleh Tentara Merah dan serangan atas Leningrad yang kemudian membalik jalannya cerita Perang Dunia Kedua. Jadi, yang lebih pas ialah bahwa AS melakukan praktek-praktek koersif sekaligus hegemonik pada saat yang bersamaan, meski keseimbangan diantara kedua faset tersebut dalam pelaksanaan kekuasaannya bisa bergeser-geser dari satu periode ke periode yang lain dan dari satu presiden ke presiden yang lain.

Selama bertahun-tahun, AS telah menjalankan kepemimpinan atas negara-negara yang sama-sama berdedikasi pada terciptanya akumulasi kapital tiada henti dan sebagai konsekuensinya AS telah menyebarluaskan cara-cara berbisnisnya ke berbagai negara di dunia. Namun tentu saja, sepanjang masa-masa Perang Dingin, AS belum merupakan suatu kekuatan hegemoni yang sungguh-sungguh bersifat global. Di saat sekaranglah, dengan lenyapnya secara efektif ancaman komunisme, peran kepemimpinan AS menjadi semakin lintas batas dan wilayah. Namun, bagi mereka yang memproyeksikan masa depan imperialisme dan imperium AS atas dunia di abad keduapuluh satu, situasi tersebut kurang begitu meyakinkan. Pandangan yang sama juga muncul di kalangan mereka yang melihat bahwa telah terjadi pengelompo-

kan-pengelompokan kekuatan secara regional yang merupakan konfigurasi tatanan politik alternatif di tengah-tengah aturan-aturan globalisasi neo-liberal.

Tak bisa disangkal perlombaan untuk saling mengungguli memang memainkan suatu peran penting dalam urusan-urusan global. Banyak negara di dunia yang semakin terbawa secara politik, ekonomi dan kultural ke dalam arus globalisasi karena adanya proses Amerikanisasi. Namun di sini, saya berbeda pendapat dari Arrighi karena saya tak melihat bahwa perlombaan saling mengungguli niscaya menimbulkan kompetisi dan bahwa perlombaan itu niscaya merupakan permainan yang bersifat menang-kalah. Perlombaan untuk mengungguli konsumerisme, gaya hidup, bentuk-bentuk kebudayaan, dan institusi-institusi keuangan AS memang telah turut berkontribusi terhadap proses akumulasi kapital tiada henti secara global. Situasi ini berkembang semakin menguat ketika perlombaan tersebut membawa pada kompetisi yang semakin tajam (sebagai misal, ketika Taiwan mengambilalh secara total beberapa sektor produksi dari AS). Dan hal ini memang memiliki pengaruh-pengaruh yang besar terhadap situasi dalam negeri Amerika Serikat (sebagaimana diperlihatkan oleh sejarah panjang deindustrialisasi di arena-arena seperti baja, galangan perkapalan, dan tekstil di Amerika Serikat). Namun, menurut hemat saya adalah penting untuk membedakan antara aspek-aspek perlombaan ini dengan aspek-aspek perlombaan yang lain yang turut berkontribusi secara aktual terhadap terbentuknya kekuatan-kekuatan kolektif yang lebih besar.

Kekuatan politik selalu terbentuk dari percampuran yang tak stabil antara koersi, perlombaan dan olah kepemimpinan lewat konstruksi persetujuan. Semua ini adalah sarana. Namun, bentuk-bentuk kekuatan apakah yang harus dihimpun di dalam logika teritorial untuk melindungi kemampuan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingannya? Bentuk-bentuk kekuatan yang tak tampak (*intangibles*) seperti prestise, status, rasa hormat, otoritas dan pengaruh

diplomatik bagaimanapun harus dilandaskan secara material dalam sesuatu. Uang, kapasitas produksi, dan kekuatan militer merupakan tiga kaki yang di atasnya hegemoni kapitalisme berdiri. Namun, dalam fondasi ini pun, kita juga temukan konfigurasi-konfigurasi yang terus menerus bergeser-geser dan bersifat tak stabil. Perhatikan misalnya bergeser-gesernya basis material dari hegemoni AS sejak akhir abad kesembilan belas.

Munculnya Imperialisme Borjuis 1870-1945

Arendt menyatakan bahwa imperialisme yang muncul menjelang akhir abad kesembilanbelas merupakan 'tahap pertama dalam kekuasaan politik kaum borjuis ketimbang merupakan tahap terakhir dari kapitalisme'.[8] Bukti akan hal ini cukup berlimpah. Krisis overakumulasi besar yang pertama (yang pada intinya didefinisikan sebagai suatu situasi dimana surplus kapital dibarengi dengan tidak adanya cara-cara pemanfaatan yang menguntungkan – dan untuk analisis lebih luas, lihat Bab 3) terjadi ketika ekonomi di seluruh Eropa runtuh pada tahun 1846-1850 sehingga memicu lahirnya gerakan-gerakan revolusioner borjuis (dengan partisipasi yang cukup besar dari kelas buruh) di seluruh Eropa. Keterlibatan secara parsial kaum borjuis di dalam tubuh aparatus negara setelah itu berlangsung secara tak seragam di seluruh Eropa. Jalan keluar dari krisis kapitalis pertama ini ialah suatu gerak ganda investasi-investasi infrastruktur jangka panjang (seperti yang telah dibentangkan dalam teori 'pengeluaran produktif negara' yang menjadi dasar teoretis bagi transformasi kota Paris oleh Hausssrhann dan bagi meluasnya perhatian kepada program-program pembangunan transportasi, saluran air dan pembuangan kotoran dan investasi dalam perumahan dan fasilitas-fasilitas publik di banyak negara Eropa) dan ekspansi geografis yang terutama terfokus

8. Arendt, *Imperialism*, 18.

pada perdagangan Atlantik (dengan AS sebagai pasar utamanya). Namun, pada pertengahan tahun 1860-an, kemampuan untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja dengan cara-cara ini merosot tajam. Terganggunya perdagangan Atlantik akibat adanya Perang Saudara di Amerika memiliki suatu dampak yang serius, dan gerakan-gerakan politik dalam negeri (seperti yang telah melahirkan Komune Paris tahun 1871) telah menciptakan tekanan-tekanan internal di seluruh Eropa. Pasca Perang Saudara di AS, gerakan-gerakan proletarian muncul baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain.

Surplus-surplus kapital di Eropa, yang semakin terhalangi pemanfaatannya di dalam negeri, dipaksa untuk bergerak keluar sehingga menenggelamkan dunia ke dalam suatu gelombang besar-besaran investasi dan perdagangan spekulatif, terutama setelah tahun 1870 atau sesudahnya. Logika kapitalistik untuk mencari apa yang saya sebut, dalam Bab 3, sebagai '*spatio-temporal fixes*' menjadi mengemuka dalam skala global. Kebutuhan untuk melindungi penanaman modal asing dan bahkan untuk mengatur penanaman modal asing yang terlalu berlebihan telah menciptakan tekanan-tekanan yang memaksa negara-negara untuk memberikan tanggapannya terhadap logika kapitalistik yang ekspansioner ini. Dalam konteks ini, kaum borjuis, yang memang sudah memegang kekuasaan di Amerika Serikat, mau tak mau harus mengkonsolidasikan kekuatan politiknya vis-a-vis formasi-formasi kelas yang lama dan harus melenyapkan bentuk imperialis yang lama (seperti imperium-imperium Austro-Hongaria atau Ottoman) atau mengubahnya (sebagaimana di Inggris) menjadi menganut logika yang sangat kapitalistik. Konsolidasi kekuatan politik borjuis di dalam negara-negara Eropa karenanya menjadi prasyarat niscaya bagi suatu reorientasi politik teritorial ke arah yang diperlukan oleh logika kapitalistik.

Di sisi lain, kaum borjuis tengah tertarik dengan ide bangsa yang tengah berada di puncak kekuasaannya. Gelombang pembentukan negara-bangsa yang telah berlangsung

selama paro terakhir abad kesembilanbelas di Eropa (terutama di Jerman dan Italia) secara logis mengarah pada suatu politik konsolidasi internal ketimbang pada politik penanaman modal asing. Selain itu, solidaritas politik yang diandaikan oleh ide bangsa tidak bisa dengan mudah diperluas begitu saja sehingga mencakup 'yang lain' (*others*) tanpa membuat ide bangsa yang sesungguhnya ingin direpresentasikan menjadi kehilangan artinya. Karena itu, negara-bangsa dalam dirinya sendiri tidak memberikan suatu basis yang koheren bagi imperialisme. Lantas, bagaimana problem overakumulasi dan keniscayaan untuk menemukan *spatio-temporal fixes* itu bisa menemukan tanggapan politik yang memadai di atas basis negara-bangsa? Jawabannya ialah dengan memobilisasi nasionalisme, jingoisme, patriotisme, dan di atas semua itu rasisme untuk mendukung suatu proyek imperium dimana di dalamnya kapital-kapital nasional – dan pada saat itu, memang ada suatu koherensi yang masuk akal antara skala usaha kapitalis dan skala beroperasinya negara-bangsa – menjadi nakodanya. Seperti ditegaskan oleh Arendt, ini berarti ditundanya perjuangan kelas di dalam negeri dan dibangunnya suatu aliansi antara apa yang dia sebut 'gerombolan massa' (*mob*) dan kapital di dalam negara-bangsa. 'Sedemikian tak wajarnya hal ini dari sudut Marxis,' katanya,' sampai-sampai bahaya aktual dari upaya imperialis – yaitu untuk memecah-belah umat manusia menjadi ras tuan dan ras budak, menjadi golongan tinggi dan rendahan, menjadi orang kulit berwarna dan kulit putih, yang semuanya merupakan upaya-upaya untuk mempersatukan orang-orang atas dasar gerombolan massa – menjadi terlupakan sepenuhnya.' Mungkin memang ada, katanya, 'suatu jurang yang dalam antara nasionalisme dan imperialisme' dalam teori, 'namun dalam praktek, jurang tersebut bisa dan telah dijembatani oleh nasionalisme kesukuan dan rasisme yang blak-blakan'.[9] Tum-

9. *Ibid.* 32.

pang tindihnya nasionalisme dan imperialisme memang bukan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi. Namun perjuangan untuk melawan nasionalisme pada akhirnya gagal sebagaimana ditunjukkan secara paling dramatis oleh keruntuhan Internasional Sosialis Kedua yang terjadi akibat setiap cabang nasional mendukung negaranya masing-masing dalam perang 1914-1918. Konsekuensi dari keruntuhan itu sungguh mengerikan. Beragam imperialisme borjuis yang berbasis bangsa berkembang dan dibarengi dengan berkembangnya rasisme (Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia). Imperialisme-imperialisme yang dimotori oleh industri, namun tidak digerakkan oleh kalangan borjuis, juga muncul di Jepang dan Rusia. Semua imperialisme itu mendukung doktrin mengenai keunggulan ras mereka masing-masing yang didasarkan pada pandangan Darwinisme sosial yang pseudo-saintifik, dan seringkali mereka memandang diri mereka sebagai entitas-entitas organik yang terjebak dalam suatu perjuangan untuk bertahan hidup melawan negara-bangsa negara bangsa yang lain. Rasisme, yang telah sejak lama bergerak diam-diam, sekarang menjadi arus pemikiran politik utama. Inilah yang melegitimasi gerak peralihan menuju apa yang saya sebut dalam Bab 4 sebagai 'akumulasi lewat penjarahan' (terhadap masyarakat-masyarakat barbar, pribumi, dan masyarakat-masyarakat rendahan yang gagal mengkombinasikan dengan tepat tenaga kerja mereka dengan tanah) dan penghisapan upeti dari negara-negara jajahan lewat bentuk-bentuk imperialisme paling kejam dan sangat eksploitatif yang pernah ada (bentuk-bentuk imperialisme Belgia dan Jepang barangkali merupakan yang paling kejam dari semuanya). Menurut Arendt, adalah juga penting untuk melihat Nazisme dan Holokaus sebagai sesuatu yang sepenuhnya bisa dipahami dalam konteks alur historis-geografis ini, meski sama sekali tidak dideterminir oleh alur ini.

Meski kontradiksi yang ada antara nasionalisme borjuis dan imperialisme borjuis tak terpecahkan, semakin meningkatnya kebutuhan untuk menemukan saluran-saluran

geografis bagi surplus kapital menciptakan tekanan-tekanan terhadap kekuatan politik yang ada di dalam setiap negara imperialis untuk memperluas kontrol geografisnya. Hasilnya, sebagaiman yang telah diprediksikan dengan akurat oleh Lenin, ialah limapuluh tahun rivalitas dan perang antar-imperialis dimana di dalamnya nasionalisme-nasionalisme yang saling bersaingan bertarung. Fitur-fitur utama dari perang tersebut di antaranya ialah dipecah-pecahnya dunia menjadi dataran-dataran hak milik kolonial atau hak istimewa kolonial (yang paling dramatis ialah cengkeraman atas Afrika pada tahun 1885 dan perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama, termasuk pembagian Timur Tengah menjadi daerah-daerah protektorat Prancis dan Inggris); penumpukan sejumlah besar sumber daya dunia oleh kekuatan-kekuatan imperial; dan penyebarluasan doktrin-doktrin keunggulan ras, semua itu dibarengi dengan suatu kegagalan total dan sudah diprediksi sebelumnya untuk mengatasi problem surplus kapital di dalam domain imperial yang tertutup sebagaimana bisa disaksikan dalam depresi besar tahun 1930-an. Dan kemudian meletuslah malapetaka global Perang Dunia pada tahun 1939-1945.

Meskipun fase-fase awal ditandai oleh hegemoni Inggris dan setidaknya oleh sejumlah kecil perdagangan bebas, saya kira Arendt telah tepat dalam melihat periode dari tahun 1870 sampai dengan 1945 sebagai satu mata rantai sejarah yang utuh dari rivalitas antar imperialisme-imperialisme berbasis-bangsa yang beroperasi dengan memobilisasi rasisme dan pembangunan solidaritas-solidaritas nasional yang menyuburkan tumbuhnya fasisme di dalam negeri dan rentan terhadap konfrontasi kekerasan di luar negeri.

Di tengah-tengah itu semua, AS mengembangkan bentuk imperialismenya sendiri yang khas. Digerakkan oleh dorongan perkembangan kapitalis yang luar biasa pasca Perang Saudara, AS menjadi dominan secara teknologi dan ekonomi vis-a-vis negara-negara lain di dunia. Bentuk pemerintahannya, yang tidak dibebani oleh residu-residu feodal

atau aristokratik seperti yang bisa ditemukan di Eropa, sangat mencerminkan kepentingan-kepentingan kelas korporasi dan industri dan sejak kemerdekaannya, pada dasarnya berwatak borjuis (sebagaimana terformalisasikan dalam Konstitusinya). Kekuatan politik di dalam negeri tercurahkan pada individualisme dan sangat kuat menentang setiap ancaman terhadap hak-hak milik pribadi dan tingkat laba. AS menjadi suatu masyarakat imigran multi-etnik yang menjadikan nasionalisme etnis yang dangkal seperti yang ada di Eropa dan Jepang tak mungkin berkembang. AS juga sangat luar biasa dalam kepemilikan ruang yang luas untuk ekspansi dalam negerinya dimana di dalamnya baik logika kekuasaan yang kapitalistik maupun politik bisa menemukan ruang untuk bermanuver. Bentuk rasisme dalam negerinya (dimana orag kulit hitam dan pribumi yang menjadi sasarannya) diimbangi dengan suatu sikap bermusuhan terhadap 'orang-orang non-Kaukasian' yang membuatnya mengekang diri untuk tidak mencaplok teritori-teritori (seperti Meksiko dan negara-negara Karibia) yang didominasi oleh penduduk dari non-Kaukasia. Teori panggilan takdir sebagai negara pemimpin dunia kemudian mengobarkan sikap rasismenya yang ekspansionis dan idealisme internasionalnya. Sejak akhir abad kesembilanbelas sampai seterusnya, AS secara perlahan-lahan belajar untuk menopengi kegamblangan penguasaan dan pendudukan teritorinya dengan kedok universalisasi tanpa batas ruang nilai-nilai yang dianutnya, yang disembunyikan di bawah retorika yang kemudian mencapai puncaknya, sebagaimana dijelaskan oleh Neil Smith, dalam apa yang disebut sebagai 'globalisasi'.[10] Amerika Serikat telah sampai pada fase menyamai Eropa, telah sampai pada momen-momen episodik ketika ekspansi geografisnya menjadi sesuatu yang esensial secara ekonomi, dan telah sejak lama mendeklarasi-

10. N. Smith, *American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization* (Berkeley: University of California Press, 2003).

kan, lewat berbagai rumusan Doktrin Monroe, bahwa seluruh negara Amerika harus bebas dari kontrol Eropa dan karena itu secara de fakto ada di bawah dominasinya sendiri. Dan impian Woodrow Wilson-lah yang menjadikan Doktrin Monroe sebagai sesuatu yang universal. Sementara itu, di Amerika Selatan, AS harus berhadapan dengan republik-republik yang, seperti dirinya, telah membebaskan diri mereka dari cengkeraman kolonial lewat perjuangan-perjuangan kemerdekaan. AS pun lantas harus menjalankan cara-cara dominasi imperial yang secara nominal menghargai kemerdekaan dari negara-negara tersebut, namun mendominasi mereka lewat kombinasi hubungan-hubungan perdagangan khusus, patronase, klientelisme, dan koersi secara diam-diam. Meski AS secara umum menganut prinsip 'pintu terbuka' dalam hal perdagangan global, namun AS kurang condong atau kurang menunjukkan keinginan riil untuk menegakkan prinsip tersebut pra-Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Pertama, AS turut terlibat, dan memainkan suatu peran penting dalam tercapainya Perjanjian Versailles dimana di dalamnya prinsip hak menentukan diri sendiri suatu bangsa setidaknya diakui, meski tidak dipraktekkan (terutama terkait dengan Timur Tengah). AS juga mengalami trauma Depresi Besar (yang lebih disebabkan oleh kegagalan-kegagalan internal dari kelas yang berkuasa ketimbang merupakan suatu refleksi dari tidak adanya kesempatan bagi kapital yang berbasis di AS untuk berekspansi secara geografis), dan tersedot ke dalam konflik global berikutnya yang terjadi akibat rivalitas-rivalitas antar imperialis. Namun dengan kuatnya arus pandangan isolasionis baik di kalangan kiri maupun kanan dan dengan sejarah panjang rasa takut bahwa keterlibatan luar negeri akan membahayakan bentuk pemerintahannya, dorongan imperial yang muncul bersifat sesekali dan terbatas, dan terutama dijalankan secara diam-diam ketimbang secara terbuka, lebih bermotifkan politik ketimbang kapitalistik, kecuali dalam kasus korporasi-korporasi individual dengan kepentingan-kepentingan luar negerinya yang se-

cara terang-terangan memobilisasi kekuatan politik untuk mengembalikan proyek-proyek mereka kapan pun dan di manapun diperlukan. AS masih menjadi penyerap potensial sekaligus sebagai produsen dari surplus kapital, meski di tahun 1930-an, AS sepenuhnya gagal merealisasikan potensi-potensinya ini, terutama karena konfigurasi kekuasaan kelas di dalam negeri menolak upaya-upaya moderat Roosevelt selama New Deal untuk menyelamatkan ekonomi dari kontradiksi-kontradiksi lewat redistribusi kemakmuran. Kesulitan untuk mencapai kohesi dalam negeri dalam suatu masyarakat yang multi-etnik yang dicirikan oleh paham individualisme dan pembagian kelas juga menghasilkan apa yang disebut Hofstadter sebagai 'gaya paranoid' dari politik Amerika: yaitu rasa takut terhadap 'yang lain' (seperti bolsyewisme, sosialisme, anarkisme, atau 'agitator asing') dan hal ini krusial bagi penciptaan solidaritas-solidaritas politik di dalam negeri.[11] Uni Soviet dan bolsyewisme semakin diperlihatkan sebagai musuh dan lawan utama (dibarengi secara diam-diam dengan penciptaan rasa takut terhadap Cina, termasuk terhadap para imigran Cina).

Sejarah Hegemoni Amerika Pasca-Perang, 1945-1970

AS keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai kekuatan yang pada saat itu paling dominan. AS mendominasi teknologi dan produksi. Dollar (yang didukung oleh suplai emas terbesar di dunia) menjadi mata uang terkuat, dan aparatus militernya jauh lebih unggul daripada negara-negara lain. Satu-satunya penantang seriusnya ialah Uni Soviet, namun negara itu telah kehilangan sejumlah besar penduduknya dan mengalami kemerosotan yang parah dalam kapasitas militer dan

11. R. Hofstadter, *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996 edn.).

industrinya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Semua itu terkuras habis akibat perang melawan Nazisme, dan bisa dikatakan serbuan ke Leningrad dan kehancuran sebagian besar kapasitas militer Jerman di front timur akibat serbuan itu merupakan sesuatu yang krusial bagi kemenangan pihak Sekutu. Keterlambatan Sekutu melancarkan front kedua di Eropa membuat Stalin marah besar dan mungkin memang telah diperhitugkan oleh AS dan Inggris sebagai suatu cara untuk membuat Uni Soviet mengalami kerugian berat akibat perang. Namun, keterlambatan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi serius karena hal tersebut memungkinkan Uni Soviet mendapatkan capaian-capaian teritorial yang besar di Eropa, dan Uni Soviet kemudian menolak mundur dari daerah-daerah tersebut dan menciptakan rezim-rezim klien di seluruh Eropa Timur, bahkan sampai Jerman Timur. Menurut Uni Soviet, pembelaan atas kepentingan-kepentingannya menuntut adanya pembelaan terhadap kontrol teritorialnya.

Selama perang, elemen-elemen elit di dalam pemerintahan dan sektor swasta AS merancang suatu rencana penataan pasca-perang yang akan menjamin perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Perluasan teritori dicoret. Sudah menjadi suatu prinsip yang berpengaruh lama dalam pemikiran dan praktek politik di Amerika Serikat, sejak masa James Madison sampai seterusnya, bahwa keterlibatan di negeri asing haruslah dihindarkan karea hal tersebut akan bisa menggerogoti demokrasi di dalam negeri. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana menyeimbangkan antara rasa kekhawatiran tersebut dengan fakta gamblang dominasi global AS. Sebagaimana imperialisme Eropa harus berubah menjadi rasisme untuk menyeimbangkan ketegangan antara nasionalisme dan imperialisme, demikian pula AS berusaha untuk menyembunyikan ambisi imperialnya dangan suatu universalisme yang abstrak. Efeknya, sebagaimana yang diamati oleh Neil Smith, ialah penolakan terhadap arti penting teritori dan geografi dalam artikulasi kekuasaan imperial. Inilah

gagasan yang diajukan oleh Henry Luce dalam editorial depan yang berpengaruh di tahun 1941 dalam majalah Life yang berjudul '*The American Century*'. Luce, seorang penganut paham isolasionis, memandang bahwa sejarah telah menyerahkan kepemimpinan global kepada Amerika Serikat dan bahwa peran ini, meski diberikan kepadanya oleh sejarah, haruslah diraih secara aktif. Kekuasaan yang diberikan lebih bersifat global dan universal ketimbang spesifik secara teritorial, dan karena itu Luce lebih suka membicarakan tentang suatu abad Amerika ketimbang suatu imperium. Dalam kata-kata Smith:

> Sementara bahasa geografis dari imperium-imperium mengisyaratkan suatu politik yang bisa melemah – karena imperium-imperium muncul dan runtuh dan mudah mengundang penentangan – 'Abad Amerika' mengisyaratkan suatu takdir yang niscaya. Dalam bahasa Luce, setiap usaha untuk membantah secara politik dominasi Amerika haruslah diabaikan. Bagaimana mungkin orang melawan sebuah abad? Dominasi global AS tampil sebagai suatu hasil alamiah dari kemajuan historis, dan secara implisit merupakan puncak dari peradaban Eropa ketimbang merupakan keluaran dari kekuatan ekonomi-politik pesaing Eropa. Sebagai konsekuensinya, dominasi itu niscaya akan berlangsung selama berabad-abad. Karena tak terikat geografi, Abad Amerika melampaui imperium dan sangat tinggi derajatnya.[12]

Fakta bahwa Uni Soviet telah semakin berhasil meraih capaian-capaian teritorial dan kekuasaannya semakin borjuis mendorong politik AS yang 'paranoid' melancarkan Perang Dingin. Di dalam negeri, kebijakan ini melahirkan represi-represi yang dikenal sebagai 'McCarthyisme' yang mengekang kebebasan bersuara dan sangat menentang apapun yang terdengar sebagai komunistik atau sosialistik. Serikat buruh-serikat buruh dibersihkan dari pengaruh-pen-

12. Smith, *American Empire*, 20.

garuh radikal, dan partai-partai komunis dan kiri lainnya secara efektif dilarang. Infiltrasi yang dilakukan oleh FBI terhadap apapun yang dianggap sebagai menentang dilancarkan diam-diam. Semua ini dilegitimasi sebagai sesuatu yang vital bagi keamanan dalam negeri Amerika Serikat di bawah ancaman Uni Soviet. Hasilnya ialah konformitas dan solidaritas politik di dalam negeri. Leviathan, sebagaimana Arendt mungkin menyebutnya, memaksakan terciptanya ketertiban terhadap potensi kekacauan dari kepentingan-kepentingan individual. Buruh didesak dan dibujuk untuk menyelaraskan diri dengan kapital, upah ditingkatkan seiring dengan capaian-capaian produktivitas (suatu model Fordis yang dinilai perlu untuk dikembangkan). Dukungan kelas-buruh diarahkan untuk politik AS di luar negeri dengan mengatasnamakan anti-komunisme dan kepentingan ekonomi AS.

Dalam urusan-urusan luar negeri, AS menampilkan dirinya sebagai pembela utama kebebasan (yang dipahami dalam kerangka pasar bebas) dan hak-hak milik pribadi. AS menyediakan perlindungan ekonomi dan militer terhadap kelas-kelas yang berpunya atau elit-elit politik/militer di manapun. Sebagai imbalannya, kelas-kelas berpunya dan elit-elit ini menjadi sangat pro-Amerika dalam sikap dan tindakan politiknya di negeri mereka sendiri. Ini berimplikasi pada terciptanya pengepungan militer, politik dan ekonomi terhadap daya pengaruh Uni Soviet.[13] Ranah imperium Amerika Serikat didefinisikan secara negatif, yaitu semua wilayah yang tak masuk ke dalam orbit Uni Soviet (dan di mata AS, termasuk Cina, meski Cina telah sejak lama memisahkan diri dari orbit Uni Soviet). Meski konfrontasi frontal dengan imperium Soviet dinilai sebagai sesuatu yang tak mungkin, setiap kesempatan dimanfaatkan untuk melemahkan imperium Soviet. (Kebijakan ini ternyata di kemudian hari membawa beberapa malapetaka ketika AS mendukung kemuncu-

13. *The Editors*, 'U.S. Imperial Ambitions and Iraq', 3-13.

lan Mujahidin dan fundamentalisme Islam dengan tujuan untuk mempermalukan Soviet di Afghanistan. AS kemudian dipaksa untuk berperang melawan Mujahidin ketika muncul terorisme yang mengatasnamakan paham fundamentalisme Islam). Setiap ekspansi teritori yang berada di bawah kontrol komunis dianggap AS sebagai suatu kehilangan yang serius – dan karena itu AS menuduh bahwa Mao-lah 'yang telah bertanggungjawab menghilangkan Cina' dan tuduhan tersebut dimanfaatkan oleh McCarthy untuk melancarkan serangan terhadap siapapun yang dinilai sebagai kaum kiri di AS.

Dua prinsip utama dalam praktek strategi di dalam negeri AS telah ditetapkan selama Perang Dunia Kedua, dan semenjak itu, prinsip-prinsip itu menjadi batu sendi praktek politik dalam negeri AS: yaitu ketertiban sosial di Amerika Serikat harus tetap stabil (tak ada redistribusi kekayaan atau kekuasaan yang radikal dan tak ada penentangan terhadap kontrol elit dan/atau kelas kapitalis yang akan ditoleransi), dan harus dijalankan suatu ekspansi yang terus-menerus dalam akumulasi kapital dan konsumsi dalam negeri untuk menjamin terciptanya perdamaian, kemakmuran, dan kedamaian di dalam negeri.[14] Keterlibatan di negara asing tidak boleh mempengaruhi konsumerisme di dalam negeri: karena itulah muncul preferensi terhadap apa yang disebut Ignatieff sebagai 'imperium dalam dosis ringan' (*empire lite*). Amerika Serikat akan menggunakan keunggulan kekuatan militernya untuk melindungi rezim-rezim klien di seluruh dunia yang mendukung kepentingan-kepentingan AS. Penggulingan Mossadegh, yang telah menasionalisasi ladang-ladang minyak di Iran, dan penggantiannya dengan Shah di tahun 1953 (dengan bantuan CIA) dan ketergantungan AS kepada Shah untuk memajukan kepentingan-kepentingan AS di kawasan Teluk merupakan pendekatan yang sangat khas diterapkan oleh AS. Di dalam arena-arena geopolitik kunci, seperti dalam beru-

14. Inilah tesis utama dalam karya W. A. Williams, *Empire as a Way of Life*.

rusan dengan negara-negara garis depan untuk menghadapi Uni Soviet, AS menggunakan kekuatan ekonominya untuk membngun ekonomi-ekonomi yang kuat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalistik (dan itulah yang memunculkan Marshall Plan untuk Eropa dan dukungan kuat terhadap Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan negara-negara garis depan terhadap kekuasaan Soviet lainnya yang rapuh.) Akses menuju Timur Tengah, dengan cadangan minyaknya yang besar, juga krusial (Roosevelt, meski tengah sakit, bersedia pergi berkeliling dan berbicara dengan pemimpin-pemimpin Saudi mengenai pentingnya mempertahankan arus minyak saat dirinya dalam perjalanan pulang dari konferensi Yalta).

AS meletakkan dirinya sebagai kepala dari tatanan keamanan kolektif, dengan memanfaatkan Perserikatan Bangsa-bangsa dan yang lebih penting lagi memanfaatkan aliansi-aliansi militer seperti NATO, untuk membatasi kemungkinan perang antar-kapitalis dan untuk memerangi pengaruh dari Uni Soviet dan juga Cina. AS memanfaatkan kekuatan militer, operasi-operasi rahasia dan segala bentuk tekanan ekonomi untuk menjamin terciptanya atau berlanjutnya pemerintahan-pemerintahan yang bersahabat. Untuk tujuan ini, AS tak segan-segan mendukung penggulingan pemerintahan-pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan terlibat secara langsung atau tak langsung dalam taktik-taktik likuidasi yang dianggap menentang kepentingan-kepentingan AS. Hal ini dilakukan di Iran, Guatemala, Brazil, Kongo, Republik Dominika, Indonesia, Chili, dan di negara-negara lain. AS melakukan intervensi lewat pemilu maupun lewat kegiatan rahasia di belasan negara lain di seluruh dunia. Meski demikian, AS kalah di Cina dan Kuba, dan perlawanan-perlawanan komunis muncul di tempat-tempat dimana model Soviet dianggap menarik sebagai suatu jalan untuk menciptakan suatu modernisasi yang cepat tanpa melibatkan kekuasaan kelas kapitalis.

Dalam 'dunia bebas' ini, AS berusaha untuk membangun suatu tatanan internasional yang terbuka buat

perdagangan dan pembangunan ekonomi dan akumulasi kapital secara cepat secara kapitalistik. Hal ini mensyaratkan dibubarkannya imperium-imperium berbasis negara-bangsa yang sebelumnya ada. Dekolonisasi mengharuskan dibentuknya negara dan pemerintahan-sendiri di seluruh dunia. AS membentuk relasinya dengan negara-negara yang baru merdeka ini dengan mendasarkan diri pada pengalamannya berhubungan dengan republik-republik independen di Amerika Latin selama periode pra-perang dunia. Relasi-relasi perdagangan khusus, klientelisme, patronase dan koersi secara diam-diam, seperti telah kita lihat, menjadi senjata-senjata utama kontrol AS. Dan AS menggelar senjata-senjata ini secara bilateral, negara demi negara, sehingga memprosisikan dirinya sebagai suatu saluran sentral yang berisikan sejumlah besar juru bicara yang menghubungkan AS dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Setiap ancaman aksi kolektif terhadap kekuasaan AS yang sangat besar ini akan dilawan dengan strategi pecah-belah dengan menggunakan koneksi-koneksi individual untuk membatasi otonomi kolektif, bahkan di tengah-tengah adanya gerak menuju terbentuknya persatuan, sebagaimana yang berlangsung di Eropa.

Suatu kerangka kerja perdagangan dan pembangunan ekonomi internasional di dalam dan antar negara merdeka dibentuk lewat kesepakatan Bretton Woods untuk menstabilisasi sistem keuangan dunia, dibarengi dengan pendirian sejumlah institusi seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, *International Bank of Settlement* di Basle, dan pembentukan organisasi-organisasi seperti GATT (Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) dan OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pertumbuhan ekonomi antara kekuatan-kekuatan kapitalis maju dan untuk menghadirkan pembangunan ekonomi bergaya-kapitalis ke negara-negara non-komunis di seluruh dunia. Di dalam ranah ini, AS bukan saja dominan, namun juga hegemonik dimana posisinya sebagai suatu negara super-imperialis didasarkan pada kepemimpi-

nan kelas-kelas berpunya dan elit-elit dominan di berbagai negara. Bahkan, AS secara aktif berusaha untuk mendorong terbentuknya dan penguatan elit-elit dan kelas-kelas semacam itu di seluruh dunia: AS menjadi protagonis utama dalam memproyeksikan kekuatan borjuis di seluruh dunia. Bersenjatakan teori 'tahapan' pertumbuhan ekonominya Rostow, AS berupaya memajukan terciptanya tinggal landas di dalam pembangunan ekonomi yang akan memajukan dorongan konsumsi massa di setiap negara sehingga bahaya komunis bisa dielakkan.[15]

Namun pembubaran imperialisme-imperialisme berbasis Eropa juga memunculkan penolakan secara formal terhadap rasisme, padahal rasisme inilah yang telah memungkinkan terbentuknya perkawinan antara nasionalisme dan imperialisme. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai studi UNESCO menolak validitas rasisme dan berusaha untuk menemukan suatu universalisme hak milik pribadi dan hak-hak individual yang lebih cocok untuk suatu tahap kedua kekuasaan politik borjuis. Agar universalisme itu bisa kokoh, AS harus menggambarkan dirinya sebagai puncak peradaban dan benteng bagi hak-hak individu. Sikap pro-Amerikanisme harus dikembangbiakkan dan diproyeksikan di negara-negara lain. Dan mulailah serangan kultural besar-besaran atas nilai-nilai Eropa 'yang dekaden' dan promosi superioritas kultur Amerika dan 'nilai-nilai Amerika'. Kekuatan uang digunakan untuk mendominasi produksi kultural dan mempengaruhi nilai-nilai kultural (inilah era ketika New York 'mencuri' ide seni modern dari Paris[16]). Imperialisme kultural menjadi suatu senjata penting dalam perjuangan untuk menegaskan hegemoni secara menyeluruh. Hollywood, musik pop, bentuk-bentuk kultural dan bahkan segenap gerakan politik, seperti

---

15. W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1966 edn.).

16. S. Guilbaut, *How New York Stole the Idea of Modern Art*, terj. A. Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1985 edn.).

gerakan hak-hak sipil, dimobilisasi untuk memajukan hasrat untuk menyebarluaskan jalan Amerika (*American way*). AS dicitrakan sebagai suatu mercu suar kebebasan yang memiliki kekuasaan eksklusif untuk menarik gerbong seluruh dunia menuju suatu peradaban yang abadi yang dicirikan oleh perdamaian dan kemakmuran.

Di sisi lain, AS juga dipandang sebagai mesin utama akumulasi kapital dan mesin utama yang akan menarik gerbong negara-negara di dunia mengikuti jalurnya. Transformasi-transformasi ekonomi dalam negeri yang massif (yang sesungguhnya baru terlihat selama New Deal tahun 1930-an) menjadikan AS memiliki posisi yang sangat penting secara global karena peluang-peluang pasar yang ditimbulkannya. Investasi-investasi dalam pendidikan, sistem jalan tol antar negara bagian, munculnya daerah-daerah yang dipenuhi gedung-gedung secara tak beraturan di pinggiran kota, dan pembangunan daerah di wilayah selatan dan barat AS, menyerap sejumlah besar kapital dan barang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Negara AS, berbeda dari harapan kaum neo-liberal dan konservatif, menjadi suatu negara pembangunan selama tahun-tahun ini. Kecuali untuk beberapa area kunci tertentu, seperti sumber daya-sumber daya strategis, AS tidak terlalu banyak bergantung pada penghisapan nilai dari negara-negara lain. Proporsi pertumbuhan GDP yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri kurang dari 10 persen sampai dengan tahun 1970-an. Meski ada beberapa operasi di luar negeri, seperti ITT (International Telephone and Telegraph) di Chili (yang salah satu direkturnya merupakan direktur CIA), atau United Fruit di Amerika Tengah, yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan luar negeri AS di kawasan tersebut, imperialisme ekonomi AS, dengan perkecualian bahan-bahan mineral strategis dan minyak, tidak terlalu beranjak jauh. Ketika dialektika dunia luar menuntut, imperialisme ekonomi AS diarahkan pada negara-negara yang sudah maju. Investasi

asing yang bersifat langsung mengalir ke Eropa, sehingga membuat negara-negara Eropa terobsesi untuk menjauhkan diri dari apa yang disebut oleh Servan-Schreiber sebagai 'tantangan Amerika' (*the American challenge*).[17] Namun, sebagai imbalannya, AS membuka pasarnya untuk negara-negara lain ini dan hal ini menciptakan suatu permintaan efektif atas produk-produk dari Eropa dan Jepang. Pertumbuhan yang kuat terjadi di seluruh negara kapitalis. Akumulasi kapital berlangsung secara cepat lewat 'perluasan reproduksi' (*expanded reproduction*). Laba diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan maupun untuk teknologi-teknologi baru, kapital tetap, dan perbaikan-perbaikan infrastruktur secara besar-besaran.[18] Namun, kontrol atas arus keluar kapital (sebagai imbangan terhadap arus masuk komoditi) tetap dipertahankan sejak dari periode sebelumnya, terutama oleh negara-negara Eropa. Hal ini memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi negeri-negeri tertentu untuk mengatur kebijakan-kebijakan fiskalnya. Peran spekulasi finansial masih relatif kecil dan terbatas secara teritorial. Kebijakan pengeluaran negara yang 'Keynesian' itu dibarengi dengan suatu dinamika perjuangan kelas di masing-masing negara-bangsa yang menuntut distribusi kemakmuran. Inilah suatu era ketika buruh yang terorganisir menjadi cukup kuat dan negara kesejahteraan yang sosial demokratik muncul di seluruh Eropa. Upah sosial menjadi obyek perjuangan bahkan di dalam negeri Amerika Serikat, dan buruh yang terorganisir berhasil meraih sejumlah kemenangan penting di dalam negeri dalam perjuangan menuntut kesetaraan upah dan standar kehidupan.

Jadi, periode dari tahun 1945 sampai dengan 1970 menjadi tahap kedua dalam kekuasaan politik kaum borjuis yang beroperasi di bawah dominasi dan hegemoni AS. Peri-

17. J. J. Servan-Schreiber, *American Challenge* (New York: Scribner, 1968).
18. P. Armstrong, A. Glyn, dan J. Harrison, Capitalism since World War II: The Making and Break Up of the Great Boom (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

ode tersebut melahirkan suatu periode pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat di negara-negara kapitalis maju. Suatu kesepahaman yang saling mengerti di level global terbangun di kalangan semua kekuatan kapitalis besar, dengan AS berperan sebagai pemimpinnya, untuk menghindarkan perang yang bersifat menghancurkan dan untuk berbagi keuntungan yang dihasilkan dari pengintensifan kapitalisme yang terintegrasi di kawasan-kawasan inti. Ekspansi yang bersifat geografis dalam akumulasi kapital dipertahankan lewat proses dekolonisasi dan 'developmentalisme' yang dijadikan sebagai suatu tujuan general bagi seluruh negara di dunia. Perluasan reproduksi kapital kelihatannya berjalan dengan sangat baik dan efek-efek sekundernya bahkan mengalir keluar, meski secara ringan dan tak seragam, ke negara-negara non-komunis. Di dalam negeri, semakin meningkatnya kekuatan buruh dalam pakta kapital-buruh berarti menetesnya keuntungan-keuntungan dari konsumerisme ke kelas-kelas bawah, bahkan ke beberapa minoritas (meski tidak cukup besar jumlahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh terjadinya kerusuhan di perkotaan pada tahun 1960-an). Problem overakumulasi kapital, meski selalu mengancam, berhasil dicegah sampai akhir tahun 1960-an lewat suatu kombinasi antara penyesuaian-penyesuaian dalam negeri AS dan *spatio-temporal fixes* baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat. Strategi-strategi ini, diharapkan, akan memungkinkan sistem yang ada untuk bisa mengatasi problem-problem ekonomi yang telah mengganggu pada tahun 1930-an dan untuk menciptakan perlindungan dari ancaman komunisme.

Namun, tahap kedua ini bukannya bebas dari kontradiksi-kontradiksi. Yang pertama, munculnya penolakan secara formal terhadap rasisme di level internasional telah menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam negeri Amerika Serikat dimana diskriminasi rasial masih dijalankan. Gerakan hak-hak sipil, yang pada akhirnya menjadi model bagi gerakan-gerakan di penjuru dunia, memiliki asal-usulnya dalam dinamika internal ini serta dalam pergolakan-pergola-

kan di perkotaan yang dipimpin oleh orang-orang kulit hitam pada tahun 1960-an; selain itu gerakan itu juga memiliki suatu dimensi internasional ketika universalisme hak-hak asasi manusia berbenturan dengan praktek-praktek yag diterapkan di dalam negeri AS dan ketika diplomat-diplomat 'kulit berwarna' bergerak *en route* antara markas PBB di New York dan Washington DC karena dilarang menginap di motel-motel dekat markas PBB. Sikap selektif secara rasial dalam kebijakan imigrasi AS juga diserang habis-habisan. Arus migran menuju AS pun mulai berubah karakternya.

Yang kedua, sebagaimana akan kita lihat dalam Bab 3, kebijakan pasar terbuka menjadikan AS rentan terhadap kompetisi internasional. Arus kapital selama periode ini sangat terkonsentrasi di negara-negara kapitalis maju (terutama negara-negara anggota OECD). Jerman Barat dan Jepang-lah yang terutama sangat pesat perkembangan kekuatan ekonominya sehingga menantang dominasi AS dalam produksi selama tahun 1960-an. Ketika kemampuan AS untuk menyerap surplus kapital di dalam negeri mulai mandeg pada akhir tahun 1960-an, maka overakumulasi menjadi problem dan kompetisi ekonomi pun berlangsung semakin tajam.

Yang ketiga, ketika terjadi konflik antara demokrasi, di satu sisi, dan ketertiban dan stabilitas yang dibangun di atas kepentingan-kepentingan orang kaya di sisi yang lain, AS selalu memilih yang terakhir. Karena itulah, AS bergerak dari posisi patron dari gerakan-gerakan pembebasan nasional menjadi penindas setiap gerakan populis atau demokratik yang mengusahakan suatu jalan non-kapitalis yang agak lunak (apalagi jalan sosialis atau komunis) untuk memperbaiki situasi kemakmuran ekonomi. Upaya-upaya sosial demokratik atau populis untuk memodifikasi kapitalisme seringkali dihancurkan dengan kejam (sebagaimana terjadi terhadap Bosch di Republik Dominika, Goulart di Brazil, dan kemudian Allende di Chili). Bahkan di Eropa, AS mengerahkan segenap kekuatannya untuk melemahkan sos-

ialisme dan bahkan kadangkala untuk mensubversi sosial demokrasi. Dan rezim-rezim diktatorial yang kejam, seperti di Argentina pada tahun 1970-an, Saudi, Shah Iran dan Suharto di Indonesia didukung tanpa syarat oleh kekuatan militer dan ekonomi AS karena mereka mendukung kepentingan-kepentingan AS. Semakin meningkatnya kebencian terhadap AS karena terkunci dalam situasi ketertundukan terus-menerus secara spasio-temporal kepada pusat juga memicu munculnya gerakan-gerakan anti-dependensia di seluruh negara sedang berkembang. Perjuangan-perjuangan kelas dan pembebasan nasional di negara-negara sedang berkembang menjadi semakin mengarah menjadi politik anti-Amerika. Anti-dependensia bergabung dengan anti-kolonialisme sehingga membentuk anti-imperialisme. Dalam semua perjuangan ini, sifat teritorialitas dari kekuatan politik punya arti penting dalam memperkuat hegemoni AS sebagaimana juga sebelumnya memperkuat imperium-imperium Eropa di masa lalu. AS tidak meraih keunggulan imperialnya, sebagaimana ditegaskan oleh Ignatieff, lewat penolakan: keunggulan itu tercapai lewat penolakan terhadap penguasaan secara geografi dan pemanfaatan retorika universalitas untuk menyembunyikan keterlibatan-keterlibatan teritorialnya, terutama untuk menyembunyikan dari pandangan dalam negerinya sendiri ketimbang dari pandangan luar.

Yang keempat, dampak dari Perang Dingin dan keterlibatan di negara luar ini memperkuat posisi dari apa yang dirujuk secara tajam oleh Presiden Eisenhower dalam pidato akhir jabatannya sebagai 'kompleks industri militer' yang sangat berkuasa. Kompleks ini mengancam mendominasi politik AS lewat pengaruh luasnya dan mengancam hanya mengejar kepentingan-kepentingan dangkalnya sendiri lewat cara membesar-besarkan ancaman terhadap AS dan memanipulasi krisis-krisis eksternal sedemikian rupa sehingga bisa menciptakan suatu ekonomi perang yang permanen yang akan membuatnya semakin lebih berkuasa lagi. Untuk bisa bertahan hidup secara ekonomi, industri-industri pertahanan

membutuhkan adanya aktivitas perdagangan ekspor persenjataan yang semakin meningkat. Aktivitas ini memang memiliki peran fundamental dalam akumulasi kapital AS, namun juga menimbulkan proses militerisasi besar-besaran di seluruh negara di dunia.

Tahap kedua dari kekuasaan global kaum borjuis ini berakhir sekitar akhir tahu 1970 atau setelahnya. Berbagai problem menjadi penyebabnya. Yang pertama, terdapat problem klasik dari semua rezim imperium – yaitu jangkauan yang terlalu luas (*overreach*). Pengepungan terhadap (dan upaya untuk mensubversi) komunisme terbukti lebih mahal ketimbang yang diperkirakan oleh Amerika Serikat. Meningkatnya biaya-biaya konflik militer di Vietnam, dibarengi dengan aturan utama pelanggengan konsumerisme dalam negeri yang tiada henti – suatu kebijakan bedil dan roti – terbukti sangat tak mungkin untuk dipertahankan karena belanja-belanja militer hanya bisa menyediakan saluran-saluran jangka-pendek bagi surplus kapital dan tak banyak menghasilkan kapital yang dalam jangka panjang sesungguhnya dibutuhkan untuk bisa lepas dari kontradiksi-kontradiksi internal dalam akumulasi kapital. Respon yang segera muncul ialah dengan menggunakan kekuasaan *seigniorage* dan dengan mencetak lebih banyak dolar.[19] Hal ini kemudian berdampak menimbulkan tekanan-tekanan inflasi di seluruh dunia. Sebagai konsekuensinya, sebagaimana akan kita lihat dalam Bab 3, ialah suatu ledakan dalam jumlah kapital 'fiktif' yang beredar, gelombang kebangkrutan-kebangkrutan (dimulai dengan aset-aset yang berada di lingkungan yang telah terbangun dengan mapan), tekanan-tekanan inflasi yang tak terkendali, dan runtuhnya tatanan internasional yang telah menjadi fondasi dari super-imperialisme AS pasca Per-

19. Posisi penting dari seigniorage diuraikan oleh G. Carchedi dalam 'Imperialism, Dollarization and the Euro', dalam Leo Panitch and Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2002* (London: Merlin Press, 2001), hal. 153-74.

ang Dunia Kedua. Sementara itu, semakin meningkatnya kekuatan dari buruh yang terorganisir di seluruh negara inti dari sistem global meningkatkan belanja sosial maupun biaya upah, sehingga memangkas laba. Hasilnya ialah stagflasi. Kesempatan mendapatkan laba lenyap dan terjadilah suatu krisis overakumulasi kapital. Utang membuat banyak pemerintah tak bisa melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur fisik dan sosial dan ini menciptakan suatu krisis fiskal dalam negeri (yang memuncak dalam kebangkrutan secara mengejutkan kota New York pada tahun 1975). Di puncak semua itu, daya saing industri-industri Jepang dan Jerman Barat yang bangkit muncul sebagai tantangan, dan bahkan di beberapa area telah mampu mengungguli, dominasi produksi AS. Perlombaan dalam manufaktur telah memangkas salah satu kaki kunci dari hegemoni AS. Posisi ekonomi AS tampaknya tak lagi bisa dipertahankan. Surplus dolar mengalir ke pasar dunia dan seluruh arsitektur keuangan dan sistem Bretton Woods runtuh.

Hegemoni Neo-liberal, 1970-2000

Sistem dengan corak yang berbeda kemudian muncul, dan semua berjalan di bawah arahan AS. Emas tak lagi djadikan sebagai basis material dari nilai uang dan setelah itu dunia harus hidup dengan sistem moneter yang terdematerialisasi. Arus kapital uang, yang sejak sebelumnya bergerak bebas di seluruh dunia via pasar eurodolar (yaitu dolar yang beredar di luar Amerika Serikat yang bisa dengan mudah dipergunakan di seluruh dunia) terbebaskan sepenuhnya dari kontrol negara. Kolusi (yang sekarang telah terdokumentasikan) antara pemerintahan Nixon dan pemerintahan Saudi dan Iran untuk mendesak dinaikkannya harga minyak pada tahun 1973 menciptakan kerusakan yang lebih besar terhadap ekonomi Eropa dan Jepang ketimbang terhadap AS (yang pada saat itu tidak terlalu bergantung pada suplai minyak dari Timur Tengah). Bank-bank AS (dan bukannya IMF yang

merupakan agen yang lebih disukai oleh kekuatan-kekuatan kapitalis dunia) mendapatkan hak monopoli untuk memutar uang petrodolar ke ekonomi dunia, sehingga membuat pasar eurodolar kembali ke pangkuan AS.[20] New York menjadi pusat keuangan ekonomi dunia (dibarengi dengan deregulasi dalam negeri atas pasar keuangan, hal tersebut memungkinkan kota tersebut pulih dari krisis yang dialaminya dan berkembang sampai ke titik kemakmuran yang luar biasa dan konsumsi yang mewah di tahun 1990-an).

Karena terancam di ranah produksi, AS melakukan kounter dengan memperkuat hegemoninya di dalam sektor keuangan. Namun, agar sistem ini bisa bekerja secara efektif, pasar secara umum dan pasar kapital secara khusus harus dipaksa untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional (sebuah proses yang lambat yang membutuhkan kekuatan penekan yang besar dari AS dengan didukung oleh penggunaan pengungkit-pengungkit internasional seperti IMF dan oleh komitmen yang sama besarnya terhadap neo-liberalisme sebagai ortodoksi ekonomi yang baru). Hal ini juga menimbulkan pergeseran keseimbangan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan di tubuh kaum borjuis dari aktivitas-aktivitas produksi ke institusi-institusi kapital keuangan. Kekuatan kapital bisa digunakan untuk mendisiplinkan gerakan-gerakan kelas buruh. Muncullah kesempatan untuk melancarkan suatu serangan frontal terhadap kekuatan buruh dan untuk melemahkan peran institusi-institusi buruh dalam proses politik. Langkah pertama Presiden Reagan ialah menghancurkan kekuatan kolektif yang kuat dari pengendali udara (PATCO), dan hal ini menjadi isyarat peringatan buat gerakan serikat buruh bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama jika melakukan pemogokan. Muncul sebuah gelombang gerakan kelas buruh dimana-mana

---

20. P. Gowan, *The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World Dominance* (London: Verso, 1999).

yang berusaha untuk melanggengkan capaian-capaian yang telah berhasil mereka raih selama tahun 1960-an dan 1970-an. Jika menengok kembali masa-masa itu, kita bisa melihat hal ini sebagai suatu tindakan pembelaan untuk melanggengkan kondisi-kondisi dan hak-hak istimewa yang berhasil diraih di dalam dan di seputar semakin meluasnya reproduksi kapital dan negara kesejahteraan ketimbang merupakan suatu gerakan progresif yang berusaha menciptakan perubahan-perubahan transformatif. Untuk sebagian besar, tindakan pembelaan ini gagal. Pelemahan kekuatan buruh dan semakin merosotnya kondisi kelas pekerja di negara-negara kapitalis maju ini dibarengi dengan terciptanya suatu kaum proletariat yang besar dalam jumlahnya, terpisah-pisah dan tak terorganisir di banyak negara sedang berkembang. Hal ini melemahkan kekuatan dari tuntutan untuk menaikkan tingkat upah dan kondisi-kondisi buruh di berbagai negara. Armada kerja yang mudah dieksploitasi dan semakin mudahnya mobilitas produksi lintas geografis membukakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi pemanfaatan surplus kapital yang menghasilkan keuntungan. Hanya saja, tak lama kemudian, kebijakan ini memperburuk problem produksi surplus kapital. Pengangguran meningkat dan tingkat upah dan militansi kelas pekerja pun terkendali. Utang *overhang* oleh negara membukakan ruang kesempatan bagi aktivitas spekulatif yang pada gilirannya menjadikan kekuatan-kekuatan negara lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh keuangan. Ringkasnya, kapital keuangan menjadi pemain utama dalam fase hegemoni AS ini, dan kapital keuangan ini memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu kekuasaan pendisiplin atas gerakan-gerakan kelas buruh dan tindakan-tindakan negara, terutama ketika negara memiliki utang dalam jumlah yang besar.

Seluruh pergeseran ini tak akan berpengaruh apapun jika saja tak ada serangkaian pergeseran teknologi dan organisasi yang memungkinkan manufaktur menjadi jauh lebih lincah dan fleksibel. Semakin murahnya biaya transportasi, dibarengi dengan pergeseran-pergeseran politik pemerintah

di semua level menciptakan suatu iklim bisnis yang positif sehingga mampu mengimbangi biaya relokasi, dan hal ini semakin mendorong terjadinya mobilitas geografis dari kapital manufaktur dan meningkatkan jumlah kapital keuangan yang hiper-mobil. Sementara pergeseran-pergeseran ke arah kekuatan finansial menghadirkan dampak-dampak langsung yang besar buat Amerika Serikat, efek-efek dari mobilitas keuangan terhadap struktur industri AS cukup traumatik, jika bukannya katastrofik. Produksi di negara luar AS menjadi pilihan yang mungkin dilaksanakan dan keinginan untuk mengejar laba membuat produksi di negara luar AS itu semakin menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Gelombang demi gelombang deindustrialisasi telah memukul satu demi satu industri dan satu demi satu kawasan di dalam AS, mulai dari barang-barang bernilai tambah kecil (seperti tekstil) sampai selangkah demi selangkah merambah ke sektor bernilai tambah besar seperti baja dan galangan kapal sampai dengan impor-impor teknologi tinggi, terutama dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Bahkan Chrysler harus mendapatkan penalangan (yang efektifnya merupakan nasionalisasi untuk jangka waktu yang singkat) dari Pemerintah Federal AS agar tidak tutup. AS bersekongkol dalam melemahkan dominasinya di dalam manufaktur dengan membebaskan kekuatan-kekuatan keuangannya bergerak ke seluruh penjuru dunia. Meski demikian, AS mendapatkan keuntungan dengan membanjirnya barang-barang murah dari berbagai negara di dunia sehingga menjadi bahan bakar yang terus menggerakkan komsumerisme yang tiada henti yang merupakan komitmen AS. Ketergantungan AS pada perdagangan luar negeri semakin meningkat dan kebutuhan untuk membangun dan melindungi relasi-relasi perdagangan yang asimetris mengemuka sebagai suatu tujuan kunci dari kekuatan politik.

Pada tahun 1980 atau setelahnya, menjadi jelas bahwa manufaktur di Amerika Serikat hanylah salah satu kompleks di antara banyak kompleks manufaktur yang beroperasi di lingkungan global yang sangat kompetitif, dan

bahwa satu-satunya cara baginya untuk bisa bertahan hidup ialah dengan mencapai keunggulan (biasanya untuk sementara waktu) dalam produktivitas dan dalam desain produk dan pengembangan. Ringkasnya, manufaktur AS tak lagi hegemonik. Manufaktur AS butuh dukungan bantuan dari pemerintah (seperti dalam bentuk *Plaza Accord* pada tahun 1985 dimana pemerintah sepakat untuk mendepresiasi dolar terhadap yen untuk membuat ekspor-ekspor manufaktur AS menjadi lebih kompetitif – suatu taktik yang harus dibalik pada tahun 1990-an ketika manufaktur Jepang mengalami stagnasi). Beberapa sektor khusus – seperti agribisnis dan pertahanan – memang kebal dari perubahan yang terjadi, namun seluruh sektor yang lain terpaksa harus melakukan penyesuaian yang radikal dalam segala hal mulai dari teknik produksi sampai dengan hubungan perburuhan. Di wilayah-wilayah dimana perubahaan-perusahaan AS masih tetap kuat, perubahan ke arah produksi komponen atau bahkan seluruh aktivitas produksi ke negara luar AS semakin menempatkan kapasitas produktif berada di luar batas-batas Amerika Serikat bahkan meskipun repatriasi laba tetap memungkinkan kemakmuran mengalir ke Amerika Serikat. Di sektor-sektor industri yang lain, hak monopoli yang dimiliki atas dasar teknologi dengan hak paten dan undang-undang lisensi meringankan beban semakin menurunnya dominasi AS dalam produksi. AS semakin bergerak menuju suatu ekonomi rente dalam relasinya dengan negara-negara lain di dunia dan menjadi ekonomi jasa di dalam negerinya. Namun, kemamuran yang ada masih memungkinkan AS untuk melanjutkan konsumerisme yang selalu merupakan basis bagi terciptanya perdamaian sosial di dalam negeri AS.

Di level internasional, kapital keuangan terbukti jauh lebih mudah bergejolak dan berwatak predatoris. Berbagai tindakan devaluasi dan penghancuran kapital dijalankan (biasanya lewat program-program penyesuaian struktural IMF) sebagai sebuah obat terhadap ketidakmampuan untuk mem-

pertahankan kemulusan proses akumulasi kapital lewat perluasan reproduksi kapital. Dalam beberapa kasus, sebagai misal di Amerika Latin pada tahun 1980-an, seluruh ekonomi dijarah dan aset-aset mereka dikuasai oleh kapital keuangan AS. Di negara-negara lain, terjadi ekspor devaluasi. Serangan *hedge fund* terhadap mata uang Thailand dan Indonesia pada tahun 1997, didukung dengan kebijakan-kebijakan deflasioner yang kejam sebagaimana didesakkan oleh IMF, semakin mendorong terjadinya kebangkrutan di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Pengangguran dan kemiskinan jutaan orang menjadi akibatnya. Krisis itu juga menimbulkan suatu pelarian ke mata uang dolar sehingga mempertegas dominasi Wall Street dan menciptakan suatu boom yang luar biasa dalam nilai aset bagi orang-orang kaya di Amerika Serikat. Perjuangan kelas mulai berputar di seputar isu seperti penyesuaian-penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh IMF, aktivitas-aktivitas predatori dari kapital keuangan dan hilangnya hak-hak akibat privatisasi. Sikap anti-imperialisme mulai bergser ke arah antagonisme kepada agen-agen utama aktivitas finansialisasi – terutama sekali IMF dan Bank Dunia.

Namun, krisis utang di berbagai negara (dua pertiga anggota IMF mengalami krisis keuangan setelah 1980, dan beberapa di antaranya mengalami lebih dari dua kali krisis) ini bisa dimanfaatkan oleh AS untuk mereorganisasi relasi-relasi produksi sosial di masing-masing negara sedemikian rupa sehingga menguntungkan penetrasi lebih jauh dari kapital AS.[21] Rezim-rezim keuangan dalam negeri, pasar-pasar produk dalam negeri dan perusahaan-perusahaan di berbagai negeri yang maju pesat pun menjadi terbuka untuk diambil alih oleh perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang atau Eropa. Rendahnya laba di daerah-daerah inti karenanya bisa diimbangi dengan lebih tingginya laba yang bisa diperoleh dari

21. *Ibid.* 49, mengenai frekuensi dari krisis utang.

luar negeri. Apa yang saya sebut sebagai 'akumulasi lewat penjarahan' (*accumulation by disposession*) (lihat Bab 4) semakin menjadi fitur sentral dalam kapitalisme global (dengan privatisasi sebagai salah satu elemen kuncinya). Resistensi di ranah ini pun semakin menjadi sentral dalam gerakan anti-kapitalis dan anti-imperialis ketimbang perjuangan-perjuangan buruh yang biasanya timbul akibat perluasan reproduksi kapital,.

Meski tersentralisasi dalam kompleks Wall Street-Departemen Keuangan AS, namun sistem ini memiliki banyak aspek multilateral. Pusat-pusat keuangan di Tokyo, London, Frankfurt dan banyak tempat lain ambil bagian dalam aksi ini ketika proses finansialisasi meluas ke seluruh dunia dan semakin terfokus pada sekelompok pusat keuangan yang tersusun secara hirarkis dan pada elit bankir transnasional, pialang saham dan *financier*. Hal ini dibarengi dengan munculnya korporasi-korporasi kapitalis transnasional yang, meski memiliki basis di satu atau lebih negara-bangsa, bertebaran cabangnya di seluruh dunia dengan cara-cara yang tak terpikirkan dalam fase imperialisme sebelumnya (bandingkan dengan *thrust* dan kartel-kartel yang disebutkan oleh Lenin dan Hilferding yang kesemuanya masih sangat erat terikat dengan negara-bangsa tertentu). Inilah dunia yang berusaha dikelola oleh Gedung Putihnya Clinton dengan Menteri Keuangannya yang punya kekuasaan besar, Robert Rubin, yang dulunya merupakan spekulator Wall Street, lewat multilateralisme yang tersentralisir (yang disimbolkan dengan apa yang disebut sebagai 'Konsensus Washington' pada pertengahan tahun 1990-an). Multilateralisme ini semakin terorganisir di seputar proses regionalisasi ekonomi global dengan suatu struktur triadik yang terdiri atas Amerika Utara (NAFTA), Eropa (Uni Eropa), dan konfederasi-konfederasi kepentingan yang longgar yang terbangun di seputar relasi-relasi perdagangan di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang dominan. Dengan aturan-aturan neo-liberal dari pasar

keuangan yang terbuka dan semakin terbukanya akses, tampaknya kecil kemungkinan konfigurasi-konfigurasi regional ini jatuh ke dalam autarki yang saling bersaingan yang telah terbukti sangat destruktif dalam periode sebelum Perang Dunia Kedua dan yang telah memainkan suatu peran penting dalam menciptakan basis bagi perang antar-kapitalis. Namun, dalam struktur triadik ini, tampak jelas bahwa AS masih tetap memegang kartu utama karena pasar konsumennya yang sangat besar, karena kekuatan finansialnya yang luar biasa berlimpah, dan karena kekuatan militernya yang tak tertandingi.

Dan di atas semua itu, berakhirnya Perang Dingin telah melenyapkan ancaman terhadap akumulasi kapital global. Kaum borjuis secara kolektif telah menjadi pewaris dunia. Fukuyama meramalkan bahwa akhir sejarah telah tiba. Tampaknya, untuk sesaat, Lenin keliru dan Kautsky benar – suatu ultra-imperialisme yang didasarkan pada suatu kolaborasi 'damai' di antara semua kekuatan kapitalis besar (yang sekarang disimbolisasikan dengan G7, yang diperluas menjadi G8 untuk memasukkan Rusia, meski kepemimpinan hegemonik masih tetap dipegang oleh AS) menjadi kemungkinan nyata – dan bahwa karakter kosmopolitan dari kapital keuangan (yang disimbolisasikan dengan pertemuan-pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos) menjadi ideologi dasarnya.[22]

Namun, adalah keliru jika beranggapan bahwa kekuatan keuangan ini, meski mengagumkan, adalah sesuatu yang maha berkuasa dan mampu memaksakan kehendaknya tanpa hambatan. Menjadi kodrat dari finansialisasi untuk selalu rentan dalam relasinya dengan produksi nilai dalam aktivitas industri dan pertanian. Di tengah-tengah semua aksi perampasan dan devaluasi, muncul kompleks-kompleks produksi in-

---

22. P. Anderson, 'Internationalism: A Breviary', New Left Review, 14 (Mar. 2002), hal. 20, mencatat bagaimana 'visi seperti pandangannya Kautsky' harus dilampaui dan bahwa teoretisi-teoretisi liberal, seperti Robert Keohane, telah menyinggung koneksi tersebut.

dustri yang baru dan penting. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, misalnya, kompleks-kompleks regional seperti delta Sungai Mutiara (Guangdong) di Cina atau ekonomi-ekonomi yang dikelola di bawah arahan politik seperti Singapura dan Taiwan, bukan saja terbukti lincah beradaptasi terhadap tekanan-tekanan finansial, namun juga mampu menciptakan suatu kekuatan oposisional yang mampu menunjukkan kerentanan dari kapital keuangan – yang sekarang sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat serta di Eropa dan Jepang – terhadap produksi riil. Fakta bahwa banyak dari kompleks-kompleks produksi industri ini yang terkonsentrasi secara regional di suatu negara, atau bahkan dalam beberapa kasus antar negara, sangat menarik karena alasan yang akan kita bahas dalam Bab 3. Alur-alur serangan balik yang halus melawan hegemoni keuangan Amerika Serikat muncul di sela-sela dunia produksi. Dan tanda dari hal tersebut ialah semakin menumpuknya surplus neraca perdagangan, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Hanya saja, daur ulang surplus-surplus ini kembali ke sistem keuangan menjadikan seolah-olah Wall Street masih tetap menjadi pusat operasi dunia keuangan. Karena itu, meski ada fase-fase (seperti di tahun 1980-an) ketika hegemoni Amerika Serikat dipersoalkan secara terbuka di dalam negeri maupun di luar negeri, pada akhir tahun 1990-an, sebagian besar keraguan tersebut lenyap. Keamanan Amerika Serikat dan dominasi keuangannya dalam urusan dunia masih terjamin. Boom dalam nilai-nilai aset di dalam negeri Amerika Serikat dan munculnya suatu 'ekonomi baru' yang terbangun di seputar capaian produktivitas dan di seputar sekelompok perusahaan dot.com membuat ekonomi AS tumbuh dengan cukup cepat sehingga membawa dunia ke tingkat akumulasi kapital yang layak. Konsumerisme, yang merupakan *golden rule* bagi terciptanya ketentraman dalam negeri di Amerika Serikat, mengalami boom sampai ke level yang mengejutkan di Amerika Serikat maupun di pusat-pusat kapitalisme lanjut dunia.

Sistem inilah yang sekarang tengah mengalami kesulitan-kesulitan yang serius. Sebagaimana pada tahun 1973-1975, ada beragam sebabnya. Kali ini fragmentasi kekuatan yang mudah goyah dan kacau saling berkonflik di dalam kehidupan ekonomi-politik sehingga sulit untuk melihat dengan jernih apa yang sesungguhnya terjadi (terutama di sektor keuangan) di balik semua selubung asap ini. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh krisis 1997-1998 bahwa pusat utama dari surplus kapasitas produksi terletak di Asia Timur dan Asia Tenggara (dan bahwa upaya untuk menciptakan devaluasi diarahkan terutama ke kawasan tersebut), pemulihan yang cepat dari sebagian kapitalisme Asia Timur dan Asia Tenggara (terutama Korea Selatan) telah menjadikan problem kelebihan kapasitas (overakumulasi) kembali mengemuka sebagai persoalan global. Keruntuhan dari 'ekonomi baru' dalam bentuk perusahaan-perusahaan dot.com di Amerika Serikat yang banyak dipuji-puji, diiringi dengan skandal-skandal pembukuan yang secara dramatis memperlihatkan bahwa kapital 'fiktif' bisa dengan sangat mudah tak mampu ditebus, bukan saja telah menggerogoti kredibilitas dari Wall Street, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai relasi antara kapital keuangan dan produksi. Muncullah ancaman devaluasi kapital secara besar-besaran, dan dengan jatuhnya semua nilai aset, ada tanda-tanda nyata bahwa ancaman tersebut tengah menjadi kenyataan (yang paling dramatis ialah yang berkaitan dengan nasib dana pensiun, yang semakin sulit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya).

Arena-arena baru bagi akumulasi kapital yang menguntungkan (seperti Cina) harus dibuka, atau jika tidak, akan muncul siklus baru devaluasi kapital. Persoalannya kemudian ialah: siapakah yang akan menanggung pukulan terberat dari putaran baru devaluasi tersebut? Di mana devaluasi akan menancapkan luka terdalamnya? Tren-tren ke arah 'regionalisasi' dalam ekonomi global kemudian terlihat sangat mencemaskan. Kompetisi geopolitik yang sedemikian de-

struktif dalam tahun 1930-an mulai bergema kembali. Pengabaian AS terhadap semangat jika bukannya aturan tertulis dari aturan-aturan WTO terhadap proteksionisme lewat penetapan tarif terhadap impor baja pada tahun 2002 menjadi tanda yang sama sekali tak menyenangkan. Meledaknya gelembung spekulatif (*speculative bubble*) memperlihatkan kerentanan Amerika Serikat terhadap devaluasi. Terjadinya resesi, yang terlihat nyata mulai terjadi di tahun 2001, setelah satu dekade atau lebih periode konsumerisme yang subur dan berlimpah secara spektakuler (jika bukannya 'irasional'), memberikan bukti lebih jauh dari kerentanan tersebut bahkan sebelum keruntuhan sistem tersebut akibat peristiwa 9/11. Apakah *golden rule* bahwa arus konsumerisme harus secara terus-menerus diperbesar di Amerika Serikat telah gagal?

Sebab utama dari ketidakstabilan terletak dalam kemerosotan yang cepat dalam situasi neraca keseimbangan di Amerika Serikat. 'Ledakan impor yang sama yang telah mendorong ekonomi dunia' selama tahun 1990-an, tulis Brenner, 'telah membawa neraca perdagangan dan keuangan AS mengalami defisit ke tingkat yang terendah sepanjang sejarah, sehingga menimbulkan pertumbuhan utang (*liabilities*) luar negeri AS yang belum pernah dialami sebelumnya sepanjang sejarah' dan menciptakan 'kerentanan ekonomi AS yang paling tinggi sepanjang sejarahnya terhadap arus pelarian kapital (*flight of capital*) dan terhadap runtuhnya nilai dolar'.[23] Meski demikian, kerentanan ini berlaku dua sisi. Jika pasar AS runtuh, maka ekonomi dari negara-negara yang bergantung pada pasar tersebut akan tenggelam karena kelebihan kapasitas produksi akan jatuh bersama dengan runtuhnya pasar AS tersebut. Kesediaan para bankir bank sentral dari negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Taiwan untuk memberikan pinjaman kepada AS untuk menutupi

23. R. Brenner, The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy (London: Verso, 2002), hal. 3.

defisit-defisitnya memiliki elemen kepentingan-diri yang kuat: dengan pinjaman itu, mereka bisa mendanai konsumerisme AS yang merupakan pasar bagi produk-produk mereka. Mereka sekarang bahkan juga mendanai kegiatan perang AS.

Namun, hegemoni dan dominasi Amerika Serikat sekali lagi berada di bawah ancaman, dan kali ini ancaman itu tampaknya lebih akut daripada sebelumnya. Ancaman itu berakar pada terlalu besarnya ketergantungan terhadap kapital keuangan sebagai suatu cara untuk menegaskan hegemoni. Dalam kerangka historis, tegas Arrighi (mengikuti pendapat Braudel), ekspansi-ekspansi keuangan mengindikasikan 'bukan saja telah matangnya suatu tahap perkembangan tertentu dalam ekonomi dunia kapitalis, namun juga telah dimulainya suatu tahap baru'.[24] Jika proses finansialisasi merupakan semacam awal dari gerak peralihan kekuatan dominan dari satu pemegang hegemoni ke pemegang hegemoni lainnya (sebagaimana yang terjadi dalam sejarah), maka gerak peralihan AS ke finansialisasi pada tahu 1970-an jelas merupakan suatu langkah yang nyata-nyata menghancurkan dirinya sendiri (*self-destructive*). Defisit (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) tak boleh dibiarkan berlangsung di luar kontrol secara tanpa batas, dan kemampuan dan kesediaan dari negara-negara lain (terutama negara-negara di Asia) untuk mendanai defisit tersebut tidaklah tak terbatas. Besarnya dukungan terhadap AS sendiri cukup mengejutkan, naik sampai $2,3 milyar per hari pada awal tahun 2003. Jika negara lain yang memperlihatkan kondisi ekonomi makro seperti yang dialami oleh AS itu, maka negara tersebut sekarang pastilah telah mengikuti prosedur penyesuaian struktural dan pengencangan ikat pinggangnya IMF. Namun karena IMF itu tak lain dari Amerika Serikat sendiri, maka apa yang dialami AS tidak membuatnya harus mengikuti prose-

24. Arrighi dan Silver, *Chaos and Governance*, hal. 31-3.

dur tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Gowan: 'Kapasitas Washington untuk memanipulasi harga dolar dan mengeksploitasi dominasi keuangan internasional Wall Street memungkinkan otoritas-otoritas AS untuk menghindar dari apa yang harus dilakukan oleh negara-negara yang lain: yaitu kewajiban untuk mengawasi neraca pembayaran; kewajiban untuk menyesuaikan ekonomi dalam negeri untuk menjamin tingginya level tabungan dan investasi dalam negeri; kewajiban untuk mengawasi tingkat utang publik dan swasta; kewajiban untuk menjamin suatu sistem intermediasi keuangan dalam negeri untuk memastikan kuatnya perkembangan sektor produktif dalam negeri.' Ekonomi AS memiliki 'suatu cara untuk melepaskan diri dari semua kewajiban tersebut' dan 'sebagai hasilnya, 'semua tolok ukur normal dari akuntansi nasional kapitalis' telah menjadi 'sangat terdistorsi dan tak stabil'.[25]

Kekuatan kompleks Wall Street-Departemen Keuangan-IMF memiliki hubungan simbiotik dengan dan parasitik terhadap sistem finansial global yang diberlakukan secara paksa mengikuti apa yang disebut sebagai konsensus Washington dan semakin terelaborasi lewat penciptaan arsitektur finansial internasional yang baru. Situasi ini, tulis Soederberg, jelas berarti 'suatu aksi penjajahan oleh negara AS', meskipun hal tersebut juga melayani kepentingan-kepentingan 'seluruh kaum borjuis transnasional'.[26] Meski demikian, tindakan pendisiplinan, bahkan penghancuran, negara-negara 'pembangunan' di Asia Timur dan Asia Tenggara telah memunculkan keinginan kuat dari berbagai negara untuk menolak sistem finansial tersebut, sebagaimana yang

25. Gowan, The Global Gamble, hal. 123.

26. S. Soederberg, 'The New International Financial Architecture: Imposed Leadership and "Emerging Markets"', dalam Panitch dan Leys (ed.), Socialist Register 2002, hal. 175-92.

dilakukan oleh Malaysia ketika negeri itu dengan cepat, dan dengan berhasil, mengabaikan aturan-aturan neo-liberal, menolak tunduk pada disiplin IMF dan pada kontrol yang dipaksakan atas kapital, sesuatu yang baru muncul kembali sejak tahun 1960-an. Memang masih belum jelas sejauh mana langkah itu akan berkembang menjadi aliansi-aliansi regional yang mampu menggoyahkan jantung konsensus Washington dan menggerogoti struktur arsitektur keuangan yang baru yang menguntungkan Amerika Serikat. Juga masih belum jelas apakah AS kemudian akan juga mengikuti aturan-aturan yang ada, sebagaimana diperlihatkan oleh penetapan AS mengenai tarif impor baja. Dalam konteks ini, menarik untuk diingat bahwa ratifikasi Senat AS terhadap kesepakatan WTO diambil dengan syarat bahwa AS bisa mengabaikan dan menolak setiap aturan WTO yang dinilai tidak fair bagi kepentingan-kepentingan AS (suatu sikap yang mengandaikan bahwa AS memiliki hak untuk menjadi hakim maupun juri).

Sebagai puncak dari semua itu, resistensi ke arah dan kebencian terhadap kekuatan kompleks Wall Street-Departemen Keuangan-IMF muncul di mana-mana. Suatu gerakan anti-globalisasi sedunia (yang berbeda bentuknya dari perjuangan kelas yang muncul di dalam proses perluasan reproduksi kapital) tengah bergerak menjadi suatu gerakan globalisasi alternatif dengan dukungan akar rumput yang besar. Gerakan-gerakan populis menentang hegemoni AS oleh kekuatan-kekuatan yang sebelumnya patuh, terutama di Asia (Korea Selatan menjadi kasus yang menonjol) selain juga di Amerika Latin, mengancam terjadinya transformasi resistensi akar rumput itu menjadi serangkaian resistensi yang diarahkan oleh negara, jika bukannya menjadi resistensi nasionalis, terhadap hegemoni AS. Di bawah kondisi-kondisi ini, anti-imperialisme mulai mengambil warna yang berbeda, dan hal ini pada gilirannya akan membantu memperjelas pandangan Amerika Serikat mengenai proyek imperialis macam

apa yang harus dijalankan jika posisi hegemoniknya ingin dipertahankan. Jika hegemoni melemah, maka ada bahaya peralihan ke taktik-taktik yang lebih koersif sebagaimana yang kita sekarang saksikan di Irak.

Pilihan-pilihan

Pilihan-pilihan yang tersedia buat Amerika Serikat terbatas. Meski Arrighi dan kolega-koleganya memperhitungkan bahwa tak ada ada tantangan eksternal yang serius terhadap AS, namun mereka berhati-hati dalam menarik kesimpulan bahwa AS akan memiliki kapabilitas-kapabilitas yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh Inggris seabad yang lalu untuk mengubah hegemoninya yang tengah merosot menjadi dominasi yang bersifat eksploitatif. Jika sistem yang ada pada akhirnya runtuh, maka hal itu pertama-tama disebabkan oleh resistensi AS untuk melakukan penyesuaian dan akomodasi. Dan sebaliknya, penyesuaian dan akomodasi AS terhadap kekuatan ekonomi yang sedang menanjak dari kawasan Asia Timur merupakan suatu syarat esensial bagi suatu transisi yang bersifat non-katastrofik ke arah suatu tatanan dunia yang baru.[27]

Pergeseran kebijakan pemerintahan Bush ke arah unilateralisme, ke arah koersi ketimbang penerimaan, ke arah visi imperial yang jauh lebih terbuka, dan ke arah ketergantungan terhadap kekuatan militernya yang tak tertandingi, mengindikasikan suatu pendekatan beresiko tinggi dalam usahanya untuk mempertahankan dominasi AS, yang hampir pasti akan dijalankan lewat komando militer atas sumber-sumber minyak global. Karena pergeseran ini dilakukan di tengah-tengah tanda-tanda lenyapnya dominasi di ranah produksi dan sekarang (meski masih belum jelas) di ranah keuangan, muncul godaan kuat untuk beralih ke dominasi yang bersifat eksploitatif. Entah hal ini kemudian akan meng-

27. Arrighi dan Silver, *Chaos and Governance*, hal. 288-9.

arah atau tidak ke suatu keruntuhan yang bersifat katastrofik terhadap sistem (barangkali dengan kembali ke skenario Lenin mengenai kompetisi yang tajam di antara blok-blok kekuatan kapitalis), hal tersebut masih sulit untuk dibayangkan, apalagi diprediksi. Meski demikian, AS bisa mengurangi, jika bukannya berpaling dari, jejak langkah imperialisnya dengan melakukan suatu redistribusi kekayaan yang bersifat massif di dalam negeri dan melakukan suatu pengarahan kembali arus kapitalnya ke sektor produksi dan pembaharuan kembali infrastruktur-infrastruktur fisik dan sosial (perbaikan-perbaikan besar-besaran dalam pendidikan publik dan perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang rusak bisa menjadi awal yang bagus). Suatu strategi industri untuk merevitalisasi sektor manufaktur yang masih bernilai juga akan bisa membantu. Jika strategi itu bisa berjalan begitu lama, maka strategi itu juga akan menimbulkan suatu reorganisasi internal dalam relasi-relasi kekuasaan kelas dan langkah-langkah transformatif yang mempengaruhi relasi-relasi sosial semacam yang pernah ditolak secara sistematis untuk dipertimbangkan oleh Amerika Serikat sejak Perang Saudara. Konsumerisme swasta yang disubsidi oleh negara akan digantikan oleh proyek-proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan publik. Namun hal ini mengharuskan adanya defisit keuangan yang lebih besar lagi dan/atau penetapan pajak yang lebih tinggi lagi maupun besarnya pengaturan oleh negara, dan inilah yang persis ditolak mentah-mentah oleh kekuatan-kekuatan kelas yang dominan di dalam AS; setiap politisi yang mengusulkan sebuah paket seperti itu hampir pasti akan dikritik habis-habisan oleh pers kapitalis dan ideolog-ideolog mereka, dan hampir pasti akan kalah dalam pemilu karena harus berhadapan dengan kekuatan uang yang maha berlimpah. Namun ironisnya, suatu serangan balik yang massif di dalam negeri AS maupun di dalam negeri negara-negara kapitalisme inti lainnya (terutama di Eropa) melawan politik neo-liberalisme dan pemangkasan belanja-belanja negara dan sosial bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan kapitalisme di

dalam negeri dari tendensi-tendensi menghancurkan-diri-sendiri dan rentan krisisnya di masa-masa kini. Memang tak banyak program '*new deal*' yang sungguh-sungguh baru yang bisa dijalankan, dan hal itu pun sama sekali tak menjamin bahwa hal tersebut akan bisa benar-benar berfungsi di tengah-tengah berlimpahnya kelebihan kapasitas di dalam sistem global. Mungkin kita bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran dari tahun 1930-an: ada sangat sedikit bukti bahwa 'New Deal'-nya Roosevelt telah memecahkan problem Depresi. Dibutuhkan perang antar negara kapitalis untuk membuat strategi-strategi teritorial berfungsi kembali sehingga menjadikan ekonomi kembali ke jalur kestabilan keberlangsungan dan penyebarluasan akumulasi kapital.

Yang lebih merupakan bunuh diri politik di dalam negeri AS ialah usaha untuk memaksakan sikap disiplin-diri sebagaimana program pengencangan ikat pinggang yang biasanya ditetapkan oleh IMF kepada negara-negara lain. Setiap upaya dari kekuatan-kekuatan eksternal untuk berbuat demikian (sebagai misal, lewat *flight capital* dan keruntuhan nilai dolar, jelas akan mengundang suatu respon politik, ekonomi, dan bahkan militer. Sulit untuk dibayangkan bahwa AS akan bisa menerima secara damai dan beradaptasi dengan pertumbuhan fenomenal Asia Timur dan mengakui, sebagai yang diharapkan oleh Arrighi, bahwa kita tengah berada di tengah-tengah suatu transisi besar ke arah Asia sebagai pusat hegemonik dari kekuatan global. Merupakan suatu kemustahilan bahwa AS akan dengan tenang dan penuh damai mengucapkan selamat tinggal atas posisinya sebagai pemegang hegemoni global. Namun bagaimanapun, pergeseran yang terjadi pasti akan menimbulkan suatu reorientasi yang radikal – dan beberapa tanda dari hal ini (sebagaimana akan kita lihat dalam Bab 3) telah muncul – dalam tubuh kapitalisme Asia Timur dari bergantung kepada pasar AS menjadi pengembangan suatu pasar dalam negeri di Asia sendiri. Penarikan secara berangsur-angsur dana dari AS akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat merusak bagi AS. Se-

mentara utang yang terus meningkat jelas merupakan suatu cara yang membahayakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari konsumerisme di dalam negeri AS, apalagi untuk membiayai perang. Pelajaran dari krisis tahun 1973-1975 ialah bahwa pada suatu titik tertentu, logika kapitalistik akan berkuasa kembali di dalam negeri AS dan strategi tongkat dan wortel akan semakin tak mungkin untuk dijalankan.

Dalam konteks inilah kita bisa mengerti bahwa pemerintahan Bush mengandalkan diri pada kekuatan otot militernya karena memang hanya itulah kekuatan absolut yang tersisa untuk dimilikinya. Perbincangan terbuka mengenai imperium sebagai suatu opsi politik bisa ditebak dilakukan dengan menyembunyikan kegiatan penghisapan upeti dari negara-negara lain di dunia dengan berkedok retorika memberikan perdamaian dan kebebasan buat semua bangsa. Kontrol atas suplai minyak menjadi suatu cara yang tepat untuk mengkounter pergeseran-pergeseran kekuasaan – baik ekonomi maupun militer – yang tengah terancam di dalam ekonomi global. Situasi yang ada saat ini memunculkan aroma busuk akan berulangnya kembali apa yang pernah terjadi pada tahun 1973 karena saat ini Eropa dan Jepang, maupun Asia Timur dan Asia Tenggara (sekarang semakin menguat dengan masuknya Cina), akan semakin lebih bergantung pada minyak Teluk ketimbang Amerika Serikat. Jika AS berhasil merekayasa penggulingan baik Chavez maupun Saddam, jika AS berhasil menstabilisasi atau mereformasi suatu rezim Saudi mengingat sekarang rezim itu berdiri di atas tanah pemerintahan otoritarian yang rapuh (dan selalu di bawah bahaya jatuh ke tangan Islam radikal), jika AS bisa bergerak (dan kelihatannya hal ini mungkin) dari Irak ke Iran dan mengkonsolidasikan posisinya di Turki dan Uzbekistan dan mengkonsolidasikan kehadiran strategisnya terkait dengan cadangan minyak Cekungan Kaspia (yang juga sangat ingin dimasuki oleh Cina), maka AS, lewat kontrol ketatnya atas keran minyak global, mungkin bisa berharap

akan bisa mempertahankan kontrol efektifnya atas ekonomi global dan mengamankan dominasinya selama limapuluh tahun mendatang. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman yang telah dikutip dalam Pendahuluan, hal ini bergantung pada apakah AS bisa mempersuasi dunia bahwa dia memang bertindak dalam suatu peran sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian untuk membangun suatu kekuatan kolektif dengan bertindak sebagai penjamin suplai minyak global terhadap semua, atau apakah dia bertindak hanya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri demi untuk mengamankan posisinya sendiri dengan mengorbankan negara-negara lain. Ringkasnya, apakah AS akan mendasarkan dominasinya lewat koersi atau lewat kepemimpinan berbasis hegemoni? Taktik yang mungkin diambil ialah mencoba menyelubungi opsi yang terakhir itu dengan topeng opsi yang pertama. Namun kegagalan untuk menghimpun dukungan internasional secara penuh dalam invasi terhadap Irak menunjukkan bahwa negara di dunia telah curiga atas motivasi-motivasi AS.

Bahaya-bahaya yang dihadapi AS dengan menerapkan strategi ini di kawasan Teluk sungguh besar. Resistensi akan muncul dengan hebat, belum lagi dari Eropa dan Asia, serta juga dari Rusia dan Cina. Keengganan untuk memberikan dukungan kepada invasi militer AS ke Irak di dalam PBB, terutama oleh Prancis, Rusia dan Cina (yang memiliki akses ke sumber eksploitasi minyak Irak selama tahun 1990-an) membuktikan poin tersebut. Dan dinamika internal dalam perjuangan-perjuangan anti-Amerika di kawasan Teluk tak bisa ditebak karena begitu kompleksnya. Potensi destabilisasi di seluruh kawasan yang merentang mulai Pakistan sampai dengan Mesir sungguh besar. Pandangan takabur bahwa seluruh struktur kekuasaan politik dan organisasi teritorial di kawasan tersebut – yang diciptakan secara semena-mena oleh Inggris dan Prancis sebagai kelanjutan dari kesepakatan Versailles – bisa direka ulang dan distabilisasi di bawah kepemimpinan AS dan sekutunya, merupakan opsi yang ter-

lalu luas dampaknya untuk dipertimbangkan (meski ada ahli-ahli strategi di dalam pemerintahan AS yang percaya bahwa hal tersebut mungkin untuk dilakukan).

Dan di sinilah AS memiliki posisi untuk memainkan kartu terkuatnya – yaitu dominasi militer – dan melakukannya secara paksa jika perlu. Kita tahu betul, dari dokumen-dokumen rencana pertahanan yang telah dikeluarkan satu dekade yang lalu atau lebih, strategi politik apakah yang terlibat dalam ranah ini. Yaitu untuk mempertahankan keunggulan militer dengan biaya apapun dan untuk melemahkan dan menentang munculnya setiap rival adidaya. Penyebaran senjata pemusnah massal jenis apapun akan dicegah, dan AS harus bersiap untuk menggunakan kekuatan penangkalnya (*pre-emptive*) jika perlu untuk mencapai tujuan tersebut. Selama masa-masa pemerintahan Clinton, strategi ini diterjemahkan ke dalam suatu kapasitas aktif untuk memerangi dua perang regional pada saat yang bersamaan (dan contoh-contoh teladannya untuk tujuan perencanaan di tahun 1995 ialah Irak dan Korea Utara). Namun doktrin Cheney-Wolfowitz, yang disusun pada tahun-tahun pertama masa pemerintahan Bush dan terkonsolidasi di dalam proyek Abad Amerika Yang Baru (yang menariknya mengulang langkah Luce untuk menyembunyikan watak teritorialitas dari imperium dengan kabut konseptual 'abad'), bergerak lebih jauh. Aliansi-aliansi permanen (seperti NATO) diabaikan (karena terlalu menghambat) dan koalisi-koalisi *ad hoc* dibangun berdasarkan basis kasus per kasus. Dengan cara ini, AS tak lagi terikat oleh pandangan-pandangan sekutunya. AS mencadangkan kesediaan mendengarkan pandangan-pandangan itu hanya jika perlu ketika perang militer memang sungguh sulit. AS secara terbuka mengklaim hak untuk melakukan serangan *pre-emptive* untuk menghancurkan seragan-serangan nuklir, biologis atau kimia, untuk melindungi akses ke bahan-bahan mentah strategis kunci (seperti minyak) dan untuk melindungi diri dari serangan-serangan teroris atau ancaman-acaman lainnya

(seperti kelumpuhan ekonomi). Apa yang menarik dari dokumen-dokumen strategi pertahanan dari tahun 1991-1992 ini ialah bagaimana dekatnya resep-resep mereka dengan apa yang sekarang dijalankan. Armstrong, setelah menyelidiki secara teliti dokumen-dokumen tersebut, menyimpulkan:

> Rencana Amerika Serikat ialah untuk menguasai dunia. Tema yang dikatakannya secara terbuka ialah unilateralisme, namun pada dasarnya ceritanya ialah mengenai dominasi. Merupakan kebutuhan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan keunggulan militernya yang sangat besar dan mencegah munculnya rival-rival baru yang akan bisa menjadi penantangnya di panggung dunia. Merupakan kebutuhan bagi Amerika Serikat untuk mendominasi baik kawan maupun musuh. Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat harus lebih kuat, atau paling kuat, namun ini berarti bahwa Amerika Serikat harus kuat secara absolut.[28]

Ironinya, sebagaimana dicatat oleh Armstrong, ialah bahwa dengan membantu meruntuhkan Uni Soviet, AS sekarang tengah menjalankan politik 'imperium jahat' yang justru dicela dan ditentang. AS haruslah, sebagaimana dikatakan secara gamblang oleh Colin Powell, 'menjadi penguasa tunggal dunia' (*to be the bully on the block*). Seluruh negara lain akan bisa menerima hal itu dengan senang, lanjutnya dengan penuh keyakinan, karena AS 'bisa dipercaya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan itu.'

Di sini, ada ironi lain yang masuk akal: jika imperium Soviet memang benar-benar telah diruntuhkan lewat strategi membuat berantakan ekonomi Soviet dengan perlombaan senjata, maka tidakkah AS dalam ambisinya mengejar dominasi militer akan menggerogoti fondasi-fondasi ekonomi dari kekuasaannya sendiri? Komitmen-komitmen militer regional AS memang sungguh luar biasa besar dan terus meningkat. AS telah menghabiskan $4-5 milyar set-

---

28. D. Armstrong, 'Dick Cheney's Song of America: Drafting a Plan for Global Dominance', *Harper's Magazine*, 305 (Oct. 2002), hal. 76-83.

ahun untuk melakukan patroli di kawasan Teluk sebelum pembangunan militer dimulai. Pemerintahan Bush telah mengajukan permintaan hampir $75 milyar untuk perang, dan itu hanya untuk sampai September 2003. Total biaya kemungkinan tak kurang dari $200 milyar, menurut estimasi-estimasi yang masuk akal, dan ada kemungkinan muncul bencana yang tak terduga, seperti keterpecahan regional dan meluasnya perang saudara di kawasan Teluk. Dan rencana-rencana belanja militer 'normal' AS setara dengan anggaran milik seluruh negara di dunia. Bahaya terlalu jauhnya jangkauan (*overreach*) sungguh serius, terutama semenjak defisit-defisit anggaran federal semakin membengkak dan membengkak lagi dalam lansekap keuangan dan krisis anggaran di level negara bagian dan lokal sehingga memakan banyak porsi anggaran untuk tunjangan layanan publik. Karena itu menjadi meragukan apakah aturan emas yang telah diikuti sejak Roosevelt – yaitu bahwa belanja untuk tujuan-tujuan imperial di luar negeri tak boleh mengacaukan spiral konsumerisme di dalam negeri yang tiada henti – akan bisa tetap dipertahankan. AS bukan saja harus mengorbankan darah yang sangat berharganya untuk minyak untuk mempertahankan hegemoninya yang tengah merana; AS juga harus mengorbankan seluruh hidupnya juga. Logika kapitalistik dari kekuasaan akan menyesali logika teritorial yang sekarang tengah mencabik-cabiknya.

Pemegang Hegemoni Regional dan Tandingan

Struktur regional yang triadik di dalam ekonomi global, dengan Amerika Utara dianggap sebagai berada di puncaknya, tidak dengan sendirinya merupakan suatu konfigurasi yang stabil. Tatanan formal yang terbentuk di dalam Uni Eropa tampaknya menawarkan kemungkinan terciptanya suatu ekonomi Eropa yang terintegrasi setidaknya sama besar dan sama kuatnya dengan ekonomi Amerika Serikat. Setidaknya, hal ini menjadi tanda dari terbentuknya suatu pemegang hegemon regional dan barangkali munculnya suatu

pesaing riil terhadap Amerika Serikat.[29] Logika kapitalis dalam UE, meski sama sekali tidak spektakuler, tampaknya bekerja dengan cukup baik. Kesalingterkaitan dan relasi-relasi jaringan kerja di dalam ekonomi Eropa itu berkembang baik dan terkonsolidasi di seluruh wilayah Eropa. Transisi menuju suatu mata uang tunggal dicapai relatif tanpa hambatan, dan potensi bagi euro untuk menantang dolar sebagai pilihan mata uang devisa, meski masih belum jelas, namun riil. (Usulan Saddam untuk menggunakan euro sebagai mata uang untuk membayar penjualan minyak ketimbang dolar mungkin merupakan alasan lain yang lebih signifikan buat AS untuk melakukan pergantian rezim ketimbang karena alasan pelucutan senjata di Irak). Hanya saja, UE secara politik terpecah-pecah dan logika teritorialnya secara keseluruhan masih belum jelas. Sementara AS memiliki semua cara untuk memecah-belah dan menaklukkan dan karena itu mempersulit munculnya setiap logika teritorial yang jelas di level Eropa. AS berusaha untuk mencegah munculnya suatu 'benteng Eropa' (*fortress Europe*) lewat suatu strategi ganda, yaitu (a) menegaskan aturan-aturan neo-liberalisme sebagai basis bagi relasi-relasi pertukaran dan arus kapital (di sini WTO memainkan peran penting) dan (b) menjaga alat-alat politik dan militer tertentu ada di tempatnya sehingga bisa mempengaruhi politik internal UE. Ini mendorong AS terlibat di dalam hubungan dengan negara-negara Eropa secara individual di atas basis bilateral ketimbang dengan Eropa sebagai suatu keseluruhan, dan membangun alinasi-aliansi khusus (sebagai misal, dengan Inggris, Spanyol dan Italia maupun dengan negara-negara mantan blok timur, dengan Polandia sebagai titik sentralnya, yang ingin menjadi sekutu AS). Meski AS sendiri saat ini mengusulkan untuk ditinggalkannya aliansi-aliansi yang bersifat permanen, namun AS masih tetap mempertahankan keberadaan NATO yang telah kelihangan rele-

29. Mittelman, *The Globalization Syndrome*.

vansinya semenjak berakhirnya Perang Dingin. Sebagian alasannya ialah agar AS bisa tetap mempertahankan perencanaan dan pembangunan militer Eropa di bawah komando AS. Dukungan AS misalnya terhadap ide bahwa Eropa harus mengembangkan kekuatan gerak cepat militernya sendiri diberikan dengan syarat bahwa hal tersebut masih berada di bawah komando NATO. Fakta bahwa NATO tidak ada hubungannya dengan UE, bagi AS, merupakan suatu keuntungan tersendiri karena hal itu menjadikan semakin sulit bagi NATO untuk meletakkan logika teritorial ke dalam suatu kekuatan politik dan militer yang koheren.

Keterbelahan di dalam tubuh UE, terutama antara negara-negara pro-Amerika dan negara-negara yang berusaha untuk menegaskan suatu politik independen, pada titik ini membuat sangat sulit untuk membayangkan adanya suatu strategi luar negeri dan militer bersama. UE tak mungkin akan bisa menghasilkan suatu basis yang koheren bagi 'logika teritorial dari kekuasaan'-nya untuk diproyeksikan ke dunia di masa depan yang tak terlalu jauh. Namun, apa yang terlihat di permukaan ini bisa berubah dengan cepat, terutama jika pemerintahan AS terus melanjutkan pendekatan terhadap opini Eropa lewat suatu percampuran yang tak mengenakkan antara mencela dan acuh tak acuh. UE memang merupakan suatu hegemon regional, namun potensinya untuk menandingi AS pada saat ini hanya terbatas pada ranah produksi dan keuangan.

Pada saat ini, tantangan terhadap dominasi AS justru muncul dari Asia Timur dan Asia Tenggara, dan tantangan ini tampaknya jauh lebih serius. Kekuatan finansial dan produktif masih terus terakumulasi di kawasan itu, sehingga menarik kekuatan dari Amerika Utara maupun dalam tingkatan yang lebih kecil dari Eropa. Berbeda dari Eropa, kawasan ini sedikit menunjukkan tanda-tanda adanya usaha untuk menciptakan suatu struktur formal dalam kekuatan militer-politik, dan relasi antar negara lebih berupa jaringan kerja ketimbang bersifat formal, lebih bersifat kapitalistik ketim-

bang teritorial. Amerika Serikat sendiri saat ini menjalankan suatu kontrol politik dan militer atas pemerintahan-pemerintahan Jepang, Taiwan, dan sampai saat ini Korea Selatan sehingga membuat setiap langkah politik yang independen dari negara-negara menjadi sulit. Namun, meski tampaknya tak mungkin ada logika teritorial dari kekuasaan yang koheren yang akan berkembang di kawasan ini, kekuatan logika kapitalistik tampaknya akan semakin lebih dan lebih besar lagi dan berkemungkinan hegemonik di masa mendatang di dalam ekonomi global, terutama ketika Cina dan dalam tingkatan tertentu India semakin meningkat bobotnya sebagai penyeimbang. Kita akan mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari pergeseran-pergeseran ini dalam Bab 3, namun muncul suatu pertanyaan politik dan militer karena Cina tak lagi berada di bawah dominasi Amerika Serikat sebagaimana yang dialami oleh Jepang dan memiliki kapasitas dan kadangkala juga kesediaan untuk mengambil peran kepemimpinan teritorial di dalam seluruh kawasan Asia. Pengepungan politik dan militer terhadap Cina akan menjadi sangat penting untuk mempertahankan hegemoni global AS selain juga politik pecah belah dan taklukkan Eropa. Dan di sini, sebagaimana telah saya bahas dalam Bab 1, kontrol atas cadangan minyak Timur Tengah bisa melayani dengan sangat baik kepentingan-kepentingan AS untuk mengekang ambisi-ambisi geopolitik Cina. Di dalam semua strategi ini, diterapkan suatu keseimbangan yang halus antara mempertahankan dunia agar tetap terbuka sehingga logika kapitalistik bisa tetap berkembang secara bebas dari hambatan-hambatan dan sekaligus agar logika teritorial bisa tetap stabil dan cukup terbatas sehingga bisa mencegah munculnya suatu tantangan yang besar terhadap dominasi militer dan politik AS.

Namun, semua itu bukan satu-satunya konfigurasi-konfigurasi kekuatan teritorial yang mungkin ada. Meski relatif tetapnya tatanan-tatanan teritorial menyulitkan fluiditas, pergeseran-pergeseran yang cepat dalam watak aliansi bisa dan memang tengah terjadi. Sebagai misal, ketika kebijakan

AS terhadap Irak menciptakan suatu ikatan resistensi sejak tahun 2003 antara Prancis, Jerman dan Rusia, dengan didukung oleh Cina, kita bisa juga melihat adanya suatu kemungkinan terciptanya blok kekuatan Eurasia yang telah sejak lama diprediksikan oleh Halford Mackinder sebagai akan dengan mudah mendominasi dunia secara geopolitik. Bahwa AS telah sejak lama merasa jeri terhadap adanya kemungkinan suatu blok kekuatan semacam itu, hal itu tampak nyata dalam cara AS menentang secara kuat tawaran de Gaulle kepada Uni Soviet di tahun 1960-an dan 'Ostpolitik'-nya Willy Brandt di tahun 1970-an. Bahwa AS merasa khawatir akan terciptanya suatu blok semacam itu, hal tersebut terpancar sangat jelas ketika Henry Kissinger mengatakan bahwa blok baru ini akan menandai suatu kembalinya keseimbangan politik kekuasaan yang khas abad kesembilan belas, dan dengan rasa sesal ditambahkannya bahwa dalam kasus ini 'tak ada bukti bahwa AS akan kalah', yang berarti mengakui adaya kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi.[30] Fakta bahwa pemerintahan Bush bisa melahirkan suatu aliansi tandingan yang menakutkan dalam rentan kurang dari setahun mengilustrasikan betapa cepatnya blok-blok geopolitik berubah konfigurasinya dan betapa mudahnya kekeliruan-kekeliruan menimbulkan bencana yang bisa menghancurkan usaha bertahun-tahun untuk membangun kekuatan-kekuatan perlindungan politik dan militer. Invasi AS ke Irak karenanya memiliki suatu makna yang luas. Bukan saja invasi itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol keran minyak global dan juga ekonomi global melalui dominasi atas Timur Tengah. Invasi itu juga menjadi suatu batu lompatan bagi militer AS di tanah Eurasia yang, jika digabungkan dengan aliansi-aliansinya mulai dari Polandia sampai dengan negara-negara Balkan, akan memberi AS suatu posisi geostrategis yang kuat di Eurasia yang setidaknya berpotensi mampu mengganggu

30. Dikutip dari P. Tyler, 'Threats and Responses. News Analysis: A Deepening Fissure', *New York Times*, 6 Mar. 2003, hal. 1.

setiap konsolidasi suatu kekuatan Eurasia. Usaha mengganggu konsolidasi ini akan menjadi langkah akumulasi kekuatan politik yang tiada henti yang selalu mengiringi akumulasi kapital yang juga sama-sama tiada hentinya.

Akhir dari Perang Dunia mengimplikasikan bahwa perubahan-perubahan besar tengah berjalan. Logika teritorial dari kekuasaan tengah bermutasi, meski keluaran-keluarannya sama sekali masih belum jelas. Sekarang tampak jelas bahwa logika teritorial dan kapitalistik tengah berada dalam suatu ketegangan yang tinggi. Di bawah pemerintahan Bush, logika teritorial AS menjadi jelas, dan inilah mengapa semua perbincangan saat ini mengenai imperium dan imperialisme baru sedemikian berpusat pada-AS. Namun, keseimbangan gaya yang bekerja di dalam logika kapitalistik tampaknya membawa semua itu ke titik yang berbeda. Karena itulah, pemahaman mengenai bagaimana hasil akhir dari semua ini akan bergantung pada pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana logika kapitalistik dari kekuasaan bekerja. Inilah persoalan yang akan dibahas dalam Bab 3.[]

3 Ikatan Kapital

KAPITALISME mampu bertahan hidup sedemikian lama melewati berbagai krisis dan reorganisasi serta lolos dari prediksi-prediksi suram dari kalangan kiri maupun kanan yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh tak lama lagi. Daya tahan hidup dari kapitalisme ini sungguh merupakan suatu misteri yang menuntut penjelasan. Salah satu yang berusaha memberikan penjelasan itu, yaitu Lefebvre, beranggapan bahwa dirinya telah berhasil menemukan kunci penjelasannya melalui pernyataan terkenalnya bahwa kapitalisme bisa bertahan hidup lewat penciptaan perluasan ruang (*production of space*), namun sayangnya dia gagal untuk menjelaskan secara tepat bagaimana atau mengapa hal itu bisa demikian.[1] Baik Lenin maupun Luxemburg, meski atas dasar alasan-alasan yang sangat berbeda dan dengan argumentasi yang sangat berbeda, memandang bahwa imperialisme – yang merupakan suatu bentuk penciptaan dan pemanfaatan ruang global – merupakan jawaban atas teka-teki tersebut, hanya

1. H. Lefebvre, *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*, terj. F. Bryant (New York: St Martin's Press, 1976).

saja menurut mereka kedua solusi tersebut terbatas kemampuannya dan karenanya penuh dengan kontradiksi-kontradiksi yang akan meruntuhkannya (*its own terminal contradictions*).

Dalam konteks ini, dalam berbagai tulisan sejak lebih dari duapuluh tahun yang lalu, saya telah mengusulkan suatu teori mengenai '*spatial fix*' (atau lebih tepatnya suatu '*spatio-temporal fix*') terhadap kontradiksi-kontradiksi internal yang rentan-krisis dalam akumulasi kapital.[2] Inti utama dari argumen ini terkait dengan tendensi kronis dalam kapitalisme - dan secara teoretis berangkat dari reformulasi teori Marx mengenai tendensi kejatuhan tingkat laba - untuk menciptakan krisis overakumulasi.[3] Krisis semacam itu biasanya ditandai dengan terjadinya surplus kapital (dalam bentuk komoditi, uang atau kapasitas produksi) dan surplus kekuatan tenaga kerja yang mengiringinya, dibarengi dengan ketiadaan cara-cara untuk menggunakan surplus-surplus itu secara menguntungkan. Kasus paling gamblang dari hal ini ialah terjadinya *slump* berskala dunia pada tahun 1930-an ketika pendayagunaan kapasitas menjadi rendah, surplus komoditi tak bisa dijual, dan pengangguran terus meningkat sepanjang waktu. Semua ini berdampak terdevaluasinya dan dalam beberapa kasus hancurnya surplus-surplus kapital dan berkurangnya surplus-surplus tenaga kerja sampai ke tingkat yang menyedihkan. Karena yang menjadi jantung penyebab dari kesulitan ialah ketiadaan kesempatan-kesempatan pemanfaatan surplus secara menguntungkan, maka kunci solusi dari problem ekonomi (yang berbeda dari problem sosial dan politik) terletak pada kapital. Jika devaluasi ingin dihindari, maka

---

2. Sebagian besar esai dari tahun 1970-an dan 1980-an ini pernah diterbitkan dalam D. Harvey, *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography* (New York: Routledge, 2001). Alur argumen utamanya juga bisa dibaca dalam D. Harvey, *The Limits to Capital* (Oxford: Basil Blackwell, 1982; repr. London: Verso Press, 1999).

3. Versi argumen teoretis saya dibahas lebih detil dalam Harvey, Limits to Capital, chs. 6 and 7.

harus ditemukan cara-cara untuk menyerap surplus kapital. Ekspansi geografis dan reorganisasi spasial menjadi salah satu opsinya. Namun opsi ini tak bisa dipisahkan dari proses pergeseran-pergeseran temporal dimana surplus kapital dialihkan ke proyek-proyek jangka-panjang yang butuh waktu bertahun-tahun agar nilai mereka kembali bersirkulasi lewat aktivitas produktif yang sedang mereka dukung pendanaannya. Karena ekspansi geografis seringkali menghasilkan investasi dalam infrastruktur-infrastruktur fisik dan sosial yang bertahan lama (sebagai misal dalam jaringan-jaringan transportasi dan komunikasi dan pendidikan dan riset), maka penciptaan dan rekonfigurasi relasi-relasi keruangan menjadi salah satu cara potensial untuk menunda, jika bukannya memecahkan, tendensi ke arah krisis kapitalisme. Dalam usahanya untuk menjawab problem overakumulasi pada tahun 1930-an, Pemerintah AS, sebagai misal, mengadakan proyek-proyek pekerjaan umum yang berorientasi masa depan di lokasi-lokasi yang sejauh ini belum berkembang dengan niatan langsung untuk mengatasi problem surplus kapital dan tenaga kerja (yang menarik, dengan semangat yang sama, Nazi membangun *autobahn-autobahn* pada kurun waktu yang sama).

Seperti yang telah saya katakan, logika kapitalistik (berbeda dari logika teritorial) dari imperialisme haruslah dilihat sebagai usaha untuk menemukan '*spatio-temporal fixes*' terhadap problem surplus kapital (dan saya katakan sekali lagi, surplus kapital inilah yang harus menjadi fokus primer dari perhatian analitik kita dan bukannya surplus tenaga kerja). Untuk memahami bagaimana prosesnya, saya pertama-tama akan melukiskan, meski secara skematis dan sangat general, bagaimana kapital bersirkulasi dalam ruang dan waktu untuk menciptakan geografi historisnya yang khas. Dengan demikian, saya akan bisa mempertahankan hubungan dialektis antara politik negara dan imperium di satu sisi, dan gerak molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu di sisi yang lain, sebagai pusat utama dari argumen

ini. Untuk itu, saya mengawali dengan beberapa observasi dasar mengenai pentingnya negara sebagai suatu kerangka teritorial dimana di dalamnya proses-proses molekuler dari akumulasi kapital beroperasi.

Kekuasaaan Negara dan Akumulasi Kapital

Akumulasi kapital—lewat pertukaran pasar—akan berkembang paling baik ketika dipayungi oleh struktur institusional hukum, hak milik pribadi, kontrak, dan keterjaminan nilai uang yang tertentu. Suatu negara kuat (*a strong state*) yang memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan bisa menjamin terciptanya kerangka institusional semacam itu dan mendukung keberadaan semua itu dengan tatanan-tatanan konstitusional tertentu. Karena itulah, formasi negara, dibarengi dengan keberadaan konsitusi yang berwatak borjuis, merupakan fitur-fitur krusial di dalam geografi historis yang panjang dari kapitalisme.

Kaum kapitalis memang tidak secara absolut membutuhkan kerangka institusional seperti itu untuk berfungsi, namun tanpa kerangka itu mereka akan berhadapan dengan resiko-resiko yang lebih besar. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri dalam lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak mengakui atau tidak menerima aturan-aturan mereka dan cara-cara mereka menjalankan bisnis. Para pedagang dan dealer hanya bisa bertahan hidup jika mereka bisa menciptakan kode etik dan kode bertindak mereka sendiri (sebagaimana halnya para pedagang uang jalanan di banyak negara Timur Tengah). Mereka harus mengembangkan jaringan kepercayaan di antara mereka sendiri (dengan kadangkala bergantung pada jaringan keluarga—sebagaimana yang pernah dilakukan Rothschilds pada abad kesembilanbelas—dan pada jaringan kekerabatan) dan menggantikan aktivitas kekerasan mereka (sebagaimana yang sering dilakukan oleh para kapitalis pedagang) entah di dalam maupun terhadap kekuasaan negara guna melindungi hak milik dan aktivitas bisnis mereka dari ancaman kekuatan-kekuatan antagonistik atau kekuatan-

kekuatan negara. Mereka mungkin harus melawan hukum negara ketika kekuatan-kekuatan negara bersifat memusuhi (sebagaimana dalam kasus di banyak negara bekas komunis) atau tak peduli dengan aktivitas-aktivitas mereka.[4] Dalam kondisi ketiadaan hukum ini, bahkan di jantung negara-negara pro-kapitalis yang kuat, muncul bentuk perlawanan seperti mafia, kartel obat bius, dan semacamnya. Dalam kasus-kasus lain, para kapitalis harus mengamankan *enclave-enclave* terlindung mereka untuk diri mereka sendiri. Piagam-piagam kota di Eropa abad pertengahan menciptakan pulau-pulau hak-hak warga yang berwatak borjuis di tengah-tengah relasi sosial yang masih feodal. Pos-pos perdagangan milik perusahaan-perusahaan Hindia Timur atau Hudson Bay, dan zona-zona usaha untuk investasi asing yang sekarang terbangun di, katakanlah, Cina, merupakan contoh-contoh lain. Proses-proses molekuler dari akumulasi kapital harus dan memang harus menciptakan jaringan-jaringan dan kerangka-kerangka operasi mereka sendiri dalam ruang dengan cara-cara yang tak terbatas, dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan, diaspora-diaspora, ikatan-ikatan keagamaan dan etnis, dan kode-kode linguistik sebagai cara untuk menciptakan jaringan spasial yang rumit dari aktivitas kapital yang bersifat independen dari kekuasaan negara.

Meski demikian, aktivitas kapitalis tentu lebih suka jika ada negara borjuis dimana di dalamnya institusi-institusi pasar dan aturan-aturan kontrak (termasuk aturan-aturan perburuhan) dijamin secara hukum, dan dimana kerangka regulasinya dibangun untuk mencegah terjadinya konflik-konflik kelas dan untuk mengarbitrase klaim-klaim di antara faksi-faksi kapital yang berbeda (sebagai misal antara kepentingan-kepentingan pedagang, keuangan, manufaktur, pertanian dan

4. Suatu kasus yang sangat menarik bisa dilihat dalam L. Zhang, Strangers in the City: Reconfigurations of Space, Power and Social Networks within China's Floating Population (Stanford: Stanford University Press, 2001).

pengejar rente). Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keterjaminan suplai uang dan terhadap perdagangan asing dan urusan luar negeri juga harus disusun untuk menguntungkan aktivitas bisnis.

Tentu saja, tidak semua negara bertindak seperti yang dituntut, dan andaikata pun bertindak seperti yang diharapkan, tatanan institusional yang dibangun beragam bentuknya dan keberagaman ini bisa memunculkan hasil-hasil yang sangat berbeda. Semua sangat bergantung pada bagaimana konstitusi negara dibangun dan oleh siapa, dan apakah yang bisa atau telah dibangun di masa lalu dan di masa kini oleh negara untuk mendukung atau menentang proses-proses akumulasi kapital. Negara, sebagaimana akan kita lihat dalam Bab 4, memainkan peran kunci dalam akumulasi kapital yang awal atau primitif dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatannya bukan saja untuk memaksakan diadopsinya tatanan institusional yang kapitalistik, namun juga untuk mendapatkan dan memprivatisasikan aset-aset yang merupakan basis utama bagi akumulasi kapital (pengambilalihan hak milik Gereja selama Reformasi atau penutupan lahan-lahan milik bersama lewat aksi negara di Inggris merupakan contoh-contoh yang gamblang). Selain itu, negara juga melakukan peran-peran penting lainnya (penarikan pajak salah satunya). Perbedaan dalam formasi negara dan dalam kebijakan-kebijakan negara juga selalu punya arti penting. Negara Inggris, yang lebih didominasi oleh pengaruhi kapitalis pedagang, memainkan peran yang sangat berbeda dalam relasinya dengan akumulasi jika dibandingkan dengan Prancis dimana kepentingan-kepentingan kepemilikan tanah adalah kepentingan yang dominan. Dua negara itu menghasilkan teori-teori ekonomi yang sangat berbeda untuk menjelaskan dan menjustifikasi posisi mereka. Inggris menjadi terikat dengan paham merkantilisme sebagaimana yang dipaparkan oleh Munn dalam karyanya *England's Treasure by Foreign Trade*, yang berfokus pada akumulasi *bullion* dari perdagangan, sementara Prancis mendukung gagasan fisiokratik bahwa se-

mua kemakmuran (nilai) diperoleh dari tanah dan bahwa perdagangan dan industri karenanya bersifat sekunder dan merupakan bentuk-bentuk parasitis dari penciptaan kemakmuran. Kekuasaan negara yang memusuhi akumulasi kekayaan yang bersifat privat – yang berlangsung sejak dulu hingga sekarang ini di Cina – bisa menjadikan negara statis. Negara-negara sosial-demokratik biasanya berusaha untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan atas kekuatan kerja dan memposisikan diri sebagai pembela kepentingan-kepentingan kelas buruh namun tanpa menghapuskan kapital. Di sisi lain, negara bisa menjadi suatu agen aktif dalam akumulasi kapital. Negara-negara pembangunan di Asia Timur dan Asia Tenggara (seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan) mempengaruhi dinamika akumulasi kapital secara langsung lewat tindakan-tindakan mereka (seringkali dengan mengabaikan aspirasi-aspirasi buruh). Namun, jenis intervensi negara seperti ini telah sejak lama ada. Jerman pada masa Bismarck dan Jepang pada masa restorasi Meiji muncul sebagai wilayah akumulasi kapital sebagian karena dukungan kuat, jika bukannya karena paksaan, dari kekuasaan negara. Dan tradisi *dirigiste* di Prancis (sebagaimana dicontohkan dalam kebijakan-kebijakan Gaullis di tahun 1960-an) memberi suatu kualitas khas terhadap akumulasi kapital di Prancis yang membedakannya, katakanlah, dari Inggris (yang sebagaimana diketahui umum berlangsung dengan memanfaatkan sistem kereta api). Dan tentu saja ketika tiba saatnya untuk berjuang melawan hegemoni, kolonialisme, dan politik imperial, maupun aspek-aspek hubungan luar negeri, negara telah sejak lama dan masih terus menjadi agen fundamental dalam dinamika kapitalisme global.

Negara bukanlah satu-satunya pelaku teritorial yang penting. Himpunan negara (atau blok kekuatan regional yang berbentuk jaringan informal sebagaimana di Asia Timur dan Asia Tenggara atau yang terbangun secara lebih formal sebagaimana dalam Uni Eropa) tak bisa diabaikan arti pentingnya, sebagaimana juga halnya dengan entitas-entitas sub-

nasional, seperti pemerintah regional (negara bagian di AS) dan kawasan metropolitan (Barcelona plus Catalonia, atau San Fransisco Bay). Kekuasaan politik, pemerintahan teritorial, dan administrasi pemerintahan terbangun dalam skala-skala geografis yang beragam dan membentuk susunan lingkungan politik yang hirarkis dimana di dalamnya proses-proses molekuler dari akumulasi kapital berlangsung.

Namun, menggambarkan evolusi kapitalisme sebagai suatu ekspresi dari kekuasaan negara semata dalam suatu sistem antar-negara yang dicirikan oleh kompetisi untuk memperebutkan posisi dan hegemoni – sebagaimana yang cenderung dilakukan oleh banyak teori sistem dunia – adalah terlalu sangat membatasi. Yang juga sama kelirunya ialah menggambarkan evolusi geografis-historis dari kapitalisme seolah-olah hal tersebut sepenuhnya tak terpengaruh oleh logika teritorial dari kekuasaan. Di sini, Arrighi mengajukan suatu pertanyaan penting: bagaimana bisa fiksitas (*fixity)* relatif dan logika khas dari kekuasaan teritorial cocok dengan dinamika ruang dan waktu yang cair dari akumulasi kapital?[5] Untuk menjawab itu, kita pertama-tama harus menjelaskan bagaimana proses-proses molekuler dari akumulasi kapital bekerja dalam ruang dan waktu. Dalam penjelasan itu, saya mengandaikan adanya suatu tatanan institusional yang memadai dan stabil yang dijamin dan difasilitasi oleh kekuasaan negara.

Penciptaan Suatu Ekonomi Ruang (*Space Economy*)

Dalam banyak karya terdahulu, saya telah menguraikan secara detail suatu teori mengenai bagaimana suatu ekonomi ruang muncul dari proses-proses akumulasi kapital.[6] Di sini, saya menyebutkan poin-poin menonjol dari argumen tersebut hanya dalam bentuk ringkasan. Pertukaran

5. Arrighi dan Silver, *Chaos and Governance*, 48-9.
6. Harvey, *Limits to Capital; id., Spaces of Capital; id., The Urban Experience* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).

barang dan jasa (termasuk tenaga kerja) hampir selalu menimbulkan perubahan-perubahan dalam lokasi. Pertukaran-pertukaran tersebut menimbulkan serangkaian gerak spasial yang saling bertemu sehingga menciptakan suatu geografi interaksi manusia yang khas. Gerak-gerak spasial ini terhambat oleh adanya friksi jarak dan karena itu jejak yang mereka tinggalkan pada dunia selalu merekam efek-efek dari friksi-friksi tersebut, dan sering menyebabkan aktivitas-aktivitas menjadi terhimpun ke dalam ruang dengan cara-cara yang meminimalisir friksi-friksi tersebut. Pengelompokan tenaga kerja secara teritorial dan spasial (perbedaan antar desa dan kota merupakan salah satu bentuk perbedaan awal yang paling menyolok) muncul dari proses-proses pertukaran yang terjadi di atas ruang ini. Aktivitas kapitalis karenanya menghasilkan pembangunan geografis yang tak seragam, bahkan meski tak ada perbedaan geografis dalam hal sumber daya dan kesempatan-kesempatan fisik yang merupakan faktor bagi munculnya logika diferensiasi dan spesialisasi regional dan spasial. Akibat kompetisi, kapitalis-kapitalis individual mengejar keuntungan kompetitif dengan memanfaatkan struktur spasial ini dan karena itu cenderung untuk tertarik atau terdorong untuk bergerak ke lokasi-lokasi dimana biaya-biayanya lebih rendah atau tingkat labanya lebih tinggi. Surplus kapital di satu tempat bisa menemukan pekerja di tempat lain dimana peluang-peluang yang menguntungkan belum lagi tergarap. Keuntungan-keuntungan lokasi memainkan suatu peran yang sama bagi kapitalis-kapitalis individual sebagaimaa peran yang dimainkan oleh keuntungan-keuntungan teknologis, dan dalam situasi-situasi tertentu, keuntungan lokasi bisa mensubstitusi keuntungan teknologi.

Dalam beberapa hal, alur argumen ini sejajar dengan teori lokasi klasik (sebagaimana yang dikemukakan dalam karya-karya von Thinen, Alfred Weber, dan Losch dan ke-

---

7. W. Isard, *Location and the Space Economy* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956).

mudian disintesiskan dalam karya Isard).[7] Perbedaan utamanya terletak di dalam fakta bahwa karya-karya tersebut berusaha untuk mengidentifikasi suatu keseimbangan spasial yang tercipta di dalam lanskap geografis dari aktivitas kapitalistik, semetara dalam kasus ini, proses-proses akumulasi kapital selalu berekspansi dan karenanya selalu bersifat mengganggu setiap tendensi ke arah terbentuknya keseimbangan. Selain itu, teori lokasi yang klasik mengandaikan suatu rasionalitas ekonomi yang tak terlalu berhubungan dengan perilaku-perilaku kapitalistik yang aktual. Sebagai misal, teori itu mendefinisikan apa yang disebut sebagai 'radius spasial dari barang' (*the spatial range of a good*) dalam artian jarak radius dari suatu titik produksi dimana harga pasar (yang diukur sebagai biaya produksi plus biaya transportasi) membuat barang yang diproduksi berada di luar kesediaan atau kemampuan konsumen untuk membayarnya. Namun, barang-barang tidak berjalan sendiri ke pasar. Para pedagang-lah yang membawanya. Kapitalis-kapitalis pedagang ini memiliki peran historis di dalam mempersoalkan dan menembus secara terus-menerus hambatan-hambatan spasial (seringkali melampaui apa yang bisa dianggap sebagai 'rasional') dan membuka kesempatan gerak dan ruang-ruang perdagangan yang baru. Sebagai misal, ketika berhadapan dengan keterbatasan pasar-pasar lokal dan biaya transportasi yang tinggi, para pedagang abad pertengahan berubah menjadi penjaja keliling yang menjual barang dagangan mereka menelusuri wilayah-wilayah yang sangat luas. Persis sebagaimana perilaku kompetitif memunculkan impuls-impuls perusak yang kuat dalam diri dinamika teknologi terhadap ekonomi kapitalis (karena kapitalis individual mengejar keuntungan kompetitif dengan mengadopsi teknologi yang lebih unggul), demikian pula perilaku kompetitif juga menciptakan suatu keadaan pergerakan yang terus-menerus dan instabilitas yang kronis dalam distribusi spasial dari aktivitas-aktivitas kapitalistik ketika kapitalis-kapitalis berebut mendapatkan lokasi-lokasi yang lebih kompetitif (sebagai misal lokasi-lokasi

yang biaya produksinya lebih rendah). Jadi, lanskap geografis dari produksi kapitalis, pertukaran, distribusi, dan konsumsi tak pernah berada dalam kondisi keseimbangan.

Meski demikian, proses kompetisi di dalam sistem keruangan berlangsung persis sebagaimana yang diuraikan oleh ahli-ahli teori tatanan spasial neoklasik (Chamberlain, Hotelling dan Losch), yaitu sebagai suatu bagian dari kompetisi monopolistik.[8] Sifat dari kompetisi ini tercipta pertama-tama karena keistimewaan-keistimewaan yang bersumber dari keunikan lokasi. Lokasi spasial selalu menghadirkan suatu keuntungan monopolistik tertentu: tak ada seorang pun yang akan menempatkan pabrik mereka di tempat dimana pabrik saya telah berdiri di tempat itu. Dan jika ada keuntungan-keuntungan yang sangat khusus yang melekat pada lokasi saya, maka keuntungan-keuntungan tersebut hanya menjadi milik saya. Hal ini mendorong berlangsungnya pertarungan bebas di dalam ekonomi ruang karena adanya kecenderungan kapital untuk memiliki kontrol monopoli ketimbang harus bersaing secara terbuka. Meski teori kapitalisme yang abstrak (termasuk varian neo-liberalnya) terusmenerus mengumandangkan ideal-ideal mengenai kompetisi, namun para kapitalis lebih mendambakan kekuasaan-kekuasaan monopoli karena mereka lebih menyukai keterjaminan, kalkulasi, dan suatu eksistensi yang lebih damai. Selain itu, produk akhir dari kompetisi ialah monopoli atau oligopoli dan semakin keras suatu kompetisi, semakin cepat sistem kompetisi tersebut berubah menjadi monopoli atau oligopoli: perhatikan saja kemunculan yang luar biasa dalam oligopoli dan monopoli di banyak sektor ekonomi (mulai dari penerbangan dan energi sampai dengan media dan hiburan) selama tigapuluh tahun terakhir hegemoni neo-liberal dalam

8. E. Chamberlain, *The Theory of Monopolistic Competition* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933); A. Losch, *The Economics of Location*, terj. William H. Woglom dengan bantuan Wolfgang F. Stolper (New Haven: Yale University Press, 1954).

kebijakan ekonomi di negara-negara kapitalis inti. Para kapitalis bisa dan memang memanfaatkan strategi-strategi spasial untuk menciptakan dan melindungi kekuasaan-kekuasaan monopoli di manapun dan kapan pun mereka bisa. Kontrol atas lokasi-lokasi atau kompleks-kompleks sumber daya strategis kunci merupakan suatu senjata yang penting. Dalam beberapa kasus, kekuasaan monopoli menjadi cukup kuat untuk menghambat dinamika dalam geografi kapitalisme, dan menciptakan tendensi-tendensi kuat ke arah inersia dan stagnasi geografis. Tendensi ke arah dinamika spasial yang disebabkan oleh persaingan mengejar laba diimbangi dengan penyatuan kekuatan-kekuatan monopoli dalam ruang. Dari pusat-pusat semacam inilah praktek-praktek imperialis dan dorongan imperial bersumber. Karena itulah, Lenin dan Hilferding telah cukup tepat ketika menekankan pentingnya koneksi inheren antara monopolisasi dan imperialisme.

Asimetri-asimetri dalam pertukaran sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Bab 2 merupakan sesuatu hal yang krusial untuk memahami logika ekonomi yang muncul dari kompetisi monopolistik. Ketidakseimbangan yang dihasilkannya terekspresikan secara spasial dan geografis, terutama dalam bentuk adanya konsentrasi-konsentrasi keistimewaan-keistimewaan di tempat-tempat tertentu jika dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Di masa lalu, biaya-biaya transportasi yang tinggi dan hambatan-hambatan lainnya buat gerak kapital (seperti tarif, pungutan, dan kuota) merupakan ekspresi dari adanya monopoli lokal. Saya memakan makanan lokal dan minum bir lokal karena friksi jarak yang tinggi membuat saya tak punya pilihan lain. Namun, proteksi-proteksi semacam ini runtuh ketika biaya-biaya transportasi merosot dan ketika rintangan-rintangan politik buat perdagangan dihapuskan lewat pengaturan-pengaturan seperti WTO. Saya memakan sayur-sayuran dari California di Paris dan minum bir-bir yang diimpor dari seluruh penjuru dunia di Pittsburgh. Bahkan para pembuat mobil di Detroit, yang pada tahun 1960-an dianggap sebagai suatu te-

ladan dari semacam oligopoli yang menjadi ciri khas dari apa yang disebut Baran dan Sweezy sebagai 'kapitalisme monopoli',[9] mendapati dirinya harus berhadapan dengan tantangan serius dari mobil-mobil impor asing, terutama dari Jepang. Para kapitalis karenanya harus menemukan cara-cara lain untuk membangun dan melanggengkan kekuasaan-kekuasaan monopoli yang begitu amat mereka impikan. Dua langkah utama yang telah mereka ambil ialah ke arah sentralisasi kapital secara massif, yang berusaha meraih dominasi lewat kekuasaan finansial, *economies of scales*, dan posisi pasar, serta perlindungan atas keuntungan-keuntungan teknologis mereka (yang sebagaimana telah saya tegaskan, selalu menjadi substitusi bagi keuntungan-keuntungan lokasi) lewat keberadaan hak paten, hukum lisensi, dan hak milik intelektual. Bukan kebetulan bahwa yang terakhir inilah yang menjadi fokus dari negosiasi yang intens di dalam WTO, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai kesepakatan TRIPS (*Trade-Related Intellectual Property Rights*, hak milik intelektual yang menjadi obyek perdagangan). Semua ini menunjuk pada bagaimana pentingnya kemampuan untuk menggerakkan komoditi-komoditi, kapasitas produksi, orang-orang dan uang lintas ruang. Kondisi-kondisi industri-industri transportasi dan komunikasi menjadi kunci di sini. Sepanjang sejarah kapitalis, inovasi-inovasi teknologi di dalam medan ini telah mengubah secara dramatis kondisi-kondisi spasialitas (friksi jarak) dan menciptakan semua bentuk instabilitas dalam ekonomi ruang kapitalisme. Alasan-alasan mengapa terdapat tendensi ke arah apa yang disebut Marx sebagai 'anihilasi ruang lewat waktu' telah dijelaskan secara panjang lebar di tempat lain, dan saya tak melihat ada pentingnya untuk mengulang kembali pembahasan itu di sini.[10] Namun, secara

9. P. Baran dan P. Sweezy, Monopoly Capital; An Essay on the American Economic and Social Order (New York: Monthly Review Press, 1966).

10. Lihat Harvey, Limits to Capital; id., The Condition of Postmodernity (Oxford: Basil Blackwell, 1989), pt. III.

teoretis bisa dilihat dan hal ini cocok dengan jejak rekam geografis-historis dari kapitalisme, bahwa faktornya ialah dorongan yang tiada henti ke arah pereduksian jika bukannya pengeliminasian rintangan-rintangan spasial, yang dibarengi dengan dorongan akselerasi yang juga tak henti-hentinya dalam *turnover* kapital. Reduksi dalam biaya dan gerak waktu telah terbukti menjadi suatu kebutuhan mendesak dari modus produksi yang kapitalis. Tren ke arah 'globalisasi' merupakan sesuatu yang inheren di sini, dan evolusi lanskap geografis dari aktivitas kapitalis berlangsung secara besar-besaran berkat adanya babak demi babak kompresi ruang dan waktu.

Salah satu konsekuensi lebih jauh dari proses ini ialah munculnya dorongan terus-menerus untuk mentransformasi skala geografis yang membatasi aktivitas kapitalis. Seperti halnya kedatangan rel kereta api dan telegraf pada abad kesembilanbelas yang mereorganisasi secara total skala dan keragaman spesialisasi regional serta urbanisasi dan 'kawasan' secara umum, demikian pula babak inovasi-inovasi yang lebih terkini (mulai dari transportasi dengan jet dan *kontainerisasi* sampai dengan internet) telah mengubah skala aktivitas ekonomi. Tanpa impuls-impuls ini, perubahan skala kekuatan hegemonik, seperti yang telah kita sebutkan dalam Bab 2, tak akan mungkin terjadi dan tak akan terpahami secara teoretis. Re-teritorialisasi politik seperti Uni Eropa (yang telah diimpikan selama masa Pencerahan dan diusulkan secara aktif oleh para pemikir Utopian seperti Saint-Simon pada awal abad kesembilanbelas) bukan saja menjadi lebih bisa dijalankan, namun juga semakin menjadi suatu kebutuhan ekonomi. Tentu saja, ini tidak berarti mengatakan bahwa pergeseran-pergeseran politik itu hanyalah sekedar suatu fungsi dari transformasi-transformasi material dalam relasi-relasi ruang; persoalannya jauh lebih rumit dari itu. Hanya saja, memang perubahan relasi-relasi ruang berfungsi sebagai prasyarat-prasyarat niscaya dari terjadinya reorganisasi politik seperti yang kita lihat berlangsung di seputar kita. Inilah, se-

bagaimana yang segera akan kita lihat, salah satu titik krusial dimana logika kekuasaan teritorial dan kapitalis saling bertemu.

Kondisi-kondisi industri transportasi dan komunikasi menjadi petunjuk dari adanya sebuah problem yang lebih luas. Pergerakan lintas ruang yang cair hanya bisa dicapai jika tersedia infrastruktur-infrastruktur fisik dalam ruang. Rel-rel kereta api, jalan-jalan raya, bandara-bandara, fasilitas-fasilitas pelabuhan, jaringan-jaringan kabel, sistem optik-serat, jaringan-jaringan listrik, sistem-sistem saluran air dan pembuangan limbah, jalur pipa dsb, menjadi 'kapital tetap yang melekat pada tanah' (berbeda dari bentuk-bentuk kapital tetap seperti pesawat terbang dan mesin yang bisa bergerak). Infrastruktur-infrastruktur fisik semacam itu menyerap banyak kapital, dan pemulihannya bergantung pada penggunaannya *in situ*. Kapital diinvestasikan dalam fasilitas pelabuhan sehingga tak ada kapal-kapal yang akan tersesat. Sementara kapital tetap yang diinvestasikan pada tanah memfasilitasi berlangsungnya mobilitas spasial dari bentuk-bentuk kapital yang lain dan juga tenaga kerja, investasi tersebut juga menuntut agar interaksi-interaksi spasial berjalan mengikuti pola geografis dari investasi-nvestasi tersebut agar nilainya bisa terealisasikan. Sebagai efeknya, kapital yang melekat pada tanah – dan kapital ini meliputi pabrik-pabrik, kantor-kantor, perumahan-perumahan, rumah sakit-rumah sakit, dan sekolah-sekolah maupun kapital yang melekat pada infrastruktur-infrastruktur transportasi dan komunikasi – berperan sebagai suatu penahan yang penting terhadap proses transformasi geografis dan relokasi aktivitas kapitalis. Sekali lagi, kita menyaksikan keberadaan dari kekuatan-kekuatan yang turut berperanan dalam terciptanya inersia geografis sebagai pengimbang dari dinamisme geografis. Kapital yang terkunci dalam infrastruktur-infrastruktur fisik di Kota New York, London, atau Tokyo-Yokohama begitu besar, dan sebagaimana yang diperlihatkan oleh gangguan sesaat seperti yang terjadi di New York akibat peristiwa 9/11, setiap gang-

guan terhadap arus kapital menuju dan melalui lokasi-lokasi tersebut memiliki suatu efek ekonomi yang katastrofik. Selain itu, pola khas dari investasi-investasi ini membukakan lebih banyak jalan bagi kapitalis-kapitalis individual untuk mendapatkan hak-hak istimewa yang bersifat monopolistik. Pengembang yang kebetulan menguasai tanah di lokasi dimana suatu persilangan jalan tol utama akan dibangun bisa menaikkan nilai tanah itu setinggi-tingginya serta bisa menaikan nilai investasi-investasi yang berada di atas tanah tersebut (seperti blok-blok perkantoran dan hotel-hotel).

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa lanskap geografis dari aktivitas kapitalis diselimuti oleh kontradiksi-kontradiksi dan ketegangan-ketegangan dan bahwa lanskap itu terus-menerus tak stabil ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan teknis dan ekonomi. Ketegangan-ketegangan antara kompetisi dan monopoli, antara konsentrasi dan penyebaran, antara sentralisasi dan desentralisasi, antara diam dan bergerak, antara dinamisme dan inersia, antar skala-skala aktivitas yang berbeda-beda, semuanya bersumber dari proses-proses molekuler akumulasi kapital dalam ruang dan waktu yang tiada henti. Dan ketegangan-ketegangan ini terperangkap di dalam logika ekspansionis dari suatu sistem kapitalis dimana akumulasi kapital yang tiada henti berlangsung di dalamnya dan didominasi oleh motif pencarian akan laba yang tiada akhir. Agregat efeknya ialah, sebagaimana yang sering saya rumuskan di tempat lain, bahwa kapitalisme terus-menerus berupaya untuk menciptakan suatu lanskap geografis yang bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitasnya di satu waktu dan untuk kemudian dihancurkannya, dan dibangunlah lanskap baru yang sepenuhnya berbeda di titik waktu yang lain agar nafsu keserakahannya untuk mengakumulasi kapital tiada henti terakomodasi. Inilah sejarah penghancuran kreatif yang telah membentuk lanskap geografi historis dari akumulasi kapital yang aktual.

Logika Kekuasaan Politik/Teritorial versus Logika Kekuasaan Kapitalis

Proses-proses molekuler dari akumulasi kapital yang beroperasi dalam ruang dan waktu menghasilkan revolusi-revolusi yang bersifat pasif dalam pola geografis dari akumulasi kapital. Namun ketegangan-ketegangan dan kontradiksi-kontradiksi yang telah saya sebutkan juga bisa menghasilkan konfigurasi-konfigurasi geografis yang mengarah pada stabilitas, setidaknya untuk sementara waktu. Saya akan merujuk merujuk konfigurasi-konfigurasi yang relatif stabil ini sebagai 'kawasan-kawasan' (*regions*) dimana yang saya maksudkan ialah ekonomi-ekonomi regional yang telah mencapai suatu tingkatan koherensi tertentu dalam struktur produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsinya, setidaknya untuk sementara waktu. Proses-proses molekuler menyatu dan memproduksi 'regionalitas' (*regionality*). Tentu saja, kesimpulan ini bukanlah merupakan suatu temuan yang baru. Kesimpulan itu telah begitu dikenal oleh banyak ahli geografi sejarah dan ekonomi, maupun oleh sejarawan ekonomi seperti Sydney Pollard, yang menyebut perkembangan regional dan perkembangan kawasan-kawasan sebagai suatu fitur fundamental dalam perkembangan ekonomi Inggris. Ada suatu tradisi panjang dalam teori ekonomi, mulai dari Alfred Marshall (dengan gagasannya mengenai distrik-distrik produksi industri – yang sekarang disebut 'Marshallian'), Perroux (dengan gagasannya mengenai kutub-kutub pertumbuhan) sampai dengan Paul Krugman (dengan gagasannya mengenai ekonomi-ekonomi regional 'yang mampu mengorganisir-diri' (*self-organising*), yang melihat produksi organisasi regional sebagai suatu konsekuensi tak terelakkan sekaligus sebagai suatu prasyarat dasar untuk memahami dinamika akumulasi kapital.[11] Ilmuwan-ilmuwan politik mutakhir seperti Mit-

11. P. Krugman, *Development, Geography and Economic Theory* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995).

telman juga memberikan penekanan kepada posisi pentingnya organisasi regional baik pada level supra- maupun subnasional untuk memahami kompleks arus-persilangan yang beroperasi dalam ekonomi global.[12]

Batas-batas kawasan-kawasan semacam ini selalu kabur dan tidak tegas, namun arus-arus yang saling terkait di dalam teritori tersebut menciptakan koherensi struktur yang jelas sehingga suatu area geografis tertentu menjadi terlihat berbeda jika dibandingkan dengan area-area lain yang ada di dalam suatu ekonomi nasional atau yang lebih luas lagi. Koherensi struktur biasanya begitu luas sehingga melampaui bidang pertukaran ekonomi, meski bidang ini memang fundamental. Koherensi ini biasanya meliputi juga bidang sikap-sikap, nilai-nilai kultural, kepercayaan-kepercayaan dan bahkan afiliasi-afiliasi politik di kalangan kapitalis-kapitalis maupun di kalangan mereka yang digerakkan oleh kapitalis-kapitalis tersebut. Keniscayaan untuk menghasilkan dan melindungi barang-barang mengharuskan dibentuknya suatu sistem pemerintahan dan lebih bagus lagi jika sistem itu dibentuk di kawasan tersebut. Kelas-kelas yang dominan dan aliansi-aliansi kelas yang hegemonik bisa terbentuk di dalam kawasan itu dan menciptakan suatu karakter yang khas dalam aktivitas politik maupun ekonomi kawasan tersebut. Mereka harus memperhatikan ketersediaan barang-barang publik dan karena itulah mau tak mau harus terlibat di dalam aktivitas penyediaan kebutuhan publik. Pembentukan infrastruktur-infrastruktur fisik dan sosial baik untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun juga untuk melindungi dan menyebarluaskan nilai-nilai kultural dan pendidikan dan banyak aspek lain dari kehidupan kewargaan seringkali semakin memperkuat koherensi dari apa yang mulanya muncul sebagai suatu entitas regional di dalam ekonomi global. Pola-pola perdagangan dan kompetisi, dan spesialisasi dan kon-

12. Mittelman, *The Globalization Syndrome.*

sentrasi dalam industri-industri kunci atau dalam pengkombinasian teknologis atau dalam relasi-relasi dan keterampilan-keterampilan buruh tertentu, semuanya menghubungkan ekonomi-ekonomi regional yang bersifat longgar menjadi semacam kesatuan yang terpola dari pembangunan geografis yang tak seragam. Apa yang terjadi di dalam dinamika internal dan relasi-relasi eksternal bergantung pada struktur kelas yang ada dan pada bentuk-bentuk aliansi kelas yang terbentuk di dalam dan di seputar penyelenggaraan pemerintahan (*governance*).[13]

Poin fundamental yang mesti diingat ialah bahwa suatu logika teritorial yang informal, lintas batas (*porous*), namun masih bisa teridentifikasi – atau logika teritorial 'yang bersifat regional' – niscaya dan secara tak terelakkan muncul dari proses-proses molekuler akumulasi kapital yang berlangsung dalam ruang dan waktu, dan bahwa sebagai konsekuensinya kompetisi dan spesialisasi antar-kawasan di dalam dan di antara ekonomi regional ini menjadi suatu fitur fundamental dari beroperasinya kapitalisme. Ini lantas memunculkan persoalan kunci: bagaimana sesuatu yang berkembang secara regional ini bisa tercipta lewat proses-proses molekuler akumulasi kapital yang beroperasi di dalam ruang dan waktu yang berkorelasi dengan logika teritorial dari kekuasaan sebagaimana terekspresikan lewat politik negara dan imperium?

Jawabannya pertama-tama ialah bahwa proses-proses tersebut tidak secara langsung berkaitan satu sama lain. Pollard misalnya memperkirakan bahwa ekonomi-ekonomi regional yang memainkan peran kunci di dalam revolusi industri di Inggris dalam tahun-tahun terakhir abad kedelapanbelas tak lebih dari dua puluh mil jaraknya, dan ini secara efektif merupakan pulau-pulau sangat kecil di tengah-tengah wilayah politik Inggris yang jauh lebih besar yang telah ter-

13. Harvey, *The Urban Experience*, bab. 5.

bangun setidaknya dua ratus tahun sebelumnya.[14] Namun, pulau-pulau kecil inilah yang menciptakan impuls-impuls yang pada akhirnya meliputi seluruh negeri itu. Seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya sistem-sistem transportasi dan komunikasi, pulau-pulau kecil ini tumbuh dan menyatu menjadi kawasan-kawasan yang jauh lebih luas yang mengambil alih, misalnya, Birmingham dan seluruh Midland, Manchester, dan seluruh Lancashire selatan dan provinsi West Yorkshire. Sedemikian berpengaruhnya kawasan-kawasan ini sampai-sampai politik dan kepentingan-kepentingan mereka memainkan suatu peran yang sangat berpengaruh, jika bukannya menentukan, dalam bagaimana bangsa Inggris sebagai suatu keseluruhan diatur. Kawasan-kawasan itu bahkan melahirkan filosofi-filosofi mereka sendiri, dimana 'mazhab Manchester' dari para pedagang bebas, yang dipimpin oleh Cobden dan Bright, berani menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan khusus mereka adalah juga kepentingan-kepentingan bangsa Inggris secara keseluruhan. Birmingham, sebagaimana yang terpersonifikasi di dalam figur 'Radical Joe' Chamberlain, mengambil cara pandang yang agak berbeda, sebagaimana nanti akan kita lihat. Meski demikian, bisa dikatakan bahwa politik negara Inggris sebagai suatu keseluruhan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan regional yang tidak dengan sendirinya merupakan kepentingan-kepentingan seluruh negeri (bahkan Skotlandia yang miskin jarang masuk dalam pertimbangan). Poros yang meliputi dari London, Birmingham, Midlands, sampai dengan provinsi Lanchasire dan Torkshire mendominasi politik Inggris selama berpuluh-puluh tahun dan memiliki gaya tarik dan kekuatan yang luar biasa besar. Cerita yang sama juga berlaku di seluruh Eropa. Demikian pula di Amerika Serikat ketika kawasan dan bagian di Amerika

14. S. Pollard, Essays on the Industrial Revolution in Britain, ed. Colin Holmes (Aldershot: Ashgate Variorum, 2000), 219-71.

Serikat memainkan peran yang sangat besar secara historis dalam pergeseran kekuasaan dari *north-east* dan *mid-west* ke selatan, *south-west* dan Pacific Rim.[15] Delta Sungai Mutiara dan lembah Yangtze (Shanghai) menjadi inti dari pusat-pusat kekuasaan yang dinamis di Cina yang secara ekonomi (meski tidak secara politik) mendominasi seluruh bagian lain dari negeri tersebut. Ringkas kata, kekuasaan yang lebih besar, yaitu negara teritorial, seringkali dikuasai oleh beberapa kepentingan atau koalisi kepentingan regional yang dominan, sampai kemudian muncul kawasan lain untuk mengimbangi atau mengunggulinya. Pergeseran pengaruh dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu skala ke skala yang lain, inilah yang persisnya biasanya dicptakan oleh revolusi yang pasif dari proses-proses molekuler akumulasi kapital. Namun prinsip umumnya jelas: regionalitas terkristalisasi menurut logikanya sendiri yang berbeda dari logika proses-proses molekuler akumulasi kapital dalam ruang dan waktu. Seiring waktu, kawasan-kawasan yang terbentuk itu akan memainkan suatu peran krusial dalam keseluruhan politik negara, dan mereka ditentukan semata-mata berdasarkan logika teritorial tertentu, yaitu logika dari posisi-posisinya sendiri.

Namun, negara bukanlah sekedar sesuatu yang tak berdaya, juga bukanlah sesuatu yang secara niscaya bersifat pasif, dalam kaitannya dengan proses-proses ini. Ketika negara sadar akan arti pentingnya memajukan dan menguasai dinamika regional sebagai suatu sumber bagi kekuasaannya sendiri, negara bisa menjalankan pengaruhnya atas dinamika-dinamika tersebut lewat kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Negara mungkin pertama-tama melakukan hal tersebut secara aksidental. Pada abad kesembilanbelas,

---

15. A. Markusen, *Regions: The Economics and Politics of Territory* (Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1987); id., *Profit Cycles, Oligopoly and Regional Development* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985); and S.-M. Li and W.-S. Tang, *China's Regions, Polity and Economy: A Study of Spatial Transformation in the Post-Reform Era* (Hong Kong: Chinese University Press, 2000).

misalnya, negara membangun jalan-jalan raya dan sistem komunikasi terutama untuk tujuan-tujuan pemerintahan, kontrol militer, dan perlindungan terhadap seluruh teritori. Namun, ketika semua itu telah terbangun, infrastruktur-infrastruktur ini menyediakan jalur-jalur yang mempermudah arus barang, tenaga kerja, dan kapital. Dalam banyak kasus, investasi-investasi itu dibangun secara bersama-sama. Masih menjadi bahan perdebatan apakah Haussmann membangun bulevard-bulevard baru di Paris setelah tahun 1853 terutama untuk tujuan-tujuan kontrol atas militer atau atas seluruh penduduk ataukah sebagai suatu sarana untuk mempermudah sirkulasi kapital di dalam batas-batas kota yang terbatasi oleh jaringan-jaringan jalan dan lorong-lorong abad pertengahan.[16] Dan yang menarik, sementara sistem jalan tol antar negara bagian di Amerika Serikat hampir pasti dibangun utamanya untuk alasan-alasan ekonomi, legitimasinya di hadapan publik disandarkan dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.

Selain itu, negara juga bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur diferensiasi dan dinamika regional bukan hanya lewat kekuatan komandonya atas investasi-investasi infrastruktural (terutama dalam transportasi dan komunikasi, pendidikan, dan riset), namun juga lewat kekuatannya untuk memaksakan diberlakukannya hukum-hukum yang telah ditetapkan dan lewat kekuatan aparatus-aparatus administratifnya. Kekuasaan negara untuk menjalankan reformasi-reformasi atas institusi-institusi dasarnya yang dibutuhkan oleh proses akumulasi kapital juga memiliki efek-efek yang mendalam (baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif). Ketika, sebagai misal, perbankan lokal didirikan oleh bank-bank nasional di Inggris dan Prancis pada abad kesembilanbelas, arus kapital uang yang bebas dan lintas ruang nasional mengubah dinamika regional. Yang lebih mutakhir,

16. D. Harvey, *Paris, the Capital of Modernity* (New York: Routledge, 2003).

penghapusan undang-undang perbankan lokal di Amerika Serikat yang bersifat membatasi, diikuti dengan suatu gelombang pengambilalihan dan merger bank-bank regional, telah mengubah seluruh iklim investasi di negeri itu dari bersifat lokal menjadi bangunan konfigurasi-konfigurasi regional yang lebih terbuka dan cair. Dan dalam beberapa kasus, dimana Singapura merupakan suatu contoh kasus yang paling menonjol, suatu negara politik bisa secara aktual didirikan untuk membangun suatu ekonomi regional yang efektif dan dinamis lewat penguasaan secara sistematis proses-proses molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu di dalam batas-batasnya sendiri. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, suatu iklim bisnis yang atraktif cenderung berperan sebagai suatu magnet bagi arus kapital, dan karena itulah negara-negara bisa memperbesar kekuasaan mereka dengan jalan membangun tempat-tempat singgah bagi investasi kapital. Dengan begitu, negara bisa memanfaatkan monopoli kekuasaannya yang inheren dalam ruang untuk menawarkan keistimewaan-keistimewaan monopoli kepada siapapun yang mau memanfatkannya.

Hal ini memunculkan suatu problem mendasar ke hadapan kita mengenai apa yang terjadi ketika proses-proses molekuler dari konstruksi kawasan melampaui batas-batas negara politik atau karena alasan-alasan tertentu membutuhkan suatu saluran keluar melampaui batas-batas tersebut. Tentu saja, ada beberapa kasus menarik dimana ekonomi-ekonomi regional menunggangi batas-batas nasional – El Paso da Ciudad Juarez atau Detroit dan Windsor merupakan contoh-contoh yang menarik. Dan pembentukan struktur-struktur administratif supra-negara seperti Uni Eropa, atau suatu pasar bersama seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) atau MERCOSUR (pasar bersama negara-negara bagian Selatan dari Amerika Latin), mungkin bisa menjadi solusi-solusi bagi problem ini. Namun, persoalan terbesarnya ialah apakah yang terjadi pada surplus-surplus kapital yang

dihasilkan di dalam negara ini. Inilah yang kemudian menjadi jantung utama dari munculnya tekanan-tekanan untuk menjalankan praktek-praktek imperialis dalam sistem antar-negara.

Konsekuensi lebih lanjut dari semua itu ialah bahwa konflik-konflik geopolitik hampir pasti akan muncul dari proses-proses molekuler akumulasi kapital tak peduli bagaimana kekuasaan-kekuasaan negara mengartikannya, bahwa gerak-gerak molekuler ini (terutama kapital keuangan) bisa dengan mudah merongrong kekuasaan-kekuasaan negara, dan bahwa negara politik - di negara-negara kapitalisme maju - harus mengerahkan usaha dan pemikiran yang besar dalam usaha untuk mengelola arus-arus molekuler demi kepentingannya sendiri baik di dalam maupun di luar negeri. Dan di front luar negeri, negara biasanya akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap asimetri-asimetri yang selalu muncul dari pertukaran-pertukaran spasial dan berusaha memainkan kartu kontrol monopoli yang dimilikinya sekuat-kuatnya. Singkat kata, negara niscaya akan terlibat dalam perjuangan geopolitik dan jika sanggup, menjalankan praktek-praktek imperialis. Kita akan lebih secara lebih kongkret bagaimana hal ini berlangsung dalam bagian berikut.

Sirkuit Kapital

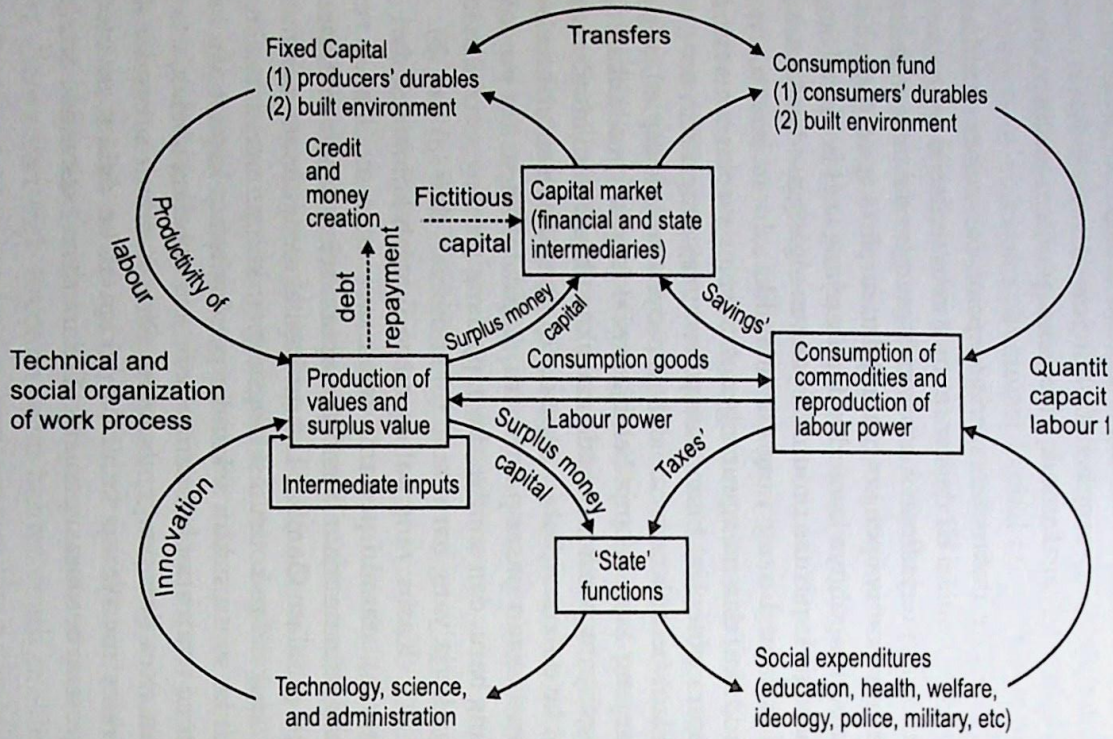
Analisis dinamika spasio-temporal berikut, meski memberikan perhatian terhadap kontradiksi-kontradiksi dan instabilitas-instabilitas, akan mengabaikan tendensi menyolok dari kapitalisme untuk menghasilkan krisis overakumulasi. Kita akan lebih menelaah secara dekat bagaimana proses-proses produksi ruang terperangkap di dalam proses-proses terciptanya krisis dan dalam proses penyelesaiannya. Namun karena perlu juga dalam hal ini untuk mengkaitkan diri dengan contoh-contoh empiris, maka saya akan menerima apa yang ditawarkan oleh Brenner, yaitu bahwa suatu problem overakumulasi yang kronik dan berlangsung lama dan telah membayangi keseluruhan bangunan kapitalisme semenjak

tahun 1970-an sebagai suatu fakta empiris.[17] Fakta ini akan menjadi latar belakang untuk menafsirkan volatilitas kapitalisme internasional sejak saat itu sebagai serangkaian *spatio-temporal fixes* yang bersifat temporer dan yang dalam jangka menengah gagal untuk mengatasi problem-problem overakumulasi.

Ide dasar dari *spatio-temporal fixes* cukup sederhana. Overakumulasi di dalam suatu sistem teritorial tertentu memiliki arti terjadinya suatu kondisi surplus dalam tenaga kerja (meningkatnya pengangguran) dan surplus kapital (yang berupa berlimpahnya komoditi di pasar yang tak bisa dijual tanpa merugi, kapasitas produktif yang menganggur dan/atau surplus kapital uang yang tak memiliki saluran investasi yang produktif dan menguntungkan). Surplus-surplus semacam itu secara potensial bisa diserap lewat (a) pengalihan temporal dalam bentuk investasi dalam proyek-proyek kapital jangka-panjang atau belanja-belanja sosial (seperti pendidikan dan riset) yang akan menunda masuknya kembali nilai-nilai kapital ke dalam sirkulasi kapital, (b) pengalihan spasial melalui pembukaan pasar-pasar baru, kapasitas-kapasitas produksi yang baru, dan sumber daya, peluang-peluang sosial dan tenaga kerja yang baru, atau (c) kombinasi dari (a) dan (b).

Kasus yang paling menarik ialah kombinasi dari (a) dan (b), namun pertama-tama saya akan membahas versi yang semata-mata bersifat temporal sebagaimana diilustrasikan di dalam Gambar 1. Arus kapital menyimpang dari ranah produksi dan konsumsi langsung (sirkuit primer) dan mengarah ke suatu sirkuit sekunder pembentukan kapital dan konsumsi tetap atau ke suatu sirkuit tersier belanja-belanja sosial dan riset dan pengembangan. Sirkuit-sirkuit sekunder dan tersier menyerap kelebihan kapital ke dalam investasi-investasi berdurasi panjang. Dalam sirkuit sekunder, arus ter-

17. Brenner, *The Boom and the Bubble.*


Transfers
Fixed Capital
(1) producers' durables
(2) built environment
Consumption fund
(1) consumers' durables
(2) built environment
Credit
and
money
creation
Fictitious
capital
Capital market
(financial and state
intermediaries)
Productivity of
labour
debt
repayment
Surplus money
capital
Savings'
Technical and
social organization
of work process
Production of
values and
surplus value
Consumption goods
Consumption of
commodities and
reproduction of
labour power
Quantit
capacit
labour f
Labour power
Surplus money
capital
Taxes'
Intermediate inputs
Innovation
'State'
functions
Technology, science,
and administration
Social expenditures
(education, health, welfare,
ideology, police, military, etc)

bagi menjadi kapital tetap untuk produksi (pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan dsb.) dan penciptaan suatu dana konsumsi (sebagai misal perumahan). Pemanfaatan secara gabungan seringkali mungkin dilakukan (jalan tol bisa dimanfaatkan baik untuk aktivitas-aktivitas produksi maupun konsumsi). Porsi tertentu kapital yang mengalir ke sirkuit sekunder ditanamkan dalam bentuk tanah dan menjadi aset-aset bank yang menempati suatu tempat—suatu lingkungan yang dibangun untuk produksi dan konsumsi (segala hal mulai dari kawasan-kawasan industri, pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara, jaringan-jaringan transporasi dan komunikasi untuk sistem pembuangan limbah dan air, perumahan, rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolah). Investasi-investasi ini biasanya menjadi suatu inti fisik dari suatu kawasan. Ringkasnya, investasi-investasi itu memainkan suatu peran fundamental di dalam produksi regionalitas. Sederhananya, investasi-investasi tersebut lebih dari sekedar suatu sektor minor dalam ekonomi. Investasi-investasi tersebut bisa dan memang menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama, sebagaimana akan kita lihat, ketika terjadi ekspansi geografis. Arus menuju sirkuit tersier kapital – yang didefinisikan sebagai investasi-investasi jangka-panjang dalam infrastruktur-infrastruktur sosial – juga terbagi ke dalam investasi dalam, katakanlah, riset dan pengembangan atau pelatihan keterampilan yang secara langsung memberikan umpan balik kepada produksi, dan investasi-investasi yang berorientasi pada peningkatan kondisi sosial dari masyarakat (sebagai misal, lewat pendidikan dan pelayanan kesehatan). Di negara-negara kapitalis maju, kategori terakhir inilah (sebagai misal anggaran layanan kesehatan) yang seringkali menyerap sejumlah besar kapital. Sejumlah porsi tertentu dari investasi ini juga bisa dianggap sebagai bersifat tak mobil secara geografis. Suatu sistem pendidikan, misalnya, sulit untuk berpindah-pindah begitu sistem itu telah terorganisir secara administratif dan finansial dalam suatu ruang tertentu.

Surplus-surplus yang dihasilkan saat ini bisa dan memang telah diserap ke dalam sirkuit-sirkuit sekunder dan tersier dari kapital. Investasi-investasi ini bisa bersifat produktif dalam jangka panjang jika investasi-investasi tersebut memang berkontribusi terhadap produktivitas kapital di masa depan. Hal ini terjadi ketika suatu armada kerja yang lebih terdidik, investasi dalam riset dan pengembangan, atau suatu sistem transportasi dan komunikasi yang lebih efisien mempermudah jalur bagi akumulasi kapital lebih lanjut. Jika hal ini yang berlangsung, maka kapital yang mengalami overakumulasi pada akhirnya akan mengalir kembali ke sirkuit primer kapital, namun butuh beberapa tahun untuk bisa demikian dan itu berarti butuh babak baru dalam investasi infrastruktur-infrastruktur fisik dan sosial. Investasi-investasi semacam ini menawarkan kelegaan, setidaknya untuk sementara waktu, terhadap problem overakumulasi. Namun over-investasi dalam sirkuit sekunder dan tersier kapital juga bisa terjadi, dimana terjadi surplus perumahan, ruang perkantoran, dan fasilitas pabrik dan pelabuhan, maupun kelebihan kapasitas dalam, katakanlah, sistem pendidikan. Dalam kasus ini, aset-aset akan didevaluasi dalam sirkuit sekunder atau tersier itu sendiri.

Overakumulasi dalam sirkuit-sirkuit sekunder dan tersier seringkali berfungsi sebagai pemicu bagi terjadinya krisis-krisis yang lebih umum. Arti penting dari hal ini sangat sering diabaikan dalam pembahasan umum mengenai dinamika akumulasi kapital (Brenner, misalnya, mengabaikan hal ini). Sebagai misal, titik awal dari krisis tahun 1973-195 ialah runtuhnya pasar properti di seluruh dunia yang diikuti tak lama kemudian oleh kebangkrutan Kota New York; awal dari stagnasi satu dekade Jepang pada tahun 1990 ialah runtuhnya gelembung spekulatif atas tanah, properti dan harga-harga aset lainnya, sehingga menjadikan seluruh sistem perbankan berada dalam keadaan bahaya (yang menarik, pemerintah Jepang berusaha mengkompensasi secara periodik lewat belanja-belanja negara yang massif dalam pekerjaan umum);

awal dari runtuhnya Asia pada tahun 1997 ialah meletusnya gelembung properti di Thailand dan Indonesia; dan tiang penyangga paling penting bagi ekonomi AS dan Inggris setelah serangan resesi umum di semua sektor sejak pertengahan 2001 sampai seterusnya ialah vigoritas spekulatif yang terus berlanjut di dalam pasar properti dan perumahan dan konstruksi. Dalam suatu efek gelombang surut yang aneh, kita temukan bahwa sekitar 20 persen dari pertumbuhan GDP di Amerika Serikat pada tahun 2002 disebabkan oleh pembayaran kembali oleh para konsumen terhadap utang hipotek mereka atas dasar nilai rumah mereka yang telah mengalami inflasi dan dengan menggunakan uang ekstra yang mereka dapatkan dari konsumsi langsung (yang berakibat memperbesar overakumulasi kapital dalm sirkuit primer). Konsumen-konsumen Inggris meminjam $19 milyar pada kuartal ketiga tahun 2002 atas dasar nilai hipotek mereka untuk membiayai konsumsi mereka. Apa yang terjadi jika dan ketika gelembung properti ini meletus, hal tersebut kini telah menjadi pusat perhatian yang serius.[18] Kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan dampak dari program pekerjaan umum yang luas yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Cina sebagai salah satu cara yang mungkin untuk setidaknya menjadi saluran parsial bagi overakumulasi global di masa depan yang tak terlalu jauh (dengan cara yang sama dengan sistem jalan tol antar negara bagian dan semua kerja suburbanisasi dan pembangunan daerah selatan dan barat Amerika Serikat telah membantu menyerap surplus kapital pada tahun 1950-an dan 1960-an).

Namun, semua ini bergantung pada peran mediasi yang krusial dari institusi-institusi finansial dan/atau negara dalam mengubah arus kapital di antara ketiga sirkuit kapital itu. Surplus kapital dalam kaos dan sepatu tak bisa diubah

18. C. de Acule, 'Keeping a Wary Eye on the Housing Boom', *International Herald Tribune*, 23 Jan. 2003, hal. 11.

secara langsung menjadi suatu bandara atau institut penelitian. Di sini, institusi-institusi negara dan keuangan memiliki kekuatan kunci untuk menghasilkan dan menawarkan kredit. Mereka mampu menciptakan suatu kuantitas dari apa yang bisa disebut sebagai 'kapital fiktif' (*fictitious capital*) (yaitu aset-aset kertas atau *promissory notes* yang tak memiliki penjamin material, namun bisa dipergunakan sebagai uang).[19] Andaikan mereka menciptakan kapital fiktif kira-kira ekuivalen dengan kelebihan kapital yang terkunci dalam produksi kaos dan sepatu dan mengalihkannya kepada proyek-proyek berorientasi masa depan seperti misalnya dalam pembangunan jalan tol atau pendidikan sehingga dengan begitu akan menghidupkan kembali ekonomi (mungkin termasuk memperbesar permintaan akan kaos dan sepatu oleh para guru dan para pekerja konstruksi). Jika belanja untuk pembangunan lingkungan atau perbaikan sosial terbukti produktif (atau bersifat fasilitatif terhadap bentuk-bentuk akumulasi kapital selanjutnya yang lebih efisien), maka nilai fiktif akan tertebus kembali (entah secara langsung lewat pelunasan utang atau secara tak langsung dalam bentuk katakanlah pengembalian pajak yang lebih tinggi untuk melunasi utang negara). Teori mengenai belanja negara yang produktif yang membayar belanja negara itu dari hasil pertumbuhan dan pajak yang lebih tinggi seringkali diterapkan di dalam praktek, sebagaimana dalam kasus pembangunan kembali Paris selama Imperium Kedua.[20] Namun, teori itu tidak selalu berhasil, dan overinvestasi dalam pembangunan lingkungan atau dalam belanja sosial bisa menghasilkan devaluasi terhadap aset-aset ini atau menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk melunasi utang-utang negara. Selama tahun 1960-an di Amerika Serikat, misalnya, diyakini bahwa investasi yang massif dalam pendi-

---

19. Saya mengelaborasi kategori Marx mengenai 'fictitious capital' dalam Harvey, Limits to Capital, bab 10. Lihat juga S. Strange, *Mad Money: When Markets Outgrow Governments* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998).

20. Harvey, *Paris, the Capital of Modernity*.

dikan dalam jangka panjang akan memberikan hasilnya dan menciptakan suatu basis baru bagi akumulasi lebih lanjut. Namun, ternyata hal tersebut tak terjadi, dan krisis fiskal negara AS (termasuk Kota New York) yang memuncak selama tahun 1970-an sebagian disebabkan oleh over-investasi dalam produksi infrastruktur-infrastruktur fisik dan sosial semacam ini (biaya untuk perang Vietnam menjadi bagian penyebab yang lain).

Di tengah-tengah kegagalan fiskal, investasi-investasi semacam itu terbukti memiliki nilai yang tak bisa dihitung karena banyak darinya yang berada dalam bentuk nilai guna fisiknya. Surplus kapital yang besar dari Amerika Serikat (terutama Baltimore) digunakan untuk membiayai pembangunan sistem bawah tanah Inggris pada awal abad keduapuluh, yang kemudian bangkrut, namun masih meninggalkan saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Kisah klasik serupa ialah kisah perusahaan properti Olympia & York yang berhasil menghimpun kekayannya dengan membeli properti-properti yang bangkrut dengan harga murah dan kemudian mengubahnya menjadi layak. Olympia & York kemudian mengalami kemacetan saat meluncurkan proyeknya sendiri di Canary Wharf dan disita oleh bank-bank karena kegagalan proyek tersebut untuk merealisir tingkat kembalian yang memadai. Bank-bank menurunkan nilai properti itu dan menjualnya kepada investor-investor, yang kemudian menjalankan dengan sangat bagus proyek tersebut (perusahaan Olympia & York, yang sadar akan kemungkinan keberhasilan itu, turut menjadi bagian dari konsorsium yang membeli kembali properti itu dengan harga yang lebih murah!). Sebagaimana yang pernah dikatakan secara tepat oleh Marx, gelombang pertama investor seringkali bangkrut dalam usaha-usaha semacam itu, sehingga menjadikan bisnis-bisnis yang menguntungkan berpindah ke tangan mereka yang membeli aset-aset yang telah terdevaluasi nilainya itu dengan harga yang sangat murah. Devaluasi aset, ter-

utama dalam sirkuit sekunder kapital, karenanya bisa memainkan suatu peran yang penting dalam membangun suatu basis yang baru bagi akumulasi kapital.

Spatio-Temporal Fixes

Istilah *'fix'* memiliki suatu makna ganda dalam konteks pemikiran saya. Sejumlah porsi tertentu dari total kapital secara harfiah terfiksasi di dalam dan pada fisik tanah untuk periode waktu yang relatif lama (bergantung pada usia ekonomis dan fisiknya). Beberapa belanja sosial (seperti pendidikan publik atau pun sistem layanan kesehatan) juga menjadi terteritorialisasi dan menjadi tak mobil secara geografis karena adanya komitmen-komitmen negara. *Spatio-temporal 'fixes'*, di sisi lain, merupakan suatu metafora bagi suatu jenis solusi terhadap krisis-krisis kapitalis lewat penangguhan secara temporal dan lewat ekspansi geografis. Lantas bagaimana dan kapan makna-makna material dan metaforis ini saling bertabrakan satu sama lain?

Produksi ruang, organisasi dari pembagian-pembagian tenaga kerja yang sepenuhnya baru secara teritorial, pembukaan kompleks-kompleks sumber daya yang baru dan yang lebih murah, pembukaan kawasan-kawasan baru sebagai ruang akumulasi kapital yang dinamis, dan penetrasi formasi-formasi sosial yang telah ada oleh relasi-relasi sosial dan pengaturan-pengaturan institusional yang kapitalis (seperti peraturan-peraturan mengenai kontrak dan pengaturan mengenai hak milik pribadi) menjadi cara-cara penting untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja. Namun, ekspansi, reorganisasi dan rekonstruksi geografis semacam itu seringkali mengancam nilai-nilai yang telah terfiksasi dalam ruang (melekat pada tanah) hanya saja belum terealisir. Kontradiksi ini tak terhindarkan, dan menciptakan perulangan yang tiada akhir karena kawasan-kawasan baru juga membutuhkan kapital tetap dalam infrastruktur fisik dan pembangunan lingkungan jika ingin infrastruktur dan lingkungan terse-

but berfungsi secara efektif. Kuantitas yang sangat besar dari kapital yang terfiksasi di dalam ruang berperan sebagai suatu pengerem terhadap kapasitas untuk merealisasikan suatu *spatial fix* di tempat lain. Nilai dari aset-aset yang membentuk Kota New York di masa lalu dan di masa kini tidaklah kecil dan ancaman devaluasi terhadap aset-aset itu pada tahun 1975 (dan terulang kembali pada tahun 2003) pada saat itu (dan di saat sekarang) dipandang sebagai suatu acaman utama bukan saja terhadap kota, namun juga terhadap seluruh masa depan kapitalisme. Jika kapital tidak bergerak keluar, maka kapital akan mengalami kehancuran dan devaluasi; deindustrialisasi yang dialami oleh jantung-jantung kapitalisme (seperti Pittsburg, Sheffield, Ruhr), maupun di banyak tempat di dunia (seperti Bombay) pada tahun 1970-an dan 1980-an menjadi contoh-contoh nyata. Jika kapital tidak atau tidak bisa bergerak, maka kapital yang mengalami overakumulasi akan terdevaluasi secara langsung akibat serangan resesi atau depresi yang deflasioner.

Namun, dalam dinamika transformasi spasio-temporal itu, muncullah kontradiksi-kontradiksi. Jika terjadi surplus kapital dan armada kerja di dalam suatu teritori tertentu (seperti di dalam suatu negara-bangsa atau suatu kawasan) dan surplus tersebut tak bisa diabsorsi di dalam negeri (entah lewat penyesuaian-penyesuaian geografis atau belanja-belanja sosial), maka surplus tersebut harus dialihkan ke tempat lain yang bisa berfungsi sebagai suatu dataran yang segar bagi direalisasikannya secara menguntungkan surplus tersebut dan tidak terdevaluasi. Hal ini bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Pasar-pasar untuk surplus komoditi memang bisa ditemukan di mana-mana. Namun, ruang untuk surplus kapital haruslah memiliki alat-alat pembayaran seperti emas atau cadangan mata uang (seperti dolar) atau komoditi-komoditi yang bisa diperdagangkan. Untuk itu, surplus komoditi bisa dikirimkan keluar agar uang atau komoditi mengalir masuk. Cara ini ternyata hanya membuat problem overakumulasi

hanya bisa diatasi dalam jangka pendek (hanya mengubah surplus dari komoditi menjadi uang atau menjadi bentuk komoditi yang lain, meskipun jika ternyata yang terakhir ini, sebagaimana sering terjadi, mempermurah bahan-bahan mentah atau input-input lain, bentuk komoditi yang lain ini bisa membukakan kesempatan-kesempatan baru bagi penciptaan-laba). Jika teritori tersebut tak memiliki cadangan atau komoditi untuk diperdagangkan kembali, maka pilihannya haruslah ditemukan teritori-teritori yang memilikinya (sebagaimana Inggris memaksa India untuk melakukannya dengan membuka perdagangan candu dengan Cina di abad kesembilanbelas dan dengan begitu Inggris bisa menghisap perak milik Cina via candu yang dibudidayakan India) atau diberikan kredit atau bantuan. Dalam kasus yang terakhir, suatu teritori asing diberi pinjaman atau donasi uang untuk membeli surplus komoditi yang dihasilkan di dalam negeri. Inggris pernah melakukan hal ini terhadap Argentina pada abad kesembilanbelas, dan surplus perdagangan Jepang selama tahun 1990-an banyak yang diabsorbsi dengan cara memberikan pinjaman kepada Amerika Serikat guna mendukung kosumerisme di Amerika Serikat sehingga barang-barang Jepang akan dibeli (meski AS dalam kasus ini juga memiliki keuntungan bahwa dolarnya merupakan alat pembayaran dan karena itu AS memiliki hak *seigniorage*; jika AS memilih memanfaatkan hak tersebut, maka AS bisa meregulasi nilai tukar internasional dari dolar untuk membayar kembali Jepang dengan mata uang yang telah didevaluasi). Salah satu taktik dari industri senjata AS ialah mendorong pemerintah AS, demi alasan-alasan 'keamanan', untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah-pemerintah asing (yang paling terkini ialah kepada Polandia) untuk membeli perlengkapan militer buatan AS. Pasar dan transaksi kredit semacam ini bisa menghapuskan problem-problem overakumulasi di dalam teritori tertentu, setidaknya dalam jangka pendek. Transaksi-transaksi tersebut bisa berfungsi dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi ketidakseragaman pembangunan geografis dima-

na di dalamnya surplus-surplus yang tersedia di dalam satu teritori diimbangi dengan ketiadaan suplai di tempat yang lain.

Hanya saja, dengan bergantung pada sistem kredit, teritori-teritori menjadi rentan terhadap arus kapital spekulatif dan fiktif yang memang bisa menstimulus namun sekaligus bisa merongrong perkembangan kapitalis dan bahkan, sebagaimana pada tahun-tahun terakhir, dimanfaatkan untuk memaksakan diterapkannya kebijakan devaluasi-devaluasi yang kejam di teritori-teritori tersebut. Keterjebakan teritori pada utang semakin menjadi suatu problem global setelah tahun 1980 atau setelahnya, dan banyak negara miskin (dan bahkan beberapa kekuatan besar, seperti Rusia di tahun 1998 dan Argentina pasca tahun 2001) mendapati bahwa tak mungkin bagi mereka untuk membayar utang-utang mereka, dan muncul ancaman gagal bayar. Untuk mengatasi kesulitan ini, suatu organisasi permanen yang terdiri atas sembilanbelas negara kreditor, yang dikenal sebagai Paris Club, didirikan guna menetapkan aturan-aturan penjadwalan kembali pembayaran utang untuk negara-negara yang tak sanggup melunasi utangnya kepada kreditor-kreditor. Sejak tahun 2000, sekitar tigapuluh tujuh negara telah dipaksa untuk mengikuti jalan ini, dan muncul tekanan yang semakin kuat terhadap Paris Club untuk memberikan pembebasan utang sepenuhnya kepada beberapa negara termiskin. Namun, apa yang disebut Cheryl Payer sebagai 'jebakan utang' sesungguhnya haruslah dipahami sebagai suatu proses 'memancing' (*hook in*) negara-negara miskin ke dalam sistem sirkulasi kapital sehingga negara-negara tersebut bisa dimanfaatkan sebagai 'tempat pembuangan' (*sinks*) surplus-surplus kapital.[21] Negara penerima surplus kapital inilah yang harus menanggung devaluasi kapital sehingga negara kreditor bisa

21. C. Payer, *The Debt Trap: The IMF and the Third World* (New York: Monthly Review Press, 1974).

terlindung dari devaluasi. Sumber-sumber daya dari negara-negara penerima bisa dengan mudah dijarah di bawah aturan-aturan kejam pelunasan utang.

Ekspor kapital, terutama ketika dibarengi dengan ekspor armada tenaga kerja, bekerja dengan cara yang agak berbeda dan biasanya memiliki dampak-dampak jangka panjang. Dalam kasus ini, surplus-surplus kapital dan tenaga kerja dikirim ke tempat lain agar akumulasi kapital bisa berputar di ruang regional yang baru. Surplus-surplus kapital dan tenaga kerja Inggris yang dihasilkan pada abad kesembilanbelas menemukan jalannya ke Amerika Serikat, ke koloni-koloni pemukiman seperti Afrika Selatan, Australia, dan Kanada, dan menciptakan pusat-pusat akumulasi yang baru dan dinamis di teritori-teritori ini sehingga terciptalah permintaan akan barang-barang dari Inggris. Bantuan luar negeri AS di masa-masa sekarang hampir selalu terkait dengan kewajiban untuk membeli barang dan jasa dari AS, dan karena itu berfungsi secara de fakto sebagai pendukung ekonomi AS. Karena butuh waktu bertahun-tahun bagi kapitalisme untuk menjadi matang di teritori-teritori ini (jika memang sempat matang) dan untuk sampai ke titik dimana mereka juga mulai menciptakan overakumulasi-overakumulasi kapital, maka negara asal kapital tak berharap akan bisa memetik manfaat dari proses ini untuk jangka waktu yang tak terbatas. Ini terutama terjadi ketika barang-barang permintaan di tempat-tempat lain itu berbentuk sebagai kapital tetap yang berupa tanah. Investasi-investasi portofolio memang bisa mendukung konstruksi rel kereta api, jalan tol, pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungan dan infrastruktur-infrastruktur lain yang dibutuhkan sebagai basis yang kuat bagi akumulasi kapital di masa depan. Namun tingkat kembalian (*rate of return*) dari investasi-investasi jangka panjang di negara-negara penerima ini pada akhirnya bergantung pada tingkat perubahan yang cepat dalam dinamika akumulasi yang kuat di negara penerima (kecuali, sebagaimana sering terjadi, jika tingkat kembalian [*rate of return*] atas kapital yang dipinjam-

kan itu dijamin penuh oleh negara penerima). Inggris memberikan pinjaman kepada Argentina dengan cara ini selama paro kedua abad kesembilanbelas. Amerika Serikat sendiri, via Marshall Plan untuk Eropa (terutama Jerman) dan Jepang, jelas-jelas melihat bahwa keamanan ekonomi dirinya (dengan mengesampingkan aspek militer dari Perang Dingin) sangat bergantung pada dihidupkannya kembali aktivitas kapitalis di ruang-ruang tersebut.

Kontradiksi-kontradiksi muncul, sebagaimana yang ditunjukkan secara sangat menyolok oleh kasus terakhir di atas, ketika ruang-ruang dinamis yang baru dari akumulasi kapital itu kemudian menghasilkan surplus dan berusaha menemukan cara penyerapan lewat ekspansi-ekspansi geografis. Jepang dan Jerman lantas berubah menjadi kompetitor-kompetitor serius terhadap kapital AS sejak akhir tahun 1960-an sampai sekarang, persis sebagaimana AS mengungguli kapital Inggris (dan membantu meruntuhkan imperium Inggris) saat pergantian ke abad duapuluh. Yang menarik untuk dicatat ialah selalu ada titik dimana perkembangan-perkembangan dalam negeri yang kuat begitu meluap sehingga dibutuhkan suatu *spatial fix*. Di Jepang, *spatial fix* ini dijalankan selama tahun 1960-an, pertama lewat perdagangan, dan kemudian lewat ekspor kapital melalui investasi langsung, pertama ke Uni Eropa dan Amerika Serikat, dan yang lebih mutakhir melalui investasi-investasi massif (baik yang bersifat langsung maupun portofolio) di Asia Timur dan Asia Tenggara secara umum dan khususnya Cina, dan pada akhirnya melalui pemberian pinjaman kepada negara lain (terutama untuk mendanai defisit neraca anggaran AS). Korea Selatan kemudian muncul pada tahun 1980-an, diikuti oleh Taiwan pada akhir tahun 1980-an, dan kedua negara itu bukan saja mengekspor kapital keuangannya, namun juga beberapa praktek manajemen tenaga kerja yang paling kejam ketika berperan sebagai subkontraktor-subkontraktor bagi kapital multinasional di seluruh dunia (di Amerika Tengah dan Afrika, maupun di negara-negara Asia Timur dan Asia Teng-

gara lainnya). Bahkan pengikut-pengikut pembangunan kapitalis yang berhasil akhir-akhir ini juga mendapati diri mereka membutuhkan suatu *spatio-temporal fix* bagi kapital mereka yang mengalami overakumulasi. Kecepatan perubahan posisi teritori-teritori tertentu, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, dari teritori-teritori penerima bersih kapital menjadi teritori-teritori pengekspor bersih kapital relatif cukup luar biasa jika dibandingkan dengan lambannya ritme yang khas dari periode-periode sebelumnya. Namun pada saat yang bersamaan, teritori-teritori yang berhasil ini juga harus lebih cepat berhadapan dengan arus balik (*blowback*) dari *spatio-temporal fixes* mereka. Cina, yang mengabsorpsi surplus-surplus dalam bentuk investasi-investasi asing langsung dari Jepang, Korea, dan Taiwan, dengan cepat menggantikan negara-negara tersebut di dalam banyak lini produksi dan ekspor.

Over-kapasitas secara umum yang telah diidentifikasi oleh Brenner terutama sejak dari tahun 1980 sampai sekarang terdisagregasi menjadi suatu *hub* ekonomi yang hegemonik (triad Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa) dan serangkaian *spatio-temporal fixes* yang berpecaran dan menyebar terutama di sepanjag Asia Timur dan Asia Tenggara, dengan elemen-elemen tambahan di Amerika Latin (terutama Brazil, Meksiko, dan Chili), dan semenjak akhir Perang Dingin ditambah dengan sejumlah negara Eropa timur. Meski *spatio-temporal fixes* ini bisa dilihat dalam kerangka teritori, namun pada dasarnya *spatio-temporal fixes* itu merupakan relasi-relasi material dan sosial antar kawasan yang terbangun melalui proses-proses molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu. Persoalan-persoalan teritorial yang bersifat formal antara Taiwan dan Cina daratan tampaknya merupakan sesuatu yang sepenuhnya bersifat anakronistik jika diamati dari latar belakang semakin meningkatnya integrasi dari kawasan-kawasan industri Taipei dan Shanghai.

Ada dua kemungkinan hasil dari proses ini. Yang pertama, *spatio-temporal fixes* yang baru akan terbuka beru-

lang kali dan surplus-surplus kapital akan diserap secara episodik. Apa yang saya sebut sebagai 'krisis yang berpindah-pindah' (*switching crises*) memiliki dampak mengarahkan kembali arus-arus kapital dari satu ruang ke ruang yang lain. Sistem kapitalis masih tetap relatif stabil secara keseluruhan, bahkan meskipun bagian-bagiannya mengalami kesulitan-kesulitan secara periodik (seperti deindustrialisasi di satu tempat atau devaluasi parsial di tempat lain). Dampak keseluruhan dari volatilitas antar-kawasan ini meredusir untuk sementara waktu agregat bahaya-bahaya overakumulasi dan devaluasi meskipun mungkin kesulitan-kesulitan yang ada di tingkat lokal dari waktu ke waktu menjadi semakin meningkat. Dalam artian tertentu, volatilitas yang dialami semenjak tahun 1980 atau setelahnya terutama adalah volatilitas semacam ini, meski tentu saja volatilitas itu tak lebih dari volatilitas produk manipulasi, jika bukannya diarahkan, oleh kompleks Wall Street-Departemen Keuangan AS-IMF demi keuntungan kapital keuangan, Wall Street, dan ekonomi AS. Di setiap langkah, tentu saja, isu yang muncul ialah ruang manakah lagi yang akan bisa membawa keuntungan bagi arus kapital, dan mengapa demikian.

Di dalam konjungtur saat ini, kandidat yang nyata untuk mengabsorbsi surplus kapital ialah Cina, dan ada baiknya untuk menengok hal ini secara sekilas karena Cina bukan saja bisa mengilustrasikan potensi-potensi dari suatu *spatio-temporal fix* kontemporer terhadap problem overakumulasi, namun juga memiliki relevansi terhadap pertanyaan mengenai pergeseran hegemoni di dalam sistem global. Cina kini telah menjadi sebuah negeri penerima utama dari investasi asing langsung. Investasi asing langsung bersih meningkat dari $5 milyar pada tahun 1991 menjadi sekitar $50 milyar pada tahun 2002. Di sisi lain, pasar Cina juga meningkat secara sangat cepat; pendapatan perkotaan naik sebesar 11 persen dan pendapatan pedesaan naik sebesar 6 persen per tahun pada saat sekarang. Pasar dalam negeri semakin

meningkat, sebagaimana juga pasar untuk barang-barang luar negeri. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan multinasional, seperti General Motors, yang menghasilkan sebagian besar laba mereka dari penjualan di Cina pada tahun 2001-2002. Potensi yang sangat besar dari pasar dalam negeri Cina karenanya tak bisa diabaikan dan beberapa investasi asing langsung, katakanlah dalam mikro elektronik, sangat berorientasi baik untuk penjualan dalam negeri maupun untuk diekspor ke seluruh dunia. Namun yang lebih dramatis lagi ialah prospek-prospek investasi infrastruktur jangka panjang. Sejak tahun 1998, Cina berusaha menyerap surplus tenaga kerja mereka yang sangat besar (dan untuk mencegah ancaman keresahan sosial) dengan melakukan investasi yang dibiayai oleh utang pada megaproyek-megaproyek yang akan membuat pembangunan bendungan *Three Gorges* menjadi terlihat sebagai bukan apa-apa. Cina bahkan mengajukan suatu proyek yang jauh lebih ambisius (dengan biaya setidaknya $60 milyar) untuk mengalirkan air dari Sungai Yangtze ke Sungai Kuning. Sistem-sistem kereta bawah tanah dan jalan tol yang baru tengah dibangun di kota-kota besar, dan 8.500 mil jalan raya baru telah direncanakan dibangun untuk mengintegrasikan daerah pedalaman dengan zona pantai yang ekonominya dinamis, termasuk suatu jalur cepat antara Shanghai dan sebuah jalur menuju Tibet. Infrastruktur-infrastruktur perkotaan ditingkatkan mutunya di mana-mana. Olimpiade menjadi investasi yang sangat besar di Beijing. Upaya ini secara keseluruhan (*in toto*) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat selama tahun 1950-an dan 1960-an, dan memiliki potensi untuk mengabsorpsi surplus-surplus kapital selama beberapa tahun mendatang. Meski demikian, semua itu merupakan pembiayaan yang bersifat defisit, dan karena itu beresiko tinggi karena jika investasi-investasi tersebut tidak menghasilkan nilai bagi proses akumulasi selanjutnya, maka suatu krisis fiskal di negara itu akan dengan cepat membawa kon-

sekuensi-konsekuensi yang serius bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial Cina.[22] Bagaimanapun, Cina bisa dianggap sebagai suatu versi luar biasa dari suatu *spatio-temporal fix* yang memiliki implikasi-implikasi global bukan saja untuk menyerap kapital yang mengalami overakumulasi, namun juga untuk menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi dan politik ke arah Cina sebagai pemegang hegemoni regional dan barangkali tengah membawa kawasan Asia, di bawah kepemimpinan Cina, menjadi pesaing utama bagi Amerika Serikat. Inilah alasan kuat mengapa Amerika Serikat berusaha untuk menanamkan cengkeramannya terhadap suplai minyak yang semakin dibutuhkan oleh Cina dari Cekungan Kaspia maupun dari Timur Tengah.

Namun, ada kemungkinan keluaran yang kedua, dan ini adalah semakin sengitnya kompetisi internasional ketika berbagai pusat akumulasi kapital yang dinamis saling bersaing di panggung dunia di tengah-tengah arus overakumulasi yang kuat. Karena pusat-pusat itu tak mungkin bisa berhasil sepanjang waktu, maka pihak yang terlemah akan kalah dan jatuh ke dalam krisis devaluasi lokal yang serius, atau terjadi pertarungan geopoltik antar kawasan. Hal yang terakhir ini bisa berubah via logika kekuasaan teritorial menjadi konfrontasi antar negara dalam bentuk perang dagang dan perang mata uang, dengan ancaman pecahnya konfrontasi militer (seperti yang telah menciptakan dua perang dunia di antara kekuatan-kekuatan kapitalis di abad keduapuluh). Dalam kasus ini, *spatio-temporal fix* mengambil bentuk yang jauh lebih kejam ketimbang saat *spatio-temporal fix* itu berubah menjadi ekspor devaluasi dan menjadi penghancuran kapital secara

---

22. J. Kahn, 'China Gambles on Big Projects for its Stability', *New York Times*, 13 Jan. 2003, hal. Al and A8; 'Made in China, Bought in China', *New York Times*, 5 Jan. 2003, kolom *Business*, hal. 1 dan 10; D. Altman, 'China: Partner, Rival or Both', *New York Times*, 2 Mar. 2003, kolom *Money and Business*, hal. 1 and 11; T. Crampton, 'A Strong China May *Give Boost to its Neighbors'*, International Herald Tribune, Economic Outlook, 23 Jan. 2003, hal. 16-17.

lokal dan regional (seperti yang pernah terjadi dengan skala massif di Asia Timur dan Asia Tenggara dan di Rusia pada tahun 1997-1998). Namun, bagaimana dan kapan perubahan ke arah itu akan terjadi, semua bergantung pada bentuk-bentuk eksplisit dari aksi politik, dari kekuatan-kekuatan negara maupun pada proses-proses molekuler akumulasi kapital dalam ruang dan waktu. Dialektika antara logika teritorial dan logika kapitalistik berjalan secara total. Di sini, ada beberapa poin lebih jauh yang mesti kita bahas dari proses agar kita bisa lebih memahami bagaimana proses itu sungguh-sungguh berlangsung secara aktual.

Kontradiksi-kontradiksi Internal

Dalam karyanya *The Philosophy of Right*, Hegel mencatat bagaimana kontradiksi-kontradiksi internal dari masyarakat borjuis, yang terlihat sebagai over-akumulasi kekayaan di satu kutub dan penciptaan tumpukan kemiskinan di kutub yang lain, mendorong masyarakat borjuis untuk mencari solusinya lewat perdagangan luar negeri dan lewat praktek-praktk kolonial/imperial.[23] Dengan demikian, Hegel menolak ide bahwa mungkin ada jalan-jalan untuk memecahkan problem kesenjangan dan ketidakstabilan sosial lewat mekanisme-mekanisme redistribusi internal. Lenin mengutip Cecil Rhodes yang mengatakan bahwa kolonialisme dan imperialisme di luar negeri merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk menghindarkan perang saudara di dalam negeri.[24] Relasi-relasi kelas dan pertarungan kelas di dalam suatu formasi sosial dalam suatu lingkup teritorial tertentu menciptakan dorongan untuk mencari suatu *spatio-temporal fix*.

---

23. G. W. Hegel, The Philosophy of Right, terj. T. Knox (New York: Oxford University Press, 1967 edn.).

24. V. I. Lenin, 'Imperialism: The Highest Stage of Capitalism', dalam Selected Works, vol. i (Moscow: Progress Publishers, 1963).

Bukti dari akhir abad kesembilanbelas cukup menarik di sini. Perhatikan, misalnya, figur seperti Joseph Chamberlain (yang lebih dikenal sebagai 'Radical Joe'). Sebagai sosok sekutu dekat dari kepentingan-kepentingan manufaktur liberal di Birmingham, Chamberlain pada awalnya sangat menentang imperialisme (sebagai misal, dalam Perang Afghan tahun 1850-an) dan mencurahkan banyak waktunya untuk melakukan reformasi pendidikan dan proyek-proyek lain yang berhubungan dengan perbaikan infrastruktur-infrastruktur sosial dan fisik untuk produksi dan konsumsi di kota tempat tinggalnya, yaitu Birmingham. Menurutnya, hal ini akan memberikan suatu saluran produktif bagi surplus-surplus dan hasilnya akan bisa dipetik dalam jangka panjang. Sebagai seorang tokoh penting dalam gerakan konservatif liberal, dia melihat gelombang munculnya perjuangan kelas di Inggris secara langsung, dan pada tahun 1885 dia berbicara dalam suatu pidato terkenal dimana dia menyerukan kelas-kelas kaya (*the propertied classes*) untuk menyadari akan tanggung jawab-tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban mereka kepada masyarakat (yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan darii mereka yang paling kurang beruntung dan berinvestasi di dalam infrastruktur-infrastruktur sosial dan fisik demi kepentigan nasional) ketimbang semata-mata memajukan hak-hak individual mereka sebagai pemilik kekayaan. Kelas-kelas kaya gempar dan hal ini memaksanya untuk menarik kembali kata-katanya, dan sejak saat itu dia menjadi pendukung paling lantang terhadap imperialisme (pada puncaknya dia menjabat sebagai Menteri Kolonial [*Colonial Secretary*], yang membawa Inggris ke dalam malapetaka Perang Boer di Afrika Selatan). Jejak karir semacam in cukup lazim selama periode tersebut. Jules Ferry di Prancis, seorang pendukung lantang bagi reformasi dalam negeri (terutama pendidikan) pada tahun 1860-an, beralih menjadi penasehat kolonial pasca Komune tahun 1871 (yang membawa Prancis terperosok ke dalam lumpur Asia Tenggara dan memuncak dalam kekalahan di Dien Bien-Phu pada tahun

1954), dan bahkan Theodore Roosevelt di Amerika Serikat berubah, setelah deklarasi terkenal Frederic Jackson Turner bahwa perbatasan Amerika sekarang telah tertutup (meski di bagian selatan dan barat, perbatasan Amerika masih sangat terbuka bagi kesempatan-kesempatan investasi baru), menjadi mendukung praktek-praktek imperial ketimbang melakukan reformasi-reformasi internal.[25]

Dalam semua kasus tersebut, perubahan dalam liberal imperialisme (dan bentuk yang terkait dengan suatu ideologi kemajuan dan misi memperadabkan) tercipta bukan akibat dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang absolut, namun akibat dari ketidaksediaan-ketidaksediaan politik dari kaum borjuis untuk melepaskan setiap hak privilesenya dan untuk menyerap overakumulasi di dalam negeri lewat reformasi sosial di dalam negeri, bahkan di di tengah-tengah semakin menguatnya tuntutan-tuntutan gerakan-gerakan kelas buruh. Hobson, untuk menyebut salah satu, mengidentifikasi hal ini sebagai problem kunci dan dia pun berusaha untuk menemukan suatu kebijakan sosial demokratik yang akan bisa melawannya.[26] Maka, sangatlah penting untuk memperhatikan peran dari relasi-relasi kelas dan dari perjuangan kelas di dalam negeri, dan pola khusus dari aliansi-alianasi kelas yang terbangun di dalam negeri (termasuk aliansi kelas dari buruh dan kapitalis dalam upaya-upaya imperial), untuk menilai dorongan bagi upaya-upaya imperialis dan dorongan keluar untuk menemukan *spatio-temporal fixes*. Politik dalam negeri semacam inilah yang memaksa banyak kekuatan Ero-

---

25. Sejarah pergeseran radikal dari solusi-solusi internal ke solusi-solusi eksternal atas problem-problem ekonomi-politik sebagai tanggapan terhadap dinamika perjuangan kelas di banyak negara kapitalis dibahas dalam suatu koleksi tulisan yang tak terlalu terkenal namun sungguh menarik karya C.-A. Julien, J. Bruhat, C. Bourgin, M. Crouzet, dan P. Renouvin, *Les Politiques d'expansion imperialiste* (Paris: Presses Universitaires de France, 1949), dimana di dalamnya kasus-kasus Ferry, Chamberlain, Roosevelt, Crispi, dan yang lainnya dikaji secara lumayan detil.

26. P. Cain, *Hobson and Imperialism: Radicalism, New Liberalism and Finance, 1887-1938* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

pa sejak tahun 1884 sampai tahun 1945 untuk memecahkan problem-problem mereka dengan beraksi di luar negeri, dan hal ini memberikan warna khusus bagi bentuk imperialisme Eropa yang berlangsung sepanjang tahun-tahun tersebut. Menarik untuk dicatat, misalnya, betapa banyak tokoh liberal dan bahkan radikal yang menjadi imperialis dengan penuh kebanggaan dan betapa banyak gerakan kelas buruh yang berkolaborasi dengan proyek imperial. Semua ini mengharuskan kepentingan-kepentingan borjuis untuk memiliki komando atas kebijakan negara dan kekuatan militer. Karena itulah, saya beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh Arendt telah tepat sebagaimana telah saya saya katakan dalam Bab 2, ketika dia menginterpretasikan imperialisme yang muncul pada akhir abad kesembilanbelas sebagai 'tahap pertama dalam kekuasaan politik kaum borjuis ketimbang merupakan tahap terakhir dari kapitalisme' sebagaimana yang dikatakan oleh Lenin.[27] Kita akan kembali membahas hal ini dalam Bab 5.

Kekuatan dari Institusi-institusi Mediasi

Peranan mediasi dalam aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan finansial dan institusional (terutama aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan negara) sangatlah penting dalam proses akumulasi kapital, dan karena itu patut disimak. Namun, pertama-tama kita harus melakukan penyelidikan yang seksama terhadap berbagai bentuk yang mungkin diambil oleh institusi-institusi mediasi tersebut dan dampak-dampaknya terhadap proses-proses molekuler dari akumulasi kapital dalam ruang dan waktu. Dalam studinya mengenai bagaimana krisis tahun 1997-1998 terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara misalnya, Henderson memperlihatkan bahwa beda antara Taiwan dan Singapura (yang relatif terluka tak terlalu

27. Arendt, Imperialism, 32.

dalam oleh krisis kecuali dalam hal terdevaluasinya mata uang) dan Thailand dan Indonesia (yang hampir seluruh ekonomi dan politiknya runtuh) menjadi faktor dalam terciptanya perbedaan kebijakan-kebijakan negara dan finansial diantara negara-negara tersebut.[28] Taiwan dan Singapura terlindung dari arus-arus spekulatif berkat adanya posisi negara yang kuat dan pasar finansial yang terlindungi, sementara Thailand dan Indonesia, yang telah sama-sama meliberalisasikan pasar kapital mereka, tidak demikian halnya. Perbedaan-perbedaan semacam ini jelas sangat besar artinya. Dalam kasus ini, perbedaan-perbedaan itu menentukan siapa yang terpukul oleh devaluasi yang kejam dan siapa yang tidak.

Dalam hal ini, saya mengakui aspek politis dari isu ini. Tak bisa disangkal, seluruh pola turbulensi dalam relasi antara negara, supra-negara dan kekuatan-kekuatan keuangan di satu sisi dengan dinamika umum dari akumulasi kapital (melalui produksi dan devaluasi yang selektif) di sisi lain telah terbukti menjadi salah satu elemen paling menyolok dan paling kompleks dalam narasi ketidakseragaman pembangunan dan politik imperialis semenjak periode tahun 1973. Menurut saya, pandangan Gowan tepat ketika melihat restrukturisasi radikal dari kapitalisme internasional pasca tahun tersebut sebagai serangkaian perjudian putus asa di pihak Amerika Serikat dalam usahanya untuk mempertahankan posisi hegemoniknya di dalam medan ekonomi dunia menghadapi Eropa, Jepang dan kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara. Usaha ini telah dimulai selama krisis tahun 1973 dengan strategi ganda Nixon, yaitu menaikkan harga minyak dan melakukan deregulasi finansial. Bank-bank AS kemudian diberikan hak eksklusif untuk mendaur-ulang sejumlah berlimpah ruah petrodollar yang terakumulasi di kawasan Teluk.[29] Strategi ini menjadikan AS kembali berpo-

---

28. J. Henderson, 'Uneven Crises: Institutional Foundations of East Asian Economic Turmoil', *Economy and Society*, 28/3 (1999), 327-68.

29. Gowan, *The Global Gamble*, 21.

sisi sebagai pusat dari aktivitas finansial global, dan dibarengi dengan reformasi-reformasi dalam negeri di dalam sistem keuangan di Amerika Serikat, hal ini secara insidental membantu menyelamatkan New York dari krisis ekonomi lokalnya. Muncullah kemudian suatu rezim finansial Wall Street/ Departemen Keuangan AS yang kuat yang memiliki kekuatan kontrol atas institusi-institusi finansial global (seperti IMF) dan memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghancurkan ekonomi-ekonomi luar negeri yang lebih lemah melalui manipulasi-manipulasi kredit dan praktek-praktek manajemen utang. Rezim moneter dan finansial ini dimanfaatkan, kata Gowan, oleh pemerintahan AS periode-periode selanjutnya 'sebagai suatu instrumen rekayasa ekonomi yang hebat untuk mendorong terciptanya proses globalisasi dan transformasi-transformasi neoliberal di dalam negeri'. Rezim ini tumbuh berbasiskan krisis: "IMF menjamin resiko dan menjamin bahwa bank-bank AS tidak akan rugi (karena negara-negara akan membayar lewat penyesuaian-penyesuaian struktural dsb.) dan pelarian kapital dari suatu krisis lokal akan bisa semakin memperkuat kekuatan Wall Street..."[30] Sebagai hasilnya terbangun kekuatan finansial AS di luar negeri (jika mungkin beraliansi dengan kekuatan-kekuatan finansial yang lain), terbukanya pasar-pasar secara paksa, terutama untuk arus kapital dan keuangan (yang sekarang menjadi suatu syarat yang ditetapkan oleh AS bagi setiap negara yang ingin menjadi anggota dalam sistem IMF), dan diterapkannya secara paksa praktek-praktek neo-liberal (yang memuncak dalam pembentukan WTO) di negara-negara lain di seluruh dunia.

Terhadap sistem ini, ada dua poin yang harus kita pahami. Yang pertama, perdagangan bebas komoditi seringkali digambarkan sebagai terbukanya dunia terhadap kompetisi yang bersifat bebas dan terbuka. Namun, kita telah

30. *Ibid.*, bab 4.

melihat bahwa kompetisi ini, jika didasarkan pada ruang, niscaya memunculkan kompetisi yang monopolistik, sehingga menciptakan asimetri-asimetri dalam pertukaran bahkan ketika kondisi-kondisi yang melingkupi merupakan kondisi-kondisi yang terbaik. Seluruh argumen ini gagal, sebagaimana telah ditunjukkan sejak lama oleh Lenin, jika kita melihat adanya konsentrasi kekuatan monopoli atau oligopoli (baik dalam produksi maupun konsumsi). AS, misalnya, telah berulangkali menggunakan senjata penolakan pembukaan akses untuk pasarnya yang sangat besar untuk memaksa negara-negara lain mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Ini merupakan suatu versi kejam dan buruk dari asimetri di dalam pertukaran yang selalu terikat dengan relasi-relasi ruang. Kasus paling mutakhir (dan paling kasar) dari hal ini muncul ketika wakil dagang AS, Robert Zoellick mengatakan bahwa jika Lula, presiden terpilih Brazil dari Partai Buruh, tidak sejalan dengan rencana-rencana AS untuk menciptakan pasar bebas di benua Amerika, maka Brazil terpaksa harus 'mengekspor ke Antartika'.[31] Taiwan dan Singapura dipaksa (sebagaimana juga Korea pada masa sebelumnya sebagai bagian dari program talangan IMF atas arahan Departemen Keuangan AS), secara bertentangan dengan penilaian terbaik mereka, untuk membuka pasar-pasar keuangan mereka terhadap kapital spekulatif, bahkan meskipun negara-negara itu telah berhasil melindungi diri dari devaluasi dengan tetap menutup pasar mereka. Negara-negara itu dipaksa untuk menandatangani WTO di bawah ancaman-ancaman AS yang akan menolak akses masuk barang mereka ke pasar AS. AS sekarang berencana untuk menjadikan syarat pembukaan akses pasar terhadap barang dan jasa AS sebagai syarat wajib bagi negara-negara miskin yang ingin mendapatkan bantuan luar negeri AS dalam program '*Millenium Challenge Grants*'. Sebagai imbal balik dari bantuan ini, negara-negara

31. Editorial, *Buenos Aires Herald*, 31 Dec. 2002, h. 4.

miskin itu harus mengadopsi aturan-aturan institusional yang cocok dengan aturan-aturan institusional AS dan itu artinya membiarkan diri mereka terbuka terhadap apapun yang diinginkan atau dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan kapital monopoli yang superior. Di sisi produksi, oligopoli-oligopoli terutama berada di kawasan-kawasan kapitalis inti yang secara efektif mengontrol produksi benih, pupuk, barang-barang elektronik, piranti lunak komputer, produk-produk kimia, produk-produk minyak, dan banyak lagi lainnya. Di bawah kondisi-kondisi ini, penciptaan pembukaan-pembukaan pasar baru jelas tidak membukakan kompetisi, namun hanya menciptakan kesempatan-kesempatan bagi kekuatan-kekuatanm monopoli untuk berkembang biak dengan segala konsekuensi sosial, ekologis, ekonomi dan politiknya. Ini terutama berlaku buat ekspor kapital-kapital multinasional yang memproduksi sepatu dan kaos ke negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin maupun yang memasarkan Coca Cola. Bahkan dalam sesuatu yang kelihatannya seperti indah seperti Revolusi Hijau, sebagaimana diakui kebanyakan komentator, semakin meningkatnya output-output pertanian dibarengi dengan semakin besarnya konsentrasi-konsentrasi kekayaan di sektor pertanian dan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap monopoli input-input pertanian di seluruh negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Penetrasi pasar Cina oleh perusahaan-perusahaan tembakau AS dilakukan untuk mengkompensasi kekalahan-kekalahan perusahaan-perusahaan tersebut di pasar AS dan pada saat yang bersamaan untuk menciptakan suatu krisis kesehatan umum di Cina selama beberapa dekade mendatang. Dalam semua kasus ini, klaim-klaim yang biasanya dipakai untuk mendukung neo-liberalisme, yaitu akan terciptanya kompetisi yang terbuka dan bukannya kompetisi yang monopolistik, akan terciptanya perdagangan yang adil dan perdagangan bebas, ternyata bohong, dan semua itu seperti biasa ditutupi oleh fetisisme pasar.

Sebagaimana yang diakui sendiri oleh para pendukung perdagangan bebas, memang terdapat suatu perbedaan yang sangat besar antara kebebasan perdagangan dalam komoditi dan kebebasan bergerak untuk kapital keuangan. Perbedaan ini dengan segera memunculkan problem mengenai kebebasan pasar macam apa yang sesungguhnya tengah dibicarakan. Beberapa pengamat, seperti Bhagwati, dengan gigih membela perdagangan bebas dalam komoditi, namun menentang ide bahwa hal ini dengan sendirinya berlaku juga untuk arus kapital.[32] Namun, ada kesulitan dalam argumen tersebut. Di satu sisi, arus kredit merupakan sesuatu yang vital bagi investasi produktif dan realokasi kapital dari satu lini produksi atau lokasi ke lini yang lain. Arus kredit tersebut juga memaikan peran penting dalam menciptakan kebutuhan-kebutuhan konsumsi (sebagai misal, konsumsi terhadap perumahan) yang berpotensi menciptakan hubungan keseimbangan dengan aktivitas-aktivitas produktif di dalam suatu dunia yang terpisah-pisah secara spasial yang ditandai oleh surplus di satu ruang dan defisit di ruang yang lain. Dalam semua kasus ini, sistem keuangan (dengan atau tanpa keterlibatan negara) merupakan sesuatu yang kritis agar dinamika akumulasi kapital berjalan terkoordinasi. Namun, kapital keuangan juga membawa banyak aktivitas tak produktif dimana uang semata-mata dipakai untuk menghasilkan lebih banyak uang lewat spekulasi atas kontrak perjanjian jual-beli komoditi atas harga tertentu (*commodities futures)*, nilai mata uang, utang dan sebagainya. Ketika sejumlah besar kapital tersedia untuk tujuan-tujuan ini, maka pasar kapital yang terbuka akan menjadi kendaraan bagi aktivitas spekulatif. Beberapa dari kapital itu, seperti telah kita lihat selama tahun 1990-an, bersama-sama dengan munculnya perusahaan dot.com dan 'gelembung' pasar

32. J. Bhagwati, 'The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars', *Foreign Affairs*, 77/3 (1998), 7-12.

saham (*stock market 'bubbles'*), mampu menciptakan apa yang mereka ramalkan (*self-fulfilling prophecy*) dan hal ini terlihat dalam bagaimana mereka bisa memaksa Indonesia dan bahkan Korea Selatan menjadi bangkrut tak peduli bagaimanapun kekuatan fondasi ekonominya. Sebagian besar dari apa yang terjadi di Wall Street memang sama sekali tak ada hubungannya dengan usaha untuk memfasilitasi investasi di dalam aktivitas-aktivitas produktif. Apa yang terjadi di Wall Street sepenuhnya bersifat spekulatif (dan inilah alasan dari penyebutannya sebagai kapitalisme 'kasino' atau 'ventura'). Meski demikian, aktivitas ini memiliki dampak-dampak yang dalam terhadap dinamika keseluruhan dari akumulasi kapital, dan terutama terhadap usaha pemusatan kembali kekuatan ekonomi-politik terutama di Amerika Serikat, selain juga di pasar-pasar finansial di negara-negara inti lainnya (Tokyo, London, Frankfurt).

Masuknya Kembali Negara Ke Pentas

Pada titik inilah, politik teritorial negara dan imperium masuk kembali ke pentas untuk menegakkan peran kepemimpinannya untuk melanjutkan drama akumulasi kapital dan over akumulasi yang tiada henti. Negara sebagai entitas politik, sebagai tubuh politik, adalah pihak yang paling mampu memimpin secara terkoordinasi pengaturan-pengaturan institusional dan memanipulasi kekuatan-kekuatan molekuler akumulasi kapital untuk melanggengkan pola asimetri dalam pertukaran yang paling menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan kapitalis dominan yang bekerja di dalam kerangkanya. Jika, sebagai misal, kita menemukan bahwa WTO memproklamirkan perdagangan bebas, namun dalam kenyataannya menciptakan perdagangan yang tak adil dimana negara-negara kaya mampu mempertahankan keuntungan kolektifnya atas negara-negara yang lebih miskin, maka kita tak perlu terkejut. Ini merupakan praktek-praktek khas imperial. Inggris mendesak berlakunya perdagangan bebas (yang tak adil) dan *laissez-faire* selama abad kesembilan-

belas ketika hal itu menguntungkan baginya, namun meninggalkan sikap seperti itu segera ketika manfaat-manfaatnya beralih ke negara lain. Amerika Serikat kemudian mengambil alih bendera 'pintu terbuka', dan kemudian perdagangan bebas sampai ke titik dimana retorika pemerintahan Bush saat ini menyamakan kebebasan dengan perdagangan bebas tanpa sama sekali mengakui adanya ketidakcocokan yang ada antara kebebasan dalam menentukan nasib sendiri di satu sisi dengan disiplin pasar bebas dan perdagangan yang tak adil yang dipaksakan. Imperialisme, di dalam domain ini, dijalankan dengan menyelinapkan aturan-aturan dan syarat-syarat institusional terhadap negara-negara lain, biasanya dengan mengatasnamakan kemakmuran seluruh dunia. Inilah tema sentral dari kebijakan-kebijakan mutakhir pemerintahan Bush, sebagaimana yang telah saya catat dalam Bab 1. 'Kita mengejar', kata Bush saat dia melanjutkan perang, 'suatu perdamaian yang adil dimana represi, kebencian dan kemiskinan digantikan dengan harapan akan demokrasi, pembangunan, pasar bebas dan perdagangan bebas.' Dua hal terakhir ini 'membuktikan kemampuannya untuk mengangkat seluruh masyarakat keluar dari kemiskinan'. Amerika Serikat akan memberikan hadiah kebebasan (pasar) kepada dunia entah dunia suka atau tidak.

Bagaimana semua retorika ini akan terwujud dalam kenyataannya, hal itu bergantung pada sifat dari penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk dominan dari aliansi kelas, terutama di negara-negara inti yang pertama kali memproduksi dan kemudian mengontrol arus balik surplus kapital. Negara-negara ini memiliki suatu pengaruh yang luar biasa besar atas arsitektur keuangan yang lewat itu *spatio-temporal fixes* dijalankan, dan karena itu mereka lebih sanggup menyelaraskan asimetri-asimetri yang niscaya ada dalam pertukaran spasial demi keuntungan mereka sendiri. Lahirnya kompleks 'Wall Street-Departemen Keuangan AS' di dalam Amerika Serikat, yang mampu mengontrol institusi-institusi seperti IMF dan memproyeksikan kekuasaan finansial yang san-

gat besar di seluruh dunia melalui jaringan institusi finansial dan pemerintah lainnya, telah memainkan pengaruh yang sangat massif atas dinamika kapitalisme global pada tahun-tahun terakhir. Namun, pusat kekuatan ini hanya bisa beroperasi seperti sekarang karena negara-negara lain di dunia telah menjadi jejaring dan telah berhasil dipancing ke dalam (dan secara efektif 'diperangkap' biasanya lewat aturan-aturan kredit) suatu kerangka struktur institusi-institusi keuangan dan pemerintahan (termasuk institusi-institusi supra-nasional) yang saling mengunci.

Wajah yang kemudian tercipta ialah wajah dari suatu dunia jejaring spasio-temporal dari arus-arus finansial dari surplus-surplus kapital dengan konglomerasi-konglomerasi kekuatan politik dan ekonomi sebagai titik-titik simpul kuncinya (New York, London, Tokyo) yang berusaha untuk menyalurkan dan menyerap surplus-surplus itu ke jalur-jalur yang produktif, dan seringkali ke proyek-proyek jangka panjang di berbagai ruang (mulai dari Bangladesh sampai Brazil atau Cina), atau untuk menggunakan kekuatan spekulatif untuk menyingkirkan sistem overakumulasi dengan cara menimbulkan krisis devaluasi di teritori-teritori yang rapuh. Tentu saja, penduduk-penduduk dari teritori-teritori yang rapuh inilah yang kemudian harus membayar semua beban dalam bentuk lenyapnya aset-aset, hilangnya lapangan pekerjaan, dan lenyapnya jaminan kerja, selain juga lenyapnya martabat dan harapan. Dan dengan cara yang sama dengan yang dialami oleh teritori-teritori paling rapuh yang terhantam pertama kali, hal yang sama juga menimpa penduduk-penduduk paling miskin yang tinggal di teritori-teritori yang memikul beban tersebut. Penduduk desa yang miskin di Meksiko, Thailand, dan Brazil merupakan yang paling menderita akibat dari depresiasi yang tercipta dari krisis-krisis keuangan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Jadi, kapitalisme bisa bertahan hidup bukan hanya lewat serangkaian *spatio-temporal fixes* yang menyerap surplus kapital dengan cara-cara yang produktif dan konstruktif, namun juga lewat devaluasi dan penghancu-

ran yang disebut sebagai obat penyembuh terhadap apa yang secara umum digambarkan sebagai pemborosan fiskal (*fiscal profligacy*) dari mereka yang berutang. Ide bahwa mereka yang meminjam secara tak bertanggung jawab juga akan bertanggung jawab, tentu saja diabaikan oleh elit-elit yang berkuasa. Ide tersebut menuntut adanya kesadaran dari kelas-kelas pemilik kekayaan dan adanya dorongan bahwa mereka harus memperhatikan tanggung jawab-tanggung jawab mereka, dan bukan sekedar memperdulikan hak-hak mereka atas hak milik mereka yang mutlak dan bukan hanya mempedulikan tingkat laba yang membawa keuntungan kepada mereka. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Chamberlain, jauh lebih mudah secara politik untuk menjarah dan menghancurkan penduduk-penduduk negara yang jauh (terutama sekali negara-negara yang secara rasial, etnis, atau kultural berbeda) ketimbang harus berhadapan dengan kekuatan kelas kapitalis yang maha besar di dalam negeri. Maka, sisi kejam dan destruktif dari *spatio-temporal fixes* terhadap problem overakumulasi menjadi suatu elemen yang sama krusialnya di dalam geografi historus dari kapitalisme dengan sisi kreatif dari *spatio-temporal fixes* dalam membangun suatu lanskap baru yang bisa mengakomodasi akumulasi kapital tiada henti dan akumulasi kekuasaan politik tiada henti.

Jika retorika resmi ingin dipercaya, maka kompleks aturan institusional yang sekarang memediasi arus-arus kapital di seluruh dunia haruslah diarahkan untuk mempertahankan dan mendukung perluasan (pertumbuhan) reproduksi, untuk menjauhkan setiap tren ke arah krisis, dan untuk secara serius menghapuskan problem kemiskinan. Namun, jika semua ini gagal, kompleks itu masih bisa berusaha melakukan akumulasi dengan cara-cara yang lain. Seperti halnya relasi antara perang dengan diplomasi, intervensi kapital keuangan yang didukung oleh kekuatan negara seringkali membutuhkan akumulasi dengan cara-cara lain. Suatu aliansi duniawi antara kekuatan-kekuatan negara dan aspek-aspek predatori dari kapital keuangan lantas menjadi kekuatan utama dari suatu

'kapitalisme pemangsa' (*vulture capitalism*) yang menjalankan praktek-praktek kanibalistik dan memaksakan devaluasi sekaligus berusaha menciptakan suatu pembangunan global yang saling berkecocokan. Namun, apakah 'cara-cara lain' dalam mengakumulasi ini?. []

4 Akumulasi Lewat Penjarahan

(*Accumulation by Dispossession*)

ROSA LUXEMBURG menyatakan bahwa akumulasi kapital memiliki suatu karakter ganda:

> Karakter yang pertama terkait dengan pasar komoditi dan dengan lokasi dimana surplus nilai diproduksi – seperti pabrik, tambang, estat pertanian. Dalam aspek ini, akumulasi merupakan suatu proses yang murni bersifat ekonomi dimana fase terpentingnya ialah transaksi antara sang kapitalis dan buruh upahan... Di sini, terdapat perdamaian, hak milik dan kesetaraan, dan dibutuhkan dialektika analisis ilmiah yang tajam untuk memperlihatkan bagaimana hak atas kepemilikan berubah seiring dengan proses akumulasi menjadi pengambilalihan terhadap hak milik orang lain, bagaimana pertukaran komoditi berubah menjadi eksploitasi, dan kesetaraan berubah menjadi kekuasaan kelas. Aspek kedua dari akumulasi kapital terkait dengan relasi antara kapitalisme dan modus-modus produksi non-kapitalis yang eksis di panggung internasional. Metode utama yang digunakan untuk melakukan akumulasi di sini ialah kebijakan kolonial, sistem utang internasional – yang berarti kebijakan bunga – dan perang. Paksaan, penipuan, penindasan, perampasan dijalankan secara telanjang tanpa ada usaha untuk menutup-nutupi, dan dibutuhkan suatu kerja keras untuk me-

nyingkap hukum-hukum besi dari proses ekonomi yang ada di balik liku-liku kekerasan politik dan pertarungan kekuasaan ini.[1]

Kedua aspek akumulasi, menurutnya, 'saling terkait secara organis' dan 'riwayat perjalanan historis dari kapitalisme hanya akan bisa dipahami jika kedua aspek itu dilihat secara bersama-sama.'

Underconsumption atau Overakumulasi?

Luxemburg mendasarkan analisisnya di atas pada pemahamannya mengenai tendensi-tendensi krisis dari kapitalisme. Sumber krisis dari kapitalisme, menurutnya, ialah *underconsumption*, yaitu suatu ketiadaan secara umum tingkat permintaan efektif yang memadai untuk menyerap pertumbuhan dalam keluaran yang dihasilkan oleh kapitalisme. Kesulitan ini muncul ketika para pekerja dieksploitasi dan menerima nilai yang jauh lebih kecil untuk dibelanjakan ketimbang yang mereka hasilkan, dan sebagian kapitalis harus berinvestasi kembali alih-alih berkonsumsi. Setelah mengkaji berbagai cara yang mungkin diambil untuk menjembatani kesenjangan yang diandaikan ada antara penawaran dan permintaan efektif, dia menyimpulkan bahwa perdagangan dengan masyarakat-masyarakat non-kapitalis (*non-capitalist social formations*) akan menjadi satu-satunya cara yang sistematis untuk menstabilkan sistem. Jika masyarakat-masyarakat atau teritori-teritori itu enggan untuk melakukan perdagangan, maka mereka harus dipaksa untuk mau melakukannya dengan menggunakan todongan senjata (sebagaimana yang dilakukan selama perang candu di Cina). Menurutnya, inilah jantung dari imperialisme. Salah satu konsekuensi lanjutan dari argumen ini (meski Luxemburg tak menyatakannya secara langsung) ialah bahwa jika sistem ini ingin bertahan selama mungkin, maka teritori-teritori non-kapitalis harus dipertahankan

1. R. Luxemburg, *The Accumulation of Capital*, terj. A Schwarzschild (New York: Monthly Review Press, 1968 edn.).

(jika perlu dengan paksaan) untuk tetap berada di dalam kondisi non-kapitalisnya. Inilah mengapa berkembang sifat-sifat represif yang kejam di banyak rezim kolonial yang berkembang selama paro kedua abad kesembilanbelas.

Di masa kini, tak banyak lagi yang menerima teori *underconsumption*-nya Luxemburg di atas sebagai penjelasan terhadap terjadinya krisis dalam tubuh kapitalisme.[2] Kontras dengan teori tersebut, muncul teori overakumulasi yang menganggap ketiadaan kesempatan bagi investasi yang menguntungkan sebagai problem yang fundamental. Kadangkala, ketiadaan permintaan konsumen efektif yang memadai menjadi bagian dari problem itu – dan itulah sebabnya mengapa ketergantungan yang besar di masa kita sekarang terhadap apa yang disebut sebagai 'kepercayaan konsumen' (atau yang juga dikenal sebagai ketidakmampuan para pembeli kompulsif untuk mempertahankan kartu-kartu kredit mereka di dompet mereka) menjadi suatu indikator dari kekuatan dan stabilitas dalam ekonomi. Jurang kesenjangan yang disebutkan Luxemburg, akan bisa dengan mudah ditutupi dengan reinvestasi yang akan memunculkan permintaannya sendiri akan barang-barang kapital dan input-input lain. Dan sebagaimana yang telah kita lihat dalam kasus *spatio-temporal fixes*, ekspansi geografis dari kapitalisme yang merupakan fondasi dari banyak aktivitas imperialis sangat bermanfaat untuk menstabilisasi sistem persis karena ekspansi itu membukakan permintaan akan barang-barang investasi maupun barang-barang konsumsi di berbagai tempat. Tentu saja, ketidakseimbangan bisa saja ada antar sektor dan antar kawasan, dan *business cycles* dan resesi lokal mungkin terjadi. Namun, adalah mungkin juga untuk melakukan akumulasi di tengah-tengah stagnannya permintaan efektif jika biaya-biaya input (tanah, bahan mentah, bahan baku, armada tenaga

2. Lihat misalnya M. Bleaney, *Underconsumption Theories* (London: Methuen, 1976); A. Brewer, *Marxist Theories of Imperialism* (London: Routledge & Kegan Paul, 1980).

kerja) merosot tajam. Akses ke input-input yang lebih murah karenanya sama pentingnya dengan meluasnya akses ke pasar karena kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan keuntungan tetap terbuka. Implikasinya ialah bahwa teritori-teritori non-kapitalis haruslah dibuka secara paksa bukan saja untuk perdagangan (yang memang penting), namun juga untuk memungkinkan kapital agar bisa berinvestasi di dalam usaha-usaha yang menguntungkan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah, bahan mentah, tanah yang berbiaya rendah, dan seterusnya. Tujuan umum dari setiap logika kapitalistik dari kekuasaan bukanlah bahwa teritori-teritori harus dicegah untuk tak berkembang secara kapitalistik, namun bahwa mereka harus terus-menerus membuka diri. Dari sudut pandang ini, represi-represi kolonial sebagaimana yang pernah ada pada akhir abad kesembilanbelas bisa ditafsirkan sebagai suatu tindak bunuh-diri (*self-defeating*), dan merupakan suatu contoh dari logika teritorial yang menghambat logika kapitalistik. Ketakutan akan tersaingi membuat Inggris, misalnya, menghalangi India untuk mengembangkan suatu dinamika kapitalis yang kuat dan dengan begitu telah menghalangi kemungkinan-kemungkinan *spatio-temporal fixes* di kawasan tersebut. Dinamika yang terbuka dari ekonomi Atlantik memberikan dampak yang lebih besar ketimbang imperium kolonial yang menindas di India dimana Inggris memang bisa menghisap surplus-surplus, namun tak pernah bisa menjadikan India sebagai medan utama bagi pemanfaatan surplus kapital Inggris. Karena alasan yang sama, dinamika terbuka dari perdagangan Atlantik membuka kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menggeser Inggris sebagai kekuatan hegemonik global. Jika Arendt benar dan akumulasi tiada henti membutuhkan akumulasi kekuatan politik yang tiada henti pula, maka pergeseran-pergeseran semacam itu tak mungkin untuk dihindarkan dan setiap usaha penghindaran akan menghasilkan bencana. Pembentukan imperium-imperium yang tertutup setelah perang Dunia Pertama hampir bisa dipastikan turut berperan di dalam menciptakan ketidakmampuan dalam memecahkan problem over-

akumulasi pada tahun 1930-an dan menjadi landasan ekonomi bagi terciptanya konflik-konflik teritorial Perang Dunia Kedua. Logika teritorial mendominasi dan menghalangi logika kapitalistik, sehingga memaksa logika kapitalistik mengalami krisis yang hampir memuncak akibat konflik teritorial.

Bukti geografis-historis dari abad keduapuluh memang secara umum selaras dengan argumen overakumulasi. Namun, ada hal lain yang menarik dalam rumusan Luxemburg. Yang pertama, ide bahwa kapitalisme haruslah terus-menerus memiliki sesuatu 'di luar dirinya sendiri' untuk menstabilisasikan dirinya sendiri menarik untuk dikaji, terutama karena hal tersebut menggemakan kembali konsepsi Hegel, seperti yang telah kita bahas dalam Bab 3, mengenai adanya suatu dialektika internal dari kapitalisme yang memaksanya untuk mencari solusi yang bersifat eksternal dari dirinya sendiri. Perhatikan, misalnya argumen Marx mengenai penciptaan suatu armada cadangan industri.[3] Akumulasi kapital, dengan tak adanya arus perubahan teknologis yang hemat tenaga kerja, membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini bisa dipenuhi dengan sejumlah cara. Peningkatan penduduk memiliki arti penting (dan banyak analis yang melupakan kritikan-kritikan tajam Marx mengenai hal ini). Kapital juga bisa merampas 'cadangan tenaga kerja potensial' (*latent reserves*) dari petani atau, keluar, memobilisasi buruh murah dari negeri-negeri jajahan atau dari negeri-negeri luar lainnya. Jika langkah ini gagal, kapitalisme masih bisa memanfaatkan kekuatan perubahan dan investasi teknologinya untuk mendorong terciptanya pengangguran (*lay-offs*) agar tercipta suatu armada cadangan buruh secara langsung. Pengangguran ini cenderung memberikan tekanan penurunan tingkat upah dan karena itu membukakan kesempatan-kesempatan baru bagi pengerahan kapital secara

3. K. Marx, *Capital*, terj. B. Fowkes (New York: Viking, 1976), volume i, bab 25.

menguntungkan. Nah, dalam semua kasus ini, kapitalisme membutuhkan sesuatu 'di luar dirinya' untuk melakukan akumulasi, namun dalam kasus terakhir, kapitalisme benar-benar melemparkan buruh keluar dari sistem pada suatu waktu dengan tujuan agar buruh-buruh itu membantu mereka untuk tujuan-tujuan akumulasi pada waktu sesudahnya. Dalam bahasa teori politik posmodern kontemporer, kita bisa katakan bahwa kapitalisme secara niscaya dan selalu menciptakan 'sisi lainnya' (*other*) sendiri. Ide bahwa ada semacam 'pihak luar' (*outside*) yang dibutuhkan untuk menstabilisasi kapitalisme karenanya memiliki relevansi. Namun, kapitalisme juga bisa memanfaatkan beberapa pihak luar yang telah ada (seperti masyarakat-masyarakat non-kapitalis atau beberapa sektor dalam kapitalisme - seperti pendidikan – yang belum lagi mengalami proses proletarianisasi) atau bisa secara aktif menciptakannya. Saya akan membahas dialektika 'pihak dalam-pihak luar' ini secara serius dalam kesempatan berikut. Saya akan membahas bagaimana 'relasi organik' antara perluasan reproduksi di satu sisi dengan proses penjarahan yang seringkali berlangsung secara kejam di sisi lain yang telah turut membentuk geografi historis dari kapitalisme. Ini akan membantu kita untuk memahami secara lebih baik apakah bentuk kapitalistik dari imperialisme itu.

Yang menarik, Arendt juga mengajukan argumen dengan alur yang serupa. Depresi pada tahun 1860-an dan 1870-an di Inggris, katanya, memunculkan tekanan-tekanan untuk menghadirkan suatu bentuk baru imperialisme:

> Ekspansi imperialis disebabkan oleh terjadinya suatu jenis krisis ekonomi yang unik, yaitu overproduksi kapital dan munculnya uang 'yang sangat berlimpah' (*superfluous money*), sebagai hasil dari *oversaving*, yang tak lagi bisa menemukan saluran investasi produktif di dalam negeri. Untuk pertama kalinya, investasi kekuasaan tidak memberi jalan bagi investasi uang, sementara di sisi lain ekspor kekuasaan bisa membonceng uang yang diekspor, karena investasi yang tak terkontrol di negara-negara yang jauh berpotensi mengubah sejumlah besar strata

masyarakat menjadi penjudi, mengubah seluruh ekonomi kapitalis dari suatu sistem produksi menjadi suatu sistem spekulasi keuangan, dan menggantikan laba produksi dengan laba komisi. Persis dalam dekade sebelum era imperialis, yaitu pada tahun tujuhpuluhan abad keduapuluh, kita menyaksikan suatu peningkatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah di dalam aktivitas *swindle*, skandal-skandal keuangan dan perjudian dalam pasar saham.

Skenario di atas mungkin terasa sangat biasa karena kita terbiasa mengalaminya pada tahun 1980-an dan 1990-an. Namun deskripsi Arendt mengenai respon borjuis terhadap skenario tersebut sangat menarik. Dikatakannya, kaum borjuis sadar 'untuk pertama kalinya bahwa dosa awal yang berupa perampokan sederhana dalam abad-abad yang lalu yang telah memungkinkan berlangsungnya "akumulasi kapital yang awal" (Marx) dan yang telah menjadi awal dari semua akumulasi lebih lanjut lambat laun harus berjalan secara berulang-ulang karena jika tidak, maka motor penggerak akumulasi akan dengan segera berhenti.'[4]

Proses yang disebut Marx, mengikuti Adam Smith, sebagai akumulasi 'primitif' atau 'awal', dalam pandangan Arendt, menjadi suatu kekuatan yang penting dan terus hidup dalam geografi historis akumulasi kapital lewat imperialisme. Sebagaimana dalam kasus suplai buruh, kapitalisme selalu membutuhkan aset-aset di luar dirinya sendiri jika ingin menghadapi dan mengurangi tekanan-tekanan overakumulasi. Jika aset-aset tersebut, seperti tanah kosong atau sumber-sumber bahan metah yang baru, tidak tersedia, maka kapitalisme bagaimana pun harus memproduksinya. Di sini, Marx melihat hal ini tidak mungkin dicapai kecuali dalam kasus penciptaan suatu cadangan buruh industri lewat pengangguran yang dihasilkan sebagai dampak dari teknologi. Adalah menarik untuk menyelidiki mengapa demikian.

---

4. Arendt, *Imperialism*, 15, 28.

Teori umum Marx mengenai akumulasi kapital dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang secara luas menantang asumsi-asumsi dasar teori ekonomi politik klasik. Asumsi-asumsi ekonomi politik klasik ialah: pasar persaingan yang berfungsi secara bebas dengan tatanan-tatanan institusional hak milik pribadi, individualisme yang diakui hukum, kebebasan kontrak, dan struktur-struktur hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang cocok yang dijamin oleh suatu 'negara fasilitatif' yang juga melindungi integritas uang sebagai penyimpan nilai dan sebagai medium pertukaran. Peran kapitalis sebagai produsen dan pedagang komoditi telah terbangun secara mantap, dan tenaga kerja juga telah menjadi suatu komoditi yang diperjualbelikan secara umum dengan nilai yang cocok. Akumulasi 'yang primitif' atau 'awal' telah berlangsung dan akumulasi berjalan berbarengan dengan perluasan reproduksi (melalui eksploitasi buruh dalam produksi) di dalam kondisi 'perdamaian, kemakmuran dan kesetaraan'. Asumsi-asumsi ini memungkinkan kita untuk melihat apa yang akan terjadi jika proyek liberal dari ekonom-ekonom politik klasik atau, di masa kita, proyek neoliberal dari ekonom-ekonom, direalisasikan. Kebrilyanan metode dialektisnya Marx, sebagaimana diakui misalnya secara tegas oleh Luxemburg, terletak dalam kemampuannya untuk menunjukkan bahwa liberalisasi pasar – yang merupakan kredo dari kaum liberal dan neoliberal – tak akan menghasilkan suatu negara yang harmonis dimana di dalamnya setiap orang hidup secara lebih layak. Sebaliknya, akan tercipta level-level kesenjangan sosial yang jauh lebih besar (sebagaimana telah menjadi tren global selama tigapuluh tahun terakhir, terutama di dalam negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang paling menganut garis politik semacam itu). Marx memprediksi, hal tersebut juga akan menciptakan ketidakstabilan yang serius dan ketidakstabilan itu semakin meningkat sehingga memuncak dalam bentuk krisis-

krisis overakumulasi yang bersifat kronis (seperti yang sekarang tengah kita saksikan).

Kekurangan dari asumsi-asumsi itu ialah bahwa asumsi-asumsi itu memposisikan akumulasi yang didasarkan pada predasi, penipuan dan kekerasan sebagai suatu 'tahap awal' yang dianggap tak relevan atau, sebagaimana Luxemburg, dianggap berada 'di luar' kapitalisme sebagai suatu sistem tertutup. Suatu evaluasi ulang secara umum terhadap peran berkelanjutan dan keberlangsungan praktek-praktek predatori dari akumulasi 'primitif' atau 'awal' dalam geografi historis yang panjang karenanya amat diperlukan sebagaimana yang telah diamati oleh beberapa pengamat mutakhir.[5] Karena terasa aneh harus menyebut suatu proses yang sesungguhnya terus berlangsung sebagai bersifat 'primitif' atau 'awal', maka setelah ini, saya akan menggantikan kedua istilah tersebut dengan konsep akumulasi lewat penjarahan' (*accumulation by dispossession*).

Akumulasi Lewat Penjarahan

Pengamatan yang lebih dekat terhadap deskripsi Marx mengenai akumulasi primitif memperlihatkan adanya berbagai macam proses.[6] Termasuk di antaranya komodifikasi dan privatisasi tanah serta pengusiran secara paksa penduduk petani; pengubahan berbagai bentuk hak milik (hak milik bersama, hak milik kolektif, hak milik negara, dsb.) menjadi hak milik pribadi semata; penyangkalan keberadaan hak-hak atas milik bersama; komodifikasi tenaga kerja dan penyangkalan terhadap bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alterna-

---

5. M. Perelman, *The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation* (Durham, NC: Duke University Press, 2000). Juga ada perdebatan yang luas dalam The Commoner (<www.thecommoner.org>) mengenai pembukaan dataran-dataran baru dan mengenai apakah akumulasi primitif harus dipahami semata-mata sebagai suatu proses historis ataukah suatu proses kontinyu. DeAngelis <http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis> provides a good summary.

6. Marx, *Capital*, vol. i, pt. 8.

tif (pribumi); proses-proses pengambilalihan secara kolonial, neo-kolonial dan imperial aset-aset (termasuk sumberdaya alam); monetisasi pertukaran dan pajak, terutama pajak atas tanah; perdagangan budak dan praktek riba, utang nasional, dan puncaknya sistem kredit sebagai cara radikal dalam akumulasi primitif. Negara, dengan monopolinya atas kekerasan dan penetapan hukum, memainkan suatu peran yang krusial baik dalam mendukung maupun memajukan proses–proses ini, dan sebagaimana yang telah saya katakan dalam Bab 3, ada banyak bukti bahwa transisi menuju pembangunan kapitalis telah dan terus menjadi sesuatu yang sangat bergantung pada sikap negara. Peran pembangunan dari negara memang sungguh penting, yaitu untuk menjaga agar logika teritorial dan logika kapitalistik dari kekuasaan selalu jalin-menjalin, meski tidak harus selalu saling selaras.

Semua fitur dari akumulasi primitif yang telah disebutkan oleh Marx masih tetap eksis di dalam geografi historis kapitalisme sampai sekarang. Penggusuran rakyat petani dan penciptaan kaum proletariat tak bertanah masih terus berlangsung di negara-negara seperti Meksiko dan India dalam tiga dekade terakhir, banyak sumber daya yang sebelumnya menjadi hak milik bersama, seperti sumber air, sekarang telah diprivatisasi (seringkali atas desakan Bank Dunia) dan ditarik ke dalam logika akumulasi yang kapitalistik, bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alternatif (produksi dan konsumsi oleh pribumi dan bahkan dalam kasus Amerika Serikat, produksi dan konsumsi komoditi kecil) ditindas. Industri-industri nasional diprivatisasi. Pertanian keluarga diambilalih oleh perusahaan agribisnis. Dan perbudakan masih terus berlangsung (terutama dalam bentuk perdagangan seks).

Pengalaman selama bertahun-tahun dalam memakai secara kritis analisa Marx terhadap kumulasi primitif – yang memang berupa sketsa ketimbang merupakan suatu eksplorasi sistematis – menunjukkan adanya beberapa ruang kosong yang mesti harus diisi. Proses proletarianisasi, misalnya, memerlukan suatu kombinasi koersi dan apropriasi atas keterampilan-keterampilan, relasi-relasi sosial, pengetahuan-

pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan berpikir, dan kepercayaan-kepercayaan pra-kapitalis di pihak mereka yang diproletarianisasikan. Struktur-struktur kekerabatan, tatanan kekeluargaan dan rumah tangga, relasi-relasi gender dan otoritas (termasuk relasi-relasi yang dibangun lewat agama dan institusi-institusinya) semuanya memiliki perannya masing-masing. Dalam beberapa kasus, struktur-struktur yang telah ada harus direpresi secara kejam karena tidak konsisten dengan usaha penciptaan buruh kapitalisme. Meski demikian, sekarang ada berbagai kajian yang menyatakan bahwa struktur-struktur itu mungkin bisa dikooptasi dalam upaya untuk menciptakan suatu basis konsensual ketimbang basis koersif bagi penciptaan kelas buruh. Ringkasnya, akumulasi primitif membutuhkan apropriasi dan kooptasi terhadap capaian-capaian kultural dan sosial yang telah ada maupun juga membutuhkan konfrontasi dan penaklukan (*supersession*). Syarat-syarat perjuangan dan pembentukan kelas buruh sangat beragam dan itulah sebabnya, sebagaimana yang diantaranya ditegaskan oleh Thompson, ada situasi dimana suatu kelas buruh 'menciptakan dirinya sendiri namun tanpa mereka sendiri pernah meyadarinya'.[7] Sebagai hasilnya, sering terdapat peninggalan jejak relasi-relasi sosial pra-kapitalis dalam formasi kelas-buruh dan tercipta perbedaan-perbedaan geografis, historis dan antropologis yang khas dalam bagaimana wajah suatu kelas buruh. Bagaimanapun universalnya proses proletarianisasi, hasilnya tidak selalu terciptanya suatu kaum proletariat yang homogen.[8]

---

7. E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class* (Harmondsworth: Penguin, 1968).

8. Etnograf-etnograf kontemporer mengenai proletarianisasi, yang banyak darinya menekankan pentingnya isu-isu gender, juga sagat beragam. Lihat misalnya A. Ong, *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia* (Albany: State University of New York Press, 1987); C. Freeman, High Tech and High Heels in the Global Economy (Durham, NC: Duke University Press, 2000); C. K. Lee, Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory Women (Berkeley: University of California Press, 1998).

Beberapa mekanisme akumulasi primitif yang ditegaskan oleh Marx telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga memainkan suatu peran yang lebih kuat lagi pada saat ini jika dibandingkan dengan di masa lalu. Sistem kredit dan kapital keuangan menjadi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lenin, Hilferding dan Luxemburg di awal abad keduapuluh, pendongkrak utama dalam predasi, penipuan, dan pencurian. Gelombang kuat finansialisasi yang berlangsung setelah tahun 1973 sungguh luar biasa watak spekulatif dan predatorinya. *Stock promotion*, *ponzi scheme*, penghancuran aset-aset secara terstruktur lewat inflasi, perampokan aset-aset melalui merger dan akuisisi dan penjeratan lewat utang membuat seluruh penduduk, bahkan di negara-negara maju, terjebak dalam jeratan utang (*debt peonage*), ditambah dengan kecurangan oleh korporasi dan penjarahan aset-aset (pelenyapan dana pensiun dan nilainya dengan jalan menghancurkan saham dan korporasi) lewat manipulasi-manipulasi kredit dan saham – semua ini merupakan fitur-fitur sentral dari kapitalisme kontemporer. Keruntuhan Enron telah merenggut banyak mata pencaharian dan hak-hak pensiun. Namun di atas semua itu, kita harus betapa aksi perampokan lewat kegiatan itu dilakukan oleh *hedge-hedge fund* dan oleh institusi-institusi kapital keuangan utama lainnya sebagai pemain utama akumulasi lewat penjarahan di masa-masa sekarang.

Mekanisme-mekanisme yang sepenuhnya baru di dalam akumulasi lewat penjarahan juga terbuka. Penitikberatan pada hak-hak milik intelektual di dalam negosiasi-negosiasi WTO (yang dikenal sebagai kesepakatan TRIPS) menjadi jalan dimana di dalamnya pematenan dan lisensi atas bahan generik, plasma benih dan semua bentuk produk lain sekarang bisa digunakan untuk melawan penduduk-penduduk yang praktek-prakteknya memainkan suatu peran krusial di dalam perkembangan bahan-bahan tersebut. Pembajakan biologis (*biopiracy*) merajalela dan penjarahan stok sumber genetik dunia berlangsung demi keuntungan sejumlah kecil perusahaan-perusahaan farmasi. Perusakan yang terus me-

ningkat terhadap sumber lingkungan milik bersama secara global (seperti tanah, udara, air) dan merebaknya degradasi habitat demi lancarnya modus-modus produksi pertanian yang padat modal berlangsung sebagai akibat dari komodifikasi secara menyeluruh terhadap alam dalam semua bentuknya. Komodifikasi bentuk-bentuk kultural, sejarah dan kreativitas intelektual mengundang terjadinya penjarahan secara besar-besaran (industri musik merupakan contoh menonjol mengenai apropriasi dan eksploitasi kultur dan kreativitas akar rumput). Korporatisasi dan privatisasi terhadap apa-apa yang selama ini menjadi aset-aset publk (seperti universitas-universitas), ditambah lagi gelombang privatisasi (terhadap utilitas-utilitas air dan publik dalam semua jenisnya) melanda seluruh dunia, dan menjadi petunjuk adanya suatu gelombang baru 'dihabisinya hak milik bersama (*the commons*)'. Seperti di masa lalu, kekuatan negara seringkali dipakai untuk memaksakan dilaksakannya proses-proses semacam itu, tak peduli meski hal tersebut bertentangan dengan kehendak umum. Dicabutnya kembali kerangka regulasi yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan dari degradasi telah melenyapkan hak-hak. Diserahkannya hak-hak milik bersama yang telah berhasil direbut lewat bertahun-tahun perjuangan kelas yang berat (seperti hak untuk mendapatkan pensiun negara, untuk dana kesejahteraan, untuk layanan kesehatan nasional) ke dalam domain privat menjadi salah satu hal yang paling menonjol dari semua kebijakan penjarahan yang dilancarkan dengan mengatasnamakan ortodoksi neoliberal.

Kapitalisme telah menginternalisasi ke dalam dirinya praktek-praktek kanibalistik maupun predatori dan penipuan. Namun seperti yang terus terang diakui oleh Luxemburg, 'seringkali sulit untuk menentukan, di tengah-tengah kekusutan kekerasan dan unjuk kekuatan, hukum-hukum besi dari proses ekonomi." Akumulasi lewat penjarahan bisa berlangsung dengan berbagai cara dan banyak dari modus operandinya yang bersifat kontingen dan tak terpola jelas.

Jadi, bagaimana persisnya cara akumulasi lewat penjarahan membantu memecahkan problem overakumulasi? Perlu diingat, overakumulasi merupakan suatu kondisi dimana surplus-surplus kapital (barangkali dibarengi dengan surplus tenaga kerja) berada dalam keadaan menganggur tanpa ada saluran-saluran yang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan. Apa yang dilakukan oleh akumulasi lewat penjarahan ialah melepaskan sejumlah aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam beberapa kasus dengan tanpa biaya). Kapital yang mengalami overakumulasi bisa menguasai aset-aset semacam itu dan dengan segera mengubahnya ke arah pemanfaatan yang menguntungkan. Dalam kasus akumulasi primitif seperti yang telah dilukiskan oleh Marx, proses tersebut membutuhkan pengambilalihan tanah, atau penguasaan tanah, dan memaksa penduduk yang tinggal di tanah tersebut untuk menjadi kaum proletariat tanpa tanah, dan kemudian melepaskan tanah itu ke dalam arus akumulasi kapital yang privat. Privatisasi (terhadap perumahan sosial, telekomunikasi, trasnportasi, air, dsb., di Inggris misalnya) pada masa-masa sekarang membukakan sejumlah lapangan penguasaan yang sangat luas bagi kapital yang mengalami overakumulasi. Runtuhnya Uni Soviet dan kemudian dibukanya Cina menghadirkan ruang bagi kapital untuk masuk menguasai aset-aset yang selama ini tertutup dan membawanya masuk ke dalam arus utama akumulasi kapital. Apa jadinya kapital yang mengalami overakumulasi selama tigapuluh tahun terakhir ini jika dataran-dataran akumulasi yang baru ini tak terbuka? Jadi, ketika kapitalisme mengalami kesulitan overakumulasi yang kronis sejak tahun 1973, maka proyek privatisasi yang neoliberal terhadap apapun akan bisa memiliki arti yang sangat besar sebagai jalan untuk memecahkan problem tersebut. Cara lain ialah dengan melepaskan bahan-bahan mentah yang murah (seperti minyak) ke dalam sistem. Biaya-biaya input akan teredusir dan karena itu laba akan meningkat. Sebagaimana dikatakan oleh sang penguasa ko-

ran Rupert Murdoch, solusi terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi saat ini ialah minyak seharga $20 ketimbang $30 per barel. Wajar jika kemudian semua koran milik Murdoch menjadi pendukung paling kuat terhadap kebijakan perang melawan Irak.[9]

Namun, tujuan yang sama bisa dicapai dengan devaluasi aset-aset kapital dan tenaga kerja yang ada. Aset-aset kapital yang terdevaluasi bisa dibeli dengan harga obral dan bisa didaur ulang secara menguntungkan ke dalam sirkulasi kapital oleh kapital yang teroverakumulasi. Namun, hal ini membutuhkan suatu gelombang devaluasi, yang artinya krisis. Krisis mungkin bisa diatur, dikelola dan dikontrol untuk merasionalisasi sistem. Inilah yang seringkali dilakukan oleh program-program pengencangan ikat pinggang yang terencana, dengan menggunakan pengungkit-pengungkit kunci terhadap tingkat bunga dan sistem kredit. Krisis-krisis yang terbatas mungkin bisa dipaksakan oleh kekuatan luar atas suatu sektor atau suatu teritori atau seluruh kompleks teritori dari aktivitas kapitalis. Inilah yang oleh pakar diharapkan dilakukan oleh sistem keuangan internasional (dipimpin oleh IMF) yang didukung oleh kekuatan negara yang superior (seperti Amerika Serikat). Langkah ini akan menciptakan secara periodik suatu stok aset yang terdevaluasi, dan dalam banyak kasus *undervalued*, di belahan dunia tertentu sehingga bisa menjadi sasaran pemanfaatan surplus-surplus kapital yang tak lagi memiliki saluran yang menguntungkan di belahan dunia yang lain. Wade dan Veneroso menangkap esensi dari hal ini ketika mereka menulis tentang krisis Asia tahun 1997-1998:

> Krisis keuangan selalu menciptakan transfer kepemilikan dan kekuasaan ke pihak mereka yang pandai menjaga aset-aset

9. D. Kirkpatrick, 'Mr Murdoch's War', New York Times, 7 April 2003, hal. CI.

> mereka dan punya posisi untuk memberikan kredit, dan prinsip tidak terkecuali berlaku juga untuk krisis Asia.. tak ada keraguan bahwa korporasi-korporasi Barat dan Jepang merupakan pihak pemenang yang mendapatkan keuntungan besar... Kombinasi devaluasi besar-besaran, liberalisasi keuangan yang didesakkan oleh IMF, dan pemulihan kembali yang difasilitasi oleh IMF mempercepat transfer-transfer aset-aset secara damai dan terbesar dari pemilik-pemilik dalam negeri ke pemilik-pemilik asing dalam limapuluh tahun terakhir di seluruh dunia, sehingga membuat transfer-transfer dari pemilik-pemilik dalam negeri ke pemilik-pemilik AS di Amerika Latin pada tahun 1980-an atau di Meksiko setelah tahun 1994 terlihat sebagai bukan apa-apa. Di sini, kita mungkin teringat kata-kata Andrew Mellon: ' Dalam situasi depresi, aset-aset kembali ke tangan pemilik-pemiliknya yang tepat'.[10]

Krisis regional dan devaluasi yang berbasis lokal muncul sebagai cara-cara utama yang dengannya kapitalisme bisa terus-menerus menciptakan 'yang lain' dengan tujuan untuk memangsanya. Krisis-krisis keuangan Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 merupakan suatu kasus klasik dari prinsip ini.[11] Penganalogian prinsip tersebut dengan kasus menciptakan suatu pasukan tenaga kerja industri cadangan dengan cara membuat orang-orang menganggur dari pekerjaannya sungguh tepat. Aset-aset yang berharga dikeluarkan dari sirkulasi dan terdevaluasi. Aset-aset tersebut menjadi menganggur dan tidur sampai surplus kapital menguasainya sehingga memberi nafas kehidupan baru ke dalam akumulasi kapital. Namun, bahayanya ialah bahwa krisis

---

10. R. Wade dan F. Veneroso, 'The Asian Crisis: The High Debt Model versus the Wall Street-Treasury-IMF Complex', *New Left Review*, 228 (1998), 3-23.

11. Ibid. Kajian lain mengenai krisis ini disajikan oleh Henderson, 'Uneven Crises'; Johnson, Blowback, bab 9; dan edisi khusus *Historical Materialism*, 8 (2001), 'Focus on East Asia after the Crisis', terutama tulisan P. Burkett dan M. Hart-Landsberg, 'Crisis and Recovery in East Asia: The Limits of Capitalist Development', hal. 3—48.

semacam itu mungkin lepas dari kontrol dan menjadi meluas, atau mereka 'yang dilainkan' (*the 'othering'*) akan memberontak terhadap sistem yang telah menciptakannya. Salah satu fungsi utama dari intervensi negara dan insitusi internasional ialah untuk memimpin secara terorganisir devaluasi dengan cara-cara yang memungkinkan akumulasi lewat penjarahan berlangsung tanpa menimbulkan suatu keruntuhan secara luas. Inilah esensi dari program penyesuaian struktural yang dipimpin oleh IMF. Bagi kekuatan-kekuatan kapitalis utama, seperti Amerika Serikat, hal ini berarti mengorganisir proses-proses ini demi keuntungan tertentu, sambil terus memproklamirkan peran mereka sebagai pemimpin yang mulia yang mengorganisir 'talangan' (*bail-out*) (sebagaimana terjadi di Meksiko tahun 1994) untuk menjaga agar akumulasi kapital global tetap berada di jalurnya. Namun, sebagaimana setiap perjudian spekulatif, ada bahaya kehilangan: kepanikan yang mendadak dari pihak Departemen Keuangan AS dan IMF pada Desember 1998 setelah Rusia dengan ringannya menyatakan bangkrut dan ketika tampaknya bahwa ekonomi Korea Selatan (setelah beberapa bulan perundingan secara berat) hampir hancur dan mungkin akan memicu suatu reaksi berantai secara global, memperlihatkan betapa sangat beresikonya bentuk-bentuk penjarahan seperti itu.[12]

Kombinasi antara koersi dan persetujuan di dalam aktivitas tawar-menawar semacam itu memang sangatlah beragam, namun kita sekarang bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana hegemoni bisa terbangun lewat mekanisme-mekanisme finansial dengan suatu cara sehingga menguntungkan pemegang hegemon sembari mengarahkan negara-negara subaltern agar melangkah ke arah yang diandaikan sebagai jalan emas pembangunan kaptalis. Tali pusar yang mengikat akumulasi lewat penjarahan dan perluasan reproduksi yang digerakkan oleh kapital keuangan dan institusi-institusi kredit

12. Gowan, *The Global Gamble*, menyajikan suatu kajian yang memikat.

sebagaimana biasa mendapat dukungan penuh dari kekuatan-kekuatan negara.

Kontingensi dari Semua Itu

Lantas, bagaimana kita menemukan hukum besi di balik kontingensi-kontingensi akumulasi lewat penjarahan tersebut? Kita tentu tahu bahwa akumulasi ini dalam tingkat tertentu selalu berlangsung sepanjang waktu dan bentuknya bisa bermacam-macam, entah yang berwajah legal ataupun ilegal. Perhatikan, misalnya, proses penjarahan di dalam pasar perumahan AS yang dikenal sebagai '*flipping*'. Suatu rumah yang berada di dalam kondisi buruk dibeli secara sangat murah, diberi beberapa perbaikan penampilan luar, kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, dengan bantuan paket hipotek yang diatur oleh sang penjual, kepada sebuah keluarga berpendapatan rendah yang ingin mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah. Jika keluarga itu memiliki kesulitan untuk melunasi pembayaran atau menghadapi problem perawatan yang serius yang hampir pasti muncul, maka rumah itu akan diambil alih kembali. Ini tidak sepenuhnya ilegal (karena itu, waspadalah para pembeli!), namun dampaknya ialah dimangsanya keluarga-keluarga berpendapatan rendah dan terkurasnya tabungan yang mereka miliki. Inilah yang disebut sebagai akumulasi lewat penjarahan. Aktivitas (legal maupun ilegal) semacam ini sangat beragam bentuknya dan semua ini memungkinkan satu kelas memiliki kontrol yang lebih besar terhadap aset-aset jika dibandingkan dengan kelas yang lain.

Namun, bagaimana, kapan dan mengapa akumulasi lewat penjarahan ini berubah posisi dari sebagai latar menjadi bentuk akumulasi yang lebih dominan jika dibandingkan dengan perluasan reproduksi? Dalam beberapa hal, ini berkaitan dengan bagaimana dan kapan krisis terjadi di dalam perluasan reproduksi. Selain itu, hal ini juga bisa merefleksikan upaya-upaya yang dilakukan oleh entrepreneur-entrepreneur yang gigih dan negara-negara pembangunan untuk 'bergabung ke

dalam sistem' dan mengejar keuntungan-keuntungan akumulasi kapital secara langsung.

Setiap masyarakat atau teritori yang tersedot atau masuk ke dalam logika pembangunan kapitalis niscaya harus mengalami perubahan-perubahan struktural, institusional dan legal secara besar-besaran seperti yang telah dilukiskan oleh Marx dalam konsepsinya mengenai akumulasi primitif. Runtuhnya Uni Soviet merupakan contoh bagus dari hal ini. Perubahan-perubahan ini menciptakan suatu episode kejam akumulasi primitif di bawah sebutan '*shock therapy*' di bawah arahan kekuatan-kekuatan kapitalis dan institusi-institusi internasional. Tekanan sosial semakin meningkat, namun di sisi lain distribusi aset-aset yang dihasilkan lewat privatisasi dan reformasi-reformasi pasar sangat kecil (*lop-sided*) dan sangat tidak kondusif bagi pembentukan corak-corak aktivitas investasi yang secara khas muncul seiring dengan perluasan reproduksi. Dalam konteks yang lebih mutakhir, peralihan ke arah kapitalisme yang dipimpin oleh negara di negeri Cina juga memunculkan gelombang demi gelombang akumulasi primitif. Sampai saat ini, perusahaan-perusahan negara dan kota/desa yang berhasil di seputar Shanghai (yang menyediakan bagian-bagian komponen untuk industri besar di area metropolitan) pada akhir-akhir ini terpaksa tutup atau mengalami privatisasi, sehingga mengurangi kesejahteraan sosial dan tunjangan pensiun dan terciptalah sejumlah besar pengangguran dan buruh miskin. Hasilnya, perusahaan-perusahaan Cina yang masih berdiri menjadi sangat jauh lebih kompetitif di pasar dunia, namun dengan biaya devaluasi dan penghancuran mata pencaharian yang sebelumnya aktif. Meski analisa ini bersifat sketsa, namun kita bisa melihat bahwa ada sejumlah besar tekanan sosial di tingkat lokal dan episode-episode perjuangan kelas yang sengit, kadangkala keras, di daerah-daerah yang dihancurkan oleh proses ini.[13]

---

13. E. Eckholm, 'Where Workers, Too, Rust, Bitterness Boils Over', New York Times, 20 Mar. 2002, hal. A4; E. Rosenthal, 'Workers' Plight Brings New Militancy to China', New York Times, 10 Mar. 2003, hal. A8.

Akumulasi lewat penjarahan di sini bisa ditafsirkan sebagai suatu biaya yang perlu untuk membuat suatu terobosan yang berhasil di dalam pembangunan kapitalis dengan dukungan kuat dari kekuatan-kekuatan negara. Motivasi-motivasinya bisa karena dorongan dalam negeri (sebagaimana kasus Cina) atau dipaksakan dari luar (sebagaimana dalam kasus pembangunan neo-kolonial di zona-zona pemrosesan-ekspor di Asia Tenggara atau sebagaimana kasus pendekatan reformasi struktural yang sekarang diajukan oleh pemerintahan Bush sebagai syarat bagi setiap bantuan luar negeri AS ke negara-negara miskin). Dalam banyak kasus, kombinasi antara motivasi dalam negeri dan tekanan eksternal telah menjadi faktor bagi terciptanya transformasi-trasformasi tersebut. Meksiko, misalnya, menghapuskan proteksi-proteksinya yang memang telah melemah terhadap petani dan penduduk pribumi pada tahun 1980-an, sebagian sebagai akibat tekanan dari negara-negara tetangganya di Utara agar Meksiko mengadopsi praktek-praktek privatisasi dan neoliberal sebagai imbalan atas bantuan keuangan dan pembukan pasar AS bagi perdagangan lewat perjanjian NAFTA. Dan bahkan ketika motivasi kelihatannya lebih kuat berasal dari dalam negeri, kondisi-kondisi eksternal masih tetap berpengaruh penting. Pembentukan WTO menjadikan lebih mudah bagi Cina sekarang untuk masuk ke dalam sistem kapitalis global ketimbang yang bisa dilakukan pada tahun 1930-an ketika autarki di dalam imperium-imperium yang tertutup masih ada, atau bahkan pada tahun 1960-an ketika sistem Bretton-Wood yang didominasi negara AS menjaga arus kapital tetap berada di bawah kontrol yang ketat. Kondisi-kondisi pasca-1973 – dan hal inilah yang kelihatannya mendorong AS mendesak dibukanya pasar – sangat memungkinkan bagi setiap negara atau kompleks regional yang ingin masuk ke dalam sistem kapitalis global – dan inilah yang menyebabkan pesatnya teritori-teritori seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan, dan beberapa kawasan dan negara industri baru lainnya. Keterbukaan kesempatan ini membawa gelombang-gelombang deindustrialisasi ke banyak negara kapitalis

maju (dan bahkan lebih dari itu, sebagaimana telah kita lihat dalam Bab 3) seiring dengan munculnya negara-negara industri baru, dan seiring dengan krisis tahun 1997-1998, sehingga membuat banyak negara kapitalis maju menjadi lebih rentan terhadap gerak kapital spekulatif, kompetisi spasio-temporal, dan gelombang-gelombang akumulasi lewat penjarahan berikutnya. Begitulah volatilitas dari kapitalisme internasional terbangun dan teralisir.

Devaluasi yang diambil akibat krisis seringkali bersifat destruktif terhadap kesejahtaraan sosial dan terhadap institusi-institusi sosial secara lebih umum. Hal ini terutama berlaku ketika sistem kredit menerapkan praktek pemerasan, ketika likuditas mengering dan perusahaan-perusahaan dipaksa bangkrut. Tak ada jalan lain bagi para pemilik untuk menggantung aset-asetnya dan mereka mesti melepas aset-aset tersebut dengan harga yang sangat rendah kepada para kapitalis yang memiliki likuiditas untuk mengambil alih. Di sini, alur ceritanya bisa sangat beragam. Penggusuran-penggusuran yang terjadi di Dust Bowl pada tahun 1930-an dan migrasi besar-besaran '*okies*' (penduduk asal Oklahoma) ke California (yang digambarkan secara dramatis dalam buku *Grapes of Wrath* karya Steinbecks) merupakan awal yang kejam dari suatu proses panjang penggusuran terhadap pertanian keluarga di Amerika Serikat oleh perusahaan agribisnis. Pengungkit utama bagi transisi ini selalu ialah sistem kredit, namun barangkali aspek paling menarik dari hal ini ialah bagaimana berbagai institusi negara berpura-pura untuk membantu mempertahanakan pertanian keluarga dengan memainkan peranan subversif sehingga transisi yang seharusnya mereka rintangi malah mereka fasilitasi.

Akumulasi lewat penjarahan menjadi semakin menyolok pasca tahun 1973, sebagian sebagai kompensasi atas problem-problem overakumulasi yang kronis yang terjadi dalam perluasan reproduksi. Kendaraan utama dari semakin meningkatnya akumulasi ini ialah finansialisasi dan penyelarasan di bawah arahan Amerika Serikat sistem keuangan internasioanl yang seiring waktu semakin bisa melaku-

kan apapun mulai dari devaluasi dan akumulasi lewat penjarahan dalam tingkatan yang ringan sampai dengan tingkatan yang kejam di sektor-sektor tertentu atau bahkan di seluruh teritori. Selain itu, pembukaan teritori-teritori baru bagi pembangunan kapitalis dan bagi bentuk-bentuk perilaku pasar yang kapitalistik juga turut memainkan peran, sebagaimana peran yang dulu pernah dimainkan oleh akumulasi primitif di beberapa negara (seperti Korea Selatan, Taiwan, dan sekarang yang lebih dramatis lagi, Cina) yang ingin bisa masuk ke dalam kapitalisme global dan menjadi pemain-pemain aktif di dalamnya. Agar keinginan ini bisa menjadi kenyataan, dibutuhkan bukan saja finansialisasi dan kehidupan perdagangan yang lebih bebas, namun juga suatu pendekatan yang sangat berbeda terhadap bagaimana kekuasaan negara, yang selalu merupakan pemain utama di dalam akumulasi lewat penjarahan, harus dijalankan. Kemunculan teori neoliberal dan politik privatisasi yang mengiringinya menjadi lambang ke arah manakah sesungguhnya pergeseran tersebut menuju.

Privatisasi: Tahap Lebih Lanjut dari Akumulasi lewat Penjarahan

Neoliberalisme sebagai suatu doktrin ekonomi telah muncul sejak akhir tahun 1930-an. Menentang secara radikal komunisme, sosialisme dan segala bentuk intervensi aktif pemerintahan melampaui yang dibutuhkan untuk melindungi tatanan hak milik pribadi, institusi-institusi pasar, dan aktivitas entrepreneur, doktrin ini pada mulanya merupakan suatu kerangka pikiran yang terisolasi dan sangat diabaikan yang dikembangkan secara aktif selama tahun 1940-an oleh pemikir-pemikir seperti von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman dan setidaknya untuk sesaat Karl Popper. Von Hayek telah dengan tepat memprediksikan bahwa dibutuhkan setidaknya satu generasi agar pandangan-pandangan neoliberal bisa menjadi arus utama. Dengan menghimpun dana-dana dari korporasi-korporasi yang bersimpati dan think-tank-think-tank yang dibentuk secara eksklusif, gerakan itu memproduksi arus analisis, tulisan, polemik dan pernyataan-per-

nyataan politik yang kontinyu dan terus meluas selama tahun 1960-an dan 1970-an. Namun, gerakan itu masih dianggap sangat tidak relevan dan bahkan tak dianggap oleh arus utama yang ada. Baru setelah terjadi krisis overakumulasi, menjadi sangat jelas pada tahun 1970-an bahwa gerakan itu harus dianggap sebagai suatu alternatif terhadap Keynesian dan kerangka-kerangka garis kebijakan lainnya yang sama-sama lebih berpusat pada negara. Dan Margaret Thatcher-lah yang, dalam usahanya untu mencari suatu kerangka yang lebih baik untuk mengatasi problem-problem ekonomi pada masanya, yang mengangkat gerakan itu secara politik dan meminta inspirasi-inspirasi dan saran dari *think-tank* gerakan tersebut saat dia terpilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 1979.[14] Bersama-sama dengan Reagan, dia mengubah seluruh orientasi aktivitas negara menjauh dari negara kesejahteraan dan mendukung secara aktif 'sisi penawaran' dari akumulasi kapital. IMF dan Bank Dunia mengubah kerangka kebijakan mereka hampir dalam waktu singkat, dan dalam waktu beberapa tahun doktrin neoliberal telah berhasil meraih kemenangan di dalam berbagai institusi dan mendominasi kebijakan, pertama-tama di negara-negara Anglo-Amerika, dan untuk kemudian ke seluruh negara Eropa dan dunia lainnya. Karena privatisasi dan liberalisasi pasar merupakan mantra bagi gerakan neoliberal, dampaknya ialah terciptanya suatu babak baru dimasukkannya hak milik bersama (*the commons*) ke dalam wilayah kebijakan-kebijakan negara. Aset-aset yang dikuasai oleh negara atau yang menjadi milik bersama dilepas ke pasar sehingga kapital yang teroverakumulasi bisa berinvestasi di dalamnya, meningkatkan tampilannya dan berspekulasi atasnya. Dataran-dataran aktivitas baru yang menguntungkan terbuka, dan hal ini membantu tertangguhkannya problem overakumulasi, setidaknya untuk sementara. Namun, begitu telah berjalan, aktivitas-aktivitas tersebut menciptakan teka-

14. D. Yergin, J. Stanislaw, dan D. Tergin, *The Commanding Heights: The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World* (New York: Simon & Schuster, 1999).

nan-tekanan yang sangat besar bagi ditemukannya lebih banyak dan lebih banyak lagi arena, entah di dalam negeri maupun di luar negeri, dimana privatisasi bisa dijalankan.

Dalam kasus Thatcher, stok perumahan sosial yang besar menjadi salah satu dari kelompok aset yang pertama-tama diprivatisasikan. Pada mulanya, langkah ini seperti menjadi berkah bagi kelas-kelas bawah yang kelihatannya bisa berubah posisi dari penyewa ke pemilik dengan biaya yang relatif rendah, bisa memiliki kontrol atas suatu aset yang berharga, dan bisa memperbesar kemakmuran mereka. Namun, begitu transfer kepemilikan telah dilakukan, aktivitas spekulasi perumahan mengambil alih perumahan sosial itu, terutama di lokasi-lokasi sentral yang utama, dan dengan cara menyuap, menipu atau memaksa, menyingkirkan masyarakat yang berpendapatan rendah agar keluar ke pinggiran kota-kota seperti London, dan mengubah apa yang dulunya merupakan estate perumahan kelas buruh menjadi pusat-pusat perumahan kelas elit yang mewah. Hilangnya perumahan yang terjangkau menciptakan kondisi ketunawismaan dan anomi sosial di banyak lingkungan perkotaan. Di Inggris, privatisasi yang kemudian dijalankan atas utilitas-utilitas (air, telekomunikasi, listrik, energi, transportasi), penjualan secara murah setiap perusahaan milik publik, dan diselaraskannya banyak institusi publik lainnya (seperti universitas-universitas) sesuai dengan logika entrepreneurial memiliki arti ditransformasinya secara radikal pola relasi-relasi sosial yang dominan dan terjadinya redistribusi aset-aset yang semakin menguntungkan kelas-kelas atas ketimbang kelas-kelas bawah.

Pola redistribusi aset yang sama juga bisa ditemukan hampir di semua tempat dimana privatisasi berlangsung. Bank Dunia menjadikan negara Afrika Selatan pasca-apartheid sebagai bukti lebih besarnya efisiensi yang bisa dicapai lewat privatisasi dan liberalisasi pasar. Bank Dunia mendorong, misalnya, privatisasi air atau mendorong '*total cost recovery*' oleh utilitas-utilitas milik kota. Para pelanggan membayar air yang mereka pakai ketimbang mendapatkannya sebagai

barang gratis. Dengan lebih tingginya pendapatan, maka secara teori, utilitas-utilitas itu akan mendapatkan laba dan bisa memperluas layanan-layanannya. Namun, karena tak mampu menutupi biaya, maka semakin lebih banyak dan lebih banyak lagi orang yang tak mendapatkan layanan dan semakin lebih rendah tingkat pendapatan yang diterima oleh perusahaan, sehingga membuat air menjadi semakin tak terjangkau buat penduduk yang berpendapatan rendah. Salah satu keluaran lain ialah karena orang-orang dipaksa untuk mencari sumber-sumber suplai air yang lain, terjadi wabah kolera yang menyebabkan kematian banyak orang. Tujuan negara (yaitu menyediakan air bagi seluruh penduduk) tak bisa direalisasikan karena cara-cara yang dipaksakan untuk dilakukannya. Survei-survei ekstensif yang dilakukan di Afrika Selatan oleh McDonald dan yang lainnya menunjukkan bahwa '*cost recovery* dalam layanan-layanan umum menciptakan beban-beban yang sangat besar terhadap keluarga-keluarga berpendapatan rendah, turut andil dalam sejumlah besar terpangkasnya dan tak tersedianya layanan dan menghancurkan potensi jutaan keluarga berpendapatan rendah untuk hidup secara sehat dan produktif.'[15]

Logika yang sama juga berlaku di Argentina lewat suatu gelombang privatisasi besar-besaran (dalam sektor air, energi, telekomunikasi, transportasi) yang menghasilkan suatu arus masuk yang sangat besar dari kapital yang teroverakumulasi dan suatu boom dalam nilai-nilai aset, diikuti kemudian dengan keruntuhan sehingga berakibat pemiskinan besar-besaran (yang sekarang meliputi lebih dari separo penduduk) ketika kapital keluar dari negeri itu. Perhatikan, sebagai contoh lain, kasus hak tanah di Meksiko. Konstitusi 1917 yang disusun oleh revolusi Meksiko melindungi hak-hak hukum penduduk pribumi dan mengabadikan hak-hak mereka dalam sistem *ejido* yang memungkinkan dikuasai dan

15. D. McDonald dan J. Pape, *Cost Recovery and the Crisis of Service Delivery in South Africa* (London: Zed Books, 2002), 162.

dimanfaatkannya tanah secara kolektif. Pada tahun 1991, pemerintahan Salinas mengesahkan suatu undang-undang reformasi yang mengijinkan dan mendorong privatisasi tanah-tanah *ejido*. Karena *ejido* merupakan basis bagi jaminan kolektif di kalangan penduduk pribumi, maka langkah itu berarti bahwa pemerintah melepaskan salah satu tanggung jawabnya untuk mempertahankan basis jaminan kolektif. Langkah ini sendiri merupakan salah satu item dalam suatu paket umum privatisasi yang dijalankan di bawah pemerintahan Salinas juga melenyapkan proteksi-proteksi jaminan sosial secara umum dan hal ini memiliki dampak-dampak dramatis yang telah bisa diprediksi sebelumnya terhadap pendapatan dan distribusi kekayaan.[16] Resistensi terhadap reformasi *ejido* menyebarluas, dan kelompok-kelompok *campesino* pun kemudian mendukung pemberontakan Zapatista yang pecah di Chiapas pada bulan Januari 1994 ketika pakta NAFTA diberlakukan. Semakin dikuranginya penghambat-penghambat impor menciptakan suatu serangan lain karena impor-impor murah dari pertanian-pertanian yang efisien karena sangat disubsidi (sampai sekitar 20 persen biayanya disubsidi) di Amerika Serikat menurunkan harga jagung dan produk-produk lain sampai ke titik dimana produsen-produsen pertanian kecil tak mampu bersaing. Karena hampir kelaparan, banyak dari produsen ini yang terpaksa meninggalkan lahannya untuk berkerumun di pusat pengangguran di kota-kota besar yang telah penuh sesak. Dampak-dampak yang sama terhadap penduduk pedesaan juga dialami di seluruh dunia. Impor-impor murah sayur-sayuran dari California dan beras dari Louisiana, dengan berlindung di balik aturan-aturan WTO, telah menggusur penduduk-penduduk pedesaan, semisal, di Jepang dan Taiwan. Persaingan asing di bawah aturan-aturan WTO tengah menghancurkan kehidupan pedesaan di

16. J. Nash, *Mayan Visions: The Quest for Autonomy in an Age of Globalization* (New York: Routledge, 2001), 81-4.

India. Sebagai dampaknya, kata Roy, 'ekonomi pedesaan India, yang mendukung tujuh ratus juta orang tengah tercekik. Para petani yang memproduksi terlalu banyak berada dalam tekanan, sementara para petani yang menghasilkan terlalu sedikit juga dalam keadaan tertekan, dan buruh-buruh tani tak bertanah menganggur ketika estate-estate dan pertanian-pertanian besar memberhentikan para pekerjanya. Mereka semua berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari kerja.'[17] Di Cina, diperkirakan setidaknya setengah milyar orang harus terserap oleh proses urbanisasi selama sepuluh tahuh mendatang jika penderitaan dan pemberontakan di desa ingin dihindarkan. Apa yang mereka akan lakukan di kota-kota besar memang masih belum jelas, meski sebagaimana telah kita lihat, rencana-rencana pembangunan infrastruktur fisik yang sangat besar tengah direalisasikan dan hal ini dalam beberapa hal akan bisa menyerap tekanan sosial itu.

Roy menyimpulkan, privatisasi pada esensinya merupakan 'transfer dalam aset-aset publik yang produktif dari negara ke perusahaan-perusahaan privat. Aset-aset produktif ini termasuk sumber-sumber daya alam. Bumi, hutan, air, udara. Semua ini merupakan aset-aset yang dikuasai oleh negara atas nama rakyat yang diwakilinya... Merenggutkan dan menjual aset-aset tersebut sebagai saham ke perusahaan-perusahaan swasta merupakan suatu proses penjarahan barbar dengan suatu skala yang tak ada bandingannya dalam sejarah'.[18]

Bahwa pemberontakan Zapatista di Chiapas, Meksiko, sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak pribumi, hal itu sangatlah gamblang. Bahwa pemicu bagi gerakan ini ialah menguatnya prakarsa-prakarsa ke arah privatisasi terhadap hak milik bersama (*the commons*) dan pembukaan perdagangan bebas lewat NAFTA, hal tersebut juga merupakan

17. A. Roy, *Power Politics* (Cambridge, Mass.: South End Press, 2001), 16.
18. Ibid. 43.

sesuatu yang gamblang. Namun, hal tersebut memunculkan pertanyaan umum mengenai bagaimana bentuk resistensi terhadap akumulasi lewat penjarahan.

Perjuangan-perjuangan melawan Akumulasi lewat Penjarahan

Akumulasi primitif sebagaimana yang digambarkan oleh Marx memunculkan serangkaian perjuangan yang keras dan episodik. Lahirnya kapital bukanlah sesuatu yang membawa damai. Kapital menuliskan jejaknya di dalam sejarah dunia, meminjam kata-kata Marx, 'dengan darah dan api'. Christopher Hill, dalam karyanya *The World Turned Upside Down*, menyajikan suatu analisis yang detil mengenai bagaimana perjuangan-perjuangan ini berlangsung di Inggris abad ketujuhbelas, ketika kekuatan-kekuatan kekuasaan kapital dan pemilik tanah berbenturan berulang kali dengan berbagai gerakan kerakyatan yang tersebar yang ingin menjauhkan kapitalisme dan privatisasi dari berbagai bentuk organisasi sosial dan komunal.[19] Akumulasi lewat penjarahan di masa kita juga memunculkan perjuangan-perjuangan politik dan sosial dan lubang-lubang resistensi yang sangat luas. Banyak darinya yang sekarang mengambil bentuk gerakan anti-globalisasi yang masih sedang berkembang dan tersebar luas. Perkembangan kematangan ide-ide alternatif di dalam gerakan-gerakan ini berjalan selaras dengan suburnya ide-ide yang muncul di dalam fase-fase historis dalam perubahan cara-cara hidup dan relasi-relasi sosial (perhatikan misalnya periode tahun 1640-1680 di Inggris dan 1830-1848 di Prancis). Namun, penekanan dalam gerakan-gerakan ini terhadap tema perebutan kembali hak milik bersama (*the commons*) merupakan petunjuk mengenai betapa dalamnya kontinuitas-kontinuitas perjuangan-perjuangan tersebut dengan perjuangan-perjuangan di masa lalu.

---

19. C. Hill, *The World Turned Upside Down* (Harmondsworth: Penguin, 1984).

Namun, kemunculan perjuangan-perjuangan tersebut memunculkan kesulitan serius dalam bagaimna menginterpretasi dan menganalisisnya. Anda tak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telurnya, begitulah kata pepatah lama, dan kelahiran kapitalisme memang membawa episode-episode penghancuran kreatif yang keras dan seringkali kejam. Sementara kekerasan kelas memang membawa kehancuran, sisi positifnya ialah terhapuskannya relasi-relasi feodal, terbebaskannya energi-energi kreatif, terbukanya masyarakat terhadap arus perubahan teknologi dan organisasi yang kuat dan ditaklukkannya suatu dunia yang didasarkan pada takhyul dan kebodohan dan digantikan dengan suatu dunia pencerahan ilmiah dengan potensi untuk membebaskan orang dari keinginan dan kebutuhan material. Dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa akumulasi primitif merupakan suatu tahapan yang perlu yang melalui tahapan itu, tatanan sosial bisa sampai pada suatu keadaan dimana baik kapitalisme maupun semacam sosialisme alternatif menjadi mungkin untuk ada. Marx (bertentangan dengan kaum anarkis seperti Reclus dan Kropotkin, dan para pengikut cabang sosialismenya William Morris) meletakkan nilai yang kecil terhadap bentuk-bentuk sosial yang dihancurkan oleh akumulasi primitif. Dia juga tak mendukung suatu pelanggengan *status quo* dan hampir pasti tak mendukung setiap usaha kembali ke relasi-relasi sosial dan bentuk-bentuk produksi pra-kapitalis. Dia berpandangan bahwa ada sesuatu yang progresif di dalam pembangunan kapitalis dan bahwa hal ini bahkan berlaku bagi imperialisme Inggris di India (suatu pandangan yang kurang disetujui dalam gerakan-gerakan anti-imperialis pada periode pasca-PD II sebagaimana ditunjukkan oleh penerimaan yang dingin terhadap karya Bill Warren mengenai imperialisme sebagai perintis kapitalisme).[20]

---

20. Untuk pembahasan Marx mengenai India, lihat koleksi tulisan K. Marx dan F. Engels, On Colonialism (New York: International Publishers, 1972); B. Warren, *Imperialism: Pioneer of Capitalism* (London: Verso, 1981).

Isu ini memiliki arti penting dalam setiap evaluasi politik terhadap praktek-praktek imperialis kontemporer. Meski level eksploitasi terhadap armada tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang sangat tinggi dan ada banyak kasus praktek perlakuan yang tak baik yang telah teridentifikasi, namun analisis etnografis terhadap trasformasi-transformasi sosial yang ditimbulkan oleh investasi-investasi asing langsung, pembangunan industri dan sistem produksi *offshore* di banyak bagian dunia menghadirkan suatu cerita yang lebih rumit. Dalam beberapa kasus, posisi kaum wanita, yang merupakan bagian terbesar dari armada tenaga kerja, telah semakin berubah, jika bukannya semakin meningkat. Berhadapan dengan pilihan untuk tetap dalam kerja industri atau kembali ke kemiskinan di desa, banyak pihak dalam tubuh kaum proletariat yang baru itu yang tampaknya lebih memilih yang pertama. Dalam banyak kasus, kekuasaan kelas telah tercipta sedemikian rupa sehingga bisa menciptakan capaian-capaian material yang riil di dalam standar-standar kehidupan dan bisa mencapai suatu standar kehidupan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi-situasi yang buruk dalam kehidupannya sebelumnya di desa. Maka bisa diperdebatkan manakah yang menjadi problem di Indonesia, misalnya, dampak dari proses industrialisasi yang cepat terhadap kesempatan hidup selama tahun 1980-an dan 1990-an ataukah dampak dari devaluasi dan de-industrialisasi yang berlangsung selama krisis finansial pada tahun 1997-1998 yang telah menghancurkan banyak capaian yang telah berhasil diraih oleh proses industrialisasi. Manakah problem yang lebih serius: impor dan masuknya akumulasi kapital lewat perluasan reproduksi ke dalam ekonomi Indonesia ataukah keruntuhan total dari aktivitas tersebut lewat akumulasi lewat penjarahan? Meski memang jelas bahwa yang terakhir merupakan suatu konsekuensi logis dari yang pertama, dan bahwa tragedi sesungguhnya tercipta akibat tertariknya (kadangkala secara paksa) penduduk menjadi kaum proletariat dalam waktu singkat hanya untuk kemudian menjadikannya sebagai buruh yang berlebih jumlahnya, namun saya

juga beranggapan adalah masuk akal bahwa langkah kedua itulah yang jauh lebih menghancurkan harapan-harapan, aspirasi-aspirasi dan kemungkinan-kemungkinan jangka panjang bagi sejumlah besar penduduk miskin ketimbang yang bisa dilakukan oleh yang pertama. Implikasinya ialah bahwa akumulasi primitif yang membukakan jalan bagi perluasan reproduksi adalah satu hal, dan akumulasi lewat penjarahan yang merusak dan menghancurkan jalan yang telah terbuka adalah hal yang lain.

Kesadaran bahwa akumulasi primitif bisa menjadi suatu pendahulu yang perlu bagi terjadinya perubahan-perubahan yang lebih positif memunculkan persoalan mengenai politik penjarahan di bawah sosialisme. Dalam tradisi revolusioner Marxis/komunis, seringkali dianggap perlu untuk mengorganisir akumulasi primitif yang setara dengan tujuan untuk mengimplementasikan program-program modernisasi di negara-negara tersebut yang tidak harus menjalani proses inisiasi ke dalam pembangunan kapitalis. Kadangkala ini berarti adanya level kekerasan yang setara dengan yang ada dalam pembangunan kapitalis, seperti terlihat dalam proses kolektivisasi secara paksa terhadap pertanian di Uni Soviet (penghapusan kulak-kulak) dan di Cina dan Eropa Timur. Kebijakan-kebijakan ini sulit untuk bisa disebut sebagai kisah-kisah yang sangat sukses, dan kebijakan-kebijakan itu kemudian memicu resistensi politik yang dalam beberapa kasus dihancurkan dengan sangat kejam. Pendekatan ini menciptakan kesulitan-kesulitannya sendiri ketika diimplementasikan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum Sandinista dengan kaum Indian Mesquito pantai Atlantik di Nikaragua ketika mereka merencanakan pembangunan sosialis di kawasan itu, telah menjadi suatu kuda Troya yang lewat itu CIA bisa melancarkan serangan Kontra-nya yang berhasil melawan revolusi itu.

Karena itulah, sementara perjuangan-perjuangan melawan akumulasi primitif bisa menjadi lahan persemaian ketidakpuasan bagi gerakan-gerakan pemberontakan, termasuk mereka kaum petani, tujuan politik sosialis bukan-

lah untuk melindungi tatanan kuno, namun untuk menyerang secara langsung relasi-relasi kelas dan bentuk-bentuk kekuasaan negara dan untuk sampai ke suatu konfigurasi relasi-relasi kelas dan kekuasaan negara yang sepenuhnya berbeda. Ide ini merupakan ide sentral bagi banyak gerakan revolusioner yang ada di negara-negara sedang berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Mereka memang telah berjuang melawan imperialisme kapitalis, namun mereka melakukannya dengan mengatasnamakan suatu modernitas alternatif ketimbang merupakan suatu pembelaan terhadap tradisi. Dengan begitu, mereka seringkali menemukan diri mereka ditentang dan dilawan oleh mereka yang berusaha melindungi jika bukannya merevitalisasi sistem-sistem produksi, norma-norma kultural dan relasi-relasi sosial yang tradisional.

Gerakan-gerakan pemberontakan melawan akumulasi lewat penjarahan tidak dengan sendirinya suka dikooptasi oleh paham pembangunanisme sosialis. Catatan keberhasilan yang setengah-setengah dari alternatif yang sosialis (seperti capaian-capaian awal Kuba dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan dan pertanian yang pada awalnya penuh inspirasi sebelum kemudian mengendor), dan iklim politik represif yang terutama diorganisir oleh politik Perang Dingin, menjadikan semakin sulit bagi kiri tradisional untuk mengklaim posisi kepemimpinannya karena dominasi koersifnya dalam relasinya dengan gerakan-gerakan sosial itu.

Gerakan-gerakan pemberontakan melawan akumulasi lewat penjarahan secara umum mengambil suatu jalan politik yang berbeda, dalam beberapa kasus cukup memusuhi politik sosialis. Kadangkala alasannya ideologis, namun dalam kasus-kasus lain karena alasan-alasan pragmatis dan organisasional yang bersumber dari watak perjuangan itu di masa lalu dan di masa kini. Keragaman perjuangan itu sendiri sungguh menarik perhatian di masa lalu maupun di masa kini. Sulit bahkan untuk membayangkan adanya koneksi di antara gerakan-gerakan tersebut. Perjuangan-perjuangan masyarakat Ogoni (penduduk asli Afrika) melawan degradasi

tanah mereka oleh Shell Oil; perjuangan panjang melawan proyek-proyek pembangunan bendungan yang didukung oleh Bank Dunia di India dan Amerika Latin; gerakan-gerakan petani melawan *biopiracy*; perjuangan-perjuangan melawan bahan-bahan pangan hasil modifikasi genetika dan demi otentisitas sistem-sistem produksi lokal; perlawanan-perlawanan untuk melestarikan akses masyarakat-masyarakat pribumi terhadap hutan lindung sekaligus membatasi aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan kayu; perjuangan-perjuangan politik melawan privatisasi; gerakan-gerakan untuk melindungi hak-hak buruh atau hak-hak perempuan di negara-negara sedang berkembang; kampanye-kampanye melindungi keanekaragaman hayati dan untuk mencegah penghancuran habitat; gerakan-gerakan petani untuk mendapatkan akses tanah; protes-protes menentang pembangunan jalan tol dan bandara; ratusan protes menentang program-program penghematan yang dipaksakan oleh IMF – semua ini merupakan bagian dari suatu kombinasi volatil gerakan-gerakan protes yang berlangsung di seluruh dunia dan semakin menjadi berita utama selama dan setelah tahun 1980-an.[21] Gerakan-gerakan dan pemberontakan-pemberontakan ini seringkali dihancurkan dengan kekerasan, sebagian besar oleh kekuatan-kekuatan negara yang bertindak dengan mengatasnamakan 'ketertiban dan stabilitas'. Negara-negara klien, dengan dukungan militer atau dalam beberapa kasus dengan kekuatan-kekuatan khusus yang dilatih oleh aparatus-aparatus militer besar (dipimpin oleh AS, dengan Inggris dan Prancis memainkan suatu peran minor), menjadi pemimpin dari suatu sistem represi dan penghancuran untuk melawan secara kejam gerakan-gerakan aktivis yang menentang akumulasi lewat penjarahan.

Selain gambaran yang rumit ini, harus pula ditambahkan adanya perkembangan yang luar biasa dalam jumlah

21. B. Gills (ed.), *Globalization and the Politics of Resistance* (New York: Palgrave, 2001), merupakan koleksi tulisan yang luar biasa bagus mengenai keragaman ini.

NGO-NGO internasional, terutama pasca tahun 1970 atau setelahnya, yang kebanyakan darinya mendedikasikan diri pada politik-politik isu tunggal (lingkungan, status perempuan, hak-hak sipil, hak-hak buruh, penghapusan kemiskinan, dan semacamnya). Sementara beberapa NGO ini berakar pada tradisi-tradisi keagamaan dan humanistik di Barat, NGO-NGO yang lain terbentuk dengan mengatasnamakan perlawanan terhadap kemiskinan, namun didanai oleh kelompok-kelompok yang dicurigai memperjuangkan tujuan penyebarluasan pertukaran pasar. Sangat sulit untuk tak merasa tergetar menyaksikan luasan dan keragaman isu atau jangkauan tujuan ini. Seorang aktivis seperti Roy mengatakan: 'Apa yang tengah terjadi pada dunia kita hampir terlalu kolosal untuk dipahami manusia. Namun, apa yang tengah terjadi itu buruk, sangat buruk. Adalah tak mungkin untuk secara sekaligus membayangkan dunia yang ideal, berupaya menggambarkannya dan mengupayakan dan memperjuangkannya. Satu-satunya cara untuk berjuang ialah lewat berjuang di dalam perang-perang yang spesifik dengan cara-cara tertentu.'[22]

Namun, gerakan-gerakan ini tak hanya bersifat masih baru dalam tahap perkembangan. Gerakan-gerakan itu seringkali menunjukkan adanya kontradiksi-kontradiksi internal seperti, misalnya, ketika masyarakat pribumi merebut kembali hak-hak di dalam area-area yang dianggap oleh kelompok-kelompok lingkungan sebagai sesuatu yang krusial untuk dicagari demi melindungi keanekaragaman hayati dan untuk mencegah penghancuran habitat. Dan sebagian karena adanya perbedaan-perbedaan kondisi yang memunculkan gerakan-gerakan tersebut, membuat orientasi politik dan modus organisasi mereka juga sangat berbeda dari orientasi politik dan modus organisasi dari mereka yang biasanya bersatu di seputar isu perluasan reproduksi. Pemberontakan Zapatista, misalnya, tidak berusaha mengambil alih

22. Roy, *Power Politics*, 86.

kekuasaan negara atau melakukan suatu revolusi politik. Alih-alih, pemberontakan itu menjalankan suatu politik yang lebih inklusif yang lebih berusaha memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki nasib mereka. Secara organisasi, gerakan itu cenderung untuk menghindar dari sikap avan-gardisme dan menolak untuk mengambil bentuk sebagai partai politik. Pemberontakan itu alih-alih lebih menyukai untuk tetap menjadi suatu gerakan sosial di dalam negara, yang berusaha untuk membentuk suatu blok kekuatan politik dimana di dalamnya kultur-kultur pribumi menjadi sentral ketimbang periferi. Jadi, pemberontakan itu berusaha mencapai semacam revolusi pasif di dalam logika teritorial dari kekuasaan yang dikomando oleh aparatus negara Meksiko.[23]

Dampak dari semua gerakan ini *in toto* ialah pergeseran dataran organisasi politik menjauh dari partai-partai politik dan dari pengorganisasian buruh yang tradisional menuju agregat dari suatu dinamika aksi sosial yang kurang terlalu berfokus politik di sepanjang spektrum *civil society*. Hilangnya fokus dalam gerakan ini diimbangi dengan relevansi dan kedekatan dengan politik kehidupan sehari-hari. Gerakan ini menimba kekuatannya dari kedekatan ini, namun dengan berbuat itu, gerakan itu seringkali sulit untuk melepaskan diri dari yang lokal dan dari yang partikular yang memungkinkannya untuk bisa memahami politik makro dari akumulasi lewat penjarahan baik di masa lalu maupun di masa kini.

Namun, adalah berbahaya jika melihat semua perjuangan melawan penjarahan itu per definisi sebagai 'progresif' atau, lebih buruk lagi, menempatkan mereka di bawah bendera yang sama seperti yang digunakan oleh Hardt dan Negri, yaitu '*multitude*', yang akan secara ajaib lahir untuk mewarisi bumi.[24] Di sinilah, menurut saya, letak dari kesulitan

23. Nash, Mayan Visions; A. Morton, 'Mexico, Neoliberal Restructuring and the EZLN: A Neo-Gramscian Analysis', dalam Gills (ed.), *Globalization*, 255-79.
24. Hardt dan Negri, *Empire*.

politik yang sesungguhnya. Karena jika Marx hanya benar secara parsial dalam anggapannya bahwa memang kadangkala ada sesuatu yang progresif dari akumulasi primitif, bahwa untuk membuat telur dadar beberapa telur harus dipecahkan, maka kita harus memecahkan pilihan-pilihan sulit yang ada di hadapan kita. Dan pilihan-pilihan inilah yang sekarang dihadapi oleh gerakan anti- atau alternatif globalisasi dan yang mengancam akan memecah belah gerakan yang kelihatannya berpeluang membawa bendera perjuangan anti-kapitalis dan anti-imperialis. Saya akan mencoba menguraikan lebih jauh hal ini.

Domain Ganda Perjuangan Anti-Kapitalis dan Anti-Imperialis

Pandangan klasik kiri Marxis/sosialis ialah bahwa kaum proletariat, yang diartikan sebagai buruh upahan yang terampas aksesnya ke kepemilikan alat-alat produksi, merupakan agen kunci dari perubahan historis. Kontradiksi sentralnya ialah antara kapital dan buruh di dalam dan di seputar titik produksi. Instrumen-instrumen utama organisasi kelas buruh ialah serikat-serikat buruh dan partai-partai politik yang tujuannya ialah mengambilalih kekuasaan negara dengan tujuan untuk meregulasi atau menggantikan dominasi kelas kapitalis. Jadi, fokusnya ialah pada relasi-relasi kelas dan perjuangan-perjuangan kelas di dalam medan akumulasi kapital yang dipahami sebagai perluasan reproduksi. Semua bentuk perjuangan yang lain dianggap sebagai tambahan, sekunder atau bahkan dicap sebagai periferi atau tak relevan. Tentu saja, ada banyak nuansa dan variasi dari bentuk ini, namun yang menjadi intinya ialah bahwa semuanya memandang bahwa kaum proletariat merupakan agen yang unik dalam transformasi historis. Perjuangan-perjuangan yang dilancarkan mengikuti resep ini telah menghasilkan buah yang luar biasa bagi abad keduapuluh, terutama di negara-negara kapitalis maju. Meski transformasi-transformasi revolusioner tidak terjadi, namun semakin meningkatnya kekuatan dari

organisasi-organisasi kelas buruh dan partai-partai politik telah berhasil mencapai perbaikan-perbaikan yang luar biasa di dalam standar kehidupan material yang dibarengi dengan institusionalisasi atas sejumlah luas proteksi sosial. Negara kesejahteraan sosial demokratik yang muncul, terutama di Eropa Barat dan Skandinavia, bisa dianggap, meski dengan problem-problem dan kesulitan-kesulitan inheren mereka, sebagai model bagi perkembangan yang progresif. Dan mereka tak akan muncul jika tak ada organisasi proletarian yang berfokus tunggal di dalam kerangka perluasan reproduksi. Saya rasa penting untuk mengakui signifikansi dari pencapaian ini.

Meski fokus tunggal itu bersifat produktif, namun hal tersebut juga membawa konsekuensi sejumlah eksklusi. Upaya-upaya, misalnya, untuk memasukkan gerakan-gerakan sosial perkotaan ke dalam agenda kiri secara luas gagal, kecuali tentu saja di bagian-bagian dunia dimana politik komunitarian masih kuat. Politik yang berakar dari tempat kerja dan pusat produksi mendominasi politik ruang kehidupan. Gerakan-gerakan sosial seperti feminisme dan perlindungan lingkungan masih berada di luar pandangan murni kiri tradisional. Dan relasi dari perjuangan-perjuangan demi perbaikan sosial di dalam negeri menjadikan penggusuran-penggusuran bangsa lain yang menjadi ciri khas dari imperialisme cenderung diabaikan (dengan akibat bahwa banyak dari gerakan buruh di negara-negara maju terjebak ke dalam perangkap bertindak sebagai suatu aristokrasi buruh yang berusaha untuk melindungi privilese-privilesenya sendiri, jika perlu lewat imperialisme). Perjuangan-perjuagan menentang akumulasi lewat penjarahan dianggap sebagai tak relevan. Konsentrasi fokus tunggal dengan mengeksklusikan semua yang lain ini merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Hal ini karena jika dua bentuk perjuangan tidak ada kaitannya secara organis di dalam geografi historis dari kapitalisme, maka kiri tidak hanya melemahkan dirinya sendiri, namun juga melumpuhkan kekuatan-kekuatan analitik dan programatisnya

sendiri karena sepenuhnya mengabaikan satu sisi dari dualitas ini.

Dalam dinamika panjang perjuangan kelas pasca krisis tahun 1973, gerakan-gerakan kelas buruh dimana-mana mengambil posisi defensif. Meski ada banyak ketidakseragaman di dalam pandangan bagaimana perjuangan-perjuangan itu dilancarkan (bergantung pada kekuatan resistensi), namun efeknya secara umum ialah lenyapnya kekuatan dari gerakan-gerakan itu sehingga mempengaruhi *trajectory* dari perkembangan kapitalis global. Perluasan secara cepat produksi di Asia Timur dan Asia Tenggara berlangsung dalam suatu dunia dimana, dengan pengecualian Korea Selatan, gerakan-gerakan serikat buruh yang independen (yang dibedakan dari yang korporatis) tak ada atau direpresi secara kejam dan dimana komunisme dan sosialisme sebagai gerakan-gerakan politik dihabisi secara kejam (pertumpahan darah tahun 1965 ketika Suharto menggulingkan Sukarno dan mungkin ada jutaan orang yang dibunuh, merupakan kasus yang paling brutal). Di negara-negara lain, di seluruh negara Amerika Latin maupun di Eropa dan Amerika Utara, munculnya kapital keuangan, perdagangan yang lebih bebas dan pendisplinan negara oleh gerak lintas-negara dari pasar-pasar kapital yang telah diliberalisasikan menjadikan bentuk-bentuk organisasi buruh tradisional menjadi kurang memadai dan sebagai konsekuensinya, kurang berhasil. Gerakan-gerakan revolusioner dan bahkan reformis (sebagaimana di Chili di bawah Allende) direpresi secara kejam oleh kekuatan militer.

Namun beratnya kesulitan untuk mempertahankan perluasan reproduksi juga memunculkan suatu penekanan yang lebih besar lagi terhadap politik akumulasi lewat penjarahan. Bentuk-bentuk organisasi yang dikembangkan untuk memerangi yang pertama tidak terjemahkan dengan bagus ketika tiba saatnya untuk berkonfrontasi dengan yang terakhir. Jika digeneralisir secara kasar, bentuk-bentuk organisasi politik sayap kiri, yang dibangun dalam periode tahun 1945-1973 ketika perluasan reproduksi telah meningkat tidak lagi memadai untuk dunia pasca-1973 ketika akumulasi lewat pen-

jarahan mengemuka sebagai kontradiksi primer di dalam organisasi imperialis dari akumulasi kapital.

Hasilnya ialah munculnya suatu jenis politik resistensi yang berbeda, yang bersenjatakan suatu visi yang berbeda dengan visi sosialisme atau komunisme. Perbedaan ini diakui pada awalnya oleh, misalnya, Samir Amin, terutama terkait dengan perjuangan-perjuangan dalam apa yang diistilahkanya sebagai zona-zona periferal dari kapitalisme:

> pembangunan yang tak setara yang imanen dalam ekspansi kapitalis telah memunculkan dalam sejarah tipe revolusi yang lain, yaitu revolusinya masyarakat-masyarakat (dan bukan kelas-kelas tertentu) periferi. Revolusi ini berwatak anti-kapitalis dalam artian bahwa revolusi itu menentang pembangunan kapitalis sebagaimana yang ada secara aktual karena pembangunan kapitalis itu tak bisa ditoleransi oleh masyarakat-masyarakat ini. Namun ini tidak berarti bahwa revolusi-revolusi anti-kapitalis ini berwatak sosialis... Karena desakan situasi, revolusi-revolusi ini memiliki suatu sifat yang kompleks. Pengekspresian kontradiksi-kontradiksi khusus dan baru mereka, yang tak terbayangkan dalam perspektif transisi sosialis klasik sebagaimana yang diajukan oleh Marx, menjadi isi riil dari rezim-rezim pos-kapitalis, yaitu suatu bangunan nasional populis dimana di dalamnya tendensi-tendensi sosialisme, kapitalisme dan statisme berkombinasi dan berkonflik.

Sayangnya, kata Amin, banyak gerakan kontemporer yang:

> mendasarkan diri pada pemberontakan populis yang bersifat spontan melawan kondisi-kondisi yang tak dapat diterima yang tercipta akibat kapitalisme periferal; hanya saja, gerakan-gerakan sejauh ini telah gagal menjadi gerakan yang menyerukan revolusi ganda dimana modernisasi dan *popular enfranchisement* harus disatukan bersama; sebagai hasilnya, dimensi fundamental mereka, yang mendasarkan diri pada mitos yang menatap ke masa lalu, masih terus mengekspresikan diri dalam suatu

bahasa dimana di dalamnya perhatian metafisik masih tetap eksklusif di dalam seluruh visi sosial yang dianutnya.[25]

Meski saya tidak beranggapan bahwa akumulasi lewat penjarahan ini eksklusif di periferi, namun tak bisa dibantah bahwa beberapa dari manifestasinya yang paling kejam dan tak manusiawi ada di kawasan-kawasan paling rentan dan buruk di dalam pembangunan geografis yang tak seragam itu.

Perjuangan-perjuangan melawan penjarahan itu sendiri berlangsung di berbagai skala. Banyak darinya yang bersifat lokal, yang lain regional, dan yang lainnya lagi global, sehingga komando aparatus negara – yang merupakan tujuan primer dari gerakan-gerakan sosialis dan komunis tradisioal – tampaknya menjadi semakin kurang dan semakin kurang relevan. Ketika pergeseran ini dibarengi dengan semakin tersingkapnya mengenai apa yang bisa dicapai oleh pembangunanisme sosialis, maka dorongan untuk mencari suatu politik alternatif tampaknya menjadi semakin lebih kuat lagi. Target-target dan tujuan-tujuan dari perjuangan-perjuangan semacam itu, seperti dicatat oleh Amin, beragam, merupakan fungsi dari bentuk-bentuk belum matang, fragmentaris dan kontingennya akumulasi lewat penjarahan. Penghancuran habitat di satu tempat, privatisasi jasa di tempat yang lain, pengusiran dari tanah di tempat lain lagi, *biopiracy* di ranah yang lain lagi – masing-masing menciptakan dinamikanya. Karena itu, trennya ialah mencari bentuk-bentuk pegorganisasian yang bersifat *ad hoc* namun lebih fleksibel yang bisa dibangun di dalam *civil society* untuk menjawab perjuangan-perjuangan itu. Seluruh medan perjuangan anti-kapitalis, anti-imperialis dan anti-globalisasi sebagai konsekuensinya akan mengalami refikonfigurasi dan berlangsunglah suatu dinamika politik yang sangat berbeda.

---

25. S. Amin, 'Social Movements at the Periphery', dalam P. Wignaraja (ed.), *New Social Movements in the South: Empowering the People* (London: Zed Books, 1993), 95. Kumpulan tulisan ini memuat beberapa tulisan yang merefleksikan secara tajam tema-tema ini.

Bagi banyak pengamat, gerakan-gerakan baru ini dengan kualitas-kualitas khusus mereka layak disebut sebagai 'posmodern'. Begitulah sekarang cara pemberontakan Zapatista seringkali dicirikan. Meski deskripsi-deskripsi dari gerakan-gerakan tersebut memang cocok, namun penyebutan 'posmodern' merugikan. Mungkin terasa menggelikan untuk memperdebatkan istilah tersebut, namun konotasi-konotasi substantifnya sungguh penting. Yang pertama, ada kesulitan tertentu yang muncul dari periodisasi dan historisisme yang inheren yang secara niscaya melekat pada awalan 'pos'. Seperti yang telah saya tunjukkan, ada banyak episode akumulasi primitif dan akumulasi lewat penjarahan di dalam geografi historis dari kapitalisme. Studi Eric Wolf mengenai Perang Petani pada Abad Keduapuluh meletakkan salah satu dimensi dari perjuangan-perjuangan itu di dalam suatu perspektif komparatif tanpa mendasarkan diri pada ide posmodernitas. Karena itulah, agak mengejutkan ketika melihat June Nash, yang penggambaran-penggambarannya mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di Chiapas menghadirkan suatu dokumen eviden atau suatu contoh, menerima penyebutan 'posmodern' terhadap apa yang dilakukan oleh Zapatisa di masa lalu dan di masa kini. Padahal pasti akan lebih masuk akal untuk melihat bahwa perjuangan itu dengan berlatar belakang perjalanan perjuangan yang panjang di pihak penduduk pibumi dan petani melawan aksi-aksi pelanggaran batas oleh imperialisme kapitalisme dan melawan ancaman penjarahan yang konstan terhadap setiap aset yang mereka miliki dengan menggunakan aksi-aksi negara. Dalam kasus Zapatista, saya rasa sangatlah signifikan artinya bahwa perjuangan itu pertama-tama muncul di hutan-hutan dataran rendah, tempat dimana elemen-elemen pribumi yang tergusur membangun suatu aliansi dengan *mestizo* atas dasar pemiskinan yang sama-sama mereka alami dan atas dasar pengesampingan secara sistematis yang sama-sama mereka alami untuk mendapatkan setiap manfaat yang harusnya mereka dapatkan dari pengambilan sumber daya (terutama minyak dan kayu) dari kawasan yang mereka diami. Peng-

gambaran gerakan ini sebagai semata-mata berhubungan dengan 'penduduk pribumi' mungkin lebih berhubungan dengan perjuangan untuk menegakkan legitimasi Konstitusi Meksiko yang melindungi hak-hak pribumi ketimbang dengan gambaran aktual mengenai asal-usul gerakan tersebut.[26]

Namun sebagaimana hilangnya 'kaitan organik' antara akumulasi lewat penjarahan dan perluasan reproduksi telah melemahkan dan membatasi visi kiri tradisional, demikian pula pendasaran diri pada konsepsi perjuangan posmodern telah memiliki dampak yang sama terhadap gerakan-gerakan yang baru muncul melawan akumulasi lewat penjarahan. Permusuhan di antara kedua jalan pemikiran dan gaya mengorganisir ini [antara kiri tradisional dan gerakan sosial baru] telah banyak terlihat di dalam gerakan anti-globalisasi. Seluruh sayap gerakan baru melihat bahwa gerakan untuk mengambil komando atas aparatus negara sebagai bukan saja tak relevan, namun juga merupakan suatu penyesatan yang ilusif. Jawabannya terletak, kata mereka, di dalam melokalisasi segala hal.[27] Sayap itu juga cenderung mencap gerakan serikat buruh sebagai suatu bentuk organisasi modernis, reaksioner dan opresif yang niscaya akan dilampaui oleh bentuk-bentuk gerakan sosial posmodern yang lebih cair dan terbuka. Gerakan-gerakan serikat buruh yang baru bermunculan, katakanlah, di Indonesia dan Thailand yang berjuang melawan kekuatan-kekuatan penindasan neoliberal yang sama dengan Zapatista, meski di bawah situasi-situasi yang sangat berbeda dan di atas basis sosial dan kultural yang sangat berbeda, sama-sama menemukan dirinya terpinggirkan. Di sisi lain, banyak kaum sosialis tradisional menganggap gerakan-gerakan baru itu sebagai naif dan menghancurkan dirinya sendiri (*self-destructive*) seolah-olah tak ada yang me-

---

26. E. Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century* (New York: HarperCollins, 1969); Nash, Mayan Visions; Morton, 'Mexico'.

27. Suatu versi yang tajam dari argumen ini disajikan dalam C. Hines, *Localization: A Global Manifesto* (London: Earthscan, 2000). Lihat juga Wignaraja (ed.), *New Social Movements*.

narik dan yang bisa dipelajari dari gerakan baru. Perpecahan seperti ini berlangsung dengan sangat kuat sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa debat di Forum Sosial Dunia di Porto Alegre. Kemenangan merebut kekuasaan pemerintahan di Brazil oleh Partai Buruh Brazil, yang jelas-jelas memiliki suatu basis 'kaum buruh' (*workerist*) dan yang mendasarkan perjuangannya sebagian pada cara-cara kiri tradisional, membuat debat itu menjadi lebih sengit dan genting.

Perbedaan-perbedaan itu sendiri tak bisa dikubur di bawah konsep yang kabur, seperti '*multitude*'. Perbedaan-perbedaan itu harus dipecahkan secara politik maupun secara analitik. Di dataran yang terakhir, rumusan Luxemburg sangatlah membantu. Akumulasi kapital sungguh-sungguh memiliki suatu karakter ganda. Aspek perluasan reproduksi dan akumulasi lewat penjarahan memiliki keterkaitan yang bersifat organik dan jalin-menjalin secara dialektis. Sebagai konsekuensinya perjuangan-perjuangan di dalam medan perluasan reproduksi (yang sangat ditekankan oleh kiri tradisional) haruslah dilihat di dalam suatu kerangka relasi dialektis dengan perjuagan-perjuangan menentang akumulasi lewat penjarahan yang merupakan fokus utama dari gerakan-gerakan sosial yang berkoalisi dengan gerakan-gerakan anti- dan alternatif globalisasi. Jika periode saat ini telah memperlihatkan adanya suatu pergeseran dalam penekanan dari akumulasi lewat perluasan reproduksi menuju akumulasi lewat penjarahan, dan jika yang terakhir itu menjadi jantung praktek-praktek imperialis, maka sebagai konsekuensinya neraca keseimbangan kepentingan di dalam gerakan anti- dan alternatif globalisasi haruslah menempatkan akumulasi lewat penjarahan sebagai kontradiksi primer yang mesti dilawan. Namun, semua itu tak boleh dilakukan dengan mengabaikan relasi dialektis terhadap perjuangan-perjuangan di medan perluasan reproduksi.

Hanya saja, ini pun memunculkan kembali problem bahwa tidak semua perjuangan melawan penjarahan sama progresifnya. Perhatikan saja gerakan milisia di dalam Amerika Serikat, atau sentimen-sentimen anti-imigran dalam

enklaf-enklaf etnik yang berjuang menentang masuknya 'asing' ke dalam apa yang mereka sebut sebagai hak-hak tanah yang tradisional dan sakral. Ada ancaman bahaya bahwa suatu politik nostalgia yang telah hilang akan mengalahkan usaha untuk mencari cara-cara yang lebih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dari penduduk yang termiskinkan dan tertindas; bahwa politik lokal yang eksklusioner akan mengalahkan kebutuhan untuk membangun suatu globalisasi alternatif di berbagai skala geografis; bahwa gerak balik ke arah pola-pola relasi-relasi sosial dan sistem produksi yang lama akan diposisikan sebagai suatu solusi di dalam suatu dunia yang sesungguhnya telah berubah. Tampaknya tak ada jawaban yang mudah bagi persoalan-persoalan semacam itu.

Meski demikian, seringkali relatif tak terlalu sulit untuk membangun rekonsiliasi dalam tingkat tertentu. Perhatikan, misalnya, argumen Roy menentang investasi-investasi besar-besaran dalam pembangunan bendungan di lembah Narmada di India. Roy lebih memperjuangkan pemberian listrik murah kepada penduduk desa yang miskin. Di sini, dia sama sekali bukanlah anti-modernis. Yang menjadi argumennya di dalam menentang bendungan ialah: (a) listrik dari bendungan relatif mahal jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk pembangkit listrik lainnya, sementara manfaat-manfaat pertanian (yang memang jarang diukur) dari irigasi tampaknya minimal; (b) biaya lingkungan bendungan tampaknya besar (sekali lagi, tak ada usaha serius untuk menaksir, apalagi mengukurnya); (c) besarnya jumlah uang yang mengalir menuju proyek itu menguntungkan sejumlah kecil elit konsultan, insinyur, perusahan konstruksi bendungan, pembuat turbin dsb (yang banyak darinya merupakan orang asing, termasuk perusahaan Enron yang bereputasi buruk), dan bahwa uang ini akan jauh lebih bisa bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan yang lain; (d) semua resiko ditanggung oleh negara karena perusahaan-perusahaan yang terlibat dijamin akan mendapatkan tingkat kembalian; dan (e) bahwa ratusan ribu orang akan tergusur dari lahan-lahan mereka, sejarah mereka

dan mata pencaharian mereka, terutama sekali penduduk pribumi (*dalit*) atau yang termarjinalisasi yang sama sekali tak mendapatkan kompensasi dan manfaat dari proyek-proyek tersebut. Penduduk-penduduk itu bahkan tak diajak musyawarah atau dimintakan pendapatnya, padahal kemudian desa-desa mereka-lah yang harus mengalami banjir setinggi lutut saat pemerintah dengan tiba-tiba mengisi bendungan ketika musim *monsoon* (musim hujan lebat) tiba. Meski perlawanan ini jelas merupakan suatu perang bentuk khusus di suatu lokasi yang tertentu yang diperjuangkan dengan cara-cara tertentu, namun karakter kelasnya cukup jelas, jika melihat proses penjarahan 'yang barbar' itu.[28] Bahwa sebanyak 30 juta orang harus tergusur oleh proyek-proyek bendungan di India selama lebih dari limapuluh tahun terakhir, hal tersebut merupakan bukti luasnya dan brutalnya proses penjarahan. Hanya saja, rekonsiliasi semacam ini sangat bergantung pada pemahaman terhadap posisi fundamental politik dari akumulasi lewat penjarahan sebagai suatu titik pusat utama dari pembangunan perjuangan kelas yang ada dan yang harus ada.

Saya sendiri berpandangan, dan pandangan ini saya rasa berharga, bahwa gerakan-gerakan politik, jika ingin memiliki dampak makro dan jangka panjang, haruslah melampaui nostalgia atas masa yang telah hilang dan juga harus bersedia untuk mengakui capaian-capaian positif yang telah diraih dari transfer-transfer aset-aset yang dicapai lewat bentuk-bentuk penjarahan yang terbatas (sebagai misal lewat reformasi pertanahan atau lewat struktur-struktur pengambilan kebijakan yang baru seperti misalnya manajemen hutan bersama). Gerakan-gerakan itu juga harus lebih bisa memisahkan antara aspek-aspek progresif dan regresif dari akumulasi lewat penjarahan dan berusaha memandu aspek-aspek progresif ke arah tujuan politik yang lebih luas yang memiliki nilai yang lebih universal jika dibandingkan dengan banyak gerakan lokal

28. Roy, *Power Politics*.

yang seringkali menolak untuk meninggalkan partikularitas mereka. Namun, untuk bisa demikian, mereka harus menemukan cara-cara untuk mengakui arti penting dari identitas-identitas yang *multiple* (yang didasarkan pada kelas, gender, lokalitas, kultur dsb.) yang ada di dalam diri penduduk, dalam jejak-jejak sejarah dan tradisi yang muncul sebagai tanggapan terhadap masuknya kapitalis ketika mereka memandang diri mereka sendiri sebagai makhluk sosial yang memiliki kualitas-kualitas dan aspirasi-aspirasi yang tersendiri dan seringkali kontradiktif dengan kapitalis. Jika tak ada pengakuan tersebut, ada bahaya terciptanya kembali ruang kosong dalam analisis seperti dalam analisis Marx mengenai akumulasi primitif dan kegagalan untuk melihat potensi kreatif yang tersimpan di dalam apa yang oleh beberapa pihak dicap sebagai relasi-relasi sosial dan sistem-sistem produksi 'yang tradisional' dan non-kapitalistik. Beberapa cara harus ditemukan, baik secara teoretis maupun politik, untuk melampaui konsep '*multitude*' tanpa jatuh ke dalam perangkap mentalitas 'komunitasku, lokalitasku, atau kelompok sosialku benar atau salah'. Di atas semua itu, konektivitas di antara perjuangan-perjuangan di dalam menentang perluasan reproduksi dan akumulasi lewat penjarahan haruslah ditumbuhkembangkan secara keras. Untunglah, di sini, adanya hubungan sejarah saling menghidupi di antara kedua bentuk perjuangan itu di dalam menentang tatanan institusional keuangan dengan dukungan kekuatan-kekuatan negara (sebagaimana terbangun di dalam dan tersimbolisasikan oleh IMF dan WTO) telah mendapatkan pengakuan kuat. Konektivitas itu haruslah menjadi fokus utama dari gerakan-gerakan protes. Dengan telah diterimanya inti dari problem politik, maka menjadi mungkin untuk membangun suatu politik penghancuran kreatif yang lebih luas dan yang dimobilisasikan bersama-sama untuk melawan rezim dominan dari imperialisme neoliberal yang berusaha ditanamkan di seluruh dunia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis yang hegemonik.

Imperialisme sebagai Akumulasi Lewat Penjarahan

Ketika Joseph Chamberlain membawa Inggris ke dalam Perang Boer lewat aneksasi Witwatersrand di awal abad keduapuluh, sangat jelas bahwa sumber emas dan berlian menjadi motivasi utamanya. Namun, sebagaimana kita telah lihat, perubahan ke logika imperialis muncul karena ketidakmampuannya untuk menemukan solusi-solusi internal terhadap problem kronis over akumulasi kapital di dalam Inggris. Ketidakmampuan ini sangat terkait dengan struktur kelas yang menghalangi setiap penerapan berskala besar surplus kapital ke arah reformasi sosial dan investasi infrastruktur di dalam negeri. Dorongan pemerintahan Bush untuk turut campur secara militer di Timur Tengah juga memiliki kaitan erat dengan usaha untuk mengontrol secara lebih ketat sumber-sumber minyak di Timur Tengah. Kebutuhan untuk menjalankan kontrol telah semakin meningkat semenjak Presiden Carter pertama kali mengemukakan doktrin bahwa Amerika Serikat tak segan-segan menggunakan cara-cara militer untuk menjamin arus minyak Timur Tengah yang tanpa henti ke dalam ekonomi global. Karena korelasi antara resesi dalam ekonomi global dengan harga minyak semakin meningkat, maka semakin rendahnya harga minyak bisa dianggap sebagai salah satu taktik dalam upaya untuk mengatasi problem-problem kronis overakumulasi yang telah berlangsung selama tiga dekade. Sebagaimana di Inggris pada akhir abad sebelumnya, penghalangan terhadap reformasi internal dan investasi infrastruktural oleh konfigurasi kepentingan-kepentingan kelas selama tahun-tahun tersebut juga memainkan suatu peran krusial di dalam mengubah politik AS ke arah yang semakin lebih terbuka dalam menjalankan imperialisme. Karena itulah, adalah menarik untuk melihat invasi AS ke Irak sebagai setara dengan keterlibatan Inggris di dalam Perang Boer karena keduanya sama-sama berlangsung pada masa-masa awal berakhirnya hegemoni mereka.

Namun, intervensi-intervensi militer hanyalah puncak dari gunung esnya imperialis. Kekuasaan negara yang hegemonik biasanya dikerahkan untuk menjamin dan memajukan tatanan-tatanan institusional yang bersifat eksternal dan internasional yang lewat itu asimetri relasi-relasi pertukaran bisa bekerja sedemikian rupa sehingga menguntungkan kekuasaan yang hegemonik. Lewat cara-cara seperti itu, upeti dihisap dari seluruh dunia. Perdagangan bebas dan pasar kapital yang terbuka menjadi sarana-sarana primer yang semakin menguntungkan kekuatan-kekuatan monopoli yang berbasis di negara-negara kapitalis maju yang memang telah mendominasi perdagangan, produksi, jasa dan keuangan di dalam dunia kapitalis. Kendaraan utama bagi akumulasi lewat penjarahan, karenanya, ialah memaksakan terbukanya pasar di seluruh dunia lewat tekanan-tekanan institusional yang dijalankan lewat IMF dan WTO dengan dukungan dari kekuatan Amerika Serikat (dan sampai tingkatan tertentu Eropa) dan menghalangi akses masuk ke pasar dalam negeri mereka yang sangat luas kepada negara-negara yang menolak untuk melepaskan proteksi-proteksi mereka.

Meski begitu, semua langkah ini tak akan punya arti penting seperti sekarang ini jika saja tak muncul problem-problem kronis di dalam overakumulasi kapital lewat perluasan reproduksi yang dibarengi dengan suatu penolakan politik untuk memecahkan problem-problem tersebut lewat reformasi internal. Jawabannya kemudian ialah semakin ditekankannya akumulasi lewat penjarahan, dan hal ini disimbolisasikan dengan semakin meningkatnya suatu politik internasionalis dari neoliberalisasi dan privatisasi, yang berkorelasi dengan serangan periodik dalam devaluasi predatori terhadap aset-aset di berbagai belahan dunia. Ringkasnya, kaum borjuis Amerika telah menciptakan kembali apa yang pernah diciptakan oleh kaum borjuis Inggris dalam tiga dekade terakhir abad kesembilanbelas. Sebagaimana dikatakan oleh Arendt, akumulasi lewat penjarahan merupakan 'bentuk kejahatan perampokan yang sesungguhnya' (*the original sin of*

simple robbery) yang memungkinkan akumulasi kapital awal bisa 'berlangsung berulang-ulang kecuali jika motor penggerak akumulasi dengan tiba-tiba mati'.[29] Jika memang demikian halnya, maka 'imperialisme baru' tampaknya tak lebih dari kebangkitan kembali imperialisme yang lama, hanya saja dalam ruang dan waktu yang berbeda. Entah kesimpulan ini merupakan suatu konseptualisasi yang memadai atau tidak atas situasi yang ada, hal ini masih harus dievaluasi.

29. Arendt, *Imperialism*, 28.

5 Dari Konsensus ke Koersi

IMPERIALISME kapitalis lahir dari suatu relasi dalektis antara logika kekuasaan teritoral dan logika kapitalistik. Kedua logika ini sangat berbeda dan tak bisa diredusir satu sama lain, hanya saja ada hubungan saling jalin-menjalin yang erat di antara keduanya. Keduanya bisa dilihat sebagai berelasi secara internal satu sama lain. Namun, keluaran-keluaran dari dialektika di atara kedua logika itu bisa sangat berbeda di antara ruang dan waktu yang berbeda. Setiap logika menciptakan kontradiksi-kontradiksi dalam diri logika yang lain. Akumulasi kapital yang tiada henti, misalnya, menimbulkan krisis-krisis periodik di dalam logika teritorial karena ada kebutuhan untuk menciptakan suatu akumulasi yang berkesejajaran dalam bidang kekuatan politik/militer. Ketika kontrol politik dari logika teritorial berpindah, arus kapital pun juga berpindah mengikutinya. Negara-negara meregulasi urusan-urusan mereka sesuai dengan aturan-aturan dan tradisi-tradisi khas mereka dan dengan demikian melahirkan gaya-gaya penyelenggaraan pemerintahan yang khas. Kekhasan ini menjadi basis bagi terciptanya ketidakseragaman di dalam pembangunan georafis, di dalam perjuangan-perjuangan geopolitik, dan di dalam berbagai bentuk politik imperialis. Karena itu, imperialisme tak bisa dipahami tanpa pertama-

tama memahami teori mengenai negara kapitalis dalam semua keragamannya. Negara-negara yang berbeda-beda melahirkan imperialisme-imperialisme yang berbeda-beda, sebagaimana tampak jelas dengan imperialisme Inggris, Prancis, Belanda, Belgia dsb dari tahun 1870 sampai dengan 1945. Imperialisme-imperialisme, seperti halnya imperium-imperium, bisa muncul dalam banyak rupa dan bentuk. Sementara mungkin banyak dari bentuk itu yang bersifat kontingen dan aksidental – dan hal tersebut niscaya ada karena adanya perjuangan-perjuangan politik yang berlangsung di dalam logika kekuasaan teritorial– saya percaya bahwa kita bisa membangun suatu kerangka pemahaman yang solid terhadap bentuk imperialisme yang sangat khas kapitalistik dengan cara menjelaskan dialektika ganda dari, yang pertama, logika kekuasaan teritorial dan logika kapitalistik, dan, yang kedua, dari relasi-relasi internal dan eksternal dari negara kapitalis.

Dengan kerangka pemahaman di atas, perhatikan kasus pergeseran mutakhir dalam bentuk imperialisme dari imperialisme neoliberal menuju imperialisme neo-konservatif di Amerika Serikat. Ekonomi kapitalisme global mengalami suatu rekonfigurasi yang radikal sebagai respon terhadap krisis overakumulasi tahun 1973-1975. Arus-arus kapital selama ini memang menjadi sarana primer dari pengartikulasian logika kekuasaan kapitalistik. Namun ketika Kotak Pandora dari kapital keuangan telah terbuka, maka meningkatlah tekanan bagi dilakukannya transformasi-transformasi yang bersifat adaptif di dalam diri aparatus-aparatus negara. Selangkah demi selangkah, banyak negara, dengan arahan dari Amerika Serikat dan Inggris, mengadopsi kebijakan-kebijakan neoliberal. Sementara itu, negara-negara yang lain berusaha mengikuti jejak kekuatan-kekuatan kapitalis utama atau pun dipaksa untuk mengikuti jejak dengan menggunakan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh IMF. Negara neoliberal biasanya berusaha untuk mengambil-alih hak milik umum (*to enclose the commons*), melakukan privatisasi, dan membangun pasar komoditi dan kapital

yang terbuka. Negara neoliberal harus menjaga disiplin tenaga kerja dan memajukan 'suatu iklim bisnis yang baik'. Jika suatu negara tertentu gagal atau menolak melakukan hal tersebut, maka negara tersebut akan diklasifikasikan sebagai negara 'yang gagal' atau negara 'berandal' (*rogue state*). Konsekuensi dari semua ini ialah munculnya bentuk-bentuk imperialisme yang sangat khas neoliberal. Akumulasi lewat penjarahan (*accumulation by dispossession*) berlangsung kembali. Setelah menjelang tahun 1970 hanya berada di latar belakang, proses akumulasi tersebut sekarang berubah menjadi suatu fitur utama dalam logika kapitalis. Perubahan posisi itu memungkinkannya menjalankan dua tugas. Di satu sisi, pelepasan aset-aset secara murah menjadi medan penarik yang sangat kuat untuk mengabsorsi surplus kapital. Di sisi lain, pelepasan aset-aset secara murah menjadikan biaya-biaya devaluasi surplus-surplus kapital ditanggung oleh teritori-teritori dan penduduk-penduduk yang paling lemah dan paling rapuh. Ketika volatilitas dan berlimpahnya kredit serta krisis likuiditas telah menjadi fitur ekonomi global saat ini, maka imperialisme harus bisa mengorganisir semua ini lewat institusi-institusi seperti IMF agar pusat-pusat utama akumulasi kapital terlindung dari devaluasi. Dan inilah yang persis dilakukan dengan berhasil oleh kompleks Wall Street-Departemen Keuangan AS-IMF yang beraliansi dengan pemerintahan-pemerintahan Eropa dan Jepang selama lebih dari dua dekade.

Namun, peralihan ke arah finansialisasi ini membutuhkan banyak biaya di dalam negeri AS, seperti deindustrialisasi, fase-fase inflasi yang cepat diikuti dengan menyusutnya kredit (*credit crunches*) dan pengangguran struktural yang kronis. AS misalnya kehilangan dominasinya dalam produksi, dengan pengecualian dalam sektor-sektor seperti pertahanan, energi dan pertanian. Pembukaan pasar-pasar global untuk komoditi-komoditi dan kapital membuka kesempatan bagi negara-negara lain untuk masuk ke dalam ekonomi global, pertama-tama sebagai penyerap, namun kemudian sebagai produsen-produsen surplus kapial. Mereka kemudian men-

jadi pesaing-pesaing dalam pentas dunia. Apa yang bisa disebut sebagai 'sub-imperialisme' pun muncul, bukan saja di Eropa, namun juga di Asia Timur dan Asia Tenggara ketika masing-masing kawasan mengembangkan pusat akumulasi kapitalnya guna membangun *spatio-temporal fixes* bagi surplus kapitalnya masing-masing secara sistematis dengan cara memperkuat lingkungan pengaruh teritorialnya. Akan tetapi, lingkungan-lingkungan pengaruh antar teritori ini saling tumpang tindih dan saling mempenetrasi ketimbang saling eksklusif, dan ini mencerminkan mudahnya dan fluiditas mobilitas kapital lintas ruang dan jaringan interdependensi spasial yang semakin melintasi batas negara.

Hanya saja, manfaat-manfaat dari sistem ini masih sangat terkonsentrasi di kalangan kelas CEO, pelaku bisnis keuangan (*financier*) dan pemburu rente (*rentier*) multinasional yang sangat kecil jumlahnya. Kelas kapitalis transnasional bagaimanapun masih menempatkan Wall Stret dan pusat-pusat lainnya seperti London dan Frankfurt sebagai lokasi-lokasi yang aman untuk menempatkan kapitalnya. Kelas ini, sebagaimana biasa, membutuhkan Amerika Serikat sebagai pelindung bagi nilai-nilai aset dan hak-hak atas kekayaan dan kepemilikannya di seluruh dunia. Sementara kekuatan ekonomi tampaknya masih sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat, muncul konsentrasi-konsentrasi kekuatan finansial di teritorial lainnya. Kapital yang terkonsentrasi di pasar-pasar Eropa dan Jepang dapat terbuka sebagaimana hal itu dapat dimanfaatkan oleh hampir setiap kelas pemburu rente yang cerdik dalam menempatkan posisi dirinya secara tepat di dalam matriks institusi-institusi kapitalistik. Krisis-krisis utang mungkin menggoyang Brazil dan Meksiko, krisis likuiditas mungkin menghancurkan ekonomi Thailand dan Indonesia, namun elemen-elemen pemburu rente di dalam semua negara itu bukan saja terlindung kapitalnya, namun posisinya di dalam negeri semakin menguat. Kelas-kelas dengan privilese berlindung di balik gilda-gilda *ghetto* di Bombay, Sao Paulo, dan Kuwait, sambil menikmati hasil dari investasi-investasi

mereka di Wall Street. Jadi, meski Wall Street bergelimang uang, hal itu tidak berarti bahwa orang-orang Amerika-lah yang memiliki uang tersebut. Problem Wall Street ialah bagaimana menemukan pemanfaatan-pemanfaatan yang menguntungkan bagi kesemua surplus uang yang ada di tangannya tanpa mempedulikan apakah uang itu milik orang Amerika atau bukan.

Penyebaran geografis dari kekuatan kelas kapitalistik tidak hanya terjadi dalam kasus pemburu rente dan kepentingan-kepentingan finansial; kapital produksi juga memetik keuntungan dari volatilitas spasial dan logika teritorial yang tengah bergeser. Perusahaan-perusahaan multinasional besar di bidang barang elektronik, sepatu dan kaos mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar karena mobilitas geografisnya. Demikian pula dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Diaspora bisnis Cina, misalnya, semakin menanjak posisinya persis karena ia memiliki sarana dan kemampuan untuk mengekstrak laba dari mobilitasnya. Sub-sub kontraktor Taiwan dan Korea Selatan beroperasi di Amerika Latin dan Afrika Selatan, dan meraih keberhasilan yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang mereka pekerjakan justru menderita.[1]

Namun, salah satu fitur khas dari dunia ini bahwa kelas kapitalis transnasional, yang terdiri atas para pelaku bisnis keuangan, CEO dan pemburu rente, harus mengandalkan diri pada pemegang hegemoni teritorial agar kepentingan-kepentingan mereka dan corak arsitektur institusional dimana di dalamnya mereka bisa menghimpun kekayaan dunia terlindung. Kelas ini sangat tak peduli dengan semua bentuk loyalitas atau tradisi lokal atau nasional. Kelas ini bisa berwatak multirasial, multi-etnik, multikultural, dan kosmopolitan. Jika kondisi finansial tengah darurat dan usaha pencarian laba menuntut ditutupnya pabrik dan dikuranginya kapasitas

1. G. Hart, *Disabling Globalization: Places of Power in Post-Apartheid South Africa*, (Berkeley: University of California Press, 2002).

manufaktur di negeri mereka, maka itulah yang akan dilakukan kelas ini. Kepentingan-kepentingan finansial AS, misalnya, dengan senang hati meruntuhkan hegemoni AS di dalam bidang produksi. Sistem ini mencapai titik puncaknya selama masa-masa pemerintahan Clinton ketika Departemen Keuangan AS di bawah pimpinan Rubin-Summers mengarahkan secara terorganisir urusan-urusan internasional demi keuntungan kepentingan-kepentingan rentier di Wall Street, meski hal itu seringkali berarti bahwa mereka tengah mengambil resiko yang sangat tinggi. Puncaknya ialah ketika kompetisi yang berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara didisplinkan pada tahun 1997-1998 dengan suatu cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pusat-pusat finansial di Jepang dan Eropa, dan terutama sekali Amerika Serikat, bisa membeli aset-aset nyaris dengan tanpa bayar dan dengan begitu memperbesar lini profit mereka dengan biaya devaluasi besar-besaran dan penghancuran ekonomi negara-negara lain. Ini hanyalah satu contoh dari sejumlah besar krisis utang dan keuangan yang melanda sebagian besar negara sedang berkembang pasca tahun 1980.

Imperialisme-imperialisme neoliberal di luar negeri cenderung untuk menghasilkan ketidakamanan yang kronis di dalam negeri. Karena itulah, banyak elemen kelas menengah yang berusaha mendukung teritori, bangsa dan tradisi sebagai suatu cara untuk mempersenjatai diri melawan kapitalisme neoliberal yang berwatak predator. Mereka berusaha untuk memobilisasi logika teritorial dari kekuasaan agar terlindung dari dampak-dampak kapital predator. Rasisme dan nasionalisme yang dulunya pernah mempersatukan negara-bagsa dan imperium muncul kembali di level borjuis kecil dan kelas buruh sebagai suatu senjata untuk mengorganisir diri melawan kosmopolitanisme kapital keuangan. Karena tindakan pengkambinghitaman para imigran sebagai penyebab problem-problem bisa menarik perhatian kepentingan-kepentingan elit, maka politik eksklusi atas dasar ras, etnis, dan agama muncul, terutama sekali di Eropa dimana

gerakan-gerakan neo-fasis mulai mendapatkan dukungan populer yang sangat besar. Elit-elit korporasi dan finansial yang berkumpul di Davos pada tahun 1996 mencemaskan bahwa suatu 'serangan balik yang kuat' (*mounting backlash*) melawan globalisasi di dalam negara-negara demokrasi industrial bisa 'berdampak merusak aktivitas ekonomi dan stabilitas sosial di banyak negara'. Perasaan 'ketidakberdayaan dan kecemasan' menciptakan iklim yang kondusif bagi 'munculnya suatu corak baru politisi populis' dan hal ini bisa 'dengan mudah berubah menjadi pemberontakan'.[2]

Di tengah-tengah itulah, gerakan anti-globalisasi mulai muncul, dan menyerang kekuatan-kekuatan kapital keuangan dan institusi-institusi utamanya (IMF dan Bank Dunia), berusaha merebut kembali hak-hak milik bersama (*the commons*), dan menuntut adanya ruang dimana di dalamnya perbedaan-perbedaan nasional, regional dan lokal bisa tumbuh berkembang. Dengan negara yang sedemikian jelas berpihak kepada para pelaku bisnis keuangan dan dalam banyak kasus menjadi agen primer dalam politik akumulasi lewat penjarahan, gerakan ini mengarahkan perhatiannya kepada institusi-institusi *civil society* agar bisa mentransformasi logika kekuasaan teritorial dalam berbagai skalanya, mulai dari yang sangat lokal sampai dengan yang global (sebagaimana dalam kasus gerakan lingkungan). Meluasnya penipuan, perampokan dan kekerasan menimbulkan banyak respon yang keras. Sikap yang kelihatannya beradab yang diandaikan melekat pada pasar yang berfungsi dengan baik, dalam kenyataannya tidak terbukti. Oleh kekuatan-kekuatan negara, gerakan-gerakan protes yang muncul itu untuk sebagian besar dihancurkan secara kejam. Perang berskala rendah dilancarkan di seluruh dunia, seringkali dengan keterlibatan dan bantuan militer secara diam-diam dari AS.

---

2. Klaus Schwab and Claude Smadja, dikutip dalam D. Harvey, *Spaces of Hope* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 70.

Dengan mengambil jarak dari bentuk-bentuk organisasi buruh tradisional seperti serikat buruh, partai-partai politik dan bahkan dari usaha untuk merebut kekuasaan negara (yang sekarang dianggap sebagai telah sangat penuh kompromi), gerakan-gerakan penentangan ini berusaha menemukan bentuk-bentuk organisasi sosial mereka sendiri yang otonom, dan membangun logika-logika teritorial kekuasaan mereka sendiri yang tak resmi (sebagaimana yang dilakukan oleh Zapatista) yang berorientasi pada perbaikan nasib mereka atau membela diri mereka sendiri menghadapi suatu kapitalisme yang berwatak predatoris. Gerakan organisasi-organisasi non-pemerintah (yang beberapa darinya disponsori oleh pemerintah) berusaha untuk mengontrol gerakan-gerakan sosial ini dan mengarahkan ke arah saluran-saluran khusus tertentu, yang beberapa darinya berwatak revolusioner, namun yang lainnya berwatak akomodatif terhadap rezim kekuasaan yang neoliberal. Sebagai hasilnya, terciptalah suatu gerakan sosial yang bersifat lokal, terpencar-pencar dan sangat terdiferensiasi yang berjuang untuk melawan atau menjauhkan diri dari praktek-praktek neoliberal dari imperialisme yang dipimpin secara terorganisir oleh kapital keuangan dan negara-negara neoliberal.

Volatilitas yang inheren dalam neoliberalisme pada akhirnya memukul balik Amerika Serikat. Keruntuhan ekonomi yang berawal dari runtuhnya ekonomi dot.com pada tahun 1999 dengan cepat menyebar dan memperlihatkan bahwa banyak dari kapital keuangan yang ada pada kenyataannya merupakan kapital fiktif yang tak dapat dipertukarkan yang didukung oleh praktek-praktek pembukuan yang penuh skandal dan oleh aset-aset yang sepenuhnya tak bernilai. Bahkan sebelum peristiwa 9/11, terlihat jelas bahwa imperialisme neoliberal telah sedang melemah di dalam negeri, bahwa bahkan nilai-nilai aset di Wall Street tak lagi bisa dilindungi, dan bahwa hari-hari neoliberalisme dan berbagai bentuk imperialismenya yang khas tinggal menghitung hari. Isu besarnya ialah jenis relasi apa yang akan muncul di

antara logika kekuasaan teritorial dan logika kapitalistik dan jenis imperialisme apakah yang akan dihasilkan.

Terpilihnya secara kebetulan George W. Bush, seorang Kristen yang bersemangat, menjadi presiden AS membuat sekelompok pemikir neo-konservatif kembali ke lingkar kekuasaan. Kaum neo-koservatif, dengan pendanaan yang besar dan sangat terorganisir di sejumlah '*think-tank*' sebagaimana halnya kaum neoliberal pada masa sebelumnya, telah sejak lama berusaha memaksakan agenda mereka kepada pihak pemerintah. Dan agenda mereka berbeda dari agendanya neoliberalisme. Tujuan utama mereka ialah penciptaan dan penegakan ketertiban, baik di dalam negeri maupun di pentas dunia. Hal ini mengimplikasikan kepemimpinan yang kuat di puncak dan loyalitas yang tak tergoyahkan di level basis, dibarengi dengan pembangunan suatu hirarki kekuasaan yang mantap dan tegas. Bagi gerakan neo-konservatif, keterikatan terhadap prinsip moral adalah penting. Di sini, mereka mendapatkan dukungan dari dan basis kemenangan pemilunya berasal dari kalangan Kristen fundamentalis. Sebagai misal, tak lama setelah peristiwa 9/11, Jerry Falwell dan Pat Robertson (dua pemimpin utama dalam gerakan ini) mengungkapkan pandangan bahwa kejadian itu merupakan suatu tanda dari kemarahan Tuhan atas sikap permisif masyarakat yag menoleransi aborsi dan homoseksualitas. Kemudian, dalam suatu program *current affairs* yang paling banyak ditonton di televisi Amerika, Falwell menyatakan bahwa Muhammad merupakan teroris besar pertama, dan tokoh-tokoh yang lain menyuarakan dukungan mereka terhadap Zionisme dan terhadap aksi kekerasan Sharon terhadap orang-orang Palestina karena semua ini akan membawa dunia ke Hari Kiamat dan Kebangkitan Kembali (*The Second Coming*). Kepercayaan terhadap kitab Wahyu dan Armageddon sangat menyebarluas (Reagan, misalnya, mengadopsi kepercayaan itu). Sulit terutama bagi orang-orang Eropa untuk memahami bahwa sekitar sepertiga penduduk AS memegang erat kepercayaan-kepercayaan semacam itu (termasuk paham kreasionisme ketimbang evolusi), yang mengim-

plikasikan penerimaan terhadap horor-horor perang (terutama di Timur Tengah) sebagai suatu babak pendahuluan bagi pemenuhan kehendak Tuhan di muka bumi. Banyak dari militer AS yang sekarang direkrut dari daerah selatan tempat dimana pandangan-pandangan seperti itu berpengaruh kuat.

Sementara kaum neo-konservatif tahu mereka tak bisa berkuasa dengan memanfaatkan *platform* semacam itu, pengaruh Kristiani tak bisa diremehkan. Kegagalan untuk mengeluarkan hambatan-hambatan terhadap represi kejam yang dilakukan oleh Sharon terhadap orang-orang Palestina (yang ditafsirkan oleh kaum fundamentalis sebagai suatu langkah positif menuju ke arah Armageddon) merupakan suatu contoh kasus yang menonjol. Dan dalam konflik dengan dunia Arab, sulit untuk mencegah agar sikap-sikap ini tidak berubah menjadi memunculkan retorika perang salib Kristen versus jihad Islam, sehingga akan mengubah tesis Huntington mengenai perbenturan peradaban menjadi suatu fakta geopolitik.[3]

Piagam neo-konservatif untuk kebijakan luar negeri dituangkan di dalam dokumen Proyek untuk Abad Baru Amerika (*The Project for the New American Century*) yang disusun pada tahun 1997.[4] Judulnya, sebagaimana yang dulu judul karya Luce pada tahun 1941, berbicara mengenai sebuah abad ketimbang suatu kontrol teritori. Tak heran jika tulisan tersebut mengulang-ulang semua sikap mengelaknya Smith dalam presentasi Luce.[5] Proyek itu 'diabdikan pada beberapa proposisi fundamental: bahwa kepemimpinan Amerika adalah baik untuk Amerika dan untuk dunia; bahwa kepemimpinan semacam itu membutuhkan kekuatan militer, energi diplomatik, dan komitmen terhadap prinsip moral; dan bahwa terlalu sedikit pemimpin politik saat ini

3. S. Huntington, T*he Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order* (New York: Simon & Schuster, 1997).
4. Situsnya ialah <www.newamericancentury.org>.
5. Lihat Smith, *American Empire*.

yang memberikan teladan dalam hal kepemimpinan global'. Prinsip-prinsip tersebut dinyatakan secara tegas oleh Bush pada peringatan peristiwa 9/11 (sebagaimana dikutip dalam Bab 1). Meski diakui sebagai nilai-nilai khas Amerika, prinsip-prinsip ini digambarkan sebagai nilai-nilai yang universal, dengan menggunakan istilah-istilah seperti kebebasan dan demokrasi dan penghormatan terhadap hak milik pribadi, individu, dan hukum yang digabungkan dan ditetapkan sebagai suatu kode perilaku bagi seluruh dunia. Proyek itu juga berusaha 'menghimpun dukungan bagi suatu kebijakan keterlibatan internasional Amerika yang tegas dan berprinsip'. Ini artinya mengekspor dan jika perlu memaksakan kode-kode perilaku yang cocok terhadap negara-negara lain di seluruh dunia. Sebagian besar anggota inti dari Proyek tersebut berasal dari pendukung pemerintahan mantan presiden Reagan dan Bush. Mereka inilah wakil-wakil kunci dari 'kompleks industri-militer' yang telah sejak lama oleh Eisenhower telah diprediksi kemunculannya dan yang telah semakin menguat kekuasaannya pada masa-masa pemerintahan Reagan. Banyak dari mereka yang kemudian bergabung dengan pemerintahan Bush yang baru. Jika posisi-posisi kunci dalam pemerintahan Clinton berada di tangan Departemen Keuangan (dimana Rubin dan Summers menjadi pemimpin utamanya), pemerintahan Bush yang baru mengandalkan pada pakar-pakar pertahanannya – seperti Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz dan Powell – untuk membentuk kebijakan internasional, dan bergantung pada seorang Kristen konservatif – yaitu Ashcroft – sebagai Jaksa Agung untuk menegakkan ketertiban di dalam negeri. Jadi, pemerintahan Bush didominasi oleh kaum neo-konservatif, sangat bergantung kepada kompleks industri-militer (dan sejumlah kecil sektor utama industri Amerika, seperti energi dan pertanian), dan didukung oleh penilaian-penilaian moralnya kaum Kristen fudamentalis. Tugas mereka ialah mengkonsolidasikan kekuasaan di balik agenda politik logika kekuasaan teritorial yang dipimpin-oleh-sekelompok-kecil-orang. Dalam hal ini, mereka memahami betul keterkaitan antara ketertiban dalam negeri dan keter-

tiban di luar negeri. Mereka secara intuitif menerima pandangan Arendt bahwa imperium di luar negeri memerlukan tirani di dalam negeri, hanya saja mereka menyatakannya secara berbeda. Aktivitas militer di luar negeri membutuhkan disiplin ala militer di dalam negeri.

Irak telah sejak lama menjadi pusat perhatian bagi kaum neo-konservatif, namun kesulitannya ialah bahwa dukungan publik bagi intervensi militer tak mungkin ada tanpa ada suatu even katastrofik 'dengan skala seperti Pearl Harbour', demikian mereka menyebutnya. Peristiwa 9/11 memberi mereka kesempatan emas, dan terciptalah suatu momen solidaritas sosial dan patriotisme yang bisa digerakkan untuk membangun suatu nasionalisme Amerika sehingga bisa menjadi basis bagi dilancarkannya suatu kegiatan imperialis di luar negeri dan kontrol di dalam negeri. Sebagain besar kaum liberal, bahkan mereka yang sebelumnya kritis terhadap praktek-praktek imperialis AS, mendukung pemerintah dalam kebijakannya melancarkan perang terhadap teror dan bersedia mengorbankan kebebasan sipil demi kepentingan keamanan nasional. Tuduhan sebagai tidak patriotis digunakan untuk menindas sikap kritis atau perilaku pembangkangan yang rasional. Media dan partai-partai politik memberikan persetujuannya terhadap hal tersebut. Ini memungkinkan kepemimpinan politik untuk memberlakukan legislasi yang represif terhadap setiap oposisi – terutama sekali dengan memanfaatkan Undang-undang Patriot dan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri. Langkah-langkah pengekangan terhadap hak-hak sipil dilembagakan. Tawanan-tawanan ditangkap secara ilegal dan tanpa didampingi pengacara di Teluk Guantanamo, serangkaian penangkapan terhadap 'para tersangka' dilakukan, dan banyak di antaranya yang ditahan selama berbulan-bulan tanpa mendapatkan haknya untuk didampingi oleh pengacara, terlebih lagi hak untuk diadili. Polisi bisa dengan semena-mena menahan setiap orang yang diduga terlibat 'terorisme', dan termasuk di antaranya, sebagaimana nanti akan kita lihat, mereka yang terlibat di dalam gerakan anti-globalisasi. Teknik-teknik mata-mata yang ketat diter-

apkan (FBI memiliki akses terhadap catatan peminjaman buku dari perpustakaan, pembelian buku, koneksi internet, catatan riwayat sekolah, catatan keanggotaan dalam klub menyelam, dsb.). Pihak pemeritah juga menggunakan kesempatan itu untuk memangkas semua jenis program untuk masyarakat miskin (dengan mengatasnamakan pengorbanan demi kepentingan nasional). Diterapkan kebijakan pemotongan pajak yang sangat jelas menguntungkan kaum terkaya di AS yang jumlahnya hanya 1 persen dari seluruh penduduk AS (dengan dalih untuk menstimulus ekonomi) dan bahkan mengajukan usulan penghapusan pajak terhadap deviden dengan harapan kosong bahwa hal tersebut akan menaikkan nilai aset di Wall Street. Hanya saja, kebijakan-kebijakan di atas, yang dibarengi dengan pelanggaran terang-terangan terhadap Bill of Rights dan Konstitusi Amerika, hanya bisa dipertahankan, sebagaimana yang telah sejak lama disadari dan dikhawatirkan oleh Washington, Madison dan yang lainnya, lewat kegiatan-kegiatan imperialis di luar negeri. Karena adanya ancaman-ancaman yang membayangi peristiwa 9/11 dan iklim penindasan terhadap segala bentuk ketidakpuasan, maka bahkan opini liberal pun beralih bandul mendukung ide untuk menginvasi Afghanistan, menghancurkan Taliban, dan pengejaran al-Qaeda ke seluruh dunia.

Untuk menjaga momentum dan mewujudkan ambisi-ambisinya, gaya politik Amerika yang paranoid diefektifkan. Kaum neo-konservatif telah sejak lama menyuarakan ancaman-ancaman yang akan datang dari Irak, Iran, dan Korea Utara, dan beberapa negara lain yang disebut sebagai 'negara berandal' (*rogue states*) terhadap ketertiban global. Di atas semua ini, Cina yang sejak lama ditakuti sebagai tak bisa diprediksi dan sekaligus berpotensi menjadi kompetitor kuat di pentas dunia, dijadikan sebagai sasaran. Aliansi di antara kaum neo-konservatif dan kompleks industri-militer mendesak Clinton selama tahun 1990-an agar meningkatkan belanja militernya dan mempersiapkan diri untuk berperang di dua perang regional – sebagai misal melawan 'negara berandal' (*rogue states*) seperti Irak dan Korea Utara – secara seren-

tak. Irak menjadi pusat sasaran sebagian karena posisi geopolitik dan rezim diktatornya yang tidak mau tunduk kepada tindakan pendisiplinan keuangan karena kekayaan minyaknya, selain juga karena Irak berpotensi memimpin sebuah gerakan pan-Arab yang sekuler yang akan mendominasi seluruh kawasan Timur Tengah dan mampu mendikte ekonomi global lewat kekuasaannya terhadap arus minyak. Presiden Carter di masa lalu pernah menyatakan bahwa setiap upaya untuk memanfaatkan minyak dengan cara demikian tak akan bisa ditoleransi, dan inilah yang mendorong komitmen kehadiran militer AS secara langsung ke kawasan itu sejak setidaknya tahun 1980. Perang Teluk yang pertama tidak menghasilkan perubahan rezim di Baghdad, sebagian karena tak ada mandat dari PBB untuk itu. Penetapan yang diberlakukan terhadap Irak sama sekali tak memuaskan bagi kedua belah pihak. Rakyat Irak dibuat tertegun dan sanksi-sanksi diberlakukan, inspektur-inspektur persenjataan dikirimkan dan kemudian diusir keluar, warga Kurdi dilindungi di zona otonom di utara Irak lewat ancaman militer, dan sebuah perang berskala kecil terus berlangsung di udara Irak ketika AS dan Inggris melakukan patroli gabungan di zona larangan terbang di utara maupun selatan Irak. Clinton menyebut Irak sebagai sebuah 'negara berandal' (*rogue state*) dan mengadopsi kebijakan bahwa rezim di Baghdad harus ganti, namun membatasi langkah-langkahnya pada aksi diam-diam dan pada sanksi-sanksi ekonomi terbuka yang oleh kaum neo-konservatif disebut sebagai tak akan bisa berhasil.

Setelah peristiwa 9/11, kaum neo-konservatif memiliki dasar alasan yang kuat. Kesulitannya ialah bahwa Irak jelas-jelas tak memiliki keterkaitan dengan al Qaeda dan perang melawan terorisme harus menjadi dalih utamanya. Dalam invasi ke Afghanistan, pihak militer mengujicobakan banyak dari senjata barunya di lapangan, dan hal ini hampir bisa dianggap sebagai suatu latihan bagi apa yang mungkin akan mereka lakukan di Irak dan di tempat-tempat lain. Dalam proses itu, AS mempertahankan kehadiran militernya di Uzbekistan dan Kyrgiztan yang sangat dekat dengan sumber-

sumber minyak Cekungan Kaspia (dimana besar cadangan minyaknya masih misteri dan dimana Cina berjuang keras untuk bisa mendapatkan tempat pijakan di sana guna menjamin suplai minyaknya agar kebutuhan dalam negerinya yang semakin meningkat dengan cepat bisa terpenuhi). Dalam waktu enam bulan, dan dengan kalahnya Taliban di Afghanistan, pemerintah AS mulai mengalihkan perhatiannya ke Irak. Pada musim panas tahun 2002, terlihat jelas bahwa AS berkomitmen untuk memaksakan terjadinya perubahan rezim di Baghdad dengan kekuatan militer tak peduli apapun alasannya. Satu-satunya pertanyaan yang menarik ialah bagaimana menjustifkasi hal ini ke hadapan publik Amerika dan internasional. Di sini, pemerintah AS berusaha dengan segala cara menciptakan selubung cerita, mengubah-ubah retorika hari demi hari, mengungkapkan pernyataan-pernyataan lisan seolah-olah merupakan fakta-fakta yang telah terbukti (seperti yang telah dilukiskan dalam Bab 1). Pemerintah AS berusaha untuk menciptakan suatu kekuatan koalisi dimana di dalamnya Inggris, karena keterlibatannya yang sangat besar dalam aksi militer harian di Irak (dan karena itu sangat sulit untuk melepaskan diri dari Irak), memainkan peran sebagai pemimpin. Pada mulanya, AS menolak memberikan peran kepada PBB dan bahkan menyatakan tak membutuhkan dukungan dari Kongres, namun pada titik-titik ini, AS harus mengakui tekanan-tekanan politik di dalam negeri maupun di level internasional. Pemerintah AS kemudian secara cermat menumbuhkembangkan nasionalisme jenis baru di dalam negeri AS yang dibangun semenjak peristiwa 9/11 dan memanfaatkannya dalam proyek imperial penggantian rezim di Irak dengan alasan bahwa langkah itu merupakan sesuatu yang esensial bagi keamanan dalam negerinya, dan pada saaat yang bersamaan pemerintah AS memanfaatkan proyek imperial itu untuk menciptakan kontrol dalam negeri yang semakin lebih ketat (dibahanbakari oleh peringatan-peringatan akan bahaya teror dan peciptaan rasa takut lainnya di dalam negeri). Sayangnya, sebagaimana dengan sedemikian tajamnya dicatat oleh Arendt, kombinasi antara

nasionalisme dan imperialisme tak akan bisa dicapai jika tidak mendasarkan diri pada rasisme. Gambaran umum yang merendahkan mengenai bangsa Arab dan orang Islam serta kebijakan-kebijakan resmi terhadap para tamu dan kaum imigran semuanya menjadi petunjuk jelas dari semakin meningkatnya gelombang rasisme di AS sehingga berpotensi bisa menciptakan kerusakan yang besar di masa depan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Meski saat ini situasinya bergerak dengan cepat, apalagi seperti biasa dibarengi dengan selubung dan bayang-bayang pernyataan resmi, namun masih mungkin untuk melihat secara kasar ke arah mana kira-kira proyek imperial neo-konservatif akan menuju. Karena itulah, saya ingin memberikan kesimpulan dengan sebuah sinopsis mengenai arah tujuan tersebut beserta penilaian mengenai kekuatan-kekuatan yang kemungkinan melawannnya.

Kaum neo-konservatif berusaha untuk membangun kembali Irak sejalan dengan garis-garis yang telah dimulai di Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Irak akan diliberalisasikan demi pembangunan kapitalistik yang terbuka dengan tujuan puncak untuk menciptakan suatu masyarakat konsumeris yang kaya-raya sesuai dengan alur Barat sehingga bisa menjadi model bagi seluruh negara-negara Timur Tengah lainnya. Infrastruktur-infrastruktur sosial, institusional, dan politik yang perlu akan dibangun di bawah pemerintahan AS, namun secara berangsur-angsur akan diserahkan kepada suatu pemerintahan politik Irak yang bersifat klientelis terhadap AS (bila mungkin sama lemahnya dengan partai liberal Jepang). Irak akan tetap terdemiliterisasi, namun dilindungi oleh kekuatan-kekuatan AS yang akan tetap berada di kawasan Teluk.[6] Minyak Irak akan digunakan untuk membiayai rekonstruksi itu dan untuk membayar sejumlah biaya perang, dan diharapkan, minyak itu akan dijual di pasar dunia (dijual dengan uang dollar ketimbang euro) de-

6. Rumusan ini disampaikan dengan bagus oleh Johnson, Blowback.

ngan harga yang cukup murah sehingga bisa memicu pemulihan kembali ekonomi global.

Namun, itu bukanlah batas akhir dari ambisi imperial kaum neo-konservatif. Mereka juga telah memulai membicarakan Iran (yang setelah pendudukan Irak menjadi sepenuhnya dikelilingi oleh militer AS dan jelas-jelas terancam) dan juga telah melancarkan tuduhan terhadap Syria dan telah membicarakan tentang 'konsekuensi-konsekuensi'. Begitu gamblangnya pernyataan-pernyataan mereka itu sampai-sampai pihak kementerian Luar Negeri Inggris jauh-jauh hari merasa perlu untuk menyatakan secara tegas bahwa Inggris jelas-jelas akan menolak sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam setiap aksi militer terhadap Syria maupun Iran. Kaum neo-konservatif sendiri berpandangan, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rumsfeld, bahwa AS tidak membutuhkan Inggris untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, dan jika perlu, AS akan melangkah sendirian. Tekanan terhadap Syria dan Iran semakin ditingkatkan, dan sementara itu AS juga berusaha melakukan reformasi dalam negeri di Saudi Arabia untuk mencegah setiap usaha pengambilalihan kekuasaan di Saudi Arabia oleh penganut Islam garis keras (apalagi, mengingat inilah yang menjadi tujuan primer dari bin Laden) dan sekaligus untuk memecahkan kenyataan bahwa banyak dari ajaran fundamentalis yang memicu oposisi terhadap AS justru didukung oleh Saudi. Di sisi lain, AS sekarang telah mengembangkan, dan eksperimennya tengah dilakukan di Irak, sebuah kapasitas militer yang dinamai '*shock and awe*' yang akan memiliki kekuatan untuk secara serentak menghancurkan ratusan senjata jarak jauh yang diarahkan oleh Korea Utara ke Seoul. Jika berhasil, maka kemampuan militer itu akan bisa menghancurkan semua kekuatan militer Korea Utara dan kapasitas nuklir Korea Utara dalam waktu duabelas jam.

Di balik semua itu, terdapat suatu visi geopolitik tertentu. Dengan pendudukan Irak dan reformasi dalam tingkat tertentu di Saudi Arabia dan penjinakan terhadap Syria dan Iran terhadap kekuatan serta kehadiran militer Amerika yang

superior, AS akan memiliki suatu pangkalan terdepan yang strategis dan vital, sebagaimana telah disebutkan di Bab 2, di tanah Eurasian yang kebetulan menjadi pusat produksi minyak yang sekarang merupakan bahan bakar penggerak (dan akan terus menjadi bahan bakar penggerak utama selama setidaknya lima puluh tahun mendatang) bukan hanya bagi ekonomi global, namun juga bagi setiap mesin militer besar yang berani menentang Amerika Serikat. Langkah-langkah di atas akan bisa menjamin keberlanjutan dominasi global AS selama limapuluh tahun mendatang. Jika AS bisa mengkonsolidasikan keanggotaan sekutunya dengan memasukkan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Bulgaria, dan (yang sangat problematis) dengan Turki, sampai ke Irak, dan sampai ke Timur Tengah yang bisa dijinakkan, maka AS akan memiliki suatu kemampuan yang efektif di wilayah-wilayah yang melintasi dataran tanah Eurasia, dan memisahkan Eropa barat dari Rusia dan Cina. AS dengan demikian akan berada dalam suatu posisi militer dan geostrategis yang sanggup mengontrol selutuh dunia secara militer dan, lewat penguasaan atas minyak, secara ekonomi. Ini terutama penting mengingat adanya potensi tantangan dari Uni Eropa atau, yang lebih penting lagi, dari Cina yang kebangkitannya sebagai suatu kekuatan ekonomi dan militer dan potensi kepemimpinannya di Asia tampaknya merupakan suatu acaman serius bagi kaum neo-konservatif. Kaum neo-konservatif di AS kelihatannya memiliki komitmen terhadap suatu rencana jangka panjang untuk mendominasi dunia secara total.[7] Dalam tatanan dunia Pax Amerikana itu, digambarkan bahwa semua segmen akan tumbuh berkembang di bawah payung kapitalisme pasar bebas. Dalam pandangan kaum neo-konservatif, negara-negara lain di seluruh dunia (atau setidaknya semua kelas pemilik kekayaan) harus dan akan berterimakasih atas ruang yang telah diciptakan oleh AS guna dimungkinkannya pembangunan ekonomi di bawah kapitalisme pasar bebas di seluruh dunia.

7. Armstrong, 'Dick Cheney's Song of America'.

Pertanyaan besar dan yang masih terbuka tentu saja ialah dapatkah atau akankah proyek semacam itu berhasil? Yang tak bisa dibantah, bahkan dalam tubuh pemerintahan Bush maupun dalam tubuh militer, ada pihak-pihak yang bukan saja tak yakin akan kelayakan proyek tersebut, namun juga secara aktif menentang proyek tersebut. Keseimbangan kekuatan internal di dalam pemerintahan Bush saat itu memang tengah berayun ke blok neo-konservatif, namun keseimbangan ini mungkin tidak akan seterusnya demikian. Sebagai misal, keseimbangan ini akan sangat bergantung pada apakah reputasi kaum neo-konservatif yang bersumber dari aksi militer di Irak akan meningkat ataukah malah tercemar. Suatu aksi pendudukan yang berkepanjangan dan bermasalah di Baghdad akan memiliki konsekuensi-konsekuensi serius bagi doktrin yang menyatakan bahwa perang tersebut adalah demi pembebasan dan bukan demi pendudukan atas Irak misalnya.

Di sisi lain, kekuatan-kekuatan luar yang menentang imperialisme neo-konservatif berkembang hebat. Yang pertama, semakin eksplisit proyek imperialisme itu, semakin kuat proyek itu mendorong terciptanya suatu aliansi di antara Jerman, Prancis, Rusia, Cina, dan negara-negara lain yang jelas-jelas akan mengancam posisi adidaya AS. Blok kekuatan Eropa yang relatif bersatu, sesuatu yang pernah dikhawatirkan oleh Kissinger (lihat alasannya dalam Bab 3), tidak akan tinggal diam begitu saja ketika harus berhadapan dengan AS. Selain itu, jika AS menekan Iran atau Syria, maka Inggris hampir pasti akan melepaskan dukungannya terhadap apa yang jelas-jelas merupakan imperialisme AS yang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Hampir pasti pula, pemerintah-pemerintah Eropa, seperti Spanyol dan Italia, yang mendukung AS dan menentang kehendak rakyatnya sendiri akan jatuh, dan Eropa berubah menjadi suatu blok kekuatan yang jauh lebih bersatu dalam penentangannya terhadap rencana-rencana AS ketimbang yang ada sekarang. Dan penentangan global di Perserikatan Bangsa-bangsa tampaknya juga

akan menjadi semakin menguat sehingga AS pun menjadi semakin lebih terisolasi lagi.

Kaum neo-konservatif telah melenyapkan begitu banyak kapasitas AS untuk memimpin secara moral dan kemampuan AS untuk memimpin lewat persetujuan yang sejati telah banyak berkurang. Bahkan pengaruh kulturalnya tampaknya telah sangat melemah. AS dalam kenyataannya harus berusaha untuk mendapatkan persetujuan di Perserikatan Bangsa-bangsa (dengan memperlakukan PBB hampir seperti apa yang dilakukannya di dalam politik pemilu tradisional di Chicago). Kegagalan untuk mendapatkan dukungan dari Turki, salah satu anggota NATO, bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan ekonomi yang berat dan ancaman balas dendam dari AS, menjadi petunjuk jelas mengenai adanya suatu problem yang lebih dalam itu. Sangat sedikit persetujuan sejati yang bisa didapat dari dunia, dan Inggris yang dianggap sebagai pihak yang paling dekat, di mata publik dinilai sangat mudah goyah. AS pun harus melepaskan usaha meraih hegemoni lewat persetujuan dan semakin lebih mengandalkan diri pada dominasi lewat koersi. Telah sejak lama menjadi aspirasi AS, sebagaimana dikatakan oleh Colin Powell, untuk menjadi 'menjadi penguasa besar dunia' (*the big bully in the block*) (lihat bab 2), namun pernyataanya bahwa aspirasi itu bisa diterima karena AS dipercaya akan melakukan hal yang benar sekarang telah kehilangan kredibilitasnya. Meningkatnya gelombang penentangan umum secara global, yang ditandai dengan meluasnya demonstrasi-demonstrasi anti-perang pada tanggal 15 Februari 2003, merupakan suatu kekuatan yang mesti dihadapi.

Menjadi suatu keyakinan yang dianut dengan sangat kuat di kalangan kaum neo-koservatif bahwa begitu mereka telah berhasil membangun ketertiban di seluruh dunia dan menunjukkan manfaat-manfaatnya, maka penentangan terhadap kebijakan militerisme mereka di level masyarakat umum maupun di kalangan pemerintahan negara-negara lain akan lenyap. Jelas visi itu merupakan suatu utopianisme, dan bahkan perwujudan secara parsial utopia itu akan sangat ber-

gantung pada bagaimana manfaat-manfaat itu dihasilkan dan bagaimana akan didistribusikan. Dalam konteks ini, neo-konservatisme tak jauh berbeda dari neoliberalisme dalam kepercayaannya bahwa pasar bebas baik dalam komoditi maupun dalam kapital perlu untuk menciptakan kebebasan dan kemakmuran kepada semua bangsa. Jika hal itu tak terbukti, maka apa yang akan dilakukan oleh kaum neo-konservatif hanyalah mengubah perang berintensitas rendah yang dilancarkan di bawah payung neoliberalisme di seluruh dunia menjadi suatu konfrontasi dramatis yang diandaikan akan memecahkan problem-problem sekali untuk selamanya. Kaum neo-konservatif akan melanjutkan suatu ekonomi politik yang bergantung pada akumulasi lewat penjarahan (perampasan minyak Irak merupakan titik awal yang paling menyolok) dan melakukannya hanya untuk mengatasi terus meningkatnya kesenjangan-kesenjangan yang tercipta akibat bentuk-bentuk kapitalisme kontemporer. Ketika kebijakan-kebijakan pajak mereka bisa terus berlanjut, kaum neo-konservatif akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mendukung kebijakan itu, mungkin dengan dalih bahwa dalam jangka panjang prakarsa dan kebijakan ini akan bisa meningkatkan peri kehidupan semua orang. Dari sini, kita bisa menebak perjuangan-perjuangan global melawan penjarahan akan semakin meningkat dan bukannya melemah. Juga terjadi penguatan di dalam gerakan-gerakan anti- dan alternatif globalisasi sampai ke titik dimana pemerintahan yang terpilih, seperti halnya Lula di Brazil, berusaha untuk melemahkan, jika bukannya membalik mundur, dataran beroperasinya neoliberalisme. Selain itu, di sini AS akan jatuh ke dalam politik nasionalisme dan eksklusivitas sebagai suatu cara untuk melindungi diri dari ancaman neoliberal. Dengan semakin kuatnya kecenderungan kejatuhan AS ke dalam sikap rasisme sebagai suatu cara untuk menjembatani nasionalisme dan imperialisme, disintegrasi akan semakin sulit untuk dicegah.

Selain itu, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana proyek imperial neo-konservatif akan bisa diterima di dalam dunia Arab dan lebih luas lagi dunia Islam. Di sini, kaum neo-konservatif tengah melangkah ke dataran yang sangat berbahaya. *Pertama*, setiap pendekatan dengan dunia Arab harus dilandaskan pada solusi yang bisa diterima mengenai konflik Arab-Israel, padahal pemerintahan Bush sendiri hampir sepenuhnya mendiamkan masalah ini, kecuali pada saat-saat tertentu, biasanya ketika ada tekanan-tekanan dari luar negeri (terutama dari Inggris). Alasan di balik sikap acuh tak acuh dan menolak untuk berbuat sesuatu untuk mencegah kebijakan-kebijakan Sharon di Israel ialah karena keberadaan pengaruh-pengaruh Zionis yang sangat didukung oleh kaum Kristen fundamentalis di Amerika Serikat. Kegagalan untuk memerdekakan pemukiman Palestina dari cengkeraman kekuatan imperial Amerika yang digelar di kawasan itu akan menjadi pukulan permanen terhadap AS baik di dalam maupun di luar dunia Arab. Bisa dipastikan, hal tersebut akan menjadi sumber penentangan yang bisa berbentuk kekerasan sporadis terhadap Israel dan Amerika Serikat dan mungkin memicu revolusi-revolusi di dalam negeri di dunia Muslim. *Kedua*, ide bahwa Irak bisa berfungsi sebagai suatu proyek percontohan untuk melemahkan dunia Islam dari corak fundamentalismenya dan cara-cara anti-demokratisnya, bergantung pada proposisi yang terlalu melebar, jika bukannya tak masuk akal, bahwa Irak akan bisa diubah dalam waktu semalam menjadi suatu negara makmur, kapitalistik dan demokratis di bawah arahan AS. Pilihan Irak memang masuk akal karena negara itu merupakan suatu negara yang bukan saja memiliki kekayaan minyak yang berlimpah, namun juga sejumlah besar bakat ilmiah dan pengetahuan teknis; sebelum dihancurkan oleh AS dan Saddam secara bersama-sama, Irak juga memiliki suatu basis manufaktur dan pertanian yang penting. Surplus kapital hampir pasti akan bisa menemukan salurannya dalam pembangunan kembali sebagian besar basis itu. Namun karena

aturan-aturan neoliberal secara luas masih menjadi kerangka aturan perdagangan dan arus finansial, dan karena adanya situasi overakumulasi secara umum, maka masih sulit untuk membayangkan Irak akan bisa menjadi setara dengan Korea Selatan pada tahun-tahun mendatang. Dan bahkan andaikata pun Irak mulai beranjak demikian, masih belum ada bukti jelas dari hal tersebut mengingat kegagalan-kegagalan pembangunan yang besar dari negara-negara, seperti Pakistan dan Mesir, yang telah menjalankan pembangunan ekonomi bergaya kapitalis selama lebih dari dua dekade dengan dukungan yang sangat besar dari AS. Satu-satunya kondisi dimana di dalamnya ada harapan bagi pembangunan ekonomi Irak di bawah pendudukan AS ialah lewat suatu pemulihan kembali ekonomi global dalam skala yang jauh lebih luas daripada yang pernah terjadi setelah Perang Dunia Kedua.

Ini membawa kita menjadi lebih kritis terhadap isu mengenai kondisi-kondisi ekonomi yang sekarang ada dan sampai tingkatan mana proses-proses yang telah dijelaskan dalam kesempatan sebelumnya saat membahas logika kapitalistik dari kekuasaan bisa konsisten dengan atau dapat ditempa menjadi logika teritorial yang berusaha dibangun secara paksa oleh imperialisme neo-konservatif. Sebagaimana selalu terjadi, selain sulit untuk memprediksi dengan pasti, terdapat suatu inkonsistensi yang dalam, jika bukannya kontradiksi yang nyata, di antara kedua logika tersebut. Jika hal itu yang terjadi, maka logika teritorial maupun logika kapitalistik akan melahirkan atau berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi katastrofik. Apakah tanda-tanda utama dari disjungtur ini?

Yang pertama, muncul biaya perang. Besarnya tak kurang dari $200 milyar dan kemungkinan besar akan jauh lebih besar lagi. Tegasnya, dibutuhkan banyak surplus kapital untuk mendanainya, serta ada tuntutan tingkat kembaliannya, entah itu berbentuk laba dari kontraktor-kontraktor pertahanan dan usaha rekonstruksi dan/atau pembayaran bunga

utang pemerintah. Bom-bom yang dijatuhkan bukanlah investasi yang produktif dan tidak menghasilkan nilai yang berputar kembali ke dalam sirkulasi dan proses akumulasi, kecuali jika kita memasukkan jatuhnya harga minyak sampai $20 per barel sebagai bagian dari tingkat kembalian terhadap aksi militer di Irak. Memang, minyak Irak bisa melunasi biaya perang, namun ini jelas menghalangi pemanfaatan minyak Irak guna pembangunan kembali Irak dan karena itu memperkecil kesempatan Irak untuk memainkan peran sebagai proyek teladan dari pembangunan kapitalistik. Dalam berbagai analisis, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk membawa produksi minyak Irak sampai ke titik dimana membiayai perang dan pembangunan kembali Irak. Dan dalam kasus apapun, Irak harus melunasi utang sebesar sekitar $200 milyar ($64 milyar di antaranya berasal dari Rusia) maupun untuk membayar kompensasi yang dibebankan kepada Irak akibat invasi ke Kuwait sebesar lebih dari $100 milyar. Jika di bawah arahan AS, Irak gagal untuk melunasi utang ini, maka dunia internasional akan bersuara keras (dengan Rusia menjadi garda depannya).

Karena itulah, tak banyak opsi yang tersedia buat AS selain berutang lebih besar lagi untuk membiayai perangnya. Dampaknya ialah semakin membengkaknya defisit anggaran di Amerika Serikat yang bahkan dalam kondisi-kondisi ekonomi terbaik merupakan sesuatu yang berat. Di bawah kondisi-kondisi stagnasi ekonomi, merosotnya nilai-nilai aset, dan berkurangnya pendapatan pajak yang ada sekarang, belanja defisit untuk tujuan-tujuan militer semacam itu akan cenderung mendorong ekonomi jatuh lebih dalam ke dalam resesi ketimbang membantu bangkitnya kembali ekonomi dalam negeri. Belanja-belanja militer kadangkala ditafsirkan (sebagai misal oleh Luxemburg) sebagai suatu stimulus ekonomi (kadangkala disebut 'Keynesianisme militer'), namun belanja-belanja tersebut paling banter hanya berfungsi dengan bagus dalam jangka pendek (kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti perlengkapan dan material yang te-

lah terpakai). Dan dalam konjungtur saat ini, setiap stimulus jangka pendek dari arah ini akan sepenuhnya diimbangi dengan penurunan kepercayaan konsumen dan iklim ketakutan (yang dimanfaatkan secara langsung oleh pihak pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya) sehingga menghambat masyarakat untuk bepergian atau terlibat dalam setiap aktivitas yang kelihatannya beresiko. Ini membuat perusahaan-perusahaan penerbangan menjadi tutup atau megalami kebangkrutan dan pariwisata dan aktivitas-aktivitas waktu senggang mengalami kesulitan ekonomi yang dalam. Lenyapnya lapangan pekerjaan dan jaminan perlindungan sosial (seperti asuransi kesehatan dan bahkan dana pensiun) bergema di seluruh ekonomi AS. Ekonomi Kota New York, misalnya, sekarang tengah berada dalam keadaan yang lebih genting ketimbang yang dialaminya dalam krisis tahun 1973-1975 dan defisit anggarannya tampaknya mendorong kota itu ke dalam kebangkrutan secara teknis dalam beberapa tahun mendatang.

Problem ini semakin diperparah dengan posisi gentingnya ekonomi AS di level internasional. Orang-orang asing sekarang memiliki lebih dari sepertiga utang pemerintah AS dan 18 persen utang korporasi (lebih dari dua kali lipat rasio di sekitar tahun 1980), dan AS sekarang bergantung pada arus masuk investasi asing bersih sebesar lebih dari $2 milyar per hari untuk menutupi defisit neraca perdagangannya yang sekarang terus naik dengan negara-negara lain di seluruh dunia.[8] Sebagaimana dikatakan sebelumnya, hal ini membuat ekonomi AS menjadi luar biasa rentannya terhadap *capital flight*, yang beberapa tandanya telah terlihat dalam jatuhnya nilai relatif dolar di pasar dunia. Alih-alih menghancurkan Amerika Serikat, yang terjadi ialah berbaliknya neraca keseimbangan dari kapital keuangan yang selama ini menduku-

8. A. Krueger, 'Economic Scene', *New York Times*, 3 Apr. 2003, hal. C2; J. Madrick, 'The Iraqi Time Bomb', *New York Times*, 6 Apr. 2003, *Sunday Magazine*, hal. 48.

ng AS. Logika kapitalistik AS, dengan tak adanya tindakan negara yang efektif karena ketidakmampuan pemerintahan Bush, telah mengusir keluar kekuatan ekonomi menjauh dari Amerika Serikat ketimbang mengundang masuk secara kuat gerak kapital seperti yang pernah dilakukannya selama boom ekonomi tahun 1990-an. Dengan cara yang sama dengan ketika kapital spekulatif mengalir masuk ke Thailand, Indonesia, dan Argentina, menciptakan boom ekonomi dan kemudian dengan cepat runtuh ketika terjadi *capital flight* dan malapetaka ekonomi, begitu juga arus keluar kapital spekulatif ke Wall Street pada tahun 1990-an menciptakan boom ekonomi yang bisa dengan cepat (dan memang dalam tingkatan tertentu tengah) berbalik arah. Tentu saja, situasinya agak berbeda karena dolar akan selalu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kapital global dan kekuatan *seigniorage* masih tetap berada di tangan AS. Namun karena besarnya ketergantungan terhadap kepercayaan pada pemerintahan AS dan semakin disadari bahwa pemerintah AS saat ini didominasi oleh suatu koalisi komplek industri-militer, kaum neo-konservatif dan—yang lebih mengkhawatirkan—kaum Kristen fundamentalis, semakin logika kapital akan berusaha menciptakan perubahan rezim di Washington yang memang perlu bagi keberlangsungan hidupnya. Hal ini akan memiliki dampak membawa versi imperialisme yang neo-konservatif sampai ke titik kemacetan yang menghancurkan. Jika perubahan rezim ini tak terjadi, maka penguapan secara cepat (*vast drain*) yang diakibatkan oleh semakin menguatnya kebijakan ekonomi perang yang permanen mungkin akan menyebabkan bunuh diri ekonomi bagi Amerika Serikat. Gelombang ke arah militerisme kemudian akan menjadi suatu langkah putus asa yang diambil oleh AS untuk mempertahankan dominasi globalnya dengan segala cara.

Namun, ada satu aspek potensi kerusakan lainnya yang bisa diciptakan oleh proyek imperialis neo-konservatif. Penegasan unilateralis dari kekuatan imperial AS tidak memahami betapa tingginya derajat integrasi lintas teritori yang sekarang berlangsung di dalam organisasi sirkulasi dan aku-

mulasi kapital yang kapitalistik. Ancaman-ancaman boikot AS terhadap barang-barang Prancis dan Jerman dan aksi boikot balasan oleh negara-negara Eropa sulit untuk dipahami ketika kandungan asing dari barang-barang dari setiap ekonomi berkisar antara sepertiga dan setengah dari nilai barang tersebut. Namun, dengan semakin meningkatnya nasionalisme, yang sekarang semakin dipromosikan oleh perang maupun oleh gerakan-gerakan penentangan terhadap neoliberalisme, terbangunlah perintang-perintang terhadap arus kapital internasional dan dinamika akumulasi. Terbangunnya konfigurasi-konfigurasi sirkulasi dan akumulasi kapital yang bersifat regional, yang tanda-tandanya telah terlihat, semakin menguat dengan semakin meningkatnya gelombang nasionalisme dan rasisme, terlebih lagi ketika ide perbenturan peradaban mendapat tempat dalam masyarakat. Hanya saja, pembentukan blok-blok kekuatan regional akan melahirkan praktek-praktek eksklusionis, dan kompetisi antar-blok jelas akan bisa menimbulkan krisis kapitalisme global seperti yang terjadi pada tahun 1930-an dan 1940-an. Dalam konteks ini, pendapat Lenin terbukti tepat. Dan mungkin karena tak pernah ada yang pernah menyimak pandangan Lenin itu, sehingga meski lambat, namun perubahan ke arah yang tak menyenangkan itu kemungkinan besar terjadi.

Dilanjutkannya politik neoliberal pada level ekonomi, sebagaimana yang telah saya tunjukkan, mendorong dilanjutkannya, jika bukannya semakin ditingkatkannya, akumulasi dengan cara-cara yang lain, seperti akumulasi lewat penjarahan. Konsekuensi ke arah keluar jelas ialah semakin meningkatnya gelombang resistensi global dan satu-satunya jawaban untuk itu ialah represi oleh kekuatan-kekuatan negara terhadap gerakan-gerakan populis. Hal ini mengimplikasikan dilanjutkannya perang berintensitas rendah yang telah menjadi ciri dari ekonomi global selama duapuluh tahun terakhir atau lebih kecuali jika ada cara untuk memecahkan problem overakumulasi global. Satu-satunya kemungkinan yang tersedia, sebagaimana telah saya sebutkan, ialah suatu program akumulasi yang menghancurkan, keras dan kejam yang pada

esensinya merupakan suatu bentuk akumulasi yang sungguh-sungguh primitif di Cina yang akan memicu suatu tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur publik yang bisa menyerap banyak surplus kapital dunia. Semua itu dengan syarat bahwa proses ini tidak akan memicu suatu kontrarevolusi di dalam Cina. Namun jika ini pun berhasil, maka gerak perpindahan (*drawing off*) surplus kapital ke Cina juga akan menjadi sesuatu yang merusak bagi ekonomi AS yang sekarang ini sangat lapar arus masuk kapital untuk mendukung konsumsinya yang tak produktif, baik dalam sektor militer maupun dalam sektor swasta. Hasilnya akan setara dengan suatu 'penyesuaian struktural' di dalam ekonomi AS sehingga akan mendorong terciptanya suatu program penghematan dalam tingkatan seperti yang belum pernah ada sebelumnya semenjak Depresi Besar tahun 1930-an. Dalam situasi semacam itu, AS akan tergoda untuk menggunakan kekuasaannya terhadap minyak untuk menahan Cina, untuk memicu suatu konflik geopolitik pada level yang sangat minimum di Asia Tengah dan barangkali untuk menyebarluaskan sehingga menjadi suatu konflik yang lebih bersifat global.

Satu-satunya jawaban yang mungkin, meski bersifat sementara, atas problem yang ada dalam setiap modus produksi kapitalistik ialah jawaban ala 'New Deal' baru yang berjangkauan global. Ini berarti meliberalisasikan logika sirkulasi dan akumulasi kapital dari belenggu neoliberalnya, merumuskan ulang kekuasaan negara secara jauh lebih intervensionis dan redistributif, menghalangi pertumbuhan kekuatan-kekuatan spekulatif dari kapital keuangan, dan mendesentralisir atau mendemokratisasikan pengontrolan terhadap besarnya kekuasaan oligopoli dan monopoli (terutama dalam pengaruh komplek industri-militer) dalam mendiktekan segala sesuatu mulai dari kerangka perdagangan internasional sampai dengan apa yang kita lihat, baca dan dengar di media. Dampaknya ialah akan kembalinya ke suatu imperialisme 'New Deal' yang lebih murah hati, yang diharap-

kan akan bisa dicapai lewat semacam koalisi di antara kekuatan-kekuatan kapitalis dan hal ini telah sejak lama diramalkan oleh Kautsky.

Di sisi lain, ultra-imperialisme semacam yang sekarang disukai di Eropa memiliki konotasi-konotasi dan konsekuensi-konsekuensi negatifnya sendiri. Jika Robert Cooper, seorang penasehat Blair, bisa dipercaya pendapatnya, maka itu berarti pemerintahan Blair akan lebih menyukai diangkatnya kembali pembedaan yang pernah ada di abad kesembilanbelas antara negara-negara beradab, barbar dan primitif hanya saja dengan penggantian penyebutan menjadi negara-negara posmodern, modern, dan pra-modern. Negara-negara posmodern, sebagai penjaga perilaku kolaboratif yang beradab, diharapkan untuk mendorong lewat cara-cara langsung atau tak langsung terciptanya kepatuhan terhadap norma-norma universal (baca 'Barat' dan 'borjuis'), dan praktek-praktek humanistik (baca 'kapitalistik') di muka bumi. Negara-negara posmodern, yang terutama terdiri atas negara-negara Eropa, dari sudut pandang ini sama sekali bukanlah suatu 'Eropa lama', namun merupakan negara-negara yang lebih unggul jika dibandingkan Amerika Serikat yang kelihatannya mengalami beberapa kesulitan dalam menyebarkan cara-cara modernisnya. Kesulitan dari praktek ini ialah bahwa klasifikasi-klasifikasi semacam di atas itulah yang telah memungkinkan kaum liberal abad kesembilan belas seperti John Stuart Mill untuk menjustifikasi penguasaan atas India dan penghisapan upeti dari luar negeri, sambil memuji-muji prinsip-prinsip pemerintahan perwakilan di negara-negara 'beradab' seperti negeri mereka sendiri. Dengan tak adanya kebangkitan kembali kegiatan akumulasi yang berkelanjutan (*sustained accumulation*) lewat perluasan reproduksi, versi imperialisme liberal Eropa ini hanya bisa berkembang lewat suatu politik akumulasi lewat penjarahan di seluruh dunia agar motor akumulasi tak mandeg. Bentuk imperialisme kolektif alternatif itu akan sangat sulit untuk diterima begitu saja oleh penduduk dunia yang mengalami, dan dalam bebe-

rapa kasus mereka akan mulai melawan balik setiap bentuk akumulasi lewat penjarahan dan bentuk-bentuk predatoris kapitalisme yang berkaitan dengannya. Siasat ala liberal seperti yang diusulkan oleh Cooper, apapun halnya, sangat tak menarik bagi penulis-penulis poskolonial.[9]

Tentu saja ada solusi-solusi yang jauh lebih radikal yang mungkin diambil, namun pembangunan suatu 'New Deal' baru di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Eropa, baik di dalam negeri maupun di level internasional, di tengah-tengah semakin menguatnya kekuatan-kekuatan kelas dan kepentingan-kepentingan istimewa yang menentangnya, sangat tak mudah untuk dijalankan di dalam konjungtur saat ini. Dan pemikiran bahwa dengan upaya *spatio-temporal fix* jangka panjang yang memadai, problem overakumulasi akan bisa dipecahkan setidaknya selama beberapa tahun dan akan menghancurkan kebutuhan untuk akumulasi lewat penjarahan mungkin bisa mendorong kekuatan-kekuatan demokratik, progresif dan berorientasi kemanusiaan untuk beraliansi mendukungnya dan menjadikannya sebagai suatu kenyataan. Pandangan ini tampaknya lebih bisa mengusulkan suatu lintasan imperial yang jauh kurang begitu kejam dan jauh lebih murah hati ketimbang imperialisme militeristik seperti yang sekarang ditawarkan oleh gerakan neo-konservatif di Amerika Serikat.

Medan perang sesungguhnya dimana semua ini harus diperjuangkan jelas adalah di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Dalam konteks ini, ada alasan untuk merasa kecewa dengan kuatnya pengekangan terhadap kebebasan-kebebasan sipil dan dengan adanya kesadaran yang berakar lama bah-

9. R. Cooper, 'The New Liberal Imperialism', *Observer*, 7 Apr. 2002. Kritik tajam muncul dalam U. Mehta, *Liberalism and Empire* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), yang sungguh meruntuhkan rumusan Cooper. Mengenai poin ini, saya sangat berhutang kepada analisis yang disajikan oleh J. Anderson, 'American Hegemony after September 11: Allies, Rivals and Contradictions', naskah tak diterbitkan, Centre for International Borders Research, Queen's University, Belfast, 2002.

wa imperialisme di luar negeri akan membutuhkan tirani di dalam negeri. Kekecewaan ini akan bisa menjadi basis serius bagi munculnya perlawanan politik, setidaknya di pihak mereka yang sungguh-sungguh yakin akan Bill of Rights dan yang memiliki visi konstitusi yang berbeda jenisnya dari yang dianut oleh mayoritas neo-konservatif yang sekarang mendominasi Mahkamah Agung. Orang-orang semacam ini setidaknya sama banyaknya dengan kaum fundamentalis Kristen yang sekarang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dan ada tanda-tanda di dalam tubuh mayoritas Kristen, terutama di kalangan pemimpinnya (yang telah memperlihatkan sikap anti-perangnya), bahwa ada suatu imperatif moral untuk mengisolasi fundamentalisme Kristen dan untuk memunculkan suatu bentuk lain Kekristenan yang akan mengumandangkan toleransi keagamaan dan hidup berdampingan secara damai dengan yang lain. Ada suatu gerakan anti-perang dan anti-imperialis yang tengah berjuang untuk mengekspresikan dirinya, namun dengan masih adanya iklim nasionalisme, patriotisme, dan penindasan terhadap pembangkangan di semua level, terutama di dalam media, hal itu berarti bahwa perjuangan sengit mesti dilakukan terlebih dahulu di dalam negeri Amerika Serikat melawan versi imperialisme neo-konservatif maupun melawan keberlanjutan neoliberalisme pada level ekonomi. Kekuatan kelas yang ada di belakang neoliberalisme, misalnya, memang masih kuat, namun dengan semakin problematisnya proses penyelenggaraan pemerintahan ala neo-konservatif, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, semakin muncul kecenderungan terjadi keterpecahan dan bahkan ketidaksepakatan di kalangan kelas-kelas elit mengenai arah yang harus diambil dalam logika kekuasaan teritorial. Kesulitan-kesulitan yang ada di dalam model neoliberal dan ancaman yang sekarang dihadapi oleh Amerika Serikat mungkin akan memunculkan seruan-seruan untuk dibangunnya suatu logika kekuasaan teritorial yang bersifat alternatif. Apakah hal ini akan terjadi atau tidak, hal tersebut sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan-keku-

tan politik yang ada di dalam Amerika Serikat. Meski mungkin hal ini tidak menentukan, namun hal ini akan memainkan suatu peran yang sangat besar di dalam masa depan individu dan kolektif kita. Negara-negara lain di dunia mungkin hanya bisa melihat, menunggu, dan berharap. Namun ada satu hal pasti yang bisa dikatakan. Sikap anti-Amerikanisme dari negara-negara lain di dunia tak akan dan tak mungkin bisa membantu. Mereka yang berjuang di Amerika Serikat untuk membangun suatu alternatif, baik di dalam negeri maupun dalam keterlibatan AS di luar negeri, membutuhkan simpati dan dukungan dari sebanyak mungkin pihak di dunia. Dengan cara yang sama bahwa dialektika dalam/luar memainkan suatu peran krusial dalam pembangunan imperialisme neo-konservatif, demikian juga suatu pembalikan dialektika semacam itu memiliki suatu peran krusial dalam politik anti-imperial. []

Bacaan Lebih Lanjut

S. Amin, *Imperialism and Unequal Development*, (New York: Monthly Review Press, 1977).

J. Atlas, 'A Classicist's Legacy: New Empire Builders,' *New York Times*, Week in Review, Sunday, 4 May 2003, hal. 1 dan 4.

W. Bello, *Deglobalization: Ideas for a New World Economy* (London: Zed Books, 2002).

M. Boot, *The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power* (New York: Basic Books, 2002).

K. Boulding dan T. Mukerjee (eds.), *Economic Imperialism: A Book of Readings* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972).

J. Cavanaugh, J. Mander, et al., *Alternatives to Globalization* (San Francisco: Bennett-Koehler, 2002).

J. Comaroff dan J. Comaroff (eds.), *Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism* (Durham, NC: Duke University Press, 2001).

R. Falk, *Predatory Globalization: A Critique* (Cambridge: Polity Press, 1999).

N. Ferguson, *Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons of Global Power* (New York: Basic Books, 2003).

W. Finnegan, 'The Economics of Empire: Notes on the Washington Consensus,' *Harper's Magazine*, vol. 306, no. 1836 (May, 2003), hal. 41-54.
S. George dan F. Sabelli, *Faith and Credit* (Harmondsworth: Penguin, 1995).
S. Hersh, 'Annals of National Security: How the Pentagon Outwitted the C.I.A.' *The New Yorker* (12 May 2003), hal. 44-51.
P. Hirst dan G. Thompson, *Globalization in Question: The International Economy and the Possibility of Global Governance*, (Cambridge: Polity Press, edisi revisi 1999).
E. Hobsbawm, *The Age of Empire, 1875-1914* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1987).
J. A. Hobson, *Imperialism* (Ann Arbor: University of Michigan Press, ed. Dengan kata pengantar baru dari P. Siegelman, 1965 edn.).
D. Judd, *Radical Joe: A Life of Joseph Chamberlain* (London: Hamish Hamilton, 1977).
R. Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order* (New York: Knopf, 2003).
V. Kiernan, *America: The New Imperialism* (London: Zed Books, 1978).
N. Klein, *No Logo* (New York: Picador, 2000).
D. Korton, *When Corporations Rule the World* (Bloomfield, CT: Kummarian Press, 2001).
C. Kupchan, *The End of the American Era in US Foreign Policy and the Geopolitics of the 21st Century* (New York: Knopf, 2002).
B. Lewis, *What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response* (Oxford: Oxford University Press, 2001).
H. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality* (New York: Norton, ed. by A.J. Pearce, 1962 edn).
H. Magdoff, *The Age of Imperialism: The Economics of U.S. Foreign Policy* (New York: Monthly Review Press, 1969).
K. E. Meyer, *The Dust of Empire: The Race for Mastery in the Asian Heartland* (New York: Public Affairs, 2003).

M. Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor* (London: Zed Books, 1999 edn.).
W. Nordhaus, 'Iraq: The Economic Consequences of War,' *The New York Review of Books*, vol. xlix, no. 19 (5 Desember 2002), hal. 9-12.
R. Owen dan B. Sutcliffe (eds.), *Studies in the Theory of Imperialism* (London: Longman, 1972).
Oxfam International, *Rigged Rules and Double Standards* (London: Oxfam International, 2002).
H. Radice, *International Firms and Modern Imperialism* (Harmondsworth: Penguin, 1975).
S. Sassen, *Globalization and Its Discontents* (New York: New Press, 1998).
A. Schlesinger, *The Cycles of American History* (Boston: Houghton Mifflin, 1980).
V. Shiva, *Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge* (Boston: South End Press, 1997).
V. Shiva, *Protect or Plunder? Understanding Intellectual Property Rights* (London: Zed Books, 2001).
V. Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit* (London: Zed Books, 2002).
K. Singh, *The Globalisation of Finance: A Citizen's Guide* (London: Zed Books, 1999).
G. Soros, *George Soros on Globalization* (New York: Public Affairs, 2002).
R. Steven, *Japan's New Imperialism* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1990).
J. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: Norton, 2002).
A. Thornton, *Doctrines of Imperialism* (New York: Wiley, 1965).
A. K. Weinberg, *Manifest Destiny* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1935).
D. Yergin, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power* (New York: Simon and Schuster, 1991).

Altman, D., 'China: Partner, Rival or Both', *New York Times*, 2 Mar. 2003, kolom Money and Business, hal. 1 dan 11.

Banerjee, N., 'Energy Companies Weigh their Possible Future in Iraq', *New York Times*, 26 Okt. 2002, hal. C3.

Bush, G. W., 'Securing Freedom's Triumph', *New York Times*, 11 Sept. 2002, h. A33.

Cooper, R., 'The New Liberal Imperialism', *Observer*, 7 Apr. 2002.

Crampton, T, 'A Strong China May Give Boost to its Neighbors', *International Herald Tribune*, Economic Outlook, 23 Jan. 2003, hal. 16-17.

de Acule, C, 'Keeping a Wary Eye on the Housing Boom', *International Herald Tribune*, 23 Jan. 2003, hal. 11.

Eckholm, E., 'Where Workers, Too, Rust, Bitterness Boils Over', *New York Times*, 20 Mar. 2002, hal. A4.

Editorial, *Buenos Aires Herald*, 31 Des. 2002, hal. 4.

Fisk, R., 'The Case Against War: A Conflict Driven by the Self-interest of America', *Independent*, 15 Feb. 2003, hal. 20.

———— 'This Looming War isn't about Chemical Warheads or Human Rights: It's about Oil', *Independent*, 18 Jan. 2003, hal. 18.

Friedman, T., 'A War for Oil?', *New York Times*, 5 Jan. 2003, kolom Week in Review, hal. 11.

Hilterman,. J., 'Halabja: America Didn't Seem to Mind Poison Gas', *International Herald Tribune*, 17 Jan. 2003, hal. 8.

Ignatieff, M., 'The Burden', New York Times, 5 Jan. 2003, Sunday Magazine, hal. 22-54, diterbitkan ulang dengan judul 'Empire Lite', dalam *Prospect* (Feb. 2003), 36-43.

———— 'How to Keep Afghanistan from Falling Apart: The Case for a Committed American Imperialism', *New York Times*, 26 July 2002, *Sunday Magazine*, hal. 26-58.

Kahn, J., 'China Gambles on Big Projects for its Stability', *New York Times*, 13 Jan. 2003, hal. Al dan A8.
———— 'Made in China, Bought in China', *New York Times*, 5 Jan. 2003, kolom *Business*, hal. 1 dan 10.
Kirkpatrick, D., 'Mr Murdoch's War', *New York Times*, 7 Apr. 2003, hal. CI.
Krueger, A., 'Economic Scene', *New York Times*, 3 Apr. 2003, hal. C2.
Madrick, J., 'The Iraqi Time Bomb', *New York Times*, 6 Apr. 2003, *Sunday Magazine*, hal. 48.
Rosenthal, E., 'Workers' Plight Brings New Militancy to China', *New York Times*, 10 Mar. 2003, hal. A8.
Tyler, P., 'Threats and Responses. News Analysis: A Deepening Fissure', *New York Times*, 6 Mar. 2003, hal. 1.

Buku dan Artikel Jurnal

Amin, S., 'Imperialism and Globalization', *Monthly Review* (Juni 2001), 1-10.
———— 'Social Movements at the Periphery', dalam P. Wignaraja (ed.), *New Social Movements in the South: Empowering the People* (London: Zed Books, 1993), 76-100.
Anderson, J., 'American Hegemony after September 11: Allies, Rivals and Contradictions', naskah tidak diterbitkan, Centre for International Borders Research, Queen's University, Belfast, 2002.
Anderson, P., 'Internationalism: A Breviary', *New Left Review*, 14 (Mar. 2002), 20.
Arendt, H., *Imperialism* (New York: Harcourt Brace Janovich, 1968 edn.).
Armstrong, D., 'Dick Cheney's Song of America: Drafting a Plan for Global Dominance', *Harper's Magazine*, 305 (Okt. 2002), 76-83.
Armstrong, P., A. Glyn, dan J. Harrison, *Capitalism since World War II: The Making and Break Up of the Great Boom* (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

Arrighi, G., *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times* (London: Verso, 1994).

——— dan B. Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999).

Baran, P., dan P. Sweezy, *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order* (New York: Monthly Review Press, 1966).

Berman, M., 'Justice/Just Us: Rap and Social Justice in America', dalam A. Merrifield dan E. Swyngedouw (eds.), *The Urbanization of Injustice* (New York: New York University Press, 1997), 161-79.

Bhagwati, J., 'The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars', *Foreign Affairs*, 77/3 (1998), 7-12.

Bleaney, M., *Underconsumption Theories* (London: Methuen, 1976).

Blum, W., *Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower* (London: Zed Books, 2002).

Bowden, B., 'Reinventing Imperialism in the Wake of September 11', *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, 1/2 (Summer 2002); online at <http://alternatives.journal.fatih.edu.tr/Bowden.htm>.

Brenner, R., *The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy* (London: Verso, 2002).

Brewer, A., *Marxist Theories of Imperialism* (London: Routledge & Kegan Paul, 1980).

Burkett, P., dan M. Hart-Landsberg, 'Crisis and Recovery in East Asia: The Limits of Capitalist Development', *Historical Materialism*, 8 (2001), 3—48.

Cain, P., *Hobson and Imperialism: Radicalism, New Liberalism and Finance, 1887-1938* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Carchedi, G., 'Imperialism, Dollarization and the Euro', dalam Leo Panitch dan Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2002* (London: Merlin Press, 2001), 153-74.

Chamberlain, E., *The Theory of Monopolistic Competition* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933).
Chomsky, N., *9-11* (New York: Seven Stories Press, 2001).
Doyle, M. W., *Empires* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986).
Freeman, C, *High Tech and High Heels in the Global Economy* (Durham, NC: Duke University Press, 2000).
Gills, B. (ed.), *Globalization and the Politics of Resistance* (New York: Palgrave, 2001).
Gowan, P., *The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World Dominance* (London: Verso, 1999).
———— L. Panitch, dan M. Shaw, 'The State, Globalization and the New Imperialism: A Round Table Discussion', *Historical Materialism*, 9 (2001), 3-38.
Guilbaut, S., *How New York Stole the Idea of Modern Art*, terj. A. Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1985 edn.).
Hardt, M., dan A. Negri, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).
Hart, G., *Disabling Globalization: Places of Power in Post-Apartheid South Africa* (Berkeley: University of California Press, 2002).
Harvey, D., *The Condition of Postmodernity* (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
———— *The Limits to Capital* (Oxford: Basil Blackwell, 1982; repr. London: Verso Press, 1999).
———— *Paris, the Capital of Modernity* (New York: Routledge, 2003).
———— *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography* (New York: Routledge, 2001).
———— *Spaces of Hope* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000).
———— *The Urban Experience* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).
Hegel, G. W., *The Philosophy of Right*, terj. T. Knox (New York: Oxford University Press, 1967 edn.).

Henderson, J., 'Uneven Crises: Institutional Foundations of East Asian Economic Turmoil', *Economy and Society*, 28/3 (1999), 327-68.

Hill, C, *The World Turned Upside Down* (Harmondsworth: Penguin, 1984).

Hines, C, *Localization: A Global Manifesto* (London: Earthscan, 2000).

Historical Materialism, 8 (2001), edisi khusus: 'Focus on East Asia after the Crisis'.

Hofstadter, R., *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996 edn.).

Huntington, S., *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order* (New York: Simon & Schuster, 1997).

Isard, W., *Location and the Space Economy* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956).

Johnson, C, *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire* (New York: Henry Holt, 2000).

Julien, C.-A., J. Bruhat, C. Bourgin, M. Crouzet, dan P. Renouvin, *Les Politiques d'expansion imperialiste* (Paris: Presses Universitaires de France, 1949).

Kennedy, P., *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Fontana Press, 1990).

Klare, M., *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict* (New York: Henry Holt, 2001).

Krugman, P., *Development, Geography and Economic Theory* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995).

Lee, C. K., *Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory Women* (Berkeley: University of California Press, 1998).

Lefebvre, H., *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*, terj. F. Bryant (New York: St Martin's Press, 1976).

Lenin, V. I., 'Imperialism: The Highest Stage of Capitalism', dalam *Selected Works, vol. i* (Moscow: Progress Publishers, 1963).

Li, S.-M., dan W.-S. Tang, *China's Regions, Polity and Economy: A Study of Spatial Transformation in the Post-Reform Era* (Hong Kong: Chinese University Press, 2000).

Losch, A., *The Economics of Location*, terj. William H. Woglom dengan bantuan Wolfgang F. Stolper (New Haven: Yale University Press, 1954).

Luxemburg, R., *The Accumulation of Capital*, terj. A Schwarzschild (New York: Monthly Review Press, 1968 edn.).

McDonald, D., dan J. Pape, *Cost Recovery and the Crisis of Service Delivery in South Africa* (London: Zed Books, 2002).

Markusen, A., *Profit Cycles, Oligopoly and Regional Development* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985).

———— *Regions: The Economics and Politics of Territory* (Totowa, NJ: Rowman & LitdeOeld, 1987).

Marx, K., *Capital*, terj. B. Fowkes (New York: Viking, 1976).

———— dan F. Engels, *On Colonialism* (New York: International Publishers, 1972).

Mehta, U., *Liberalism and Empire* (Chicago: University of Chicago Press, 1999).

Mittelman, J., *The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance* (Princeton: Princeton University Press, 2000).

Morton, A., 'Mexico, Neoliberal Restructuring and the EZLN: A Neo-Gramscian Analysis', dalam B. Gills (ed.), *Globalization and the Politics of Resistance* (New York: Palgrave, 2001), 255-79.

Nash, J., *Mayan Visions: The Quest for Autonomy in an Age of Globalization* (New York: Routledge, 2001).

National Security Strategy of the United State of America at < www. whitehouse. gov/nsc/nss>.

Nye, J., *The Paradox of American Power: Why the World's Only Super-Power Cannot Go It Alone* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Ong, A., *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia* (Albany: State University of New York Press, 1987).

Panitch, L., 'The New Imperial State', *New Left Review*, 11/1 (2000), 5-20.
Payer, C, *The Debt Trap: The IMF and the Third World* (New York: Monthly Review Press, 1974).
Perelman, M., *The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation* (Durham, NC: Duke University Press, 2000).
Petras, J., dan H. Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century* (London: Zed Books, 2001).
Pilger, J., *The New Rulers of the World* (London: Verso, 2002).
Pollard, S., *Essays on the Industrial Revolution in Britain*, ed. Colin Holmes (Aldershot: Ashgate Variorum, 2000).
Rostow, W. W., *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1966 edn.).
Roy, A., *Power Politics* (Cambridge, Mass.: South End Press, 2001).
Servan-Schreiber, J. J., *American Challenge* (New York; Scribner, 1968).
Smith, N., *American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization* (Berkeley: University of California Press, 2003).
Soederberg, S., 'The New International Financial Architecture: Imposed Leadership and "Emerging Markets'", dalam Leo Panitch and Colin Leys (eds.), *Socialist Register 2002* (London: Merlin Press, 2001), 175-92.
Strange, S., *Mad Money: When Markets Outgrow Governments* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998).
Thompson, E. P., *The Making of the English Working Class* (Harmondsworth: Penguin, 1968).
'U.S. Imperial Ambitions and Iraq' [editorial], *Monthly Review*, 54/7 (2002), 1-13.
Wade, R., dan F. Veneroso, 'The Asian Crisis: The High Debt Model versus the Wall Street-Treasury-IMF Complex', *New Left Review*, 228 (1998), 3-23.

Warren, B., *Imperialism: Pioneer of Capitalism* (London: Verso, 1981).
Went, R., 'Globalization in the Perspective of Imperialism', Science and Society, 66/4 (2002-3), 473-97.
Williams, W. A., *Empire as a Way of Life* (New York: Oxford University Press, 1980).
Wolf, E., *Peasant Wars of the Twentieth Century* (New York: HarperCollins, 1969).
Yergin, D., J. Stanislaw, dan D. Tergin, *The Commanding Heights: The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World* (New York: Simon & Schuster, 1999).
Zhang, L., *Strangers in the City: Reconfigurations of Space, Power and Social Networks within China's Floating Population* (Stanford: Stanford University Press, 2001).

Indeks

A
Adam Smith 159
Afghanistan 3, 4, 16, 60, 215, 216, 217, 238
Akumulasi kapital 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 75, 77, 78, 79, 86, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 128, 132, 133, 134, 137, 138, 141, 142, 146, 147, 150, 153, 159, 160, 166, 168, 169, 171, 175, 182, 188, 191, 199, 200, 201, 205, 206, 228, 229, 230
Akumulasi lewat penjarahan 52, 76, 161, 164, 166, 169, 170, 173, 174, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 209, 223, 229, 231, 232
Akumulasi primitif 161, 162, 163, 164, 166, 171, 174, 181, 183, 184, 188, 193, 198
al Qaeda 16, 17, 216
Alan Greenspan 34
Alfred Marshall 113
Allende 10, 67, 190
Amerika Latin 8, 10, 62, 75, 83, 120, 134, 145, 168, 185, 190, 207
Amerika Serikat 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 117, 118, 119, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 137, 140, 143, 147, 148, 149, 156, 160, 162, 167, 169, 173, 174, 178, 196, 201, 204, 206, 208, 210, 220, 224, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234
Arendt 18, 19, 39, 40, 49, 51, 52, 53, 59, 141, 156, 158,

159, 201, 214, 217, 239
Arrighi 32, 40, 42, 43, 44, 48, 81, 84, 86, 104, 240
Auguste Pinochet 10

B
Bank Dunia 62, 75, 162, 175, 176, 185, 209
Blok geopolitik 95
Blok kekuatan regional 32, 36, 103, 229
Bretton Woods 62, 70
Bush, George. W. 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 84, 87, 89, 91, 95, 96, 148, 172, 199, 211, 213, 221, 224, 228, 238

C
Cekungan Kaspia 28, 87, 137, 217
Chavez, Hugo 9, 10, 28, 87
CIA 10, 12, 44, 60, 64, 183
Cina 6, 9, 21, 27, 29, 56, 59, 61, 78, 79, 80, 87, 88, 94, 95, 101, 103, 117, 125, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 145, 149, 154, 166, 171, 172, 174, 179, 183, 220, 221, 230
Commonwealth 18, 20

D
Deklarasi Hak Asasi Manusia 46, 63
Devaluasi 45, 74, 75, 78, 79, 80, 98, 127, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 144, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 171, 174, 182, 200, 205, 208
Dewan Kerjasama Teluk 25
Doktrin Monroe 55

E
Eisenhower 2, 7, 68, 213
Ekonomi ruang 104, 107, 109
Enron 15, 164, 196

F
Fictitious capital 126
Finansialisasi 75, 76, 77, 81, 164, 173, 174, 205
Formasi kelas 50, 163
Fundamentalisme Kristen 233

G
G8 41, 77
GATT 62
Gerakan Pembebasan Nasional 67
Globalisasi 8, 48, 83, 143, 180, 188, 193, 194, 195, 209, 214, 223
Gramsci, Antonio 42

H
Hardt, Michael 8, 9, 187, 188, 241
Hegemoni 29, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 53, 63, 66, 68, 70, 72, 78, 81, 83, 84, 86, 88,

94, 103, 104, 108, 135, 137, 169, 200, 207, 208, 222
Hilferding 8, 76, 108, 164
Hobson 8, 140, 236, 240

I
IMF 21, 38, 45, 71, 74, 75, 81, 82, 83, 86, 131, 135, 143, 144, 149, 167, 168, 169, 175, 185, 198, 200, 204, 205, 209, 244
Imperialisme 1, 3, 4, 5, 8, 9, 31, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 68, 70, 75, 76, 77, 83, 96, 97, 99, 108, 138, 139, 140, 141, 154, 158, 181, 182, 184, 189, 193, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 218, 221, 223, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234
Imperialisme baru 5, 96
Imperialisme borjuis 49, 52
Imperialisme kapitalis 36, 184
Imperialisme metropolitan 38
Indonesia 44, 61, 68, 75, 125, 142, 147, 182, 194, 206
International Bank of Settlement 62

K
Kapital keuangan 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 120, 135, 146, 151, 164, 169, 190, 204, 208, 209, 210, 227, 230
Kapitalisme global 1, 22, 29, 43, 76, 103, 149, 174, 204, 229
Kapitalisme pemangsa 151
Karl Popper 174
Keynes 34
Kompleks industri militer 68
Komune Paris 50
Konferensi Yalta 61
Krugman 113, 242

L
Lenin 8, 47, 53, 57, 76, 77, 85, 97, 108, 138, 141, 144, 164, 229, 242
Logika kapitalis 37, 39, 50, 87, 94, 96, 99, 138, 156, 157, 162, 203, 204, 205, 211, 225
Logika teritorial 35, 37, 39, 48, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 104, 115, 117, 138, 156, 162, 187, 203, 207, 208, 210, 225
Ludwig von Mises 174
Luxemburg 8, 97, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 164, 165, 195, 226, 243

M
Mao 8, 60
Marshall Plan 61, 133
Marx 34, 51, 98, 109, 126, 127, 155, 157, 159, 160, 161,

162, 164, 166, 171, 180, 181, 183, 188, 191, 198, 240, 243
Materialisme geografis-historis 1
McCarthyisme 44, 58
Merkantilisme 102
Millenium Challenge Grants 145
Milton Friedman 174
Monopoli 37, 71, 74, 100, 107, 108, 109, 112, 119, 120, 144, 145, 146, 162, 200, 230
Multitude 188, 195, 198

N
Narmada 196
Nasionalisme 51, 52, 53, 54, 57, 63, 208, 214, 217, 218, 223, 229, 233
National Defense Strategy 6
Nazisme 52, 57
Negri, Antonio 8, 9, 187, 188, 241
Neo-konservatif 17, 19, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 232, 233, 234
Neo-liberalisme 71, 85, 92, 174, 210, 223, 233
Neokolonialisme internal 38
New Deal 56, 64, 86, 230, 232
New York Times 3, 4, 5, 6, 10, 12, 21, 28, 95, 137, 167, 171, 227, 235, 238, 239

O
OECD 62, 67
Oligopoli 107, 109, 144, 145, 230
OPEC 11, 24
Overakumulasi 49, 51, 66, 67, 70, 79, 98, 99, 120, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 140, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 166, 173, 175, 177, 199, 200, 204, 225, 229, 232

P
Pax Britania 5
Pembangunan geografis yang tak seragam 38, 105, 115, 192
Perang Dingin 18, 25, 46, 47, 58, 68, 77, 92, 133, 134, 184
Perang Dunia Kedua 1, 23, 35, 44, 47, 55, 56, 60, 70, 77, 157, 181, 184, 218, 225
Perang Dunia Pertama 22, 53, 55
Perjanjian Versailles 22, 53, 55
Privatisasi 75, 76, 102, 161, 162, 165, 166, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 192, 200, 204
Production of space 97
Project for The New American

Century 17
Project for the New American Century 212
proses molekuler 31, 34, 37, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 134, 138, 142
proteksionisme 80

R
Rapid Deployment Force 24
Rasisme 51, 52, 53, 54, 57, 63, 66, 208, 218, 223, 229
Rente proteksi 40
Revolusi Hijau 145
Roosevelt 7, 46, 54, 56, 61, 86, 91, 140, 244

S
Samir Amin 191
Shock therapy 171
Sirkuit kapital 120, 126
Spatio-temporal fixes 50, 51, 66, 99, 121, 134, 135, 141, 148, 150, 155, 156, 206
Stalin 57
Surplus kapital 49, 50, 53, 56, 67, 69, 72, 98, 99, 120, 121, 125, 128, 129, 132, 135, 136, 148, 149, 150, 156, 166, 167, 168, 199, 205, 206, 225, 230
Surplus tenaga kerja 98, 99, 136, 166

T
Thatcher 175, 176
The commons 165, 175, 179, 180, 204, 209
TRIPS 109, 164

U
Underconsumption 154, 155
Uni Soviet 7, 22, 36, 56, 57, 58, 59, 61, 90, 95, 166, 171, 183

V
von Hayek 174

W
Wall Street 4, 15, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 135, 143, 147, 149, 168, 205, 207, 208, 210, 215, 228, 244
Wolfowitz 17, 89, 213
Woodrow Wilson 55
WTO 38, 80, 83, 92, 108, 109, 144, 147, 164, 172, 178, 179, 198, 200

Z
Zapatista 187, 193, 195, 210

Penulis

David Harvey (1935) adalah Profesor Antropologi di Universitas New York (CUNY). Ia dikenal sebagai teoretisi ilmu sosial terkemuka dan pengarang sejumlah buku dalam bidang antropologi, ekonomi-politik dan geografi kritis. Karya-karyanya memberikan kontribusi yang besar pada debat-debat ilmu sosial, politik dan dianggap sebagai sosok terkemuka dalam menggunakan teori Marxist sebagai suatu metodologi yang serius dalam kritik atas kapitalisme global dan globalisasi.

Beberapa karyanya yang lain adalah *The Limits to Capital* (1982), *The Conditions of Postmodernity* (1989), *Spaces of Capital: Towards Critical Geography* (2001), *The New Imperialism* (2003), dan *Spaces of Global Capitalism: Toward Theory of Uneven Geographical Development* (2006).